BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI JAWA BARAT

MEI 2026



Menjaga Stabilitas dan Memacu Pertumbuhan:
Resiliensi Perekonomian Jawa Barat di Tengah Dinamika Global



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT

Mei 2026

Kata Pengantar

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan ridha-Nya, buku **"Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2026"** dapat diterbitkan. Buku ini merupakan asesmen terhadap perkembangan ekonomi Jawa Barat terkini yang berisi mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran, ulasan perkembangan kesejahteraan masyarakat serta mencakup pula prospek perekonomian ke depan.

Dalam penyusunan buku ini, data dan informasi selain dari internal Bank Indonesia, juga bersumber dari berbagai instansi terkait, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dinas-dinas terkait, BPS Jawa Barat, BULOG Divre III, Kementerian Keuangan c.q. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, PLN, berbagai perusahaan, asosiasi dan akademisi. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan menerangi setiap langkah kita.

Bandung, Mei 2026
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

ttd.

Junanto Herdiawan
Direktur Eksekutif



Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi



Kata Pengantar II
Daftar Isi IV
Daftar Tabel VI
Daftar Gambar VII
Daftar Grafik VIII
Tabel Indikator XII
Ringkasan Eksekutif XIV
Daftar Istilah 121
Tim Penyusun 122

Bab I
EKONOMI MAKRO REGIONAL 1

1.1 Sisi Permintaan 4
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga 5
1.1.2 Konsumsi Pemerintah 6
1.1.3 Ekspor-Impor 8
1.1.4 Investasi 11
1.2 Sisi Lapangan Usaha 14
1.2.1 Industri Pengolahan 14
1.2.2 Perdagangan Besar dan Eceran 17
1.2.3 Konstruksi 18
1.2.4 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 19
1.2.5 Transportasi dan Pergudangan 20

BOKS 1 23
Transformasi Pengelolaan Sampah Menjadi Sumber Energi di Jawa Barat

Bab II
PERKEMBANGAN INFLASI 27

2.1 Perkembangan Inflasi Triwulan I 2026 29
2.1.1 Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran 31
2.2 Perkembangan Inflasi Spasial Provinsi Jawa Barat 32
2.3 Program Pengendalian Inflasi di Provinsi Jawa Barat 35
2.4 *Tracking* Inflasi Triwulan II 2026 41

Bab III
PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 45

3.1 Kinerja Pembiayaan Daerah 47
3.1.1 Kondisi Umum 47
3.1.2 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan 47
3.1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor 49
3.1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Kelompok Bank dan Lokasi Proyek 51
3.2 Risiko Perbankan 52
3.2.1 Risiko Kredit 52
3.2.2 Risiko Likuiditas 53
3.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM 53
3.3.1 Akses Keuangan kepada UMKM 53
3.3.2 Program Peningkatan Akses Keuangan UMKM dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Jawa Barat 55
3.4 Asesmen Sektor Korporasi 56
3.4.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi 56
3.4.2 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi 57
3.5 Kinerja Sektor Rumah Tangga 60
3.5.1 Kinerja dan Ketahanan Rumah Tangga 60
3.5.2 Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga 61

BOKS 2 65
Memperkuat Ekosistem Halal: Peresmian Zona KHAS Terminal Tipe A Kota Banjar

BOKS 3 69
Nyala Harapan Industri Genteng Majalengka Melalui Program Gentengisasi



Bab IV
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 73

4.1 Kondisi Umum 75

4.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai 76
- 4.2.1 Transaksi Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) 76
- 4.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) 76
- 4.2.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) 78
- 4.2.4 Perkembangan Transaksi QRIS 79
- 4.2.5 Perkembangan Transaksi *E-commerce* 81
- 4.2.6 Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 82

4.3 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah 82
- 4.3.1 Aliran Uang Masuk/Keluar *(Inflow/Outflow)* 82
- 4.3.2 Penyediaan Uang Layak Edar 83
- 4.3.3 Pengolahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 83
- 4.3.4 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL) 84

4.4 Perkembangan Transaksi Kupva BB dan PPJP LR BB 84
- 4.4.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) 84
- 4.4.2 Perkembangan Kegiatan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) 85
- 4.4.3 Upaya Pengawasan KUPVA BB dan Penyedia Jasa Pembayaran LR 87

4.5 Perkembangan Transaksi Elektronifikasi 87
- 4.5.1 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 87
- 4.5.2 Implementasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) 88

Bab V
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 91

5.1 Ketenagakerjaan 93
- 5.1.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 93
- 5.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 94
- 5.1.3 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 94
- 5.1.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 96
- 5.1.5 Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan dan Status Pekerjaan Utama 96
- 5.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 97
- 5.1.7 Peningkatan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota 98

5.2 Kesejahteraan 99
- 5.2.1 Jumlah Penduduk Miskin 99
- 5.2.2 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 101
- 5.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat 102
- 5.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP) 103
- 5.2.5 Potensi Perbaikan Kesejahteraan pada Triwulan I 2026 106

Bab VI
PROSPEK PEREKONOMIAN 107

6.1 Prospek Perekonomian Global 109
- 6.1.1 Prospek Perekonomian Global 109
- 6.1.2 Prospek Inflasi Global 109

6.2 Prospek Perekonomian Nasional 109
- 6.2.1 Prospek Perekonomian Nasional 2026 109
- 6.2.2 Prospek Inflasi Nasional 2026 110

6.3 Prospek Perekonomian Jawa Barat 110
- 6.3.1 Prospek Perekonomian Jawa Barat Tahun 2026 110
- 6.3.2 Prospek Inflasi Jawa Barat Tahun 2026 118
- 6.3.3 Sinergitas dan Kolaborasi Bank Indonesia Jawa Barat untuk Stabilisasi Harga dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian 119

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Permintaan (%, yoy)	5
Tabel 1.2	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Permintaan (%)	5
Tabel 1.3	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Jawa Barat Triwulan I 2026	7
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)	13
Tabel 1.5	Andil Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (%)	13
Tabel 1.6	*Progress* Pembangunan di Jawa Barat Triwulan I 2026	18
Tabel 2.1	Komoditas Penyebab Inflasi Tahunan Triwulan I 2026 (Berdasarkan Andil)	30
Tabel 2.2	Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa Tw I 2026 (%yoy)	33
Tabel 2.3	Perkembangan Rata-Rata Harga Bapokting Triwulan IV 2025 dan Triwulan I 2026	38
Tabel 2.4	Neraca Pangan Komoditas Pangan Strategis Tw IV 2025 dan I 2026	39
Tabel 4.1	Wilayah Kerja Bank Indonesia di Jawa Barat	82
Tabel 5.1	Perbandingan Indeks yang Dibayar Petani (IB) Triwulan IV 2025 dan I 2026	104
Tabel 5.2	Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor pada Tahun 2022 hingga Tw I 2026	105
Tabel 6.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%, YoY)	109
Tabel 6.2	Faktor Pendorong dan Penahan Perekonomian Jawa Barat Tahun 2026	111

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	3
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa	4
Gambar B1.1	Total Timbulan Sampah Berdasarkan Kabupaten/Kota (ton/hari)	23
Gambar B1.2	Implementasi tata kelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung yang berhasil mengurangi sampah ke TPA karena efektifitas dalam pengelolaan sampah mandiri menggunakan insinerator dan kedepan akan dibuat pengelolaan biogas	25
Gambar B1.3	Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang diproyeksikan menjadi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).	25
Gambar B3.1	Sinergi Bank Indonesia Bersama IPB Dalam Pengembangan Model Bisnis UMKM Hijau	69

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jabar dan Nasional (Triwulanan) 3
Grafik 1.2 Pangsa Perekonomian Provinsi di Jawa terhadap Jawa 3
Grafik 1.3 Survei Konsumen: Indeks Keyakinan Konsumen 6
Grafik 1.4 Survei Penjualan Eceran: Indeks Penjualan Riil 6
Grafik 1.5 Likert Scale Hasil Liaison – Penjualan Domestik 6
Grafik 1.6 Perkembangan Transaksi *e-commerce* 6
Grafik 1.7 Pagu Pendapatan dan Belanja APBN Jawa Barat T.A 2026 7
Grafik 1.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN Jawa Barat s.d triwulan I 2026 7
Grafik 1.9 Pagu Pendapatan dan Belanja APBD Jawa Barat T.A 2026 7
Grafik 1.10 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Jawa Barat s.d triwulan I 2026 8
Grafik 1.11 Perkembangan Simpanan Pemerintah Daerah 8
Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Barat 8
Grafik 1.13 Perkembangan Net Ekspor (ADHK) Jawa Barat 8
Grafik 1.14 Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Jawa Barat 9
Grafik 1.15 Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Komoditas 9
Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor Jawa Barat ke Negara Tujuan Utama 9
Grafik 1.17 *Likert Scale* Hasil Liaison – Penjualan Ekspor 9
Grafik 1.18 Perkembangan Impor Jawa Barat 10
Grafik 1.19 Perkembangan Impor di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Barang 10
Grafik 1.20 Pangsa Impor Jawa Barat Berdasarkan Komoditas 10
Grafik 1.21 Perkembangan Impor Jawa Barat Berdasarkan Komoditas 10
Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Triwulanan di Jawa Barat 11
Grafik 1.23 Proporsi Realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat 11
Grafik 1.24 Negara Asal PMA di Jawa Barat 12
Grafik 1.25 Alokasi Realisasi PMA di Jawa Barat 12
Grafik 1.26 Alokasi Realisasi PMDN di Jawa Barat 12
Grafik 1.27 Kinerja Utilisasi Listrik LU Industri Jawa Barat 14
Grafik 1.28 Kinerja *Likert Scale* – Hasil Liaison Kapasitas Terpasang dan Penjualan Ekspor Industri Manufaktur 14
Grafik 1.29 Survei Kegiatan Dunia Usaha: SBT Industri Pengolahan 14
Grafik 1.30 Kinerja Penyaluran Kredit LU industri 14
Grafik 1.31 Perkembangan Kinerja Penjualan Mobil 15
Grafik 1.32 Perkembangan Kinerja Ekspor-Impor Mobil 15
Grafik 1.33 Perkembangan Kinerja Produksi Mobil 15
Grafik 1.34 Perkembangan Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor 15
Grafik 1.35 Pertumbuhan Ekspor Elektronik Berdasarkan Negara Tujuan 16
Grafik 1.36 Kinerja penyaluran Kredit untuk Industri Elektronik 16
Grafik 1.37 Pertumbuhan Ekspor TPT Berdasarkan Negara Tujuan 16
Grafik 1.38 Kinerja penyaluran Kredit untuk Industri TPT 17
Grafik 1.39 Survei Penjualan Eceran: Indeks Penjualan Riil 17
Grafik 1.40 Transaksi *E-Commerce* 17
Grafik 1.41 Kinerja penyaluran Kredit untuk Sektor Perdagangan 17
Grafik 1.42 Penjualan Semen Jawa Barat 18
Grafik 1.43 Kinerja Pembiayaan LU Konstruksi 18
Grafik 1.44 Perkembangan Produksi Padi Jawa Barat 19
Grafik 1.45 Kinerja Likert Scale – Kapasitas Utilisasi Pertanian 19
Grafik 1.46 Pertumbuhan Impor Komoditas Pertanian Jawa Barat 19
Grafik 1.47 Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat 20
Grafik 1.48 Perkembangan Kedatangan Wisatawan Nusantara 20
Grafik 1.49 Survei Kegiatan Dunia Usaha: SBT Transportasi dan Pergudangan 20
Grafik 1.50 Kinerja Kredit LU Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat 21
Grafik 2.1 Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Barat dan Nasional 29
Grafik 2.2 Inflasi Tahun Kalender Gabungan Kota IHK Jawa Barat 29
Grafik 2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Bulanan Sepanjang Triwulan I 2026 di Jawa Barat 30
Grafik 2.4 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran 31
Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok & Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 31
Grafik 2.6 Perkembangan Permintaan Emas Berdasarkan Penggunaan 31

Daftar Grafik

Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 32
Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi Kelompok & Subkelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 32
Grafik 2.9 Inflasi Kabupaten/Kota IHK Jawa Barat Tw IV 2025 dan I 2026 (%yoy) 32
Grafik 2.10 Pergerakan Harga Komoditas Bapokting di Beberapa Level 40
Grafik 2.11 Perkembangan Inflasi Jawa Barat per Bulan 41
Grafik 2.12 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen 42
Grafik 3.1 Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan 47
Grafik 3.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Kredit dan LDR 47
Grafik 3.3 Porsi Penyaluran Pembiayaan/Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan 47
Grafik 3.4 Proporsi Penggunaan Pendapatan Rumah Tangga 47
Grafik 3.5 Perkembangan Suku Bunga per Jenis Kredit 49
Grafik 3.6 Likert Scale Investasi 49
Grafik 3.7 Pangsa Kredit Sektoral 50
Grafik 3.8 Pertumbuhan Kredit Sektoral 50
Grafik 3.9 Pertumbuhan Kredit Subsektor Industri Pengolahan 50
Grafik 3.10 Rasio Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Pembiayaan 51
Grafik 3.11 Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek Menurut Lokasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat 52
Grafik 3.12 Rasio Non-Performing Loan (NPL) di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit 53
Grafik 3.13 Perkembangan Loan at Risk Proyek di Jawa Barat 53
Grafik 3.14 Perkembangan Proporsi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jangka Waktu (%) 53
Grafik 3.14 Prakiraan Curah Hujan Triwulan II 2026 43
Grafik 3.15 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jangka Waktu 53
Grafik 3.16 Perkembangan Kredit UMKM 54
Grafik 3.17 Rasio Kredit UMKM di Jawa Barat 54
Grafik 3.18 Proporsi Kredit UMKM per Kab/Kota di Jawa Barat (%) 55
Grafik 3.19 Perkembangan Kredit Korporasi di Jawa Barat 59
Grafik 3.20 Pertumbuhan Kredit Korporasi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Utama 59
Grafik 3.21 Perkembangan NPL per Jenis Kredit 59
Grafik 3.22 Perkembangan NPL per Sektor Utama (dalam %) 59
Grafik 3.23 Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Jawa Barat 60
Grafik 3.24 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga 61
Grafik 3.25 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga 61
Grafik 3.26 Perkembangan KPR 61
Grafik 3.27 *Non-Performing Loan Gross* KPR 62
Grafik 3.28 Perkembangan KPA 62
Grafik 3.29 *Non-Performing Loan Gross* KPA 62
Grafik 3.30 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor 63
Grafik 3.31 Perkembangan *Non-Performing Loan* Kredit Kendaraan Bermotor 63
Grafik 3.32 Perkembangan Kredit Multiguna 64
Grafik 4.1 Perkembangan Transaksi RTGS Jawa Barat - Nominal 76
Grafik 4.2 Perkembangan Transaksi RTGS Jawa Barat - Volume 76
Grafik 4.3 Perkembangan Transaksi Kliring Jawa Barat - Nominal 76
Grafik 4.4 Perkembangan Transaksi Kliring Jawa Barat - Volume 77
Grafik 4.5 Perkembangan Transaksi APMK ATM/Debit - Nominal 78
Grafik 4.6 Perkembangan Transaksi APMK ATM/Debit - Volume 78
Grafik 4.7 Perkembangan Transaksi APMK ATM Kredit - Nominal 78
Grafik 4.8 Perkembangan Transaksi APMK ATM Kredit - Volume 78
Grafik 4.9 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik - Nominal 79
Grafik 4.10 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik - Volume 79
Grafik 4.11 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS 79
Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS 79
Grafik 4.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS 80
Grafik 4.14 Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS 80
Grafik 4.15 Jumlah *Merchant* QRIS berdasarkan Kab/ Kota 81
Grafik 4.16 Jumlah *Merchant* QRIS berdasarkan Skala Usaha 81
Grafik 4.17 Perkembangan Transaksi *E-commerce* 81
Grafik 4.18 Transaksi *E-commerce* berdasarkan Kategori 81

Daftar Grafik

Grafik 4.19 Metode Pembayaran *E-commerce* 82
Grafik 4.20 Perkembangan *Inflow – Outflow* Uang Kartal 83
Grafik 4.21 Perkembangan Pemusnahan UTLE di Jawa Barat 83
Grafik 4.22 Perkembangan Temuan Uang Palsu di Jawa Barat 84
Grafik 4.23 Perkembangan Transaksi Pembelian Valas di KUPVA BB 84
Grafik 4.24 Perkembangan Transaksi Penjualan Valas di KUPVA BB 85
Grafik 4.25 Perkembangan Transaksi Pembelian Valas di KUPVA BB 85
Grafik 4.26 Perkembangan Transaksi Penjualan Valas di KUPVA BB 85
Grafik 4.27 Perkembangan Transaksi KUPU Domestik - Nominal 85
Grafik 4.28 Perkembangan Transaksi KUPU Domestik - Volume 86
Grafik 4.29 Perkembangan Transaksi KUPU Incoming dan Outgoing - Nominal 86
Grafik 4.30 Perkembangan Transaksi KUPU Incoming dan Outgoing - Volume 86
Grafik 4.31 Tingkat Penyerapan KPM PKH 89
Grafik 4.32 Tingkat Penyaluran Nominal PKH 89
Grafik 4.33 Tingkat Penyerapan KPM Program Sembako 89
Grafik 4.34 Tingkat Penyaluran Nominal Program Sembako 89
Grafik 5.1 Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Jawa Barat, 2022-2026 (dalam juta) 94
Grafik 5.2 Perkembangan TPAK di Jawa Barat, 2022-2026 (dalam %) 94
Grafik 5.3 Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Jawa Barat (%) 94
Grafik 5.4 Pertumbuhan Pertanian %yoy 95
Grafik 5.5 Petumbuhan Industri Pengolahan %yoy 95
Grafik 5.6 Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK periode 2025 – Triwulan I 2026 95
Grafik 5.7 Akumulasi Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Tw IV 2025 - 2026 95
Grafik 5.8 Penduduk Bekerja di Jawa Barat Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %) 96
Grafik 5.9 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama 97
Grafik 5.10 Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Kegiatannya 97
Grafik 5.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat Berdasarkan Tempat Tinggal, 2022-2026 (dalam %) 97
Grafik 5.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin, 2022-2025 (dalam %) 98
Grafik 5.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2025 (dalam%) 98
Grafik 5.14 Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam%) 98
Grafik 5.15 Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 99
Grafik 5.16 Upah Minimum Sektorak Kabupaten/Kota Jawa Barat 99
Grafik 5.17 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat 100
Grafik 5.18 Perbandingan Angka Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Barat, 2021-2025 (dalam %) 100
Grafik 5.19 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/ Kota di Jawa Barat tahun 2025 101
Grafik 5.20 Peranan Komoditas Makanan terhadap GK Jawa Barat, September 2025 (dalam %) 101
Grafik 5.21 Peranan Komoditas Non-Makanan terhadap GK Jawa Barat, Maret 2025 (dalam %) 102
Grafik 5.22 Rasio Gini Jawa Barat 102
Grafik 5.23 Perbandingan Rasio Gini Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Barat 102
Grafik 5.24 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat dan Nasional 102
Grafik 5.25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup di Jawa Barat (tahun) 103
Grafik 5.26 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat 2025 103
Grafik 5.27 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Jawa Barat (juta Rp) 103
Grafik 5.28 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Jawa Barat 27 Kab/Kota di Jawa Barat (juta Rp) 103
Grafik 5.29 Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks yang Dibayar Petani (IB) dan Indeks yang Diterima Petani (IT) 104
Grafik 5.30 Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Jawa Barat 105
Grafik 5.31 Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia 106



Halaman ini sengaja dikosongkan

Tabel Indikator

1. DATA MAKRO REGIONAL							
INDIKATOR	2024	2025				2025	2026
		I	II	III	IV		I
Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)	**4,95**	**5,00**	**5,22**	**5,19**	**5,85**	**5,32**	**5,79**
Berdasarkan Permintaan/Penggunaan							
Konsumsi Rumah Tangga	5,01	5,01	4,76	4,92	5,16	4,96	5,47
Konsumsi LNPRT	7,89	5,83	6,78	4,22	3,96	5,19	6,34
Konsumsi Pemerintah	1,39	0,18	-5,59	4,25	14,18	4,42	55,95
PMTB	6,96	3,12	6,79	5,27	5,96	5,29	4,57
Perubahan Inventori	-32,85	-111,47	37,51	-113,17	10,84	-67,42	-209,70
Ekspor	12,11	0,03	1,38	3,84	4,44	2,45	1,76
Impor	15,08	-3,54	-0,52	3,50	4,31	1,01	3,51
Berdasarkan Penawaran/Lapangan Usaha							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	31,85	4,67	5,43	2,46	10,07	4,19
Pertambangan dan Penggalian	0,00	2,34	2,48	-1,93	-4,80	-0,50	1,22
Industri Pengolahan	3,52	0,38	3,44	3,15	4,40	2,84	3,99
Pengadaan Listrik, Gas	-0,60	-0,18	0,84	0,76	5,27	1,67	-1,10
Pengadaan Air	5,48	0,03	3,79	4,57	2,29	2,64	3,42
Konstruksi	7,09	2,96	6,79	5,02	6,63	5,36	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,85	6,23	5,59	5,17	3,12	5,00	3,06
Transportasi dan Pergudangan	12,34	10,68	10,02	11,62	13,61	11,50	14,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,43	7,92	8,51	15,53	9,68	10,34	17,34
Informasi dan Komunikasi	8,20	8,61	9,83	9,31	8,76	9,13	8,70
Jasa Keuangan	4,20	1,61	-4,12	0,66	15,69	3,27	7,97
Real Estate	6,64	5,81	7,45	8,66	10,85	8,22	9,17
Jasa Perusahaan	2,49	8,97	8,25	16,37	4,34	9,19	15,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,73	2,54	5,22	-0,73	8,37	4,02	4,86
Jasa Pendidikan	5,95	3,35	5,93	7,04	9,62	6,55	7,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	2,65	9,73	12,51	13,84	9,79	14,14
Jasa lainnya	7,93	7,40	10,35	8,76	9,05	8,94	15,53
Ekspor							
Nilai Ekspor Nonmigas (USD juta)	36.975	9.123	9.091	9.981	9.631	37.827	8.894
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	8.538	1.992	1.971	2.140	2.099	8.202	1.961
Nilai Ekspor Nonmigas (% YOY)	2,31	1,73	5,20	0,02	0,01	2,30	-1,55
Volume Ekspor Nonmigas (% YOY)	-3,98	-7,18	0,23	-3,65	-4,78	-3,93	-0,03
Impor							
Nilai Impor Nonmigas (USD juta)	11.116	2.501	2.748	2.649	1.922	9.821	2.430
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	2.675	497	514	537	550	2.099	515
Nilai Impor Nonmigas(% YOY)	7,65	-2,16	5,13	2,65	-14,51	-11,65	-2,85
Volume Impor Nonmigas(% YOY)	24,10	-27,56	-21,69	-21,34	-15,19	-21,54	3,53
Indeks Harga Konsumen (IHK)							
Jawa Barat	107,34	107,65	108,68	109,03	110,16	110,16	111,53
Kota Bandung	106,59	106,64	107,58	108,14	109,46	109,46	110,54
Kota Bekasi	107,50	108,28	109,22	109,38	110,75	110,75	112,19
Kota Depok	106,81	107,03	108,19	108,53	109,49	109,49	110,72
Kota Bogor	107,41	107,68	109,01	109,43	110,47	110,47	111,82
Kota Sukabumi	107,60	108,30	109,72	110,04	110,98	110,98	112,29
Kota Cirebon	106,01	106,40	107,51	108,07	109,03	109,03	110,17
Kota Tasikmalaya	106,84	107,05	108,12	108,56	109,69	109,69	111,19
Kab Bandung	107,88	108,05	108,84	109,22	110,18	110,18	111,73
Kab Subang	109,07	109,24	110,19	110,20	111,37	111,37	112,87
Kab Majalengka	107,23	107,00	108,60	109,37	110,30	110,30	111,81
Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)							
Jawa Barat	1,61	0,79	1,78	2,19	2,63	2,63	3,61
Kota Bandung	1,60	0,58	1,46	2,09	2,69	2,69	3,66
Kota Bekasi	1,95	0,92	1,67	2,18	3,03	3,03	3,62
Kota Depok	1,75	0,87	1,99	2,12	2,50	2,50	3,45

Tabel Indikator

1. DATA MAKRO REGIONAL

INDIKATOR	2024	2025				2025	2026
		I	II	III	IV		I
Kota Bogor	2,59	0,90	2,17	2,74	2,85	2,85	3,85
Kota Sukabumi	1,83	1,77	3,26	3,89	3,14	3,14	3,69
Kota Cirebon	1,93	0,23	1,79	2,64	2,85	2,85	3,55
Kota Tasikmalaya	1,46	0,66	1,75	2,16	2,67	2,67	3,87
Kab Bandung	0,93	0,85	1,38	1,87	2,13	2,13	3,41
Kab Subang	1,60	0,52	2,27	1,98	2,11	2,11	3,32
Kab Majalengka	0,00	0,35	2,20	2,67	2,86	2,86	4,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (r) Angka Revisi)
Ket : Data IHK menggunakan Tahun Dasar 2012.

2. PERBANKAN

INDIKATOR (dalam Rp Triliun kecuali dinyatakan lain)	2024	2025				2025	2026
		I	II	III	IV		I
Bank Umum Konvensional							
Dana Pihak Ketiga (DPK) - Lokasi Bank Pelapor	613,21	616,08	618,22	629,21	640,77	640,77	672,41
Kredit - Lokasi Proyek	888,69	901,55	900,67	898,75	907,83	907,83	907,04
Bank Umum Syariah							
Dana Pihak Ketiga (DPK) - Lokasi Bank Pelapor	72,92	73,28	74,13	75,87	76,48	76,48	76,85
Pembiayaan - Lokasi Proyek	105,65	107,52	107,55	109,36	113,73	113,73	115,67
Total Bank Umum							
Total Aset	981,63	990,84	993,85	1000,73	1014,64	1014,64	1046,26
Dana Pihak Ketiga (DPK) - Lokasi Bank Pelapor	680,40	689,36	692,35	705,08	717,25	717,25	749,25
Giro	141,51	143,81	148,23	162,09	165,27	165,27	187,79
Tabungan	327,86	339,05	335,79	333,41	347,78	347,78	356,45
Deposito	216,76	206,50	208,33	209,58	204,20	204,20	205,00
Kredit/Pembiayaan - Lokasi Bank Pelapor	615,07	620,08	624,36	628,75	635,57	635,57	644,18
Kredit/Pembiayaan - Lokasi Proyek	994,34	1009,07	1008,22	1008,11	1021,57	1021,57	1022,71
Modal Kerja	337,70	337,29	329,46	320,97	315,93	315,93	302,48
Investasi	202,59	212,73	213,35	215,33	227,19	227,19	238,83
Konsumsi	454,05	459,05	465,41	471,81	478,44	478,44	481,41
Kredit UMKM - Lokasi Proyek	192,84	190,48	189,84	187,60	187,75	187,75	186,83
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%)	90,40	89,95	90,18	89,17	88,61	88,61	85,98

* Lokasi bank pelapor : pencatatan berdasarkan transaksi perbankan (baik penghimpunan dana maupun penyaluran kredit) yang dilakukan oleh bank-bank yang berkantor di Jawa Barat
** Lokasi proyek : pencatatan berdasarkan realisasi kredit yang disalurkan di wilayah Jawa Barat (tidak terbatas kepada penyaluran oleh bank yang berkantor di Jawa Barat semata)

3. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2024	2025				2025	2026
		I	II	III	IV		I
Transaksi Tunai							
Inflow (Rp Triliun)	75,29	16,05	23,11	13,88	7,62	60,66	18,32
Outflow (Rp Triliun)	-22,94	-13,98	-7,74	-6,84	12,90	-15,66	13,02
Netflow (Rp Triliun)	25,80	2,06	15,37	7,04	-5,28	19,19	5,30
Transaksi Non Tunai (Kliring)							
Nominal Kliring (Rp Triliun)	144.678	32.043	30.106	32.057	33.191	127.397	29.687
Volume Kliring (juta lembar)	3,70	0,77	0,73	0,81	0,88	3,19	0,65
Nominal RTGS (Rp Triliun)	1.321.482	294.684	321.172	328,866	400,850	616.585	365.783
Volume RTGS	425.202	96.754	90.062	103.328	114.729	404.873	92.765

Sumber: Bank Indonesia

Ringkasan Eksekutif

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,79% (yoy) didukung peningkatan permintaan masyarakat pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026.

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,79% (yoy), sedikit termoderasi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 5,85% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,61%, yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih ditopang oleh penguatan permintaan masyarakat, seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas, terutama dengan adanya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.

Pada sisi pengeluaran, ekonomi Jawa Barat ditopang konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta masih kuatnya investasi.

Pada sisi pengeluaran, berlanjutnya penguatan permintaan masyarakat terus menopang kinerja konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh positif dan meningkat pada triwulan I 2026. Lebih lanjut, konsumsi pemerintah mengalami akseleratif didukung belanja pegawai dan belanja modal. Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih kuat seiring tetap tingginya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) pada periode laporan.

Peningkatan permintaan masyarakat berdampak pada penguatan kinerja sektoral, a.l. Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi.

Peningkatan permintaan masyarakat berdampak pada penguatan kinerja sektoral, terutama yang berhubungan dengan mobilitas dan aktivitas penduduk, seperti sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi yang tumbuh positif pada triwulan laporan. Berdasarkan pangsanya, sektor Industri Pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian Jawa Barat dengan pangsa mencapai 39,60% pada triwulan I 2026.

Seiring dengan berlanjutnya optimisme perekonomian Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan seluruh stakeholders terkait akan terus bersinergi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi regional, antara lain melalui promosi investasi, mendorong pecepatan dan perluasan digitalisasi, penyelenggaraan berbagai event/pameran untuk mendukung kinerja UMKM, serta mendorong optimalisasi infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di Jawa Barat. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2026 tetap resilien, pada kisaran 4,9%-5,7% (yoy) didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, serta ditopang kinerja Industri Pengolahan, Perdagangan, Transpostasi dan Pergudangan, serta Akomodasi, Makan dan Minum.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,60% (yoy), tetap tejaga pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%(yoy).

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 3,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,63% (yoy). Peningkatan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh normalisasi tarif listrik pasca diskon pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan, dan kenaikan harga berbagai komoditas pangan strategis.

Ringkasan Eksekutif

Inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2026 diprakirakan lebih terjaga dan berada dalam rentang sasaran. Hal ini didorong oleh tren penurunan harga emas global, meski masih pada level harga yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu serta berakhirnya dampak normalisasi diskon tarif listrik dan moderasi permintaan pasca HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026. Namun demikian, tetap perlu diwaspadai risiko pendorong inflasi, khususnya yang berasal dari harga bahan bakar minyak (BBM) dan imported inflation dampak dari perang Timur Tengah.

Pada triwulan II 2026, inflasi diprakirakan lebih terjaga, dipengaruhi normalisasi tarif listrik dan penurunan permintaan pasca HBKN Idulfitri 2026.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus bersinergi dan berkolaborasi erat untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Langkah-langkah mitigasi terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dengan kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH & PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Kinerja pembiayaan di Jawa Barat mengalami moderasi di tengah likuiditas yang memadai sehingga memiliki ruang yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit pada Tw.I 2026 tumbuh terbatas sebesar 1,35% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya 2,74%, (yoy), dan berada dibawah rentang pertumbuhan kredit nasional (8-11%). Perlambatan kredit utamanya disebabkan oleh kontraksi yang semakin dalam pada kredit modal kerja, seiring dengan terbatasnya permintaan pembiayaan dari dunia usaha yang cenderung menahan ekspansi di tengah dinamika permintaan dan ketidakpastian global. Di sisi lain, kredit investasi dan kredit konsumsi masih tumbuh positif sejalan dengan terjaganya investasi dan konsumsi rumah tangga pada periode laporan.

Kondisi pembiayaan di Jawa Barat termoderasi, dan masih memiliki ruang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit pada triwulan I 2026 mengalami moderasi dengan tumbuh sebesar 1,35% (yoy). Sementara DPK terakselerasi tumbuh sebesar 8,69% (yoy).

Secara sektoral, pertumbuhan kredit ditopang oleh industri pengolahan dan jasa dunia usaha. Kedua sektor tersebut terakselerasi seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat dan aktivitas produksi menjelang HBKN Idulfitri. Lebih lanjut, kredit UMKM mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi, terutama bersumber dari permintaan kredit sektor pertanian dan peternakan, serta perbaikan kredit sektor perdagangan dan industri pengolahan didukung meningkatnya permintaan domestik.

Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jawa Barat tumbuh 8,69% (yoy) pada Tw.I 2026, terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya, dipengaruhi kenaikan posisi giro dan deposito. Hal ini mengindikasikan tersedianya likuiditas yang cukup memadai pada perbankan di Jawa Barat untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian daerah.

Ke depan, penguatan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih akseleratif. Bank Indonesia terus menempuh langkah ekspansi kebijakan moneter dan mempertahankan stance kebijakan makroprudensial yang longgar, antara lain melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dan menurunkan suku bunga perbankan. Di tingkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat turut memperkuat sisi permintaan melalui berbagai program peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses pasar. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan bankability pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih optimal dan inklusif.

Ringkasan Eksekutif

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026 tecermin dari perkembangan penggunaan transaksi tunai dan non tunai dalam masyarakat.

Kinerja infrastruktur dan transaksi sistem pembayaran tetap kuat dalam mendukung transaksi ekonomi. Kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, didukung dengan kondisi likuiditas yang memadai. Nominal transaksi nontunai melalui RTGS dan SKNBI pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan di tengah volume transaksi yang menurun. Transaksi APMK debit tercatat mengalami penurunan baik dari sisi nominal maupun volume. Di sisi lain, transaksi APMK kredit tercatat mengalami penurunan dari sisi nominal namun tumbuh lebih tinggi dari sisi volume. Transaksi UE juga tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume.

Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah dan industri untuk terus memperluas akseptasi digital.

Sementara itu, transaksi QRIS secara nominal dan volume pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 69,62% (yoy) dan 89,28% (yoy). Pada periode laporan, terdapat penambahan 507.629 pengguna (user), sehingga total pengguna QRIS di Jawa Barat hingga periode triwulan I 2026 mencapai 13,58 juta atau 22,02% dari total pengguna QRIS nasional.

Transaksi tunai di Jawa Barat mencatat posisi net-inflow sebesar Rp5,30 triliun atau tumbuh 157,12% (yoy), berbalik arah dari triwulan IV 2025 yang mengalami net-outflow sebesar Rp5,28 triliun. Hal ini mencerminkan penurunan kebutuhan uang tunai di masyarakat pasca periode HBKN Natal, Tahun Baru dan libur sekolah pada akhir tahun 2025.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pelaku industri guna mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini didukung juga dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, antara lain mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, serta sosialisasi Pelindungan Konsumen (PeKA) terkait pemahaman hak konsumen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan terus mengalami perbaikan sejalan dengan ekonomi Jawa Barat yang tumbuh positif.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tetap resilien, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan tumbuh positif sebagaimana tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Barat serta peningkatan kesejahteraan petani (NTP) yang semakin memperkuat optimisme kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat membaik pada triwulan I 2026 tecermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sedikit menurun pada Februari 2026.

Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat tercatat membaik pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut tecermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sedikit menurun pada Februari 2026, menjadi sebesar 6,64% dari semula sebesar 6,66% pada November 2025. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Universitas, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring dengan penguatan sektor industri, jasa modern, dan transformasi ekonomi digital di Jawa Barat.

Perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat diindikasi dari tingkat kemiskinan yang menurun.

Perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat antara lain diindikasikan oleh penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 6,78%, turun sebanyak 117,64 ribu jiwa dibandingkan September 2024 yang tercatat di level 7,08%. Pemerataan program pengembangan SDM, pemerataan investasi, perbaikan infrastruktur untuk mendukung konektivitas perdesaan dan perkotaan, dan berbagai program lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi lintas sektoral di pedesaan perlu terus didorong untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

Ringkasan Eksekutif

Tingkat kesejahteraan petani yang tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan. NTP pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 117,24, meningkat dari triwulan sebelumnya 116,53. Lebih lanjut, dukungan 19 Klaster Pertanian Komoditas Aneka Cabai, Bawang Merah, Padi yang direncanakan pada triwulan II dan III, serta pendampingan klaster hilirasi pangan komoditas bawang merah, ikan dan tepung beras yang akan dihubungkan dengan agregator dan implementasi Biochar diharapkan menjadi nilai tambah bagi klaster dan mendukung perbaikan kesejahteraan petani.

Tingkat kesejahteraan petani yang tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan.

PRAKIRAAN PEREKONOMIAN KE DEPAN

Prospek perekonomian global menunjukkan kecenderungan melambat dengan tingkat ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Penutupan Selat Hormuz dampak dari perang Timur Tengah mengakibatkan peningkatan harga minyak dunia, serta terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diproyeksikan lebih rendah menjadi 3,0% (yoy), dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan berada pada kisaran 4,9%-5,7% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy), ditopang oleh optimalisasi belanja Pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Dengan memperhatikan masih tingginya ketidakpastian global dan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap resilien, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, dan berada pada kisaran 4,9-5,7% (yoy). Optimisme tersebut bersumber dari penguatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya aktivitas ekonomi, dukungan stimulus fiskal, serta terjaganya investasi seiring iklim investasi yang semakin kondusif dan penguatan daya saing Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat tahun 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi inti diprakirakan tetap terjaga didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Inflasi pangan diprakirakan terkendali seiring penguatan produksi pangan yang didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Inflasi gabungan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%.

Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian rantai pasok internasional dan inflasi menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2026. Selain itu, penyerapan investasi dan kemampuan merealisasikan proyek infrastruktur juga menjadi titik lemah yang perlu diatasi. Dengan sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat, Jawa Barat optimis dapat melaju lebih cepat, memperkuat struktur ekonominya, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif dengan daya saing yang semakin kuat baik di tingkat nasional maupun global.

BAB 1

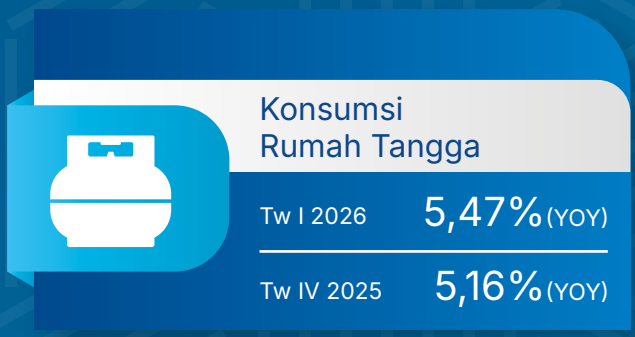
EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,79% (yoy), sedikit termoderasi dari triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,85% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,61%, yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga seiring dengan peningkatan aktivitas pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, serta Konsumsi Pemerintah didukung oleh tingginya realisasi belanja pegawai khususnya terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja modal.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU) pertumbuhan bersumber dari Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi.



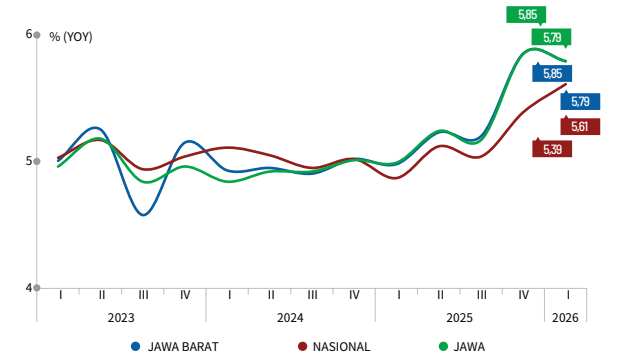






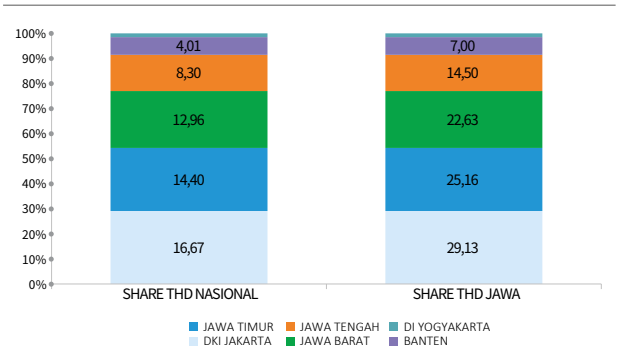



GERBANG TOL CILEUNYI
Jasa Marga



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jabar dan Nasional (Triwulanan)



Sumber : BPS, diolah

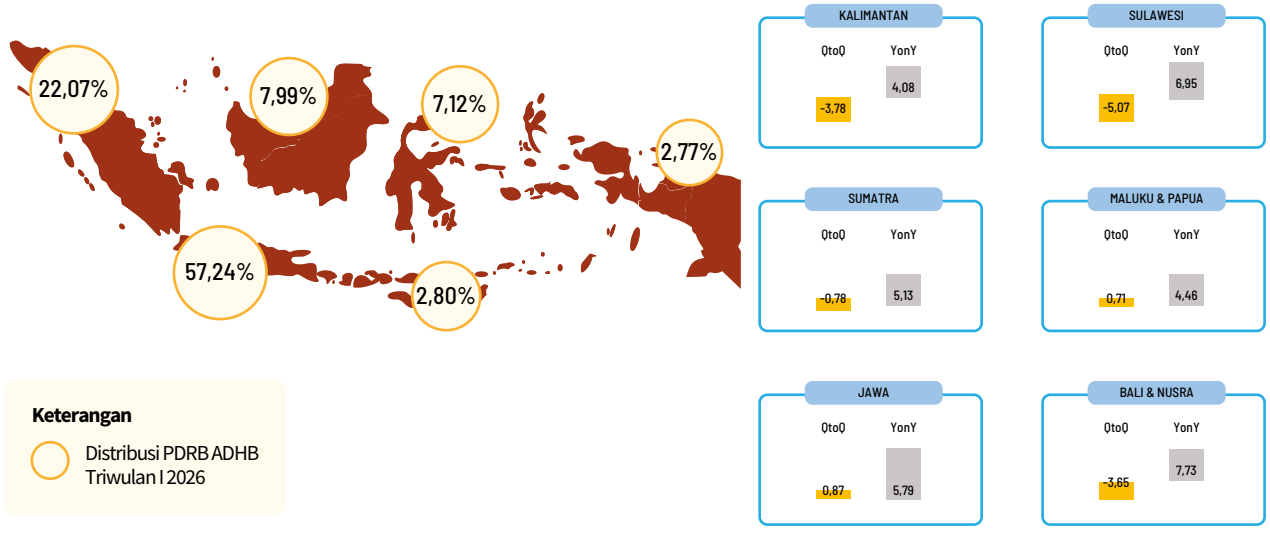
Grafik 1.2 Pangsa Perekonomian Provinsi di Jawa terhadap Jawa

PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap resilien. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,79% (yoy) atau sedikit termoderasi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 5,85% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan tercatat sebesar 0,24% (qtq), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,68% (qtq). Meskipun demikian, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% (yoy) serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa yang sebesar 5,79% (yoy).

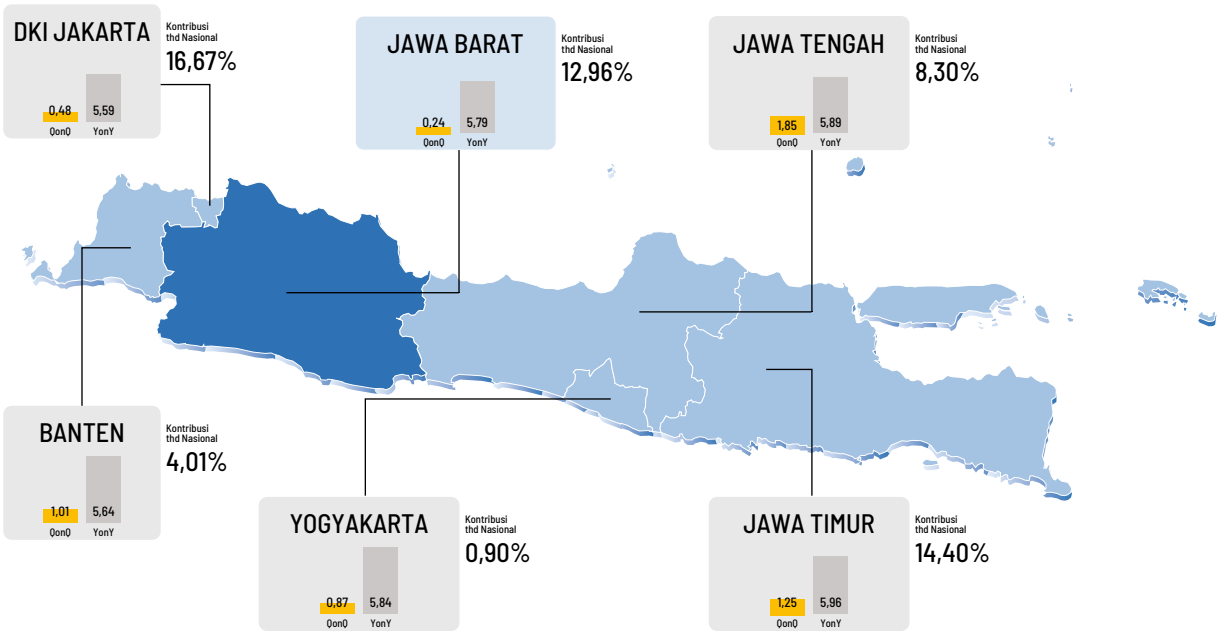
Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan periode HBKN Ramadan dan Idulfitri yang secara siklikal meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Konsumsi Pemerintah juga turut menjadi penopang didukung oleh tingginya realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Kinerja Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tercatat resilien dengan mencatatkan pertumbuhan positif seiring dengan tetap tingginya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) pada periode laporan.

Dari sisi lapangan usaha (LU), Industri Pengolahan memberikan andil positif tertinggi dan menopang pertumbuhan ekonomi. LU Industri Pengolahan tumbuh positif didorong oleh peningkatan aktivitas produksi khususnya untuk memenuhi kebutuhan domestik pada momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri. Lebih lanjut, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan juga meningkat sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan nusantara pada periode HBKN. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh kuat didukung oleh meningkatnya akseptasi digital masyarakat.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa

Secara spasial, wilayah Jawa masih menjadi motor utama penggerak perekonomian nasional pada triwulan I 2026. Wilayah Jawa berkontribusi sebesar 57,24% terhadap pertumbuhan nasional yang sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa sebesar 5,79% (yoy) pada triwulan I 2026 disumbang oleh tiga kontributor terbesar, yaitu DKI Jakarta (*share* 29,13% terhadap Jawa), Jawa Timur (*share* 25,16% terhadap Jawa), dan Jawa Barat (*share* 22,63% terhadap Jawa). Dibandingkan triwulan IV 2025, kontribusi dari Jawa Barat menunjukkan peningkatan, sementara DKI Jakarta dan Jawa Timur termoderasi.

Dalam tataran nasional, kinerja ekonomi didukung oleh berbagai kebijakan akomodatif dari sisi moneter, makroprudensial, maupun fiskal. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik.

1.1 SISI PERMINTAAN

Kinerja perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap terjaga ditopang oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah, serta terjaganya Investasi. Dari sisi permintaan, komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh lebih tinggi didorong oleh daya beli yang terjaga serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri, Imlek, dan Nyepi. Pengeluaran pemerintah tumbuh tinggi sejalan dengan intensifnya realisasi belanja pegawai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Kinerja Investasi (PMTB) tetap terjaga, tumbuh positif meskipun termoderasi, dan Jawa Barat mempertahankan posisinya sebagai wilayah tujuan investasi penanaman modal tertinggi ke-dua di Indonesia. Pada triwulan laporan, realisasi investasi penanaman modal (PMA dan PMDN) di Jawa Barat tercatat sebesar Rp76,79 triliun atau tumbuh 12,03% (yoy).

Kinerja net ekspor Jawa Barat mengalami tekanan di tengah tingginya ketidakpastian global. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang mengalami penurunan lebih dalam dibanding impor. Sebagai provinsi dengan eksposur yang tinggi terhadap perekonomian eksternal, dinamika perdagangan internasional turut memengaruhi aktivitas ekspor-impor Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, kinerja ekspor Jawa Barat tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, dipengaruhi oleh pelemahan permintaan global seiring perlambatan ekonomi dunia, tingginya inflasi dan suku bunga global, serta dampak kebijakan

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Permintaan (%, yoy)

KOMODITAS	2022				2022	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		Ir)	IIr)	IIIr)	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	3,05	5,89	5,03	4,73	4,67	4,60	5,53	5,83	5,39	5,34	4,97	5,02	4,98	5,05	5,01	5,01	4,76	4,92	5,16	4,96	5,47
Konsumsi LNPRT	0,95	1,32	5,03	5,33	3,13	4,29	15,31	16,75	19,35	14,02	20,28	4,77	4,23	4,06	7,89	5,83	6,78	4,22	3,96	5,19	6,34
Konsumsi Pemerintah	3,20	-5,07	4,39	-5,55	-1,72	10,16	12,01	-5,08	7,75	5,65	32,86	-7,02	-1,54	-3,24	1,39	0,18	-5,59	4,25	14,18	4,42	55,95
PMTB	1,17	0,51	0,09	-0,60	0,29	2,98	7,08	8,40	12,39	7,73	9,72	6,13	6,83	5,35	6,96	3,12	6,79	5,27	5,96	5,29	4,57
Net Ekspor	30,21	15,10	15,84	10,01	17,61	10,11	1,40	-4,15	-15,52	-1,78	-9,57	4,86	5,55	11,71	2,18	12,72	8,40	5,06	5,03	7,87	-3,57
a. Ekspor	17,38	13,53	10,62	3,91	11,10	4,96	11,94	14,58	17,82	12,38	21,71	9,73	11,76	6,33	12,11	0,03	1,38	3,84	4,44	2,45	1,76
b. Impor	12,98	13,03	8,72	2,06	8,92	3,22	15,46	21,86	28,76	17,56	34,83	11,13	13,66	5,17	15,08	-3,54	-0,52	3,50	4,31	1,01	3,51
PDRB	5,57	5,62	6,03	4,61	5,45	5,01	5,25	4,58	5,15	5,00	4,93	4,95	4,92	5,02	4,95	4,98	5,22	5,19	5,85	5,32	5,79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Ket: r) Angka Revisi

tarif perdagangan di negara tujuan utama ekspor. Ke depan, tingginya ketidakpastian global tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap keberlanjutan kinerja ekspor Jawa Barat.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen dengan andil tertinggi, yaitu sebesar 3,27%. Kondisi ini mempertegas perlunya kebijakan dan program untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Andil pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah komponen Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,82%, disusul oleh Investasi (PMTB) dengan andil 1,06% (Tabel 1.2).

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga sebagai penopang utama ekonomi Jawa Barat tumbuh positif sebesar 5,47% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari 5,16% (yoy) pada triwulan IV 2025. Perkembangan tersebut didukung oleh naiknya permintaan masyarakat khususnya pada momentum siklikal HBKN Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, inflasi inti yang tetap terjaga stabil turut memperkuat keyakinan konsumen.

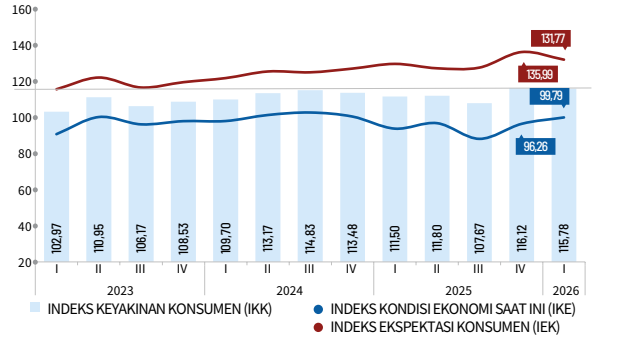
Optimisme terhadap kuatnya permintaan domestik wilayah Jawa Barat terindikasi dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus berada pada level optimis (>100). Nilai IKK pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 115,78. Sementara itu, nilai Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) menunjukkan peningkatan dari 96,26 pada triwulan IV 2025 menjadi 99,79 pada triwulan I 2026 (Grafik 1.5).

Indikasi penguatan daya beli masyarakat juga terkonfirmasi dari peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR). Berdasarkan data hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia, Indeks Penjualan Riil (IPR) secara nominal tercatat sebesar 174,22 pada triwulan I 2026, meningkat dari 137,11 pada triwulan IV 2025. Secara rinci, hampir semua komponen IPR mengalami peningkatan terutama kategori makan minum dan tembakau, suku cadang dan aksesori, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga, serta barang lainnya (Grafik 1.6). Peningkatan pada komponen makanan minuman ini

Tabel 1.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Permintaan (%)

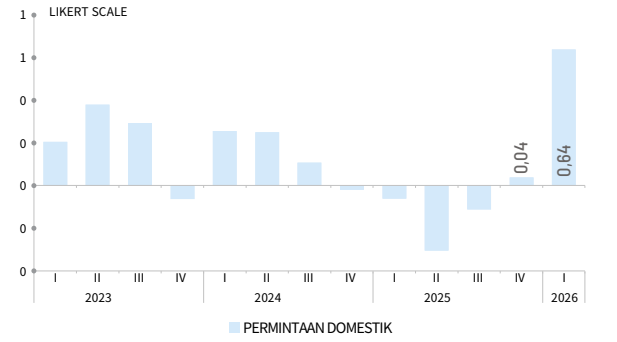
KOMODITAS	2022				2022	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		Ir)	IIr)	IIIr)	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	1,87	3,56	2,97	2,82	2,81	2,76	3,35	3,41	3,21	3,19	2,97	3,05	2,94	3,02	3,00	2,99	2,90	2,91	3,08	2,97	3,27
Konsumsi LNPRT	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	0,09	0,10	0,11	0,08	0,12	0,03	0,03	0,03	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04
Konsumsi Pemerintah	0,10	-0,29	0,19	-0,24	-0,06	0,24	0,64	-0,21	0,37	0,26	0,88	-0,34	-0,07	-0,20	0,06	0,01	-0,24	0,18	0,81	0,19	1,82
PMTB	0,28	0,12	0,02	-0,14	0,07	0,69	1,59	1,89	2,76	1,75	2,20	1,40	1,59	1,28	1,61	0,74	1,57	1,25	1,43	1,25	1,06
Net Ekspor	3,31	1,66	1,98	0,97	1,97	1,28	0,04	-0,60	-1,70	-0,26	-1,35	0,54	0,69	1,09	0,26	1,55	0,94	0,63	0,50	0,90	-0,47
a. Ekspor	7,44	5,92	4,90	1,82	4,98	2,40	5,68	7,06	8,37	5,91	10,38	4,90	6,23	3,32	6,17	0,02	0,72	2,17	2,36	1,33	0,93
b. Impor	-4,13	-4,26	-2,92	-0,85	-3,02	-1,11	-5,64	-7,66	-10,07	-6,17	-11,73	-4,36	-5,55	-2,24	-5,91	1,53	0,22	-1,54	-1,86	-0,43	-1,39
PDRB	5,57	5,62	6,03	4,61	5,45	5,01	5,25	4,58	5,14	5,00	4,93	4,95	4,92	5,02	4,95	4,98	5,22	5,19	5,85	5,32	5,79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Ket: r) Angka Revisi



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.3 Survei Konsumen: Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5 Likert Scale Hasil Liaison – Penjualan Domestik

terjadi seiring momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri yang mendorong aktivitas dan mobilitias masyarakat di Jawa Barat.

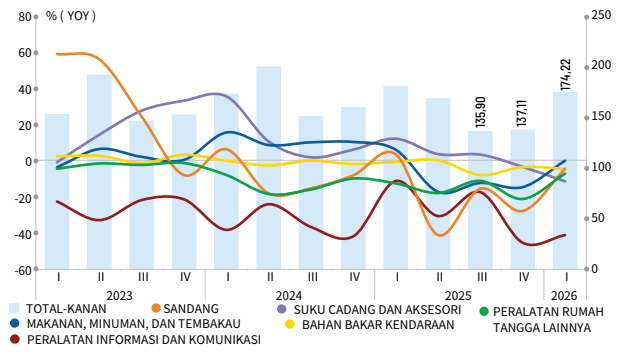
Peningkatan permintaan juga tecermin dari sisi pelaku usaha yang mencatatkan kenaikan penjualan domestik. Hal ini sebagaimana data *likert scale* hasil *liaison* yang menunjukkan peningkatan permintaan domestik menjadi 0,64 pada triwulan I 2026 dari sebelumnya sebesar 0,04 pada triwulan IV 2025. Jumlah transaksi melalui *e-commerce*[1] juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 18,76% (yoy) di triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,15% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan adanya penguatan aktivitas konsumsi masyarakat serta meningkatnya adopsi kanal perdagangan digital.

Beberapa kebijakan yang masih berlangsung hingga periode laporan diyakini mampu menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap positif, antara lain:

1) Pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan.
2) Kebijakan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 4,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi, yang mendukung momentum belanja masyarakat.
3) Keberlanjutan program bantuan sosial (bansos), seperti bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan tunai yang menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah bawah.
4) Kebijakan stabilisasi inflasi pangan, melalui penguatan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta sinergi tim pengendalian inflasi pusat-daerah (TPIP/TPID) yang membantu menjaga keterjangkauan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
5) Peningkatan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) tahun 2026, yang turut menopang pendapatan rumah tangga pekerja formal dan mendorong konsumsi masyarakat.

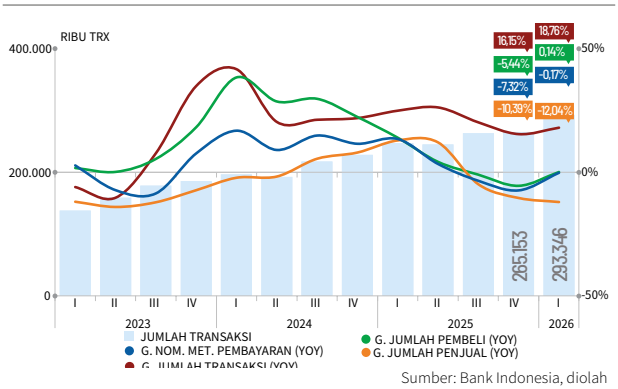
1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 terakselerasi sejalan tingginya realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Konsumsi pemerintah



Sumber : Bank Indonesia

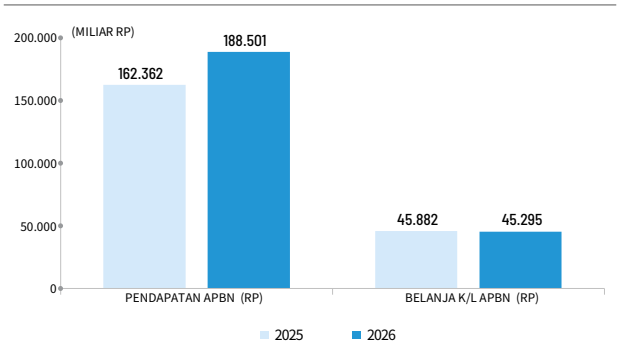
Grafik 1.4 Survei Penjualan Eceran: Indeks Penjualan Riil



Sumber: Bank Indonesia, diolah

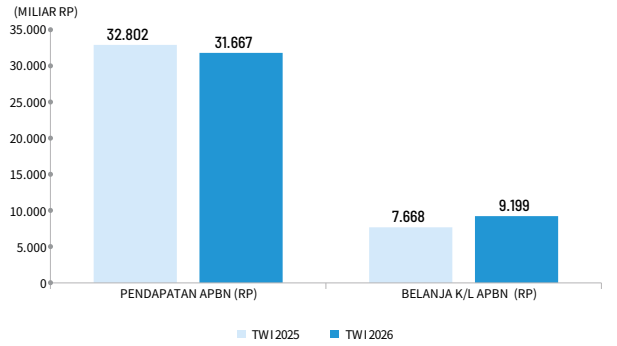
Grafik 1.6 Perkembangan Transaksi *e-commerce*

1 Data berasal dari beberapa *e-commerce* terbesar di Indonesia sehingga belum mencerminkan populasi industri *e-commerce*



Sumber: Kanwil DJPB Jabar, diolah

Grafik 1.7 Pagu Pendapatan dan Belanja APBN Jawa Barat T.A 2026



Sumber: Kanwil DJPB Jabar, diolah

Grafik 1.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN Jawa Barat s.d triwulan I 2026

pada triwulan I 2026 meningkat signifikan menjadi 55,95% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 14,18% (yoy). Peningkatan Konsumsi Pemerintah ini didorong oleh akselerasi belanja, khususnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), serta belanja modal sejalan fokus pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

Peningkatan kinerja fiskal Jawa Barat ditopang tingginya realisasi belanja dari APBN. Dari sisi APBN, realisasi pendapatan Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencapai Rp31,67 triliun atau terealisasi 16,80% dari pagu yang ditetapkan. Pendapatan tertinggi dikontribusikan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diikuti oleh penerimaan cukai. Sedangkan dari sisi belanja K/L, APBN di Jawa Barat mencatat realisasi sebesar Rp9,20 triliun pada triwulan I 2026 atau mencapai 20,31% dari alokasi anggaran 2026. Realisasi serapan belanja tersebut meningkat 19,97% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Perkembangan tersebut bersumber dari kenaikan pada pos Belanja Modal yang tumbuh hingga 92,93% (yoy).

Di sisi lain, realisasi APBN dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp20,02 triliun atau turun 7,96% (yoy) dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp21,50 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD) khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal (DIF).

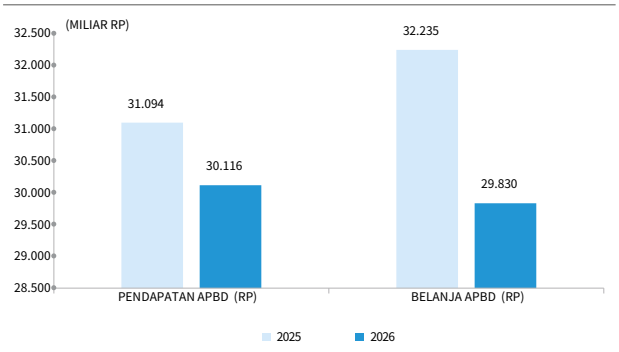
Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Jawa Barat Triwulan I 2026

	Tw I 2025 (Rp)	TW I 2025 (%)	TW I 2026 (RP)	TW I 2026 (%)
Pendapatan (APBN)	Rp32,80 T	20,20%	Rp31,67 T	16,80%
Belanja (APBN)	Rp7,69 T	16,71%	Rp9,20 T	20,31%
TKDD	Rp21,75 T	28,18%	Rp20,02 T	32,73%

Sumber: DJPN, diolah

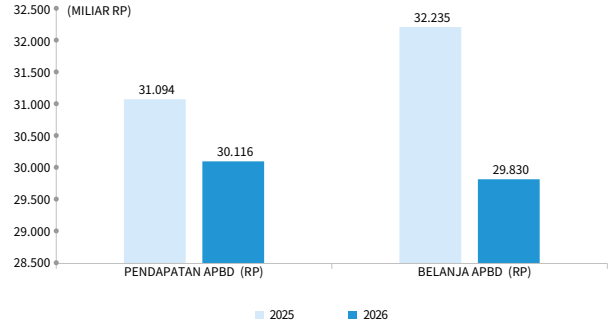
Dari sisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Realisasi pendapatan APDB Provinsi Jawa Barat triwulan I 2026 sebesar 20,70% dari pagu dengan nominal realisasi sebesar Rp6,23 triliun, atau terkontraksi 4,95% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Sedangkan dari sisi belanja, tercatat realisasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencapai 12,70% terhadap pagu anggaran atau sebesar Rp3,79 triliun. Realisasi belanja ini mengalami kontraksi 29,58% (yoy) dibandingkan triwulan I 2025.

Simpanan pemerintah daerah di perbankan pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan seiring dengan tingginya pendapatan yang masuk. Simpanan pemerintah daerah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp48,29 triliun, atau tumbuh 33,67% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar Rp12,85 triliun. Pertumbuhan simpanan pemerintah daerah tersebut terutama berasal dari peningkatan komponen tabungan dan giro, yang mengalami



Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 1.9 Pagu Pendapatan dan Belanja APBD Jawa Barat T.A 2026



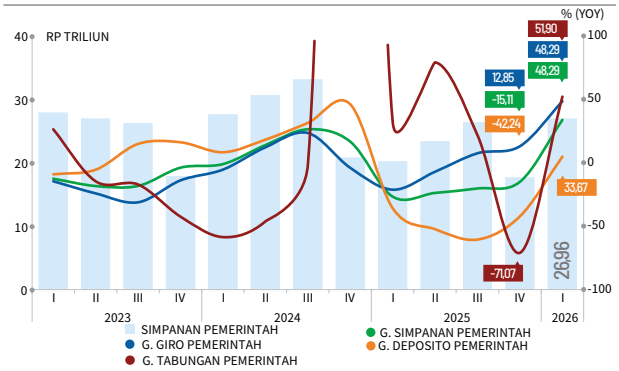
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 1.10 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Jawa Barat s.d triwulan I 2026

peningkatan sebesar 51,90% (yoy) dan 48,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Deposito pemerintah juga tumbuh positif sebesar 4,66% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 42,24% (yoy). Peningkatan posisi simpanan pemerintah ini mengindikasikan lebih tingginya pendapatan yang masuk APBN/APBD di tengah belanja yang mulai direalisasikan (Grafik 1.13).

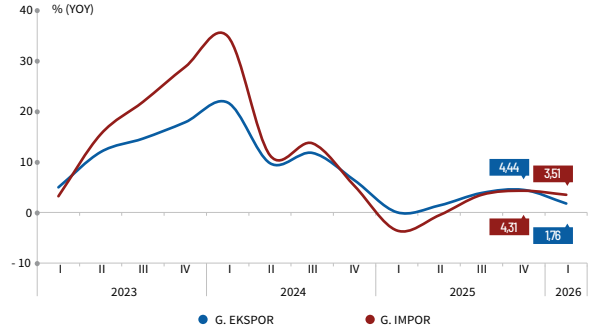
1.1.3 Ekspor-Impor

Kinerja ekspor-impor Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan dipengaruhi tingginya ketidakpastian global. Komponen ekspor dan impor terdiri dari komponen ekspor-impor luar negeri dan ekspor-impor antar daerah. Berdasarkan data BPS, ekspor Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 1,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,44% (yoy). Pertumbuhan impor turut termoderasi menjadi 3,51% (yoy) pada triwulan I 2026, dari triwulan sebelumnya sebesar 4,31% (yoy). Kinerja net ekspor pada triwulan I 2026 terkontraksi 3,57% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 5,03% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.11 Perkembangan Simpanan Pemerintah Daerah



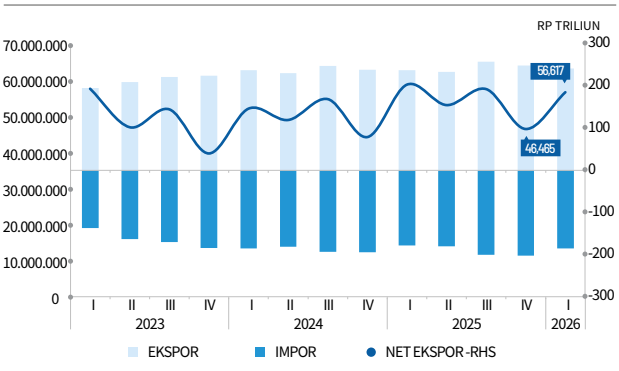
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Barat

Ekspor Luar Negeri

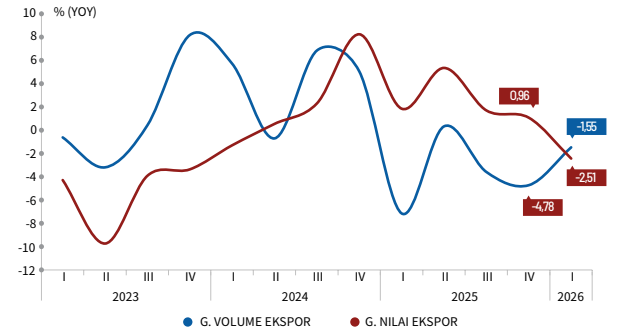
Ekspor luar negeri Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami moderasi seiring dengan penurunan permintaan akibat perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang. Berdasarkan data dari Bea Cukai, nilai ekspor *Free On Board* (FOB) Jawa Barat pada triwulan I 2026 sebesar USD9,13 miliar, atau terkontraksi sebesar 2,51% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,96% (yoy). Volume ekspor pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 1,97 juta ton, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,10 juta ton. Meskipun demikian, pertumbuhan volume ekspor triwulan I 2026 mengalami perbaikan, dari sebelumnya terkontraksi 4,78% (yoy) menjadi kontraksi sebesar 1,55% (yoy).

Penurunan kinerja ekspor berdampak pada melemahnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan. LU Industri Pengolahan menjadi kontributor utama ekspor Jawa Barat, dengan pangsa mencapai 99,14% dari total ekspor. Kontribusi yang sangat dominan ini menjadikan kinerja Industri Pengolahan sebagai faktor kunci dalam menentukan kinerja ekspor



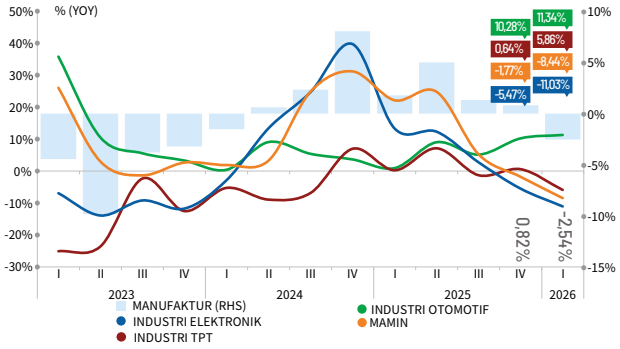
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Net Ekspor (ADHK) Jawa Barat



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.14 Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Jawa Barat



Sumber: Bea Cukai, diolah

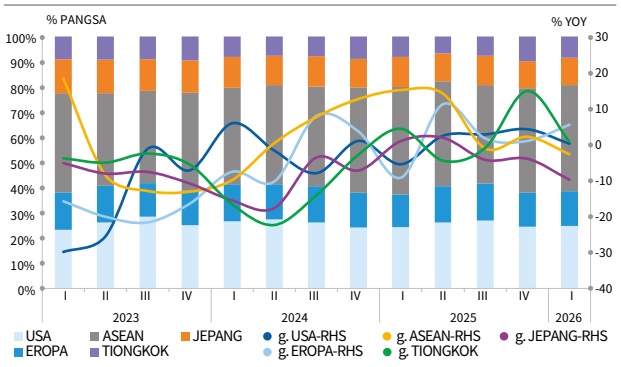
Grafik 1.15 Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Komoditas

Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekspor LU Industri Pengolahan terkontraksi 2,54% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 0,82% (yoy). Berdasarkan kontribusinya, kelompok penyumbang utama ekspor pada LU Industri Pengolahan terdiri dari Otomotif (24,94%), Elektronik (18,43%), dan Tekstil dan Pakaian Tekstil (TPT) (11,88%).

Pertumbuhan ekspor LU Industri Pengolahan yang menurun pada triwulan I 2026 dipengaruhi penurunan kinerja kelompok industri utama. Ekspor kelompok elektronik terkontraksi lebih dalam 11,03% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,47% (yoy). Hal serupa juga terjadi pada kelompok TPT yang mencatatkan kontraksi 5,86% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 0,64% (yoy). Perlambatan eskpor elektronik dan TPT terindikasi disebabkan oleh mahalnya biaya bahan baku impor akibat pelemahan Rupiah, penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama, serta terpangkasnya hari kerja efektif akibat momentum Lebaran. Di sisi lain, ekspor otomotif tercatat tumbuh positif, sedikit lebih tinggi menjadi 11,34% (yoy) dibandingkan capaian pada triwulan IV 2025 sebesar 10,28% (yoy). Hal ini sejalan dengan upaya sejumlah korporasi besar di sektor otomotif yang telah melakukan diversifikasi pasar ekspor sejak 2025 khususnya ke Amerika Latin dan Afrika untuk mengimbangi ekspor yang menurun di negara-negara utama lain.

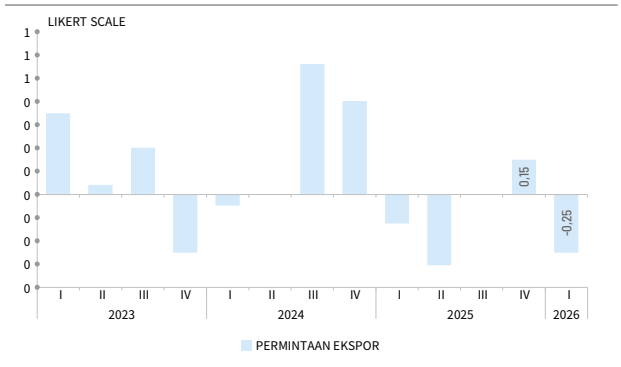
Berdasarkan negara tujuannya, pangsa ekspor terbesar Jawa Barat masih ke negara ASEAN. Pangsa ekspor ke pasar ASEAN pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 27,76%, diikuti oleh ekspor ke Amerika Serikat dengan pangsa sebesar 16,36%. Adapun ekspor ke pasar Eropa, Jepang dan Tiongkok masing-masing memiliki pangsa sebesar 9,10%, 7,20%, dan 5,50%.

Penurunan kinerja ekspor Jawa Barat terjadi ke beberapa negara tujuan utama. Ekspor ke Amerika Serikat masih mencatatkan pertumbuhan positif namun termoderasi, menjadi sebesar 0,23% (yoy) dibandingkan 4,28% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Ekspor ke Tiongkok, kawasan ASEAN, dan Jepang juga melambat, masing-masing tumbuh sebesar 0,76% (yoy), -2,69% (yoy), dan -9,82% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, kinerja ekspor ke kawasan Eropa tumbuh positif 5,45% (yoy) dari 0,96% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



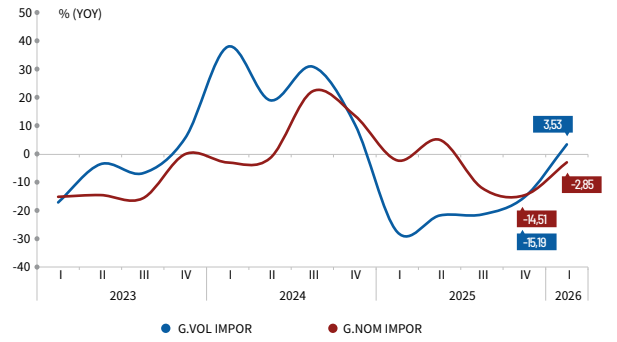
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor Jawa Barat ke Negara Tujuan Utama



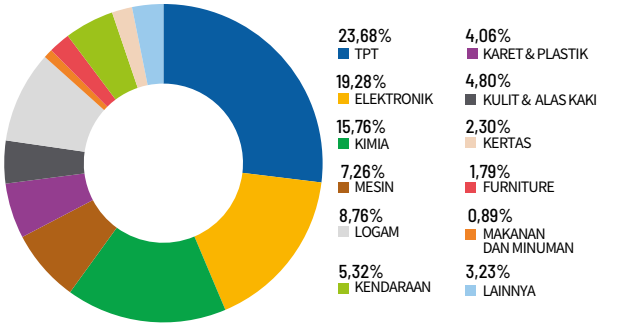
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.17 *Likert Scale* Hasil Liaison – Penjualan Ekspor



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Impor Jawa Barat



Sumber: Bea Cukai, diolah

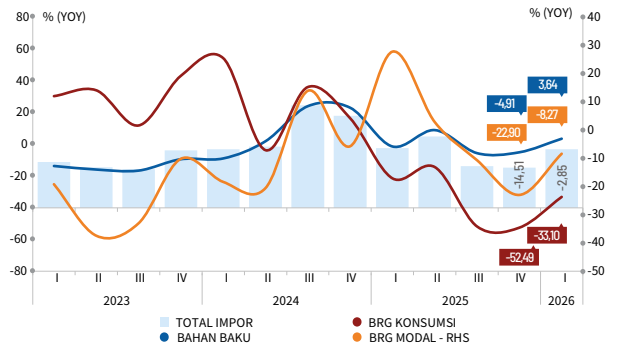
Grafik 1.20 Pangsa Impor Jawa Barat Berdasarkan Komoditas

Pelemahan kinerja ekspor tersebut juga terkonfirmasi dari nilai likert scale ekspor. Berdasarkan hasil Liaison, nilai likert scale ekspor tumbuh lebih rendah pada triwulan I 2026, yaitu sebesar -0,25 dari sebelumnya sebesar 0,15. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya permintaan global akibat perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga dan inflasi, serta dampak kebijakan tarif perdagangan global. Di sisi lain, meningkatnya persaingan dari negara kompetitor, kendala kapasitas produksi, tingginya biaya sertifikasi, dan hambatan perizinan turut membatasi peningkatan ekspor.

Impor Luar Negeri

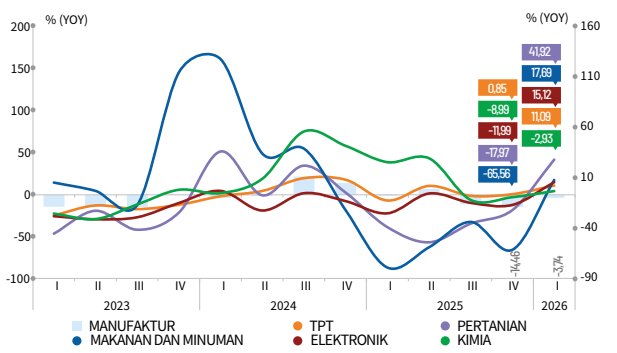
Kinerja impor Jawa Barat (impor luar negeri dan impor antar daerah) pada triwulan I 2026 juga menurun. Penurunan kinerja impor tersebut lebih banyak dipengaruhi impor antar daerah, sementara impor luar negeri mencatat perbaikan meskipun masih terkontraksi. Berdasarkan data Bea Cukai, volume impor luar negeri tercatat sebesar 514,87 ribu ton atau tumbuh 3,53% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2025 yang terkontraksi 15,19% (yoy). Sementara itu, di sisi nominal, impor luar negeri Jawa Barat tercatat sebesar USD2,43 miliar atau terkontraksi sebesar 2,85% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,51% (yoy). perkembangan impor luar negeri tersebut sejalan dengan aktivitas produksi dan meningkatnya permintaan domestik seiring HBKN Ramadan dan Idulfitri.

Berdasarkan kelompok barang, impor luar negeri Jawa Barat masih didominasi oleh impor bahan baku. Pangsa impor bahan baku sebesar 79,50%, diikuti barang modal 10,91%, dan barang konsumsi 9,59%. Kinerja impor bahan baku pada triwulan I 2026 tumbuh 3,64% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi sebesar 4,91% (yoy). Kinerja impor barang modal juga tumbuh lebih baik sebesar 8,27% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -22,90% (yoy). Lebih lanjut, kinerja impor konsumsi masih mengalami kontraksi 33,10% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 52,49% (yoy). Kinerja impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi yang masih mengalami kontraksi namun menunjukkan perbaikan mencerminkan mulai pulihnya aktivitas produksi di Jawa Barat, meskipun masih berada dalam fase penyesuaian di tengah tingginya



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Impor di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Barang



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Impor Jawa Barat Berdasarkan Komoditas

ketidakpastian global. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap pada aktivitas ekonomi, meskipun belum sepenuhnya kembali ke level ekspansi yang kuat.

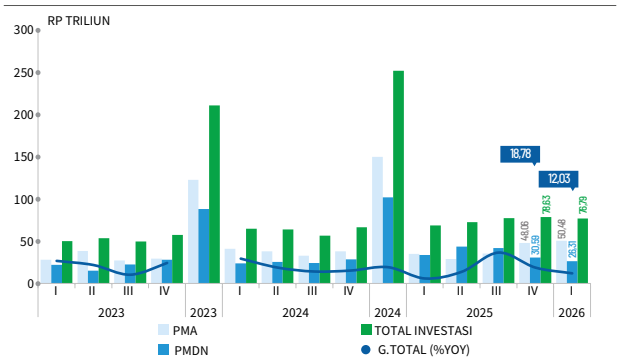
Sejalan dengan ekspor, impor luar negeri Jawa Barat pada triwulan I 2026 juga didominasi oleh LU Industri Pengolahan. Kontribusi impor LU Industri Pengolahan tercatat sebesar 96,93%. Lebih lanjut, struktur impor industri pengolahan Jawa Barat didominasi oleh sub-sektor kelompok TPT sebesar 23,68%, diikuti Elektronik sebesar 19,28%, dan Kimia sebesar 15,76%.

Perkembangan impor luar negeri Jawa Barat dipengaruhi perbaikan kinerja pada sub sektor utama. Kinerja impor pada kelompok TPT mencatatkan pertumbuhan positif 11,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 0,85% (yoy). Impor elektronik juga mengalami kenaikan sebesar 15,12% (yoy) dari sebelumnya -11,99% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, impor kimia tercatat -2,93% (yoy), lebih baik dari periode sebelumnya sebesar -8,99% (yoy).

Berdasarkan negara asal, kinerja impor luar negeri Jawa Barat didukung peningkatan impor dari Tiongkok. Pangsa impor luar negeri Jawa Barat pada periode laporan masih didominasi oleh Tiongkok (42,26%), diikuti Korea Selatan (12,36%), kawasan ASEAN (12,12%), dan Jepang (11,77%). Pada triwulan I 2026, impor dari Tiongkok tumbuh 17,64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,58% (yoy). Impor dari kawasan Eropa juga tumbuh 22,45% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi 36,96% (yoy). Adapun impor dari Korea Selatan, kawasan ASEAN, dan Jepang tercatat masih terkontraksi namun membaik masing-masing -18,28% (yoy), -7,91% (yoy) dan -33,24% (yoy) dari sebelumnya -24,59% (yoy), -13,83% (yoy), dan -45,22% (yoy).

1.1.4 Investasi

Kinerja investasi Jawa Barat yang tecermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih tetap kuat. Investasi atau PMTB tumbuh sebesar 4,57% (yoy) pada triwulan I 2026, termoderasi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar

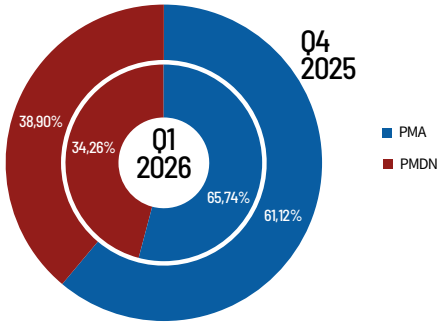


Sumber: DPMPTSP Jawa Barat, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Triwulanan di Jawa Barat

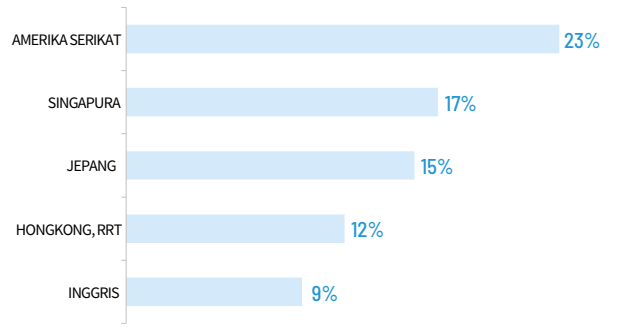
5,96% (yoy). Kinerja PMTB didukung capaian investasi penanaman modal baik dari asing maupun dalam negeri (PMA dan PMDN) yang tinggi pada periode laporan. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa total realisasi investasi penanaman modal di Jawa Barat pada triwulan I 2026 secara nominal adalah sebesar Rp76,79 triliun atau tumbuh 12,03% (yoy). Secara rinci, realisasi investasi PMA Jawa Barat sebesar Rp50,48 triliun dengan pangsa sebesar 65,74%, sementara realisasi PMDN tercatat sebesar Rp26,31 triliun dengan pangsa 34,26%. Angka realisasi PMA pada triwulan I 2026 meningkat sebesar 45,25% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 27,14% (yoy). Di sisi lain, realisasi PMDN terkontraksi 22,14% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,72% (yoy). Realisasi investasi penanaman modal ini diiringi dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 114.838 orang dan jumlah proyek sebanyak 91.082 proyek.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), realisasi PMA mayoritas disalurkan ke LU Industri Pengolahan dan LU Informasi dan Komunikasi. Nilai investasi pada LU Industri Pengolahan tercatat sebesar Rp22,38 triliun,



Sumber: DPMPTSP Jawa Barat, diolah

Grafik 1.23 Proporsi Realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat

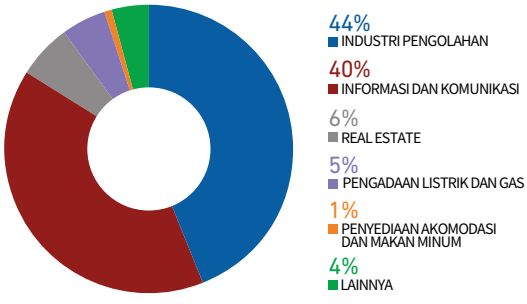


Sumber: DPMPTSP Jawa Barat, diolah

Grafik 1.24 Negara Asal PMA di Jawa Barat

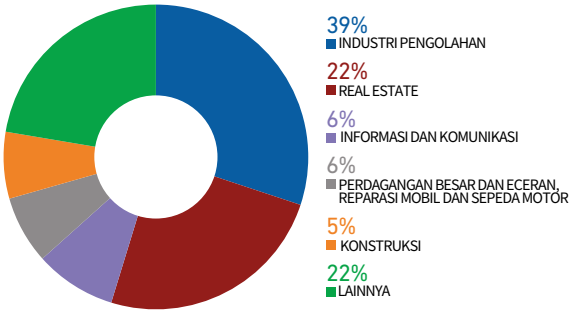
sementara pada LU Informasi dan Komunikasi sebesar Rp20,09 triliun. Realisasi investasi dari kedua lapangan usaha tersebut mencapai 84% dari total realisasi investasi PMA pada periode laporan. Berdasarkan negara asal investor, kontribusi terbesar investasi PMA Jawa Barat pada triwulan I 2026 berasal dari Amerika Serikat, yaitu sebesar Rp11,62 triliun dengan pangsa mencapai 23,01%, antara lain berupa investasi di sektor digital (data center). Realisasi investasi PMA terbesar lainnya berasal dari Singapura dan Jepang dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp8,37 triliun (pangsa 16,57%) dan Rp7,73 triliun (pangsa 15,31%). Realisasi PMA yang cukup besar salah satunya didorong oleh posisi strategis Jawa Barat dalam rantai pasok manufaktur global. Selain itu, masuknya investasi pada sektor Informasi dan Komunikasi mencerminkan berlanjutnya transformasi digital dan peningkatan kebutuhan infrastruktur digital di tengah akselerasi ekonomi berbasis teknologi.

Sejalan dengan PMA, realisasi PMDN juga sebagian besar tersalurkan ke LU Industri Pengolahan. Realisasi investasi PMDN pada LU Industri Pengolahan mencapai Rp10,26 triliun, yang kemudian diikuti oleh LU



Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.25 Alokasi Realisasi PMA di Jawa Barat



Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.26 Alokasi Realisasi PMDN di Jawa Barat

Real Estate dengan nilai investasi sebesar Rp5,78 triliun. Capaian realisasi investasi dari kedua LU tersebut tercatat lebih dari 60% dari total PMDN pada peridoe laporan.

Secara spasial, Kabupaten Bekasi mencatatkan realisasi investasi penanaman modal tertinggi, baik dari sisi nilai, jumlah penyerapan tenaga kerja maupun jumlah proyek. Realisasi investasi pada triwulan I 2026 tertinggi di Kabupaten Bekasi, yaitu senilai Rp31,70 triliun, diikuti Kabupaten Karawang dengan nilai investasi Rp11,38 triliun, serta Kab Bogor dengan nilai investasi Rp7,14 triliun. Dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya, Kabupaten Bekasi mencatat jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 21.856 orang, diikuti Kabupaten Bogor sebanyak 13.048 orang, dan Kota Bekasi sebanyak 9.051 orang. Sedangkan dari sisi jumlah proyek, Kabupaten Bekasi mencatatkan realisasi jumlah proyek terbanyak yaitu 12.448 proyek, diikuti Kota Bandung (9.581 proyek), dan Kabupaten Bogor (7.961 proyek).

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjaring potensi investasi di Jawa Barat, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan berbagai sinergi program. Beberapa program terkait promosi investasi, antara lain *West Java Investment Challenge* (WJIC) dan *West Java Investment Summit* (WJIS) yaitu kegiatan untuk menjaring proyek-proyek unggulan dari setiap kabupaten/kota yang siap dipromosikan kepada investor baik dari dalam maupun luar negeri, investment roadshow baik di dalam negeri maupun luar negeri, West Java Pitching Day yaitu kegiatan presentasi ide gagasan bisnis dari pelaku start up kepada investor, West Java

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)

KOMODITAS	2022r)				2022	2023r)				2023	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,16	2,15	5,06	7,86	4,41	2,27	0,05	-1,89	0,29	0,11	-10,98	3,24	-3,26	18,99	1,59	31,85	4,67	5,43	2,46	10,07	4,19
Pertambangan dan Penggalian	0,19	1,06	-0,31	-2,33	-0,36	-1,18	-1,09	0,84	1,05	-0,10	-0,96	0,04	-0,62	0,41	-0,28	2,34	2,48	-1,93	-4,80	-0,50	1,22
Industri Pengolahan	8,30	7,61	6,43	5,80	7,00	6,62	5,68	4,73	2,09	4,74	3,87	2,79	5,12	2,34	3,53	0,38	3,44	3,15	4,40	2,84	3,99
Pengadaan Listrik, Gas	5,06	10,42	7,44	-0,74	5,42	-0,49	-2,09	-0,34	3,70	0,18	0,67	1,84	-2,37	-2,38	-0,60	-0,18	0,84	0,76	5,27	1,67	-1,10
Pengadaan Air	2,03	1,08	4,70	2,56	2,60	5,96	2,18	-3,29	5,73	2,62	7,50	6,32	8,35	0,22	5,48	0,03	3,79	4,57	2,29	2,64	3,42
Konstruksi	2,11	-0,48	-0,42	-2,96	-0,46	0,03	4,85	5,88	12,68	5,84	10,26	6,61	7,30	4,46	7,09	2,96	6,79	5,02	6,63	5,36	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,51	3,96	4,21	4,20	4,22	4,44	3,67	4,37	4,94	4,36	4,86	4,53	3,43	6,54	4,85	6,23	5,59	5,17	3,12	5,00	3,06
Transportasi dan Pergudangan	4,21	17,85	18,37	5,55	11,09	6,37	10,09	12,44	14,67	10,93	14,43	14,13	11,87	9,23	12,34	10,68	10,02	11,62	13,61	11,50	14,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,67	8,94	25,83	7,92	11,27	9,19	6,86	7,76	10,97	8,72	8,35	8,77	2,76	5,91	6,43	7,92	8,51	15,53	9,68	10,34	17,34
Informasi dan Komunikasi	6,15	6,13	5,33	6,76	6,09	7,36	8,17	6,31	9,57	7,86	8,96	8,75	8,24	6,94	8,20	8,61	9,83	9,31	8,76	9,13	8,70
Jasa Keuangan	1,74	-0,80	-0,73	-2,94	-0,70	0,86	2,61	4,93	6,54	3,72	5,75	7,83	4,98	-1,65	4,20	1,61	-4,12	0,66	15,69	3,27	7,97
Real Estate	4,69	1,96	3,07	7,65	4,35	6,66	7,69	5,72	4,96	6,23	6,02	7,12	8,54	4,94	6,64	5,81	7,45	8,66	10,85	8,22	9,17
Jasa Perusahaan	3,01	7,60	29,80	13,52	12,73	3,11	7,17	6,31	12,43	7,30	6,92	-3,57	-4,76	11,21	2,49	8,97	8,25	16,37	4,34	9,19	15,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,38	-6,35	6,22	-3,02	-1,79	3,31	7,52	-5,74	4,82	2,44	18,37	7,63	4,53	4,93	8,73	2,54	5,22	-0,73	8,37	4,02	4,86
Jasa Pendidikan	0,35	2,00	0,30	8,58	2,79	5,43	7,18	0,88	6,88	5,04	8,99	6,14	7,02	2,12	5,95	3,35	5,93	7,04	9,62	6,55	7,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,92	5,98	8,53	0,54	5,82	1,70	6,79	6,74	8,09	5,86	7,86	5,91	4,25	6,01	5,98	2,65	9,73	12,51	13,84	9,79	14,14
Jasa lainnya	6,78	12,58	16,65	5,43	10,07	1,15	8,39	9,86	10,86	7,58	6,67	9,06	7,43	8,40	7,93	7,40	10,35	8,76	9,05	8,94	15,53
PDRB	**5,57**	**5,62**	**6,03**	**4,61**	**5,45**	**5,01**	**5,25**	**4,58**	**5,15**	**5,00**	**4,93**	**4,95**	**4,91**	**5,02**	**4,95**	**5,00**	**5,22**	**5,19**	**5,85**	**5,32**	**5,79**

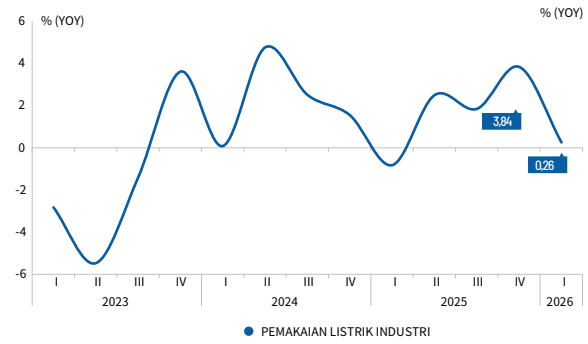
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Ket: r) Angka Revisi

Industrial Meeting (WJIM) yaitu kegiatan sosialisasi dan edukasi implementasi local currency transaction (LCT) dan pentingnya peningkatan SDM untuk meningkatkan daya saing, serta UMKM Jawa Barat Go Public yaitu upaya untuk memperluas akses pembiayaan dan investasi bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dan siap berdaya siang tinggi.

Tabel 1.5 Andil Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (%)

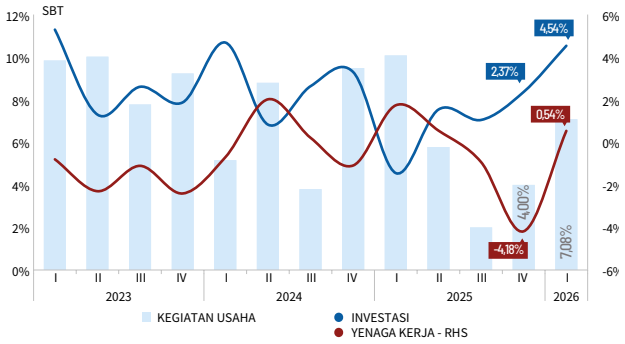
KOMODITAS	2022r)				2022	2023r)				2023	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,17	0,39	0,47	0,32	0,16	0,00	-0,14	0,02	0,01	-0,74	0,24	-0,23	1,13	0,11	1,82	0,34	0,36	0,17	0,66	0,30
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,02	0,00	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,03	0,03	-0,03	-0,06	-0,01	0,02
Industri Pengolahan	3,48	W	2,73	2,52	2,97	2,85	2,41	2,02	0,92	2,04	1,69	1,19	2,18	0,99	1,51	0,16	1,44	1,35	1,82	1,20	1,65
Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,04	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
Pengadaan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi	0,18	-0,04	-0,04	-0,25	-0,04	0,00	0,38	0,47	0,98	0,46	0,80	0,52	0,59	0,37	0,57	0,24	0,54	0,41	0,55	0,44	0,33
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,66	0,58	0,62	0,61	0,62	0,64	0,53	0,63	0,71	0,63	0,70	0,65	0,50	0,94	0,70	0,90	0,80	0,74	0,46	0,72	0,45
Transportasi dan Pergudangan	0,20	0,77	0,76	0,26	0,50	0,30	0,49	0,58	0,70	0,52	0,70	0,71	0,59	0,48	0,62	0,56	0,55	0,62	0,74	0,62	0,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,23	0,58	0,21	0,29	0,24	0,19	0,21	0,31	0,24	0,23	0,24	0,08	0,17	0,18	0,23	0,24	0,42	0,29	0,29	0,51
Informasi dan Komunikasi	0,37	0,37	0,33	0,41	0,37	0,45	0,49	0,39	0,59	0,48	0,56	0,54	0,52	0,45	0,52	0,56	0,63	0,60	0,58	0,59	0,58
Jasa Keuangan	0,05	-0,02	-0,02	-0,07	-0,02	0,02	0,06	0,12	0,15	0,09	0,14	0,19	0,12	-0,04	0,10	0,04	-0,10	0,02	0,35	0,08	0,19
Real Estate	0,07	0,03	0,05	0,11	0,06	0,10	0,11	0,08	0,07	0,09	0,09	0,10	0,12	0,07	0,10	0,09	0,11	0,13	0,16	0,12	0,14
Jasa Perusahaan	0,01	0,03	0,11	0,05	0,05	0,01	0,03	0,03	0,05	0,03	0,03	-0,02	-0,02	0,05	0,01	0,04	0,03	0,07	0,02	0,04	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,06	-0,11	0,10	-0,06	-0,03	0,05	0,12	-0,09	0,08	0,04	0,28	0,12	0,07	0,08	0,14	0,04	0,09	-0,01	0,14	0,07	0,08
Jasa Pendidikan	0,01	0,06	0,01	0,25	0,08	0,15	0,20	0,03	0,21	0,15	0,25	0,18	0,21	0,06	0,17	0,10	0,17	0,21	0,29	0,19	0,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,05	0,07	0,00	0,05	0,01	0,06	0,06	0,07	0,05	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05	0,02	0,08	0,11	0,12	0,08	0,12
Jasa lainnya	0,15	0,27	0,32	0,12	0,22	0,03	0,19	0,21	0,25	0,17	0,15	0,21	0,17	0,20	0,18	0,17	0,25	0,20	0,22	0,21	0,35
PDRB	**5,57**	**2,45**	**6,03**	**4,61**	**5,45**	**5,01**	**5,25**	**4,58**	**5,15**	**5,00**	**4,93**	**4,95**	**4,91**	**5,02**	**4,95**	**5,00**	**5,22**	**5,19**	**5,85**	**5,32**	**5,79**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Ket: r) Angka Revisi



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.27 Kinerja Utilisasi Listrik LU Industri Jawa Barat



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.29 Survei Kegiatan Dunia Usaha: SBT Industri Pengolahan

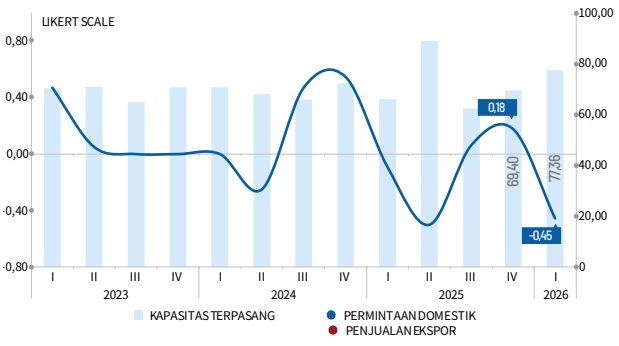
1.2 SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 ditopang beberapa sektor terkait dengan peningkatan permintaan domestik pada momentum HBKN. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh positif sejalan dengan permintaan domestik yang meningkat. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat yang didukung oleh momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri turut mendorong peningkatan beberapa lapangan usaha seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh positif.

Berdasarkan struktur lapangan usaha, LU Industri Pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian Jawa Barat. Pangsa LU Industri Pengolahan mencapai 39,60% pada triwulan I 2026, yang diikuti kemudian oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran yang memiliki kontribusi sebesar 14,21%, serta LU Kostruksi sebesar 8,14% dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Pada saat yang sama, LU Pertanian terus menguat dengan pangsa mencapai 9,22%, didorong oleh produktivitas pertanian yang meningkat seiring adanya panen raya. Selain itu, LU Informasi dan Komunikasi turut mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 3,89% disebabkan percepatan digitalisasi dan masuknya investasi pusat data (*data center*) di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan andil terhadap PDRB triwulan I 2026, LU Industri Pengolahan memberikan andil terbesar yakni 1,65%, diikuti oleh LU Transportasi dan Pergudangan dengan andil 0,81%, serta LU Informasi dan Komunikasi sebesar 0,58% (yoy).

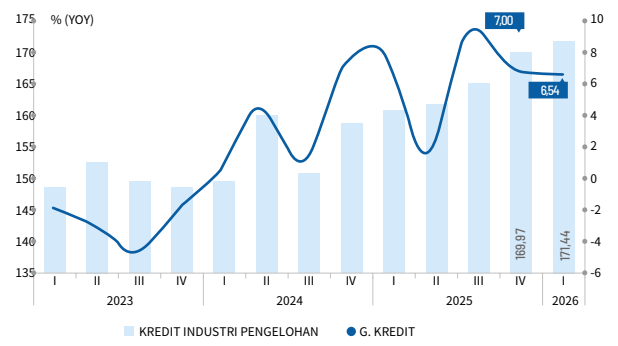
1.2.1 Industri Pengolahan

Lapangan usaha Industri Pengolahan sebagai kontributor utama perekonomian Jawa Barat tetap terjaga kinerjanya meskipun mengalami moderasi sejalan dengan kinerja perdagangan luar negeri. LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,99% (yoy) pada triwulan I 2026, termoderasi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 4,40% (yoy). Pertumbuhan yang termoderasi salah satunya disebabkan oleh normalisasi aktivitas produksi. Beberapa indikator mencerminkan adanya indikasi perlambatan, antara lain dari data listrik



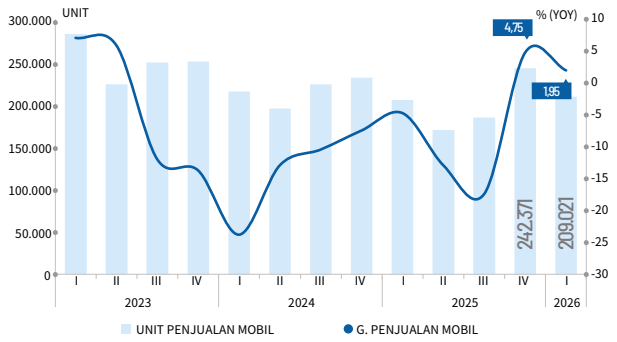
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.28 Kinerja *Likert Scale* – Hasil Liaison Kapasitas Terpasang dan Penjualan Ekspor Industri Manufaktur



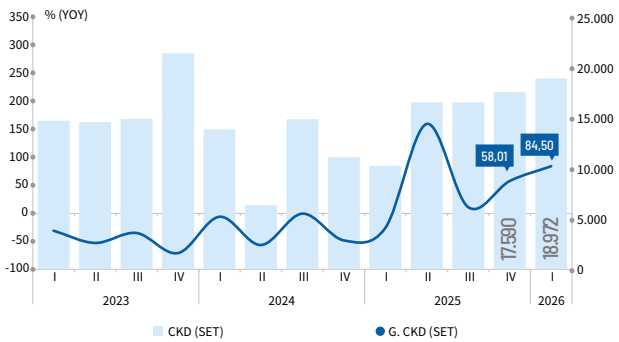
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.30 Kinerja Penyaluran Kredit LU industri



Sumber: Gaikindo

Grafik 1.31 Perkembangan Kinerja Penjualan Mobil



Sumber: Gaikindo

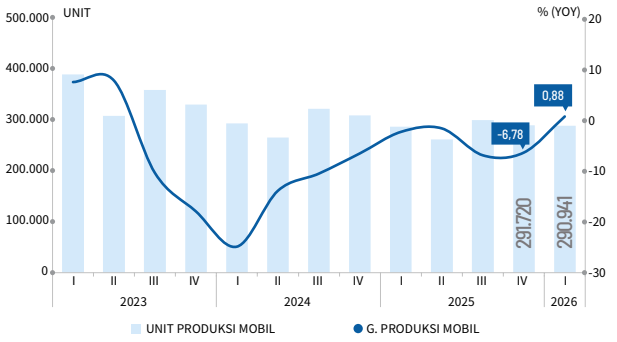
Grafik 1.33 Perkembangan Kinerja Produksi Mobil

industri yang pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 0,26% (yoy,) melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 3,84% (yoy). Hal ini menunjukkan adanya normalisasi aktivitas produksi dari triwulan sebelumnya yang sempat tumbuh tinggi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri. Selanjutnya, dari hasil liaison yang tecermin pada likert scale kapasitas terpasang dan penjualan ekspor industri manufaktur tercatat mengalami kontraksi 0,45%, menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,18%. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan permintaan ekspor pada triwulan berjalan.

Tetap kuatnya kinerja Industri Pengolahan juga tecermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha Industri Pengolahan di Jawa Barat masih menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2026, menjadi 7,08% dari periode sebelumnya sebesar 4,00%. Perkembangan tersebut lebih didukung adanya kenaikan pada investasi, sementara komponen tenaga kerja termoderasi. Di sisi lain, penyaluran kredit terhadap LU industri pengolahan tercatat melambat menjadi 6,54% (yoy) pada triwulan I 2026, dari triwulan sebelumnya sebesar 7,00% (yoy). Moderasi kinerja kredit menjadi indikator bahwa para pelaku industri cenderung menggunakan sumber pendanaan internal (internal *cash flow*) atau pendanaan lainnya, seperti laba ditahan untuk membiayai operasional dan ekspansi bisnis. Hal tersebut mengindikasikan sikap selektif dan prinsip kehati-hatian pelaku usaha.

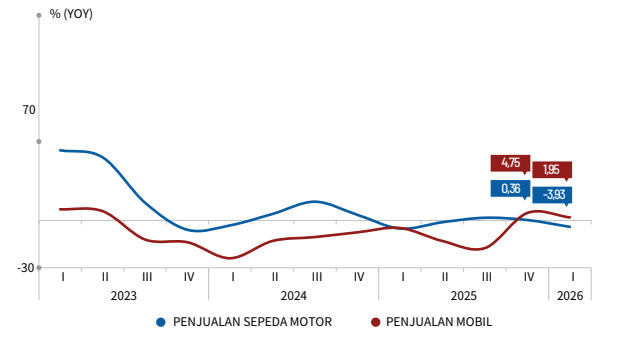
A. Industri Alat Angkut

Kinerja sub-lapangan usaha industri otomotif dan alat angkut tetap optimis. Kinerja sub-LU otomotif di Jawa Barat masih tetap tumbuh positif meskipun melambat. Dari sisi *demand,* kinerja penjualan mobil tumbuh 1,95% (yoy) pada triwulan I 2026, melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,75% (yoy). Dari sisi *supply*, kinerja produksi mobil mencerminkan pertumbuhan positif setelah dua periode sebelumnya terkontraksi, dari -6,78% (yoy) pada triwulan III 2025 dan -6,25% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi tumbuh positif 0,88%(yoy) pada triwulan I 2026.



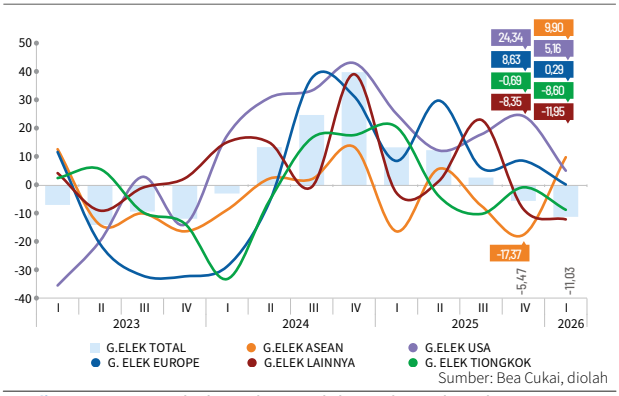
Sumber: Gaikindo

Grafik 1.32 Perkembangan Kinerja Ekspor-Impor Mobil



Sumber: AISI, diolah

Grafik 1.34 Perkembangan Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.35 Pertumbuhan Ekspor Elektronik Berdasarkan Negara Tujuan

Sejalan dengan pertumbuhan produksi mobil, kinerja ekspor mobil khususnya *Completely Knock Down* (CKD) tercatat tumbuh signifikan. Berdasarkan data Gaikindo diketahui bahwa ekspor unit CKD mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 84,01% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 58,01% (yoy).

Di sisi lain, industri sepeda motor Indonesia tercatat sedikit melambat baik dari sisi penjualan domestik maupun ekspor. Penjualan domestik sepeda motor pada triwulan I 2026 menunjukkan pelemahan dengan terkontraksi sebesar 3,93% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 0,36% (yoy). Adapun, penjualan ekspor sepeda motor tumbuh positif, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,87% (yoy), dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi 23,81% (yoy).

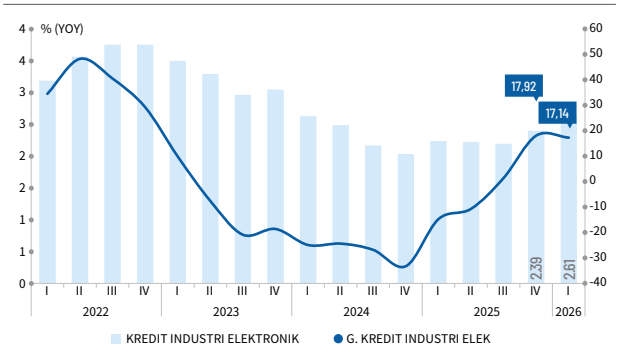
B. Industri Elektronik

Perkembangan Sub-Lapangan Usaha Industri Elektronik pada triwulan laporan menunjukkan adanya tekanan. Kinerja ekspor elektronik pada triwulan I 2026 mencatatkan kontraksi sebesar 11,03% (yoy). Penurunan ini terpantau lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 5,37% (yoy). Ditengah pelemahan ekspor elektronik secara keseluruhan, kinerja ekspor elektronik ke ASEAN kembali tumbuh pada triwulan I 2026, yaitu sebesar 5,16% (yoy), membaik signifikan dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 17,37% (yoy). Di sisi lain, ekspor ke pasar Amerika Serikat masih mampu tumbuh positif sebesar 5,16% (yoy), meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang sempat tumbuh tinggi di angka 24,34% (yoy). Sebaliknya, ekspor elektronik ke Eropa dan Tiongkok terus mengalami tekanan. Ekspor ke Eropa terkontraksi 0,29% (yoy) dari sebelumnya yang terkontraksi 8,63% (yoy), sementara ekspor ke Tiongkok terkontraksi sebesar 8,60% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,69% (yoy). Pelemahan ekspor elektronik secara agregat terutama disebabkan oleh terjadinya disrupsi komponen kelangkaan chip memori secara global, perlambatan ekonomi akibat konflik geopolitik, dan perang tarif Tiongkok dengan AS.

Sejalan dengan pelemahan kinerja ekspor, penyaluran kredit ke Sub-LU Industri Elektronik juga mengalami perlambatan. Penyaluran kredit ke industri elektronik tercatat tumbuh positif sebesar 17,14% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dibanding pertumbuhan sebesar 17,92% (yoy) pada triwulan IV 2025.

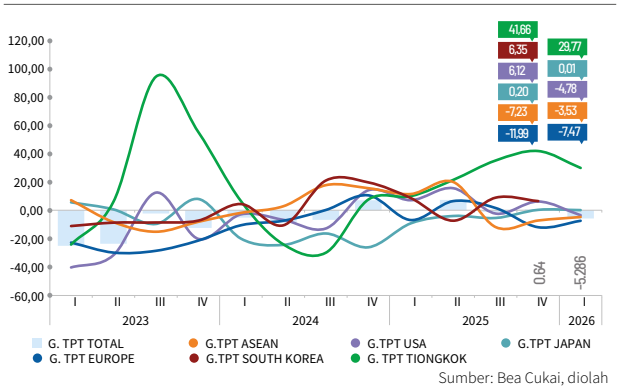
C. Industri TPT

Kinerja Sub-Lapangan Usaha Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada triwulan laporan juga mengalami pelemahan. Ekspor TPT pada triwulan



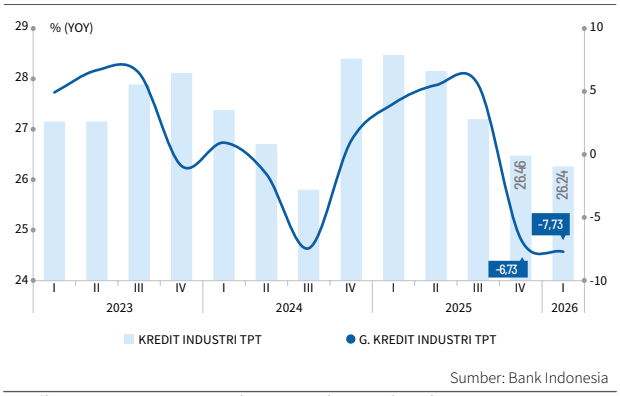
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.36 Kinerja penyaluran Kredit untuk Industri Elektronik

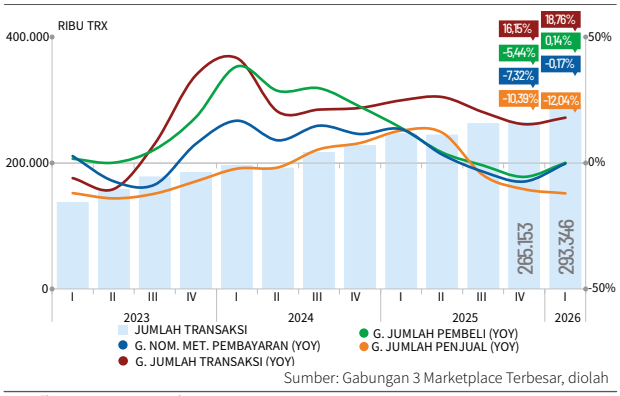


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.37 Pertumbuhan Ekspor TPT Berdasarkan Negara Tujuan



Grafik 1.38 Kinerja penyaluran Kredit untuk Industri TPT



Grafik 1.40 Transaksi *E-Commerce*

I 2026 terkontraksi sebesar 5,86% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 0,64% (yoy). Perlambatan kinerja ini utamanya dipicu oleh merosotnya ekspor ke Amerika Serikat sebagai pasar utama (dengan pangsa 41,31%), yang tercatat terkontraksi 3,53% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya sempat tumbuh 6,12% (yoy). Selain itu, kinerja ekspor juga tertekan oleh membengkaknya beban biaya energi dan logistik sebagai dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Selat Hormuz yang mengganggu jalur distribusi global.

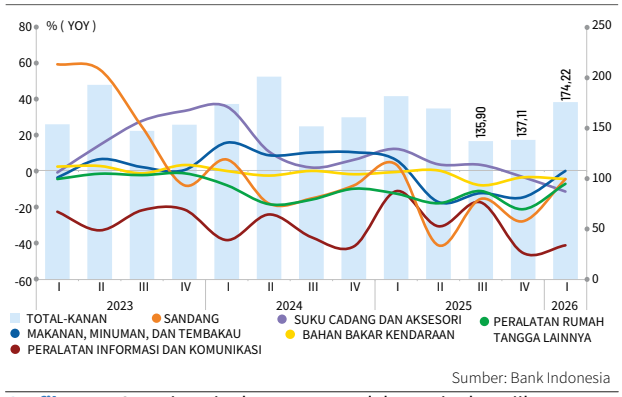
Pelemahan kinerja TPT juga tercermin dari data penyaluran kredit perbankan yang terkontraksi lebih dalam. Penyaluran kredit perbankan ke industri TPT terkontraksi 7,73% (yoy) pada triwulan laporan, lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi sebesar 6,73% (yoy).

1.2.2 Perdagangan Besar dan Eceran

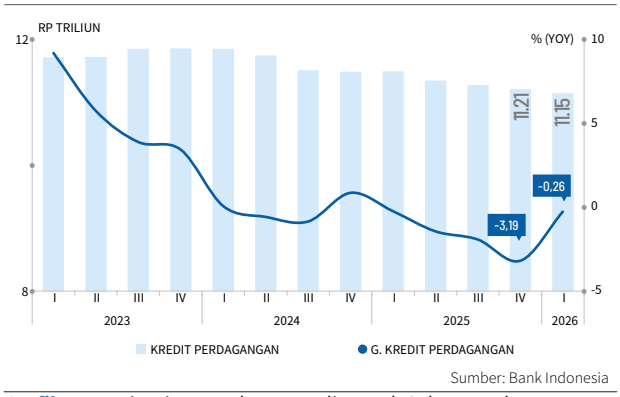
Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencatatkan kinerja yang relatif stabil. LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh positif sebesar 3,06% (yoy) pada triwulan laporan, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,12% (yoy). Kinerja perdagangan tercatat tetap kuat seiring dengan permintaan domestik yang masih terjaga didukung tingginya aktivitas masyarakat pada momentum HBKN Ramadhan dan Idulfitri.

Kinerja sektor perdagangan yang masih tumbuh positif sejalan dengan indeks penjualan riil yang menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) pada triwulan I 2026, indeks penjualan riil (IPR) tercatat sebesar 174,22, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 137,11. Selain itu, peningkatan kinerja sektor perdagangan terkonfirmasi dari transaksi *e-commerce* yang tetap tumbuh pada triwulan I 2026. Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 *marketplace* terbesar di Indonesia, pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 18,76% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,15% (yoy).

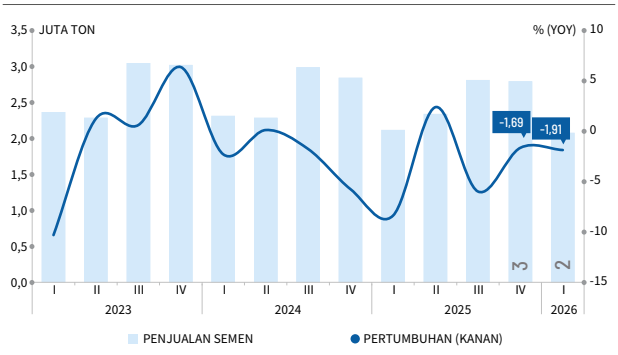
Dari sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit ke sektor perdagangan juga menunjukkan



Grafik 1.39 Survei Penjualan Eceran: Indeks Penjualan Riil



Grafik 1.41 Kinerja penyaluran Kredit untuk Sektor Perdagangan



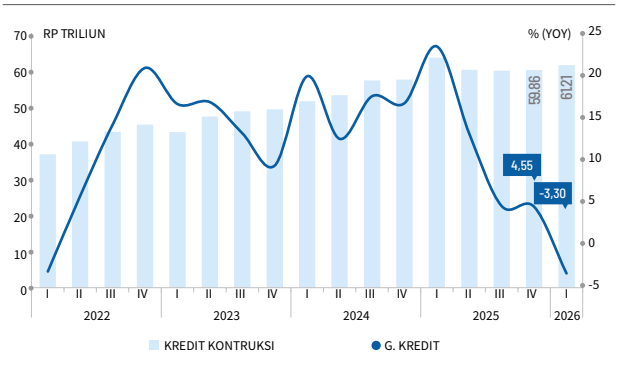
Sumber: ASI

Grafik 1.42 Penjualan Semen Jawa Barat

perbaikan meskipun masih terkontraksi. Kredit sektor perdagangan terkontraksi sebesar 0,26% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,99% (yoy). Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian pelaku usaha dalam mengelola ekspansi bisnis di tengah dinamika harga dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Pelemahan kinerja kredit tersebut diperkirakan bersifat sementara karena pelaku usaha masih menunggu momentum yang tepat untuk memanfaatkan pembiayaan, seiring optimisme terhadap perbaikan prospek ekonomi ke depan.

1.2.3 Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami moderasi pertumbuhan. LU Konstruksi tercatat tumbuh sebesar 4,11% (yoy), termoderasi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh 6,63%(yoy). Pertumbuhan konstruksi yang mengalami perlambatan tecermin dari data penjualan semen di Jawa Barat yang masih terkontraksi, yaitu sebesar 1,91% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi penjualan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,69% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.43 Kinerja Pembiayaan LU Konstruksi

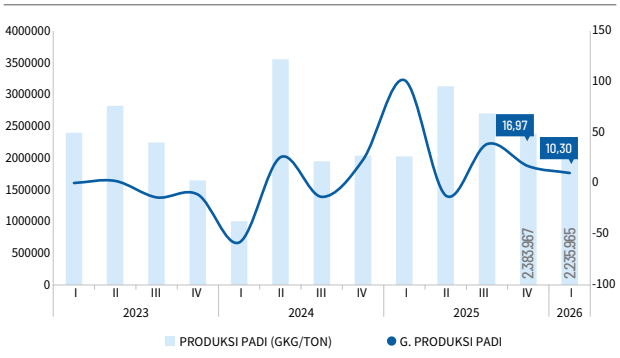
Dari sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit ke LU Konstruksi juga mengalami penurunan. Kredit ke LU Konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,30% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,55% (yoy). Perlambatan kinerja kredit ini mencerminkan proses penyesuaian seiring selesainya beberapa proyek besar yang telah memasuki tahap akhir atau tahap penyelesaian. Hal ini menyebabkan permintaan kredit baru dari para kontraktor untuk pembiayaan alat berat dan modal kerja konstruksi menurun.

Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6 *Progress* Pembangunan di Jawa Barat Triwulan I 2026

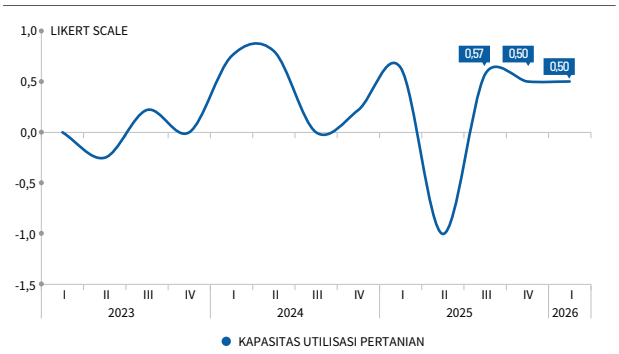
NO.	JENIS PROYEK	TARGET OPERASI	PROGRES
PROYEK STRATEGIS NASIONAL			
Jalan Tol			
1	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	2029	*On Construction* (Belum Beroperasi)
2	Jalan Tol Serpong – Cinere (Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat)	Seksi II sudah beroperasi	*On Construction* (Belum Beroperasi)
3	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan (Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat)	Fase II Seksi A ini direncanakan selesai pada April 2026	*On Construction* (Belum Beroperasi) progress telah mencapai 49,6 persen
4	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)		*On Construction* (Belum Beroperasi)
5	Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)	Seksi 3B belum berproses, Seksi 3A sudah beroperasi tahun 2021	*On Construction* (Belum Beroperasi)
6	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap (Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah)		*On Construction* (Belum Beroperasi) pembangunan tahap awal direncanakan tahun 2026 dan di tahun 2025 sudah masuk tahap lelang
7	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	2027	*On Construction* (Belum Beroperasi) progres fisik proyek Jalan Tol Akses Patimban telah mencapai 68%.
8	Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung		*On Construction* (Belum Beroperasi)
LU pelabuhan			
1	Pembangunan Pelabuhan Patimban	selesai dan beroperasi penuh pada Oktober 2026	Penyelesaian paket 5 dan 6 (Rencana selesai di tahun 2025) progress telah mencapai 83,37%

NO.	JENIS PROYEK	TARGET OPERASI	PROGRES
LU perkeretaapian			
1	Double Track Jawa Selatan (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur)		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
2	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East – West Phase I (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat)	2031	Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
LU Pengembangan Kawasan			
1	Kawasan Industri Patimban Industrial Estate		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
LU Air Bersih dan Sanitasi			
1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	2026	Tahap Persiapan Lelang
Bendungan dan Irigasi			
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
LU Energi			
1	Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
2	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai)		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
3	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Revamping dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi
LU Pendidikan dan Jasa			
1	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia		Beroperasi Sebagian/ Penyelesaian Konstruksi



Sumber: Kementrian Pertanian

Grafik 1.44 Perkembangan Produksi Padi Jawa Barat



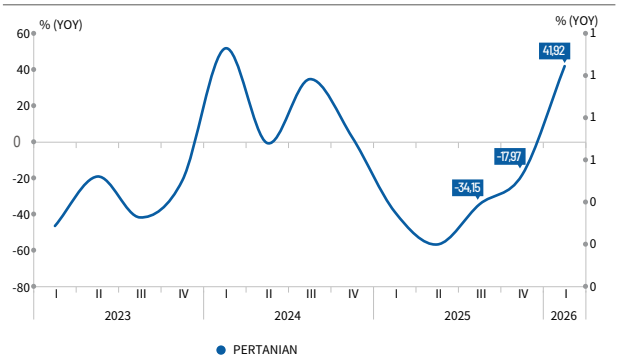
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.45 Kinerja Likert Scale – Kapasitas Utilisasi Pertanian

1.2.4 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

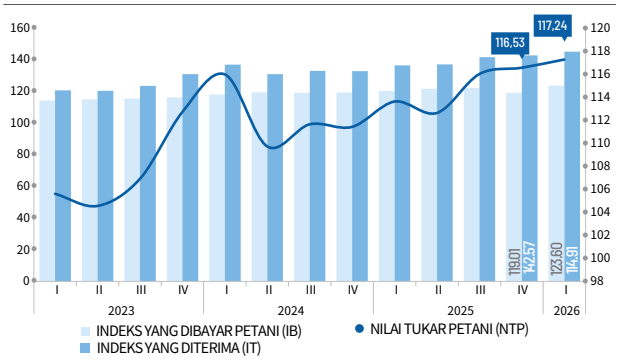
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan I 2026 mengalami akselerasi. LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh positif sebesar 4,19% (yoy), meningkat dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 2,46% (yoy). Peningkatan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan salah satunya disebabkan adanya musim panen dan peningkatan permintaan pada periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri.

Peningkatan kinerja LU Pertanian juga didukung kapasitas utilisasi pertanian yang relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya. Nilai likert scale (LS) kapasitas utilisasi pertanian pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,50, relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan produksi padi pada triwulan laporan mengalami perlambatan, menjadi sebesar 10,30%(yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,97% (yoy). Ke depan, kinerja LU pertanian diperkirakan akan terus berada pada tren positif, salah satunya ditopang oleh program MBG yang akan meningkatkan kebutuhan bahan baku produk pertanian.



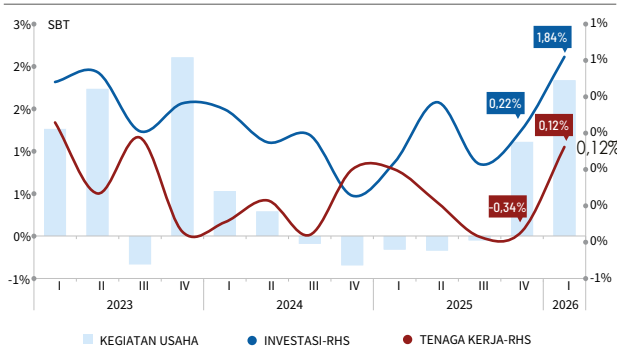
Sumber: Bea Cukai, BI diolah

Grafik 1.46 Pertumbuhan Impor Komoditas Pertanian Jawa Barat



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.47 Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat



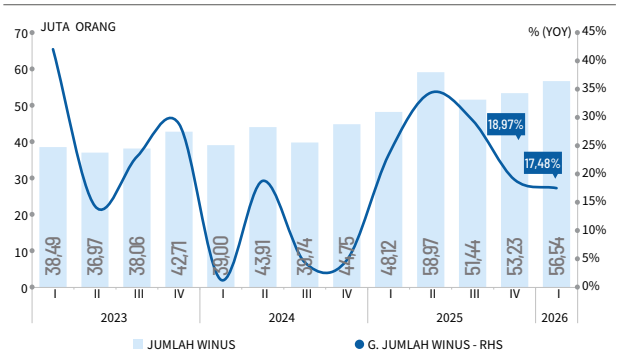
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.49 Survei Kegiatan Dunia Usaha: SBT Transportasi dan Pergudangan

Di sisi lain, impor komoditas pertanian meningkat di tengah perlambatan produksi pertanian dalam negeri. Berdasarkan data Bea Cukai, impor komoditas pertanian mengalami peningkatan pada triwulan I 2026 menjadi 41,92% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi 17,97% (yoy) pada triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi komoditas pertanian di Jawa Barat masih membutuhkan pasokan dari luar negeri. Selain itu, tingginya pertumbuhan impor tersebut juga dipengaruhi oleh baseline effect, mengingat realisasi impor pada Triwulan I 2025 berada pada level yang relatif rendah.

Kinerja LU Pertanian yang meningkat sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan petani yang dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan menjadi 117,24 dari sebelumnya sebesar 116,53 pada triwulan IV 2025. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani Jawa Barat yang semakin baik, dengan daya tukar hasil produksi yang mampu memberikan surplus bagi petani. Kondisi ini juga menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menjaga pendapatan petani di tengah dinamika harga komoditas dan biaya produksi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat kinerja lapangan usaha pertanian, Bank Indonesia Jawa Barat mengembangkan Ekosistem PANGSI (Ketahanan Pangan Terintegrasi). Program PANGSI berfokus pada pengembangan *supply chain* beras, mulai dari budidaya, penggilingan, hingga pemasaran, dengan melibatkan pondok pesantren sebagai unit usaha syariah yang memiliki peran strategis. Di samping itu, untuk mendorong peningkatan produksi hortikultura, dilakukan pula program pembinaan bagi kelompok tani pada komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, teh, dan kopi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.48 Perkembangan Kedatangan Wisatawan Nusantara

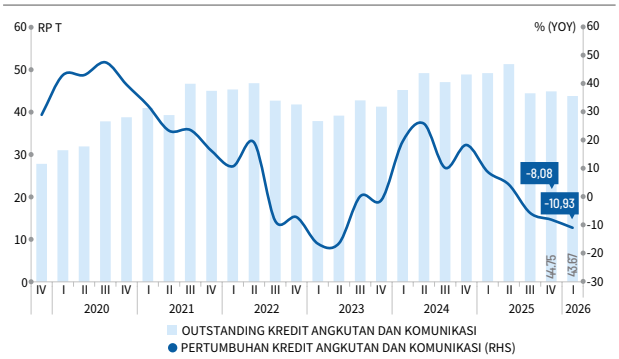
1.2.5 Transportasi dan Pergudangan

LU Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh sebesar 14,58% (yoy), meningkat dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 13,61% (yoy). Kinerja positif LU Transportasi dan Pergudangan ini didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat yang meningkat pada periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri.

Perkembangan positif LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) pada triwulan I 2026 ditopang kunjungan wisatawan nusantara yang juga meningkat. Jumlah kedatangan wisatawan nusantara (wisnus) ke Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebanyak 56,54 juta orang atau meningkat 17,48% (yoy), lebih tinggi dibanding

triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 53,23 juta orang. Tingginya pergerakan wisnus didorong oleh momentum libur panjang pada saat libur lebaran Idulfitri. Sejalan dengan perkembangan wisnus, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Transgud di Jawa Barat dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) juga meningkat menjadi 1,84%.

Di sisi lain, penyaluran kredit ke LU Transportasi dan Pergudangan masih terkontraksi. Kredit ke LU Transgud mengalami kontraksi sebesar 10,93% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,08% (yoy). Kontraksi penyaluran kredit tersebut mengindikasikan bahwa meskipun mobilitas masyarakat tetap terjaga, pelaku usaha sektor transportasi dan pergudangan cenderung melakukan efisiensi biaya operasional dan lebih mengoptimalkan aset yang sudah ada dibandingkan mengambil pinjaman bank. Selain itu, kontraksi yang mendalam ini juga mengindikasikan adanya penyesuaian strategi pendanaan, antara lain dengan menggunakan kas internal atau instrumen pasar modal lainnya guna menghindari beban bunga pinjaman di tengah dinamika ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.



Sumber: Bank Indonesia

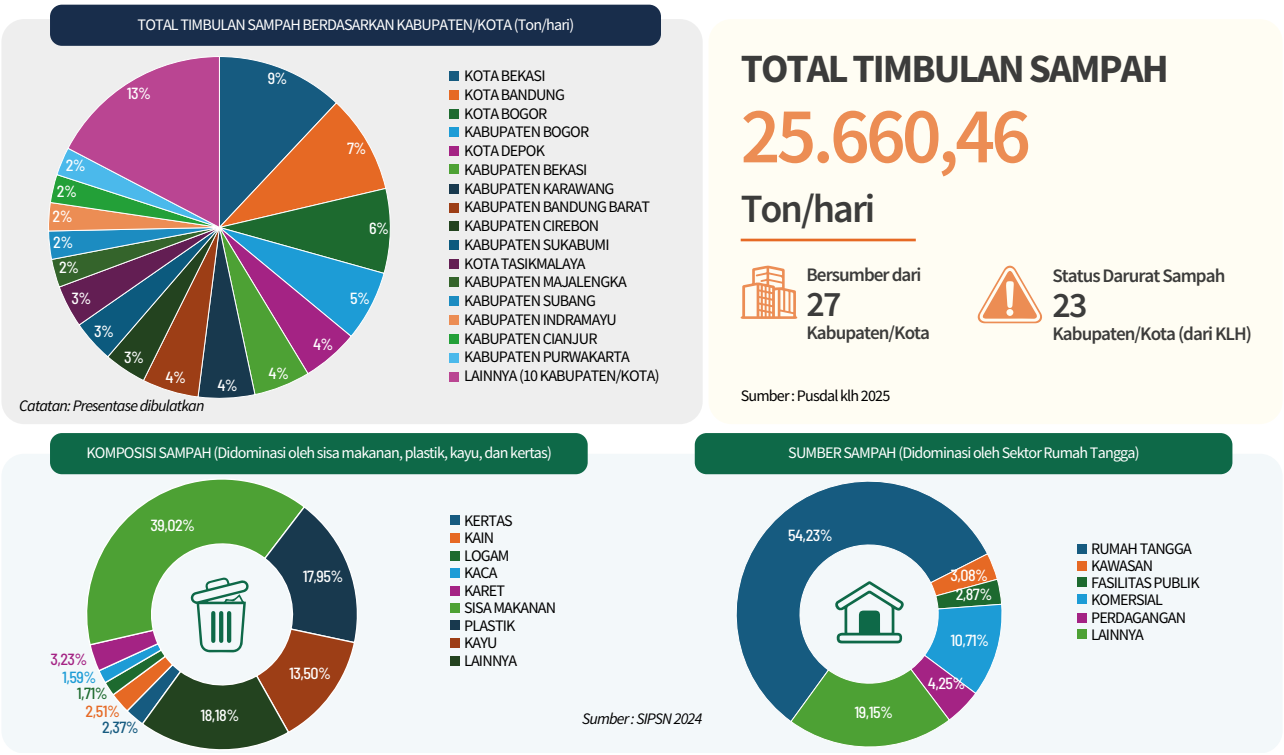
Grafik 1.50 Kinerja Kredit LU Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat



Halaman ini sengaja dikosongkan

BOKS 1

Transformasi Pengelolaan Sampah Menjadi Sumber Energi di Jawa Barat



Gambar B1.1 Total Timbulan Sampah Berdasarkan Kabupaten/Kota (ton/hari)

Krisis Persampahan dan Urgensi Penguatan Partisipasi Masyarakat

Konsumsi masyarakat selain berperan sebagai penopang utama perekonomian Jawa Barat juga mendorong munculnya permasalahn terkait persampahan. Sebagai provinsi dengan jumlah populasi hampir mencapai 51 juta jiwa pada tahun 2025 dan aktivitas masyarakat yang tinggi termasuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang terus meningkat, volume sampah di Jawa Barat meningkat signifikan setiap hari. Dengan 50% penduduk terkonsentrasi di kawasan perkotaan, volume sampah yang dihasilkan telah melampaui kapasitas manajemen konvensional. Selain itu, kapasitas pengolahan sampah belum sepenuhnya mampu mengejar laju produksi limbah baik dari rumah tangga maupun kawasan industry.

Provinsi Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan sintesis data SIPSN dan Pusat Pengendalian KLH periode 2024–2025, total timbulan sampah di Jawa Barat mencapai 25.660,46 ton per hari yang tersebar di 27 kabupaten dan kota. Sektor rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 54,23% dari total volume sampah. Dilihat dari komposisinya, timbulan tersebut didominasi oleh sisa makanan (food waste) sebesar 39,02%, diikuti oleh sampah plastik sebesar 17,95%, dan sampah kayu sebesar 13,50%. Mengingat volume sampah yang terus meningkat, sebanyak 23 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat kini telah ditetapkan dalam status darurat sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Keterbatasan fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah serta faktor pendanaan merupakan tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat. Fasilitas pengolahan yang tersedia di lapangan, mulai dari tingkat TPS (Tempat Pembuangan Sampah) hingga TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih terbatas, sehingga kinerja penanganan di lapangan menjadi tidak memadai. Selain itu, proses pengambilan kebijakan juga menghadapi tantangan akibat masih minimnya informasi dan integrasi data persampahan yang akurat. Di sisi lain, keterbatasan sumber pendanaan yang ada hingga saat ini terus menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan seluruh rantai pengelolaan sampah, baik dari sektor hulu (pembatasan dan pemilahan di sumber) hingga sektor hilir (pemrosesan akhir).

Secara umum, situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan konvensional berbasis **"Kumpul-Angkut-Buang"** sudah tidak lagi memadai, terlebih dengan mayoritas dari 33 TPA yang ada masih beroperasi menggunakan metode open dumping. Rendahnya efektivitas penanganan riil yang hanya berkisar di angka 15%, jika tidak menghitung sampah yang langsung masuk ke TPA, menegaskan perlunya pembenahan sistem yang mendasar. Oleh karena itu, peralihan menuju model tata kelola sampah yang terintegrasi dengan pemanfaatan energi menjadi langkah krusial yang perlu segera diambil demi menjaga stabilitas ekonomi regional dan memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Transformasi Pengelolaan Sampah: Diversifikasi Model Waste-to-Energy (WtE)

Transformasi menuju *Zero Waste to TPA* menuntut pergeseran paradigma radikal dari sekadar membuang sampah menjadi memproduksi energi. Jawa Barat mengadopsi strategi teknologi netral yang mendiversifikasi solusi berdasarkan karakteristik wilayah dan volume timbulan. Terdapat dua skema utama Pembangkit Listrik Berbasis Sampah **(PLTSa/PSEL),** yaitu skema PLTSa dengan pendanaan dari Danantara, dan skema PLTSa dengan pendanaan KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha). Target kapasitas sampah yang dikelola sebesar 1.000-1.500 ton per hari per fasilitas.

	SKEMA PLTSA/PSEL (PERPRES 109/2025)	SKEMA KPBU (PERPRES 35/2018 - LEGOK NANGKA)
Mekanisme Seleksi	Penugasan langsung melalui Danantara	Tender Kompetitif (Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha)
Biaya Pengelolaan	*Free Tipping Fee* bagi Pemerintah Daerah	*Tipping Fee* Rp385/kg (Provinsi 49%, Kab/Kota 51%)
Harga Jual Listrik	20 sen/KWh (ke PLN)	13 sen/KWh (ke PLN)
Tanggung Jawab Pemda	Lahan, akses jalan, air, armada, & izin	Komitmen suplai sampah sesuai kontrak
Investasi & Kapasitas	Fokus pada wilayah batch strategis (Pusat)	Estimasi Rp6 triliun; Kapasitas 40,59 MW

Untuk wilayah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari yang tidak memenuhi kriteria PLTSa termal, pemerintah Jawa Barat mendorong pemanfaatan metode *Refuse Derived Fuel* (RDF). Keberhasilan TPA Lulut Nambo di Bogor Raya yang mengembangkan RDF menjadi bukti nyata di mana sampah dikonversi menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen. Pemanfaatan RDF ini didukung sepenuhnya oleh Asosiasi Semen Indonesia yang telah menyatakan kesiapan menjadi *offtaker* melalui konversi instalasi dari batubara ke energi hijau. Strategi diversifikasi ini memastikan bahwa setiap wilayah memiliki solusi yang sesuai dengan skala ekonominya, namun tetap berorientasi pada penguatan energi.

Di samping pendekatan teknologi di sektor hilir, upaya pengurangan sampah di sektor hulu juga diperkuat secara paralel. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu:

1. Penerapan kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk mendorong tanggung jawab produsen terhadap kemasan produknya.
2. Penguatan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah langsung di tingkat rumah tangga.
3. Pelaksanaan edukasi publik serta kampanye perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Besarnya sampah yang bersumber dari rumah tangga menjadi pertimbangan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan baik melalui kampanye 3R (reduce, reuse, recycle) maupun dengan pelatihan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah.



Gambar B1.2 Implementasi tata kelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung yang berhasil mengurangi sampah ke TPA karena efektifitas dalam pengelolaan sampah mandiri menggunakan insinerator dan kedepan akan dibuat pengelolaan biogas



Gambar B1.3 Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang diproyeksikan menjadi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pemetaan Proyek Strategis PLTSa dan Progres Implementasi

Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan eksekusi di tingkat provinsi adalah kunci keberhasilan transformasi peneglolaan sampah. Pengelolaan sampah di daerah tidak berdiri sendiri, beberapa program merupakan bagian dari PSN. Selain itu, pengelolaannya juga harus mengacu pada regulasi nasional.

Berikut beberapa proyek prioritas[1] terkait pengelolaan sampah dan progress implementasinya di Jawa Barat:

1. **Legok Nangka (Metropolitan Bandung):** Menjadi tulang punggung dengan kapasitas 1.800–2.300 ton/hari. Saat ini dalam tahap *financial close* (target 6–9 bulan) dengan rencana konstruksi pada akhir 2026.
2. **Sari Mukti (Bandung Raya):** Direncanakan sebagai PLTSa masif dengan kapasitas 3.515 ton/hari untuk menangani area terdampak kebakaran TPA. Proyek ini sedang diusulkan ke KLH untuk melalui mekanisme Danantara (Perpres 109/2025).
3. **Bekasi & Bogor (Galuga/Kayu Manis):** Telah mengantongi SK Menteri LH untuk pengolahan sampah lokal (PSL) dengan keterlibatan aktif vendor dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP). Meskipun progres teknis terus berjalan, implementasi lapangan masih terhambat oleh resistensi masyarakat dan politisasi retribusi di tingkat lokal. Namun, hambatan-hambatan ini secara fundamental berakar pada krisis fiskal yang membatasi kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan kompensasi dampak lingkungan.

Tata Kelola Ekonomi dan Integrasi Ekonomi Hijau

Transformasi pengelolaan sampah merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau (*Green Economy)* di Jawa Barat. Langkah ini menjadi semakin krusial di tengah dinamika makroekonomi dan ketidakpastian harga energi global yang menuntut penguatan kemandirian energi di tingkat regional. Guna mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, strategi[2] kebijakan daerah perlu difokuskan pada:

1Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat yang disampaikan pada Focus Group Discussion 4 Mei 2026, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat

2 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat yang disampaikan pada Focus Group Discussion 4 Mei 2026, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat

- **Inovasi Finansial:** Optimalisasi BUMD menjadi keharusan. Penggunaan BUMD seperti Jasa Sarana untuk infrastruktur sampah adalah langkah strategis berisiko tinggi namun perlu, didukung oleh *Green Financing* dan dana bergulir.
- **Sinergi Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur terkait WtE harus dilihat secara integratif. Sebagai pembanding, efisiensi jalan pada 2025 diproyeksikan memberikan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 11.000 ton CO2/tahun. Sektor WtE diharapkan memberikan kontribusi pengurangan emisi yang jauh lebih signifikan dalam jangka panjang.

Untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan menghindari risiko hukum serta lingkungan akibat beban pengelolaan sampah yang tidak produktif, berikut adalah[3] prioritas langkah yang perlu diambil:

- **Kepastian Regulasi:** Menyusun kerangka hukum lintas sektor yang komprehensif guna memberikan kepastian dan daya tarik investasi bagi pengembangan PLTSa dan fasilitas RDF.
- **Pembenahan Teknis TPA:** Mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembenahan teknis operasional TPA secara bertahap melalui koordinasi intensif di tingkat provinsi, demi memenuhi standar regulasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
- **Optimalisasi Bank Sampah:** Memperkuat pembinaan dan integrasi jaringan bank sampah di seluruh wilayah sebagai bagian dari pengurangan sampah di hilir.
- **Pemilahan dari Sumber:** Mengintensifkan edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga (sektor hulu). Langkah ini krusial untuk menjaga kualitas bahan baku **(***feedstock)* fasilitas WtE, sehingga dapat menekan biaya pemrosesan residu secara keseluruhan.

Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan nasional dalam penerapan ekonomi hijau. Melalui tata kelola yang adaptif serta sinergi pendanaan yang inovatif, pengelolaan sampah dapat diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia dan lembaga lainnya, tantangan struktural persampahan ini dapat dioptimalkan menjadi peluang investasi baru yang produktif dan mendukung keberlangsungan perekonomian Jawa Barat ke depan.

3 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat yang disampaikan pada Focus Group Discussion 4 Mei 2026, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat

BAB 2

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Jawa Barat pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 3,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,63% (yoy).

Peningkatan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh normalisasi tarif listrik pasca diskon tahun sebelumnya, kenaikan harga emas perhiasan, dan kenaikan harga berbagai komoditas pangan strategis. Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong penguatan permintaan terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai. Sementara peningkatan harga sejumlah komoditas pangan dipengaruhi oleh terhambatnya hasil produksi akibat kondisi cuaca di tengah penguatan permintaan pada momentum HBKN Idulfitri.

Inflasi pada triwulan II 2026 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026, dipengaruhi dampak normalisasi permintaan dan mobilitas masyarakat pasca HBKN Idulfitri. Peningkatan harga emas perhiasan juga diperkirakan masih terbatas. Namun, risiko pendorong inflasi perlu tetap diwaspadai, khususnya yang berasal dari harga bahan bakar dan *imported inflation*.

Upaya pengendalian inflasi ke depan akan diperkuat dengan menjaga ketersediaan pasokan komoditas, meningkatkan efisiensi distribusi, dan menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas harga.

Inflasi Bulanan Jawa Barat

0,52%

Maret 2026, mtm

Inflasi Tahunan Jawa Barat

3,60%

Triwulan II 2026, yoy

Rerata 3 Tahun Jawa Barat

2,63%

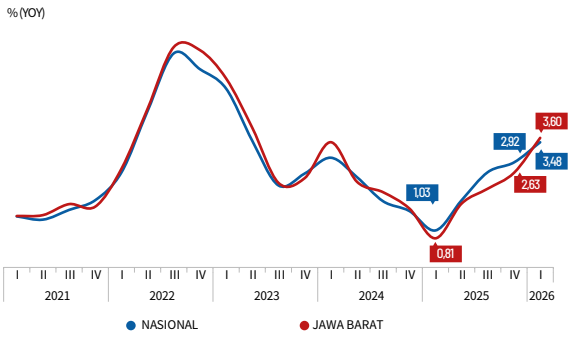
Rata-rata 3 tahun, yoy

Inflasi Tahun KalenderJawa Barat

1,24%

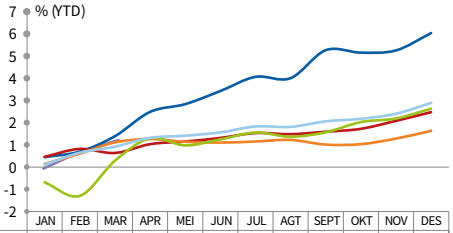
Maret 2026, ytd





Sumber: BPS, diolah. (Tahun 2019-2022 menggunakan Tahun Dasar (TD) 2018, tahun 2023-2025 menggunakan TD 2022)

Grafik 2.1 Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Barat dan Nasional



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
2022	0,45	0,70	1,40	2,49	2,84	3,43	4,07	4,01	5,27	5,26	5,26	6,04
2023	0,47	0,70	0,40	1,04	1,16	1,32	1,54	1,49	1,6	1,73	2,09	2,48
2024	0,25	0,83	0,64	1,27	1,15	1,11	1,16	1,23	1,02	1,04	1,29	1,64
2025	-0,68	-1,29	0,29	1,30	0,98	1,25	1,56	1,37	1,57	2,03	2,19	2,63
2026	-0,09	-0,72	1,29									
AVERAGE 5 TAHUN TERAKHIR	0,06	0,31	0,94	1,53	1,53	1,78	2,08	2,03	2,37	2,49	2,71	3,20

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2 Inflasi Tahun Kalender Gabungan Kota IHK Jawa Barat

Secara tahunan, inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2026 berada di atas rentang sasaran 2,5±1%, yakni sebesar 3,60% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Tekanan harga terutama bersumber dari emas perhiasan, normalisasi tarif listrik pasca diskon tahun sebelumnya, dan sejumlah komoditas pangan bergejolak yaitu daging ayam ras, beras, telur ayam ras, aneka cabai, dan wortel. Di sisi lain, tercukupinya pasokan bawang putih menahan inflasi lebih lanjut. Selain itu, pemberian insentif pemerintah melalui diskon tarif kereta api dan tarif jalan tol menahan inflasi yang lebih tinggi pada *festive season* triwulan I 2026. Lebih lanjut, sinergi TPID, operasi pasar, gerakan pangan murah, dan intervensi distribusi seperti fasilitasi distribusi pangan berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan meredam tekanan inflasi.

Inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2026 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada dalam rentang sasaran. Laju inflasi yang lebih terjaga dipengaruhi oleh tidak terdapat adanya *base effect* tarif listrik dan terbatasnya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta periode libur pada Juni 2026. Perkembangan harga emas perhiasan juga diperkirakan masih terbatas sejalan dengan pergerakan harga emas global. Risiko tekanan inflasi bersumber dari perkembangan harga bahan bakar domestik, khususnya jenis nonsubsidi termasuk dampak rambatannya kepada komoditas lain, di tengah berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global serta *imported inflation* yang dipengaruhi dinamika nilai tukar rupiah. Untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran, TPID Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota memperkuat upaya pengendalian harga di antaranya dengan meningkatkan frekuensi operasi pasar, gerakan pangan murah, dan distribusi komoditas pangan. Dari sisi moneter, bauran kebijakan Bank Indonesia yang *pro-stability* serta kenaikan BI Rate pada Mei 2026 menjadi sebesar 5,25% mendukung stabilisasi harga.

2.1 PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN I 2026

Inflasi Provinsi Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,60% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,63% (yoy), dan berada batas atas rentang sasaran 2,5±1%, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.1. Laju inflasi yang lebih tinggi didorong oleh normalisasi tarif listrik pasca diskon yang berlaku pada triwulan I 2026. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh permintaan yang lebih tinggi pada momentum HBKN Idulfitri. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan upaya untuk menjaga inflasi berada dalam sasaran inflasi melalui penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi. Perkembangan inflasi Jawa Barat pada periode laporan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional yang sebesar 3,48% (yoy).

Inflasi pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan, tarif listrik, dan sejumlah komoditas pangan bergejolak (Tabel 3.1). Daging ayam ras merupakan penyumbang inflasi utama dari kelompok pangan bergejolak, diikuti beras dan telur ayam ras. Kenaikan harga daging dan telur ayam ras dipengaruhi oleh kenaikan permintaan pada periode *festive season* Idulfitri di tengah tekanan biaya produksi. Peningkatan konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh penyaluran program pangan bergizi

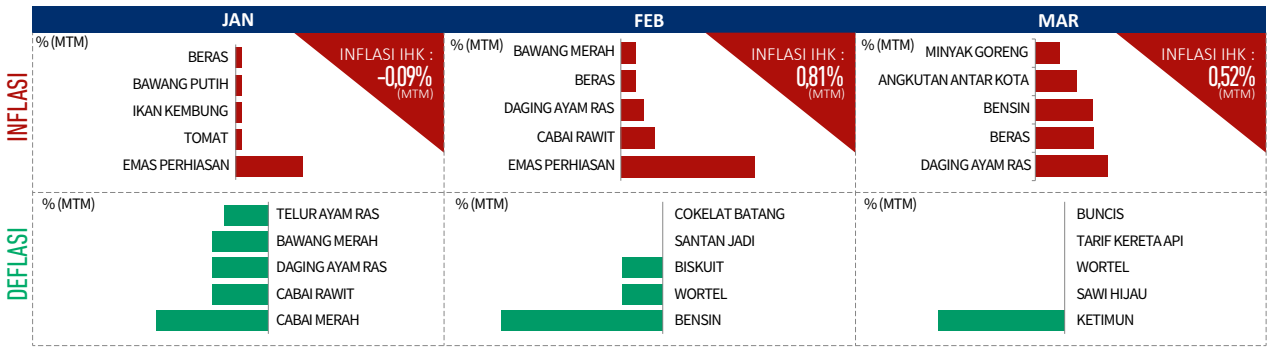
Tabel 2.1 Komoditas Penyebab Inflasi Tahunan Triwulan I 2026 (Berdasarkan Andil)

NO	KOMODITAS	FAKTOR PENDORONG
1	Emas Perhiasan	Menguatnya harga emas dunia akibat pembelian emas oleh sejumlah bank sentral di dunia serta peningkatan pembelian ritel.
2	Tarif Listrik	Normalisasi tarif listrik pasca diskon 50% yang berlaku pada triwulan I 2025.
3	Daging Ayam Ras	Peningkatan permintaan pada momentum HBKN Idulfitri di tengah kenaikan biaya produksi dan keterbatasan pasokan DOC.
4	Beras	Panen yang kurang optimal karena kondisi curah hujan yang masih tinggi di sejumlah daerah sentra.
5	Telur Ayam Ras	Peningkatan permintaan pada momentun HBKN Idulfitri di tengah kenaikan biaya produksi.

serta aktivitas musiman HBKN Idulfitri yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Di saat yang sama, sisi produksi menghadapi tekanan dari kenaikan harga jagung pipilan sebagai salah satu bahan baku pakan. Pantauan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA DI JABAR) menunjukkan rerata harga jagung pipilan pada Maret 2026 sebesar Rp13.395/kg, atau lebih tinggi 1,7% dibandingkan rerata Desember 2025. Komponen pakan sendiri menyumbang 60–65% dari total biaya budidaya ayam ras sehingga peningkatan harga pakan berdampak signifikan pada biaya produksi.

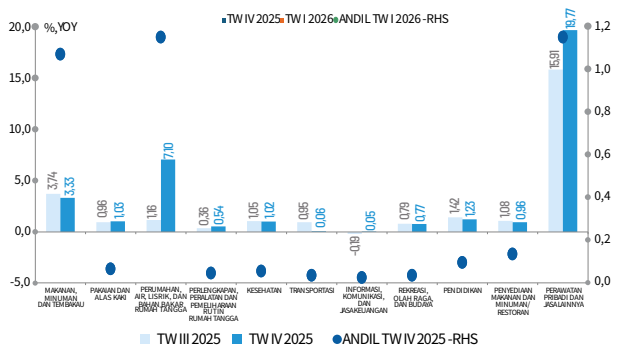
Selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi oleh peningkatan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif yang diatur pemerintah. Rerata andil peningkatan harga emas perhiasan secara tahunan sepanjang triwulan I 2026 tercatat sebesar 1,08%. Harga emas perhiasan di pasar domestik menunjukkan tren kenaikan yang tetap tinggi dan konsisten sepanjang triwulan I 2026. Peningkatan harga rata-rata emas perhiasan sekitar 67,77% (yoy) antara Januari hingga akhir Maret 2026, dengan peningkatan paling tinggi terjadi pada Januari 2026 sejalan dengan penguatan harga emas global dan peningkatan minat masyarakat sebagai salah satu aset pelindung nilai. Emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar di hampir seluruh kabupaten/kota sampel penghitung IHK Jawa Barat. Dari sisi komoditas yang diatur pemerintah, normalisasi tarif listrik menjadi penyumbang inflasi.

Dari perspektif bulanan, perkembangan harga sepanjang triwulan I 2026 mayoritas mencatatkan inflasi yang dipengaruhi oleh sejumlah komoditas pangan dan emas perhiasan. Pada Januari, terjadi deflasi yang disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan strategis seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Nataru. Deflasi lebih dalam tertahan oleh penguatan harga emas perhiasan yang mencapai 8,00% (mtm) sejalan dengan peningkatan harga emas global. Pada Februari, tekanan inflasi kembali meningkat di tengah periode Ramadan dan sejumlah HBKN, berasal dari kenaikan harga bawang merah, beras, daging ayam, dan cabai rawit. Kenaikan harga komoditas hortikultura cabai rawit dan bawang merah juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah sentra produksi yang menghambat proses panen serta distribusi. Sesuai pola musiman, inflasi bertahan tinggi pada HBKN Idulfitri yang jatuh pada bulan Maret. Tekanan inflasi pada bulan tersebut berasal dari peningkatan harga sejumlah komoditas pangan dan tarif angkutan antar kota sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, harga migas global yang mulai mengalami peningkatan juga tertransmisi pada harga bensin nonsubsidi domestik. Dalam rangka meredam gejolak inflasi pada momentum HBKN Idulfitri, Pemerintah memberikan sejumlah insentif seperti diskon tarif kereta api dan diskon tarif tol di sejumlah ruas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memperkuat pengendalian inflasi komoditas pangan



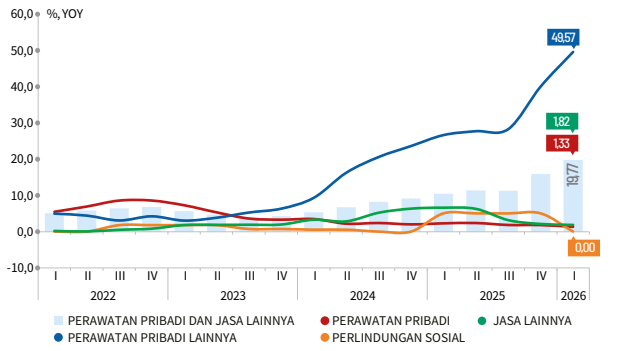
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Bulanan Sepanjang Triwulan I 2026 di Jawa Barat



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.4 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok & Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

dengan memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau, salah satunya melalui penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang lebih intensif.

Dilihat secara triwulanan, pola ini menegaskan bahwa stabilitas inflasi di Jawa Barat pada periode *festive season* dipengaruhi oleh kemampuan menjaga ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat. Namun, untuk menahan tekanan inflasi musiman, tetap diperlukan *quick wins* sebagai intervensi jangka pendek. Dengan demikian, koordinasi lintas sektor, pertanian, perdagangan, dan logistik menjadi kunci agar tekanan inflasi tetap terkendali dari waktu ke waktu.

2.1.1 Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

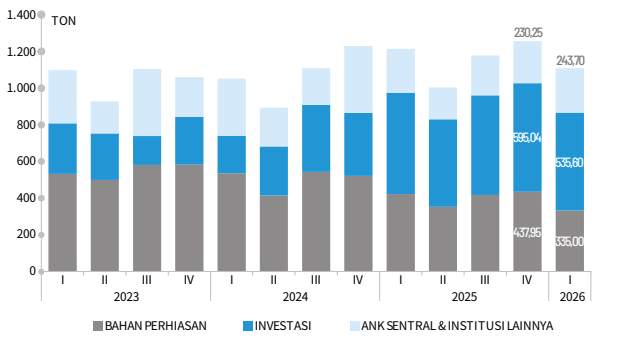
Inflasi pada triwulan I 2026 didorong oleh inflasi pada seluruh kelompok pengeluaran dengan penyumbang terbesar adalah Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 19,77% (yoy), meningkat 3,86 *percentage point* dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,91% (yoy) (Grafik 2.4). Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga mencatatkan inflasi yang tetap tinggi sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,16% (yoy). Kemudian Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatatkan inflasi 3,33% (yoy) dengan andil 1,05% (yoy).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil 1,13% dengan inflasi tahunan tertinggi. Secara tahunan, inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi pada sub-kelompok Perawatan Pribadi Lainnya, terutama emas perhiasan yang memberikan andil inflasi hingga 1,09%. Berdasakan data World Bank, harga emas pada Desember 2025 mencapai 4.309,23/toz yang kemudian meningkat menjadi USD4.855,54/toz pada Maret 2026, atau naik sekitar 12,68% dalam triwulan laporan. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, meningkatnya permintaan *safe haven*, dan meningkatnya permintaan emas oleh bank sentral. Permintaan emas global pada triwulan I 2026 lebih dipengaruhi oleh permintaan untuk tujuan investasi yang diperkirakan sebesar 535,6 ton atau turun 9,98% dari triwulan sebelumnya. Permintaan emas secara global untuk bahan perhiasan juga turun hingga 23,51% dibandingkan triwulan IV 2025. Sementara itu, permintaan emas oleh bank sentral dan institusi lainnya meningkat 5,84% yang memperkuat permintaan struktural emas global.

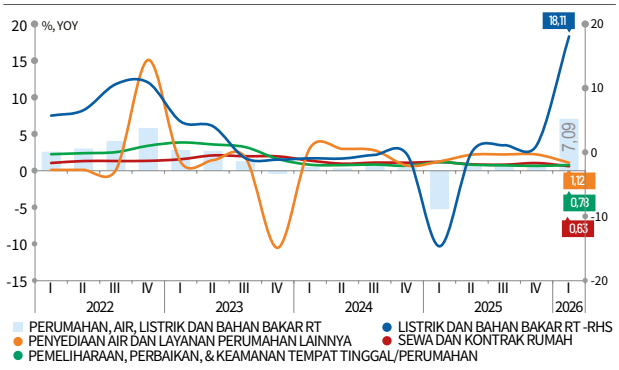
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mencatatkan andil inflasi sebesar 1,13%. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang



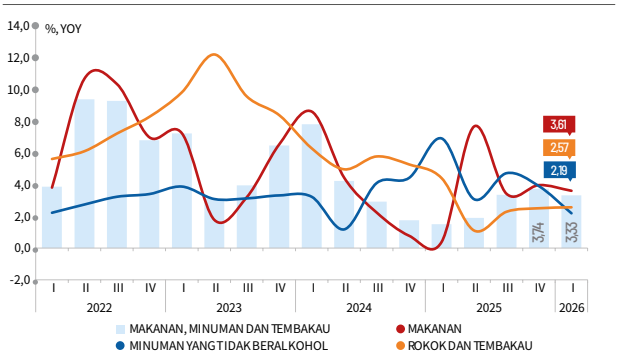
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.6 Perkembangan Permintaan Emas Berdasarkan Penggunaan



Sumber: World Gold Council

Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga



Sumber: World Gold Council

Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi Kelompok & Subkelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

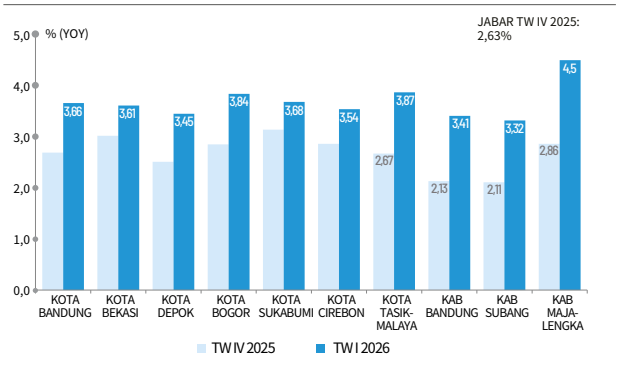
oleh komoditas tarif listrik yang menyumbang 0,99%. Kemunculan tarif listrik sebagai penyumbang inflasi disebabkan oleh dampak normalisasi diskon listrik yang diterapkan tahun lalu. Selain itu, Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) juga masih menjadi penyumbang inflasi pasca kenaikan tarif HET LPG 3 kg di wilayah Bandung Raya pada Juni 2025. Penyesuaian tehunan harga sewa properti seperti tarif sewa dan kontrak rumah juga menyumbang masing-masing 0,02% (yoy) terhadap inflasi secara umum. Penyesuaian tarif air minum PAM di sejumlah kabupaten/kota pada tahun 2025 juga mendorong inflasi kelompok dimaksud.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi penyumbang inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2026 dengan andil sebesar 1,05% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, terutama akibat masih tingginya harga pakan. Di samping itu, tekanan harga juga didorong oleh peningkatan permintaan sejalan dengan pelaksanaan program pangan bergizi serta pola musiman selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Sementara itu, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh faktor cuaca yang berdampak pada keterbatasan produksi dan tidak meratanya periode panen antarwilayah. Harga pembelian gabah di tingkat petani juga mengalami peningkatan seiring dengan naiknya biaya produksi akibat perlunya perawatan tanaman yang lebih intensif guna memitigasi risiko gagal panen. Adapun peningkatan harga SKM merupakan dampak lanjutan dari penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau pada tahun 2025, meskipun pada tahun 2026 tidak terdapat penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) maupun HJE.

2.2 PERKEMBANGAN INFLASI SPASIAL PROVINSI JAWA BARAT

Secara spasial, pada triwulan I 2026 seluruh kabupaten/kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami peningkatan tekanan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor *low base effect*, yakni rendahnya realisasi inflasi pada triwulan I 2025 akibat adanya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50%. Seiring berakhirnya kebijakan tersebut dan dilakukannya normalisasi tarif listrik pada tahun 2026, inflasi tahunan pada triwulan I 2026 tercatat meningkat dan bersifat temporer. Mayoritas berada di atas rentang sasaran inflasi, kecuali Kota Depok, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Subang yang masih berada di dalam rentang.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.9 Inflasi Kabupaten/Kota IHK Jawa Barat Tw IV 2025 dan I 2026 (%yoy)

Selain dipengaruhi faktor basis, tekanan inflasi pada triwulan I 2026 juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global, serta kenaikan beberapa komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras akibat meningkatnya permintaan masyarakat selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, kelompok energi juga turut memberikan andil inflasi melalui kenaikan bahan bakar rumah tangga.

Inflasi tahunan tertinggi pada triwulan I 2026 terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 4,50% (yoy), yang didorong oleh peningkatan tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan tomat. Tarif listrik memberikan andil inflasi sebesar 1,20% (yoy), terutama dipengaruhi oleh berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% pada triwulan I 2025 sehingga pada tahun 2026 terjadi normalisasi tarif listrik yang mendorong peningkatan inflasi kelompok *administered prices*. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan inflasi tahunan di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, komoditas emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 1,11% (yoy) sejalan dengan tingginya permintaan aset lindung nilai (*safe haven*) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi inti di Kabupaten Majalengka juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika pasar keuangan global. Di sisi lain, tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok pangan bergejolak (*volatile food*), khususnya komoditas daging ayam ras, beras, dan tomat. Kenaikan harga komoditas pangan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan aktivitas sosial keagamaan. Khusus pada komoditas hortikultura seperti tomat, tekanan harga turut dipengaruhi oleh faktor cuaca yang memengaruhi produktivitas pertanian serta kelancaran distribusi pasokan dari sentra produksi menuju wilayah konsumen. Tingginya inflasi di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa tekanan harga masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor *administered prices*, dinamika inflasi inti, dan kelompok *volatile food*. Oleh karena itu, pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan stabilisasi pasokan pangan strategis, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat, serta penguatan koordinasi kebijakan antarinstansi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Sebaliknya, capaian inflasi tahunan terendah pada triwulan I 2026 tercatat di Kabupaten Subang sebesar 3,32% (yoy). Inflasi di Kabupaten Subang terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Tarif listrik memberikan andil inflasi sebesar 1,01% (yoy) seiring normalisasi tarif listrik pasca berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pada tahun lalu. Selain

Tabel 2.2 Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa Tw I 2026 (%yoy)

KELOMPOK BARANG	JABAR	BANDUNG	BEKASI	DEPOK	BOGOR	SUKABUMI	CIREBON	TASIKMALAYA	KAB BANDUNG	SUBANG	MAJALENGKA
Umum	3,60	3,66	3,61	3,45	3,84	3,68	3,54	3,87	3,41	3,32	4,50
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,33	3,06	3,34	3,29	3,38	3,67	4,38	3,68	3,07	3,08	4,84
Pakaian dan Alas Kaki	1,03	-1,12	1,24	-2,75	1,46	-0,02	1,16	-0,8	3,54	2,17	2,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	7,09	7,53	4,56	6,18	6,25	9,53	7,26	6,93	12,14	10,81	12,35
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	0,54	-2,07	1,05	1,1	1,14	0,48	-0,32	-0,83	1,11	-0,75	1,59
Kesehatan	1,01	2,92	0,76	0,1	0,94	0,01	4,83	3,04	0,52	1,45	0,02
Transportasi	0,06	-0,11	-0,49	0,28	1,32	1,51	0,17	1,43	-0,23	0,84	-0,46
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,05	-0,03	-0,09	0,04	1,24	-1,49	-0,05	-0,16	0,22	-0,07	-0,24
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,78	0,58	0,39	0,19	1,83	0,61	-1,45	0,37	0,52	2,77	2,78
Pendidikan	1,23	0,76	0,52	2,64	1,98	1,41	4,32	2,3	0,66	0,21	1,37
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,96	0,81	0,69	1,34	1,07	1,41	2,93	0,67	0,93	0,99	0,62
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	19,77	17,84	29,5	21,02	18,2	17,19	2,75	23,66	10,73	11,93	21,39

Lebih tinggi dari inflasi Jawa Barat

Sumber: BPS, diolah

itu, kenaikan harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan strategis turut memberikan tekanan inflasi selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Namun demikian, dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, tekanan inflasi di Kabupaten Subang cenderung lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan permintaan masyarakat selama HBKN relatif lebih moderat sehingga transmisi kenaikan harga ke tingkat konsumen tidak terlalu besar. Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten Subang yang masih cukup ditopang sektor pertanian dan produksi pangan turut membantu menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di daerah. Dengan demikian, meskipun kelompok komoditas penyumbang inflasi relatif serupa dengan daerah lainnya, tekanan inflasi di Kabupaten Subang relatif lebih terkendali karena didukung oleh kondisi pasokan yang lebih stabil serta tekanan permintaan dan daya beli masyarakat yang tidak setinggi wilayah dengan aktivitas konsumsi yang lebih besar.

Dari sisi kelompok pengeluaran, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi salah satu sumber tekanan inflasi utama di sebagian besar daerah pada triwulan I 2026. Inflasi kelompok ini tercatat relatif tinggi di Kabupaten Majalengka sebesar 4,84% (yoy), Kota Cirebon 4,38% (yoy), Kota Tasikmalaya 3,68% (yoy), dan Kota Sukabumi 3,67% (yoy). Tingginya inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis antara lain beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan rokok. Tekanan harga tersebut meningkat selama periode Ramadan dan menjelang Idulfitri seiring naiknya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, distribusi bahan pangan yang menghadapi kendala cuaca, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan beberapa wilayah terhadap pasokan dari daerah lain turut memperbesar tekanan inflasi pangan. Kenaikan cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga rokok juga menjadi faktor tambahan yang mendorong inflasi pada kelompok ini.

Selain itu, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran turut mencatat inflasi di berbagai wilayah, dengan angka relatif tinggi di Kota Cirebon sebesar 2,93% (yoy), Kota Sukabumi 1,41% (yoy), Kota Depok 1,34% (yoy), dan Kota Bogor 1,07% (yoy). Kenaikan inflasi pada kelompok ini erat kaitannya dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, termasuk permintaan terhadap makanan siap saji, jasa restoran, katering, serta konsumsi di luar rumah. Mobilitas masyarakat yang meningkat selama masa libur Idulfitri dan tradisi berkumpul bersama keluarga turut mendorong peningkatan permintaan jasa penyediaan makanan dan minuman. Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku pangan juga menyebabkan pelaku usaha restoran melakukan penyesuaian harga untuk menjaga margin usaha, sehingga memperkuat tekanan inflasi kelompok ini.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat inflasi paling tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lain di hampir seluruh wilayah. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bekasi sebesar 29,5% (yoy), Kota Tasikmalaya 23,66% (yoy), Kabupaten Majalengka 21,39% (yoy), Kota Depok 21,02% (yoy), dan Kota Bogor 18,2% (yoy). Tingginya tekanan inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang sangat responsif terhadap peningkatan harga emas global dan ketidakpastian geopolitik. Emas menjadi instrumen lindung nilai (*safe haven*), sehingga lonjakan harga emas global dapat langsung mendorong inflasi pada komponen emas perhiasan dalam negeri. Mengingat bobot komoditas emas perhiasan cukup besar dalam kelompok ini, pergerakan harganya memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi inti di berbagai daerah. Selain itu, meningkatnya permintaan jasa perawatan pribadi menjelang Hari Raya juga dapat turut memperkuat tekanan inflasi pada kelompok ini.

Pada Kelompok Transportasi, tekanan inflasi relatif moderat dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 1,51% (yoy), Kota Tasikmalaya 1,43% (yoy), dan Kota Bogor 1,32% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik Idulfitri, penerapan tarif tambahan (tuslah) pada angkutan penumpang selama masa angkutan Hari Raya, serta kenaikan biaya operasional transportasi. Selain itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi turut meningkatkan biaya distribusi dan operasional jasa transportasi yang kemudian diteruskan ke konsumen.

Sementara itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menunjukkan variasi inflasi yang cukup lebar antarwilayah, dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Majalengka sebesar 12,35% (yoy), Kabupaten Bandung 12,14% (yoy), dan Kabupaten Subang 10,81% (yoy). Tingginya inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% pada periode sebelumnya, sehingga secara tahunan mendorong peningkatan inflasi kelompok utilitas rumah tangga. Selain itu, penyesuaian harga LPG nonsubsidi turut memberikan tekanan tambahan terhadap pengeluaran rumah tangga, mengingat LPG merupakan salah satu kebutuhan utama konsumsi energi domestik.

Di sisi lain, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami deflasi di beberapa wilayah, seperti Kota Sukabumi sebesar -1,49% (yoy), Kabupaten Majalengka -0,24% (yoy), Kota Tasikmalaya -0,16% (yoy), dan Kota Bekasi -0,09% (yoy). Deflasi pada kelompok ini umumnya dipengaruhi oleh persaingan yang ketat antarpenyedia layanan telekomunikasi sehingga mendorong penurunan tarif paket data internet dan layanan komunikasi. Selain itu, promosi layanan digital serta efisiensi penyediaan jasa berbasis teknologi turut menahan kenaikan harga, sehingga kelompok ini menjadi salah satu faktor penahan inflasi secara keseluruhan pada triwulan I 2026.

2.3 PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI JAWA BARAT

Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang terintegrasi dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Pada Triwulan I 2026, berbagai langkah pengendalian difokuskan untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama dalam menghadapi peningkatan permintaan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya dilakukan melalui penguatan stabilisasi harga, pengamanan pasokan pangan strategis, kelancaran distribusi antarwilayah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali.

A. Keterjangkauan Harga

Upaya pada aspek keterjangkauan harga difokuskan pada stabilisasi harga pangan strategis melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, bazar pangan, serta penguatan sinergi dengan BUMD pangan dan ritel modern. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi risiko kenaikan harga menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri.

1. Pelaksanaan GPM di 77 titik selama Februari 2026 dan meningkat menjadi 130 titik sepanjang Maret 2026 di berbagai wilayah Jawa Barat sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan masyarakat.
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) dengan target sekitar 100 ribu penerima pada Februari 2026 guna memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan bersubsidi.
3. Sinergi BUMD pangan dan ritel modern selama Februari–Maret 2026 melalui penyediaan paket sembako murah serta promo Ramadan untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas strategis.
4. Pelaksanaan Bazar Ramadan Kabupaten Subang pada 11–12 Maret 2026 dan Balkot Ramadan Fest Kota Bogor pada 12–14 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga selama Ramadan.
5. Pelaksanaan Pasar Tani DTPH Jawa Barat pada 13, 15, dan 29 Maret 2026 serta Pasar Murah Indag Jawa Barat pada 13 Maret 2026 guna menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat.
6. Optimalisasi kios pangan dan penambahan volume komoditas subsidi selama Maret 2026 untuk memperkuat akses masyarakat terhadap bahan pangan strategis.
7. Intensifikasi monitoring harga harian, pengawasan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta optimalisasi warung TPID sebagai kanal stabilisasi harga selama Februari 2026.

8. Pelaksanaan sidak pasar oleh pemerintah daerah selama Ramadan 2026 guna memastikan stabilitas harga dan kecukupan pasokan pangan strategis.

B. Ketersediaan Pasokan

Upaya pada aspek ketersediaan pasokan diarahkan untuk memastikan kecukupan stok pangan strategis melalui penguatan cadangan pangan, optimalisasi produksi pertanian, percepatan distribusi SPHP, serta penguatan kerja sama antar daerah (KAD). Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

1. Realisasi pengadaan beras mencapai 63.511 ton atau 9,15% dari target tahun 2026 serta penyaluran beras SPHP sebesar 995.760 ton atau 63,72% dari target selama Februari 2026.
2. Penguatan stok Bulog dan percepatan distribusi beras SPHP selama Februari 2026 guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.
3. Optimalisasi panen serta pemetaan neraca pasokan-permintaan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026 untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan.
4. Antisipasi risiko cuaca di sentra produksi pangan dan penguatan KAD hortikultura antarwilayah selama Februari 2026.
5. Penyaluran bantuan benih padi sebanyak 9,7 ton di Kabupaten Bekasi pada Maret 2026 guna mendukung percepatan tanam ulang pascabanjir.
6. Pelaksanaan panen perdana jagung sebanyak 28 ton melalui pemanfaatan lahan seluas 11 ha di Kabupaten Karawang pada Maret 2026 sebagai upaya penguatan produksi pangan daerah.
7. *Monitoring* produksi hortikultura, khususnya cabai dan sayuran, di Kabupaten Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan Tasikmalaya selama Maret 2026 guna memastikan keberlanjutan pasokan.
8. Peningkatan stok pangan di wilayah Bandung Raya, Bogor Raya, dan Ciayumajakuning selama Maret 2026 untuk mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Idulfitri.
9. Penguatan KAD dan pemantauan stok distributor selama Maret 2026 guna menjaga kesinambungan pasokan pangan strategis.

C. Kelancaran Distribusi

Pada aspek kelancaran distribusi, upaya pengendalian difokuskan pada penguatan distribusi pangan melalui dukungan ongkos angkut, mobil distribusi pangan, koordinasi lintas sektor, serta penguatan rantai pasok pendek antara petani dan konsumen. Langkah ini bertujuan menjaga kelancaran arus distribusi pangan dan meminimalkan hambatan distribusi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

1. Pemberian dukungan ongkos angkut pada 6 titik GPM di Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi selama Februari 2026.
2. *Launching* Mobil Distribusi Sabumi (Sabilulungan untuk Harga Stabil Sukabumi) pada 12 Februari 2026 guna memperkuat distribusi pangan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
3. Pelaksanaan koordinasi bersama Dinas Perhubungan dan aparat kewilayahan selama Februari 2026 untuk menjaga kelancaran distribusi logistik pangan.
4. *Monitoring* hambatan distribusi dan penguatan rantai pasok pendek antara petani dan konsumen selama Februari 2026 guna meningkatkan efisiensi distribusi pangan.
5. Percepatan penyaluran komoditas strategis dan koordinasi suplai lintas wilayah selama Februari 2026 untuk menjaga kecukupan pasokan di daerah konsumen.
6. Pemberian bantuan ongkos angkut di 19 titik GPM selama Maret 2026 yang mencakup Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Pasar Tani DTPH Jawa Barat, dan Pasar Murah Indag Jawa Barat.
7. Operasional distribusi Mobil Sabumi di Kabupaten Sukabumi pada 12 Maret 2026 guna memperkuat distribusi pangan hingga tingkat masyarakat.
8. Penguatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan selama Ramadan dan periode mudik Idulfitri 2026 guna menjaga kelancaran distribusi pangan dan logistik.
9. Optimalisasi distribusi langsung dari sentra produksi menuju pasar induk di Bandung, Bogor, dan Cirebon selama Maret 2026 untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan.

D. Komunikasi Efektif

Upaya komunikasi efektif dilakukan melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pelaksanaan rapat dan *High Level Meeting* (HLM) TPID, penguatan inovasi digital pengendalian inflasi, serta komunikasi publik terkait belanja bijak dan stabilitas pangan. Langkah ini bertujuan memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali.

1. Rapat koordinasi penyusunan OPS TPID Award 2026 bersama Biro Perekonomian dan DTPH Jawa Barat pada 4 Februari 2026 serta bersama Biro Perekonomian Jawa Barat pada 9 Februari 2026.
2. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Operasi Pasar/GPM Digital bersama DKPP Jawa Barat, Majalengka Mart, Shopee, dan Blibli pada 4 Februari 2026 guna memperkuat digitalisasi pengendalian inflasi pangan.
3. Pelaksanaan HLM TPID dan TP2DD Jawa Barat menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri pada 5 Februari 2026.
4. Pelaksanaan HLM TPID Kota Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri pada 10–12 Februari 2026.
5. Pelaksanaan Rakor TPID menjelang HBKN RAFI 2026 sebagai tindak lanjut HLM TPID dan TP2DD Jawa Barat pada 19 Februari 2026.
6. Pelaksanaan asistensi OPS TPID Kabupaten/Kota dalam rangka TPID Award pada 23–27 Februari 2026.
7. Penyampaian imbauan belanja bijak melalui media sosial dan kanal komunikasi pemerintah daerah di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat selama Februari–Maret 2026.
8. Pelaksanaan FGD DTPH Jawa Barat pada 9 Maret 2026 sebagai bagian dari penguatan koordinasi pengendalian pangan daerah.
9. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha Kios Pangan dalam Mendukung Inovasi GPM Digital pada 10 Maret 2026.
10. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi ke-2 Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2026 pada 11 Maret 2026.
11. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat terkait Belanja Bijak melalui website Pikiran Rakyat pada 12 Maret 2026.
12. Sosialisasi Belanja Bijak dalam kegiatan OBF Bank Indonesia Jawa Barat yang disiarkan melalui Kompas TV Jawa Barat pada 15 Maret 2026.
13. Publikasi berkala terkait perkembangan stok pangan dan pelaksanaan GPM di kabupaten/kota se-Jawa Barat selama Maret 2026.

Sumber: Rekapitulasi Bank Indonesia dari berbagai sumber (OPD Provinsi Jawa Barat dan Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se-Jawa Barat).

Selain berfokus pada pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi daerah guna menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan, evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengendalian inflasi juga dilakukan secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan agar respons kebijakan semakin tepat sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi di Jawa Barat pada triwulan I 2026, diperoleh beberapa capaian dan catatan penting sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan GPM di Jawa Barat pada Triwulan I 2026 tetap menjadi salah satu *quick win* dalam menjaga keterjangkauan harga pangan strategis, khususnya dalam menghadapi peningkatan permintaan selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Berdasarkan perkembangan harga komoditas strategis pada Triwulan I 2026, sebagian besar komoditas menunjukkan kenaikan harga yang relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat pada komoditas daging sapi (3,70%), bawang putih (3,67%), jagung pipilan (3,60%), minyak goreng (3,17%), daging ayam boiler (3,13%), dan telur ayam boiler (1,59%). Sementara itu, komoditas beras medium dan gula pasir relatif stabil dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,14% dan 0,31%.

Di sisi lain, beberapa komoditas hortikultura menunjukkan perkembangan yang berbeda. Harga bawang merah mengalami penurunan sebesar 4,26% dan cabai merah turun cukup signifikan

Tabel 2.3 Perkembangan Rata-Rata Harga Bapokting Triwulan IV 2025 dan Triwulan I 2026

NO	KOMODITAS	HARGA RATA-RATA TW IV'25	HARGA RATA-RATA TW I'26	*GROWTH*
1	Beras medium	Rp13,259	Rp13,277	0.14%
2	Bawang merah	Rp40,361	Rp38,643	-4.26%
3	Daging ayam boiler	Rp38,597	Rp39,807	3.13%
4	Telur ayam boiler	Rp29,999	Rp30,475	1.59%
5	Daging Sapi	Rp131,998	Rp136,877	3.70%
6	Gula Pasir	Rp17,719	Rp17,774	0.31%
7	Bawang Putih	Rp35,108	Rp36,397	3.67%
8	Cabai Merah	Rp57,184	Rp44,407	-22.34%
9	Cabai Rawit	Rp51,582	Rp74,432	44.30%
10	Jagung Pipilan	Rp13,184	Rp13,659	3.60%
11	Minyak Goreng	Rp18,968	Rp19,570	3.17%

Sumber: SILINDA JABAR, diolah

sebesar 22,34% seiring membaiknya pasokan di sentra produksi. Namun demikian, cabai rawit masih mengalami kenaikan tinggi sebesar 44,30% akibat terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan selama Ramadan. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GPM dan berbagai intervensi stabilisasi harga mampu menahan tekanan inflasi pangan pada sebagian besar komoditas strategis, meskipun volatilitas harga masih terjadi pada komoditas hortikultura tertentu.

Selama periode laporan, pelaksanaan GPM pada Triwulan I 2026 tercatat 207 titik di seluruh Jawa Barat, yang terdiri dari 77 titik pada Februari 2026 dan meningkat menjadi 130 titik pada Maret 2026. Pelaksanaan GPM tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota sebagai upaya menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya dalam menghadapi peningkatan permintaan selama HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026. Intensitas pelaksanaan GPM, operasi pasar, serta sinergi bersama BUMD pangan dan ritel modern turut mendukung stabilitas harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasokan dan permintaan pangan strategis.

2. Ketersediaan Pasokan

Ketahanan pasokan pangan strategis di Jawa Barat pada Triwulan I 2026 secara umum masih terjaga, meskipun terdapat beberapa komoditas yang menunjukkan tingkat ketahanan relatif terbatas, khususnya pada komoditas hortikultura dan pangan berbasis impor. Berdasarkan neraca pangan Januari–Maret 2026, komoditas beras masih berada pada kategori aman dengan ketahanan berkisar 63–75 hari. Meskipun lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2025, kondisi tersebut masih didukung oleh penguatan stok Bulog dan percepatan distribusi SPHP guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.

Pada komoditas jagung, ketahanan pasokan menunjukkan perbaikan secara bertahap dari 43 hari pada Januari menjadi 52 hari pada Maret 2026. Peningkatan ini didukung oleh mulai berlangsungnya panen di sejumlah wilayah sentra produksi sehingga mampu memperkuat pasokan jagung, khususnya untuk kebutuhan pakan ternak. Sementara itu, kedelai dan bawang putih masih mencatatkan tingkat ketahanan yang relatif rendah, masing-masing berkisar 3–9 hari dan 4–10 hari. Kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah maupun impor serta sensitivitas terhadap kelancaran distribusi.

Pada komoditas hortikultura, kondisi pasokan relatif membaik dibandingkan periode sebelumnya. Ketahanan cabai besar meningkat signifikan dari 75 hari pada Januari menjadi 93 hari pada Februari sebelum sedikit turun menjadi 85 hari pada Maret 2026. Perbaikan ini sejalan dengan meningkatnya produksi di sentra hortikultura Jawa Barat. Namun demikian, ketahanan cabai rawit masih berfluktuasi pada kisaran 23–37 hari akibat tingginya volatilitas produksi dan pengaruh cuaca terhadap pasokan. Di sisi lain, bawang merah menunjukkan peningkatan ketahanan secara bertahap dari 4 hari pada Januari menjadi 8 hari pada Maret 2026, meskipun level ketahanannya masih relatif terbatas.

Pada komoditas protein hewani, pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras secara umum berada pada kondisi aman. Ketahanan daging ayam ras meningkat dari 82 hari pada Januari menjadi 90 hari pada Maret 2026, sedangkan telur ayam ras berada pada level sangat kuat dengan ketahanan mencapai 120–141 hari. Hal ini mencerminkan pasokan protein hewani yang relatif memadai selama periode Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, ketahanan daging sapi/kerbau masih relatif terbatas pada kisaran 17–18 hari sehingga tetap memerlukan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi.

Tabel 2.4 Neraca Pangan Komoditas Pangan Strategis Tw IV 2025 dan I 2026

KOMODITAS	OKT'25		NOV'25		DES'25		JAN'26		FEB'26		MAR'26	
	NERACA (TON)	KETAHANAN (HARI)	NERACA (TON)	KETAHANAN (HARI)	NERACA (TON)	KETAHANAN (HARI)	NERACA (TON)	KETAHANAN (HARI)	NERACA (TON)	KETAHANAN (HARI)	NERACA (TON)	KETAHANAN (HARI)
Beras	1.781.877	101	1.755.383	106	1.559.652	91	1.291.246	75	1.126.349	63	1.178.588	68
Jagung	249.335	79	197.873	65	142.168	46	152.477	43	162.340	45	173.607	52
Kedelai	790	1	398	-	410	-	3.668	3	6.651	6	9.953	9
Bawang Merah	1.095	2	151	-	391	1	1.948	4	3.137	6	4.299	8
Bawang Putih	420	1	427	1	434	1	1.420	4	2.297	7	3.256	10
Cabai Besar	11.803	33	8.519	25	8.524	25	26.790	75	33.907	93	29.799	85
Cabai Rawit	5.305	12	5.307	14	4.661	12	14.874	37	13.178	32	8.947	23
Daging Sapi/ Kerbau	18.707	44	10.179	25	3.870	9	8.108	18	8.079	17	7.356	18
Daging Ayam Ras	159.047	68	170.555	77	178.410	78	192.159	82	198.787	81	207.022	90
Telur Ayam Ras	202.506	107	208.469	117	213.520	115	246.119	124	251.936	120	261.527	141
Gula Pasir	23.059	27	23.302	29	3.301	4	3.314	3	5.792	6	9.050	9
Minyak Goreng	9.246	6	10.727	8	11.549	8	54	-	935	1	26.456	18

Sumber: DKPP JABAR, diolah

Pada komoditas minyak goreng, ketahanan pasokan menunjukkan perbaikan cukup signifikan pada Maret 2026. Setelah berada pada level sangat terbatas pada Januari–Februari 2026, kondisi pasokan mulai membaik pada Maret 2026 dengan ketahanan mencapai 18 hari dan neraca sebesar 26.456 ton. Perbaikan tersebut didorong oleh penguatan distribusi serta peningkatan pasokan minyak goreng di pasar menjelang Idulfitri. Namun demikian, dibandingkan komoditas pangan utama lainnya, ketahanan minyak goreng masih relatif terbatas sehingga tetap memerlukan perhatian melalui penguatan distribusi dan monitoring pasokan secara intensif.

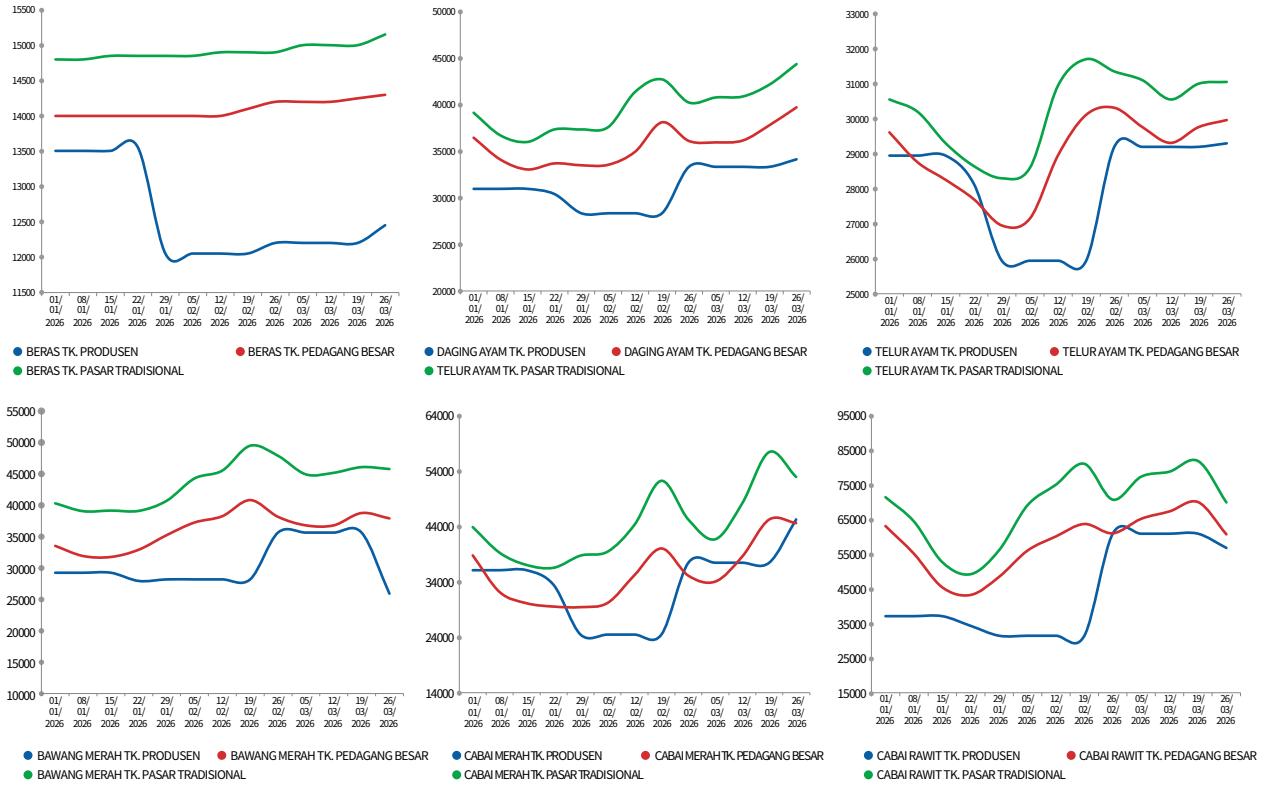
Ketahanan pasokan pangan strategis di Jawa Barat pada Triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan pada beberapa komoditas utama, khususnya hortikultura dan protein hewani. Namun demikian, masih terdapat risiko keterbatasan pasokan pada beberapa komoditas tertentu seperti kedelai, bawang putih, minyak goreng, dan daging sapi/kerbau. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan langkah antisipatif antara lain melalui optimalisasi KAD, penguatan stok cadangan pangan, serta pengendalian pasokan secara terintegrasi guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.

3. Kelancaran Distribusi

Pada Triwulan I 2026, kelancaran distribusi pangan strategis di Jawa Barat menunjukkan dinamika yang berbeda antar komoditas, tercermin dari pola transmisi harga antara tingkat produsen, pedagang besar, dan pasar tradisional. Peningkatan permintaan selama periode Ramadan dan Idulfitri turut memengaruhi efektivitas distribusi, khususnya pada komoditas hortikultura dan protein hewani yang memiliki karakteristik mudah rusak serta sensitivitas tinggi terhadap biaya logistik dan pasokan antarwilayah.

Pada komoditas beras, pergerakan harga antar tingkatan pasar relatif stabil dan sejajar sepanjang Januari-Maret 2026. Harga di tingkat produsen sempat menurun pada akhir Januari sebelum kembali meningkat secara bertahap pada Maret 2026, sementara harga di tingkat pedagang besar dan pasar tradisional cenderung bergerak stabil dengan selisih margin yang terkendali. Dengan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) sebesar 20,28% (BPS, 2024), struktur distribusi beras masih tergolong efisien dan didukung oleh sistem logistik yang relatif baik, termasuk penguatan distribusi Bulog dan penyaluran SPHP selama HBKN.

Pada daging ayam ras, transmisi harga dari produsen ke pedagang besar dan pasar tradisional menunjukkan pelebaran margin yang relatif moderat.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.10 Pergerakan Harga Komoditas Bapokting di Beberapa Level

Harga di tingkat produsen meningkat cukup signifikan pada akhir Februari dan relatif stabil hingga Maret 2026, diikuti kenaikan bertahap di tingkat pedagang besar dan pasar tradisional. Dengan MPP sebesar 28,86% (BPS, 2021), distribusi daging ayam masih dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi *livebird* dan kebutuhan *cold chain*, terutama saat permintaan meningkat selama Ramadan dan Idulfitri.

Sementara itu, distribusi telur ayam ras relatif lebih efisien dibandingkan daging ayam. Pergerakan harga antar tingkatan pasar cenderung paralel meskipun terdapat kenaikan harga pada Februari 2026. Harga di tingkat produsen sempat meningkat tajam pada akhir Februari sebelum kembali stabil pada Maret 2026. Dengan MPP sebesar 14,05% (BPS, 2022), struktur pasar telur ayam ras tergolong cukup kompetitif dan didukung oleh pola distribusi harian yang lebih stabil sehingga transmisi harga berjalan lebih lancar.

Pada komoditas bawang merah, distribusi masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Grafik menunjukkan adanya pelebaran margin yang signifikan antara harga produsen dengan pasar tradisional, terutama pada Februari hingga Maret 2026. Harga di tingkat pasar tradisional meningkat lebih tinggi dibandingkan produsen, mencerminkan tingginya biaya distribusi dan panjangnya rantai tata niaga. Dengan MPP bawang merah sebesar 82,83% (BPS, 2021), struktur distribusi bawang merah masih tergolong kurang efisien dan sensitif terhadap gangguan pasokan maupun distribusi antardaerah.

Kondisi serupa juga terlihat pada komoditas cabai merah dan cabai rawit. Pada cabai merah, harga di tingkat produsen sempat turun cukup dalam pada akhir Januari hingga Februari sebelum meningkat kembali pada Maret 2026, sedangkan harga di tingkat pedagang besar dan pasar tradisional tetap berada pada level tinggi. Sementara itu, cabai rawit menunjukkan volatilitas harga yang sangat tinggi, terutama pada akhir Februari ketika harga produsen melonjak tajam dan diikuti peningkatan harga di tingkat pedagang besar serta pasar tradisional. Dengan MPP cabai sebesar 59,20% (BPS, 2021), distribusi cabai masih menghadapi tantangan berupa tingginya risiko susut, ketergantungan pasokan lintas wilayah, serta sensitivitas terhadap cuaca dan biaya logistik. Kondisi tersebut menyebabkan transmisi harga menjadi kurang simetris dan volatilitas harga di tingkat konsumen tetap tinggi selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026.

4. Komunikasi Efektif

Pelaksanaan HLM TPID Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2026 menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri dinilai berjalan cukup efektif dalam memperkuat koordinasi, sinergi, dan kesepahaman antar pemangku kepentingan pengendalian inflasi di Jawa Barat. HLM yang turut dihadiri oleh para Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi rutin, tetapi juga berfungsi sebagai media *early warning system* dalam mengidentifikasi potensi risiko inflasi dan merumuskan langkah antisipatif secara bersama-sama, khususnya di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Melalui HLM tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berhasil menyepakati sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi yang lebih terarah dan berbasis data. Kesepakatan tersebut meliputi penguatan pemantauan harga dan pasokan secara lebih intensif dan *real-time*, khususnya pada komoditas pangan strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah. Selain itu, forum HLM juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Bulog, Satgas Pangan, pelaku usaha, serta instansi terkait lainnya guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok selama HBKN.

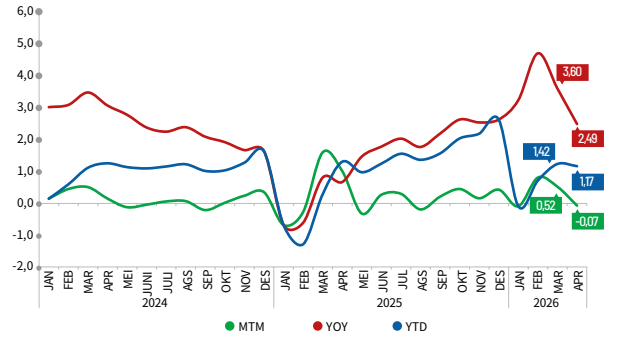
Dalam mendukung efektivitas intervensi pasar, HLM turut menekankan pentingnya optimalisasi KAD, operasi pasar, dan GPM berbasis hasil pemantauan harga harian sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran pada wilayah yang mengalami tekanan harga. Di sisi lain, penguatan komunikasi publik juga menjadi perhatian utama melalui penyampaian informasi terkait perkembangan harga pangan, ketersediaan pasokan, serta langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali dan mencegah *panic buying* selama Ramadan dan Idulfitri.

HLM TPID juga memperkuat langkah mitigasi risiko pasokan dan distribusi melalui koordinasi yang lebih intensif dengan BMKG dan BPBD dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, gangguan logistik, maupun risiko bencana yang dapat menghambat distribusi pangan strategis. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi sebagai langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pasokan di wilayah tertentu.

Pelaksanaan HLM TPID Triwulan I 2026 menunjukkan bahwa komunikasi efektif antar *stakeholder* pengendalian inflasi di Jawa Barat telah berjalan semakin kuat dan responsif. Keterlibatan aktif kepala daerah dalam forum tersebut turut memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Forum HLM dinilai mampu memperkuat konsolidasi kebijakan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko inflasi selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026.

2.4 *TRACKING* INFLASI TRIWULAN II 2026

Berdasarkan monitoring, pada triwulan II 2026 Jawa Barat diperkirakan mengalami inflasi yang didorong oleh peningkatan harga komoditas pangan. Pada April 2026, IHK Jawa Barat tercatat deflasi 0,07% (mtm) atau 2,49% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 0,52% (mtm) atau 3,60% (yoy) (Grafik 2.14). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh koreksi harga emas serta normalisasi permintaan komoditas pangan dan transportasi pasca HBKN Idulfitri. Sementara itu, secara tahunan inflasi April 2026 mulai menunjukkan dampak perang di Timur Tengah sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah global dan turunannya. Dari sisi kelompok, laju inflasi Jawa Barat pada April 2026 didorong oleh Kelompok Makanan,



Sumber: PIHPS, diolah

Grafik 2.11 Perkembangan Inflasi Jawa Barat per Bulan

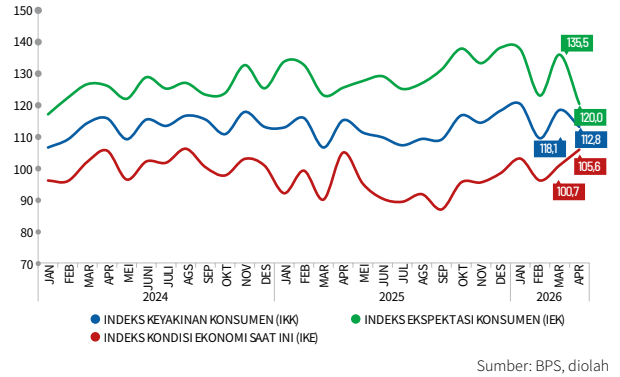
Minuman, dan Tembakau akibat peningkatan harga sejumlah komoditas pangan, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mencerminkan dampak lanjutan kenaikan harga emas global, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sejalan dengan kenaikan harga komoditas energi dunia.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi sebesar 1,08% (yoy). Pendorong utama inflasi pada kelompok ini berasal dari beberapa komoditas pangan yaitu daging ayam ras dengan andil 0,07%, beras sebesar 0,17%, minyak goreng 0,09%, serta Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan telur ayam ras masing-masing sebesar 0,07%. Kenaikan harga daging dan telur ayam ras dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi, khususnya harga jagung pipilan sebagai bahan pakan dan pasokan DOC yang terbatas. Selain itu juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Harga beras yang masih meningkat pada April 2026 dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi di sebagian daerah sentra di Jawa sehingga berdampak pada terganggunya produksi dan penguatan permintaan terhadap pasokan dari Jawa Barat, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun sebagai penyangga pasokan bagi daerah lain. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh penguatan harga CPO sebagai bahan baku utama dan penyesuaian atas kenaikan harga kemasan plastik yang terdampak kenaikan biaya produksi nafta global. Sementara itu, peningkatan harga SKM merupakan realisasi lanjutan atas penyesuaian HJE tahun 2025, meskipun pada 2026 tidak terdapat kenaikan CHT maupun HJE.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menyumbang andil inflasi sebesar 0,85% (yoy). Di tengah gejolak stabilitas geopolitik global, laju peningkatan harga emas justru mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan likuiditas sejumlah bank sentral, khususnya yang terdampak langsung oleh perang di Timur Tengah. Dolar AS juga mengalami penguatan sejalan dengan peningkatan permintaan terhadap mata uang tersebut untuk transaksi dan investasi. Meskipun melambat, harga emas global secara tahunan masih menunjukkan peningkatan dan tertransmisi kepada harga emas perhiasan domestik. Kenaikan harga emas perhiasan di Jawa Barat per April 2026 mencapai lebih dari 40% (yoy) dengan andil 0,81%. Berlanjutnya penguatan harga emas global masih dipengaruhi oleh tingginya permintaan investor terhadap aset *safe haven* di tengah ekskalasi dan perluasan ketegangan geopolitik global serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi dan moneter global.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil inflasi 0,16% (yoy). Perkembangan inflasi kelompok tersebut sudah tidak dipengaruhi oleh *low base effect* dari diskon tarif tahun sebelumnya. Inflasi dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga, yakni LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg dengan rata-rata sebesar 18%, berlaku efektif sejak April 2026. Langkah ini ditempuh sejalan dengan perkembangan harga minyak dan gas acuan global yang mengalami lonjakan akibat perang di jalur utama perdagangan migas dunia. Di sisi lain, untuk meredam dampak kenaikan harga migas terhadap inflasi dan perekonomian domestik, Pemerintah mempertahankan harga migas subsidi.

Di tengah dinamika gejolak global dan domestik, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia April 2026 menunjukkan bahwa keyakinan konsumen Jawa Barat masih positif. Namun demikian, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2026 tercatat sebesar 112,8 turun dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 118,1. Perkembangan ini dipengaruhi oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat turun ke level 120,0 dari 135,5 pada Maret 2026. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan ke level 105,6. Secara keseluruhan, perkembangan indeks keyakinan konsumen tersebut mengindikasikan bahwa optimisme



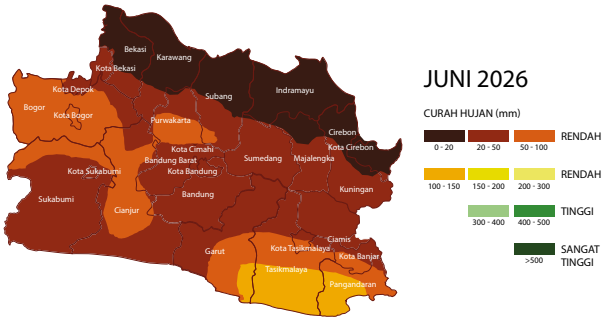
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.12 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

masyarakat terhadap kondisi perekonomian tetap terjaga. Ke depan, untuk mempertahankan optimisme dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, seluruh pemangku kebijakan perlu menjaga efektivitas ekosistem ekonomi domestik.

Cuaca di Jawa Barat pada triwulan II 2026 diperkirakan memasuki fase penurunan curah hujan. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Jawa Barat masih mengalami curah hujan tinggi pada bulan April 2026 di wilayah bagian selatan. Sementara itu, wilayah utara Jawa Barat mulai mengalami penurunan curah hujan dan beralih ke musim kemarau. Kondisi ini berisiko mengganggu masa tanam dan menyebabkan panen yang kurang optimal dari segi kuantitas maupun kualitas akibat tingginya curah hujan serta risiko serangan hama dan OPT seperti ulat grayak, kutu daun, dan *thrips*. Pada Juni 2026, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mulai memasuki masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau yang dimulai dari wilayah pantai utara Jawa Barat. Periode ini bertepatan dengan periode panen padi. Namun, kondisi pada masa peralihan meningkatkan risiko serangan hama dan OPT padi yang dapat mempengaruhi potensi hasil panen.

Secara keseluruhan, peta prakiraan curah hujan di Jawa Barat pada triwulan II 2026 mengindikasikan curah hujan yang berada pada level rendah di sebagian besar wilayah yang menunjukkan dimulainya musim kemarau pada bulan Juni (Gambar 3.15). Periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau merupakan fase yang cukup krusial bagi sektor pertanian, terutama tanaman padi, karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air dan meningkatkan risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Namun demikian, melalui pengelolaan irigasi yang baik, pengendalian OPT, serta pemantauan kondisi lahan dan cuaca secara intensif, kondisi tersebut masih dapat dioptimalkan untuk mendukung keberhasilan panen. Oleh sebab itu, diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi serta penguatan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan komoditas strategis dan kelancaran distribusi antarwilayah guna menjaga stabilitas produksi dan pasokan pangan.



Sumber: BMKG

Grafik 3.14 Prakiraan Curah Hujan Triwulan II 2026

Inflasi triwulan II 2026 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya dampak normalisasi tarif listrik pada Maret 2026 yang sebelumnya mendorong inflasi pada triwulan I 2026. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi diprakirakan lebih terkendali sejalan dengan terbatasnya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode libur pada Juni 2026. Sementara itu, kenaikan harga komoditas emas perhiasan diperkirakan masih terbatas sejalan dengan perkembangan harga emas global. Namun demikian, tekanan inflasi tetap perlu dicermati, terutama yang bersumber dari perkembangan harga minyak dan gas domestik di tengah berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global serta *imported inflation* yang dipengaruhi dinamika nilai tukar rupiah.

Ke depan, sinergi kebijakan pengendalian inflasi terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran. Pemerintah melanjutkan kebijakan stabilisasi harga energi, termasuk mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi, serta mendorong ketahanan produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan embung dan jaringan irigasi. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan yang *pro-stability* dan *pro-growth*. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap terkendali, BI Rate pada Mei 2026 meningkat menjadi sebesar 5,25%.



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

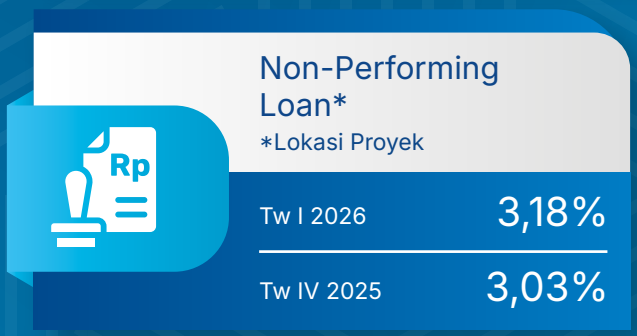
Di tengah berlanjutnya ketidakpastian kondisi global dan domestik, kinerja pembiayaan daerah di Jawa Barat pada triwulan I 2026 termoderasi, diikuti peningkatan risiko kredit.

Sementara, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Jawa Barat masih tumbuh cukup moderat pada periode berjalan seiring dengan sikap *wait and see* dalam mengambil pembiayaan.

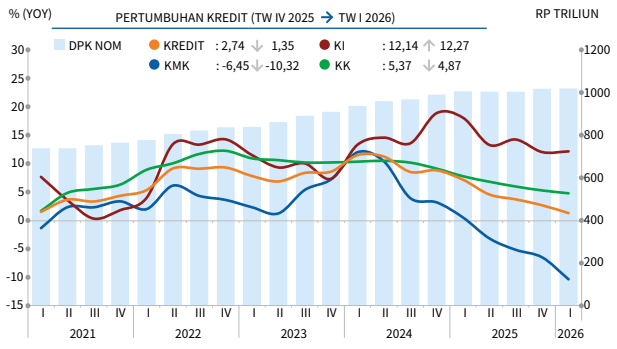












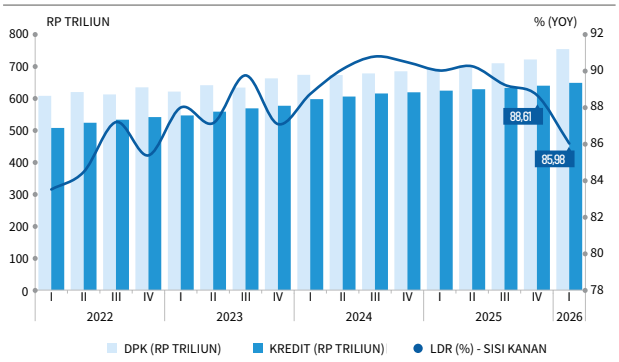
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.1 Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan

3.1 KINERJA PEMBIAYAAN DAERAH[8]

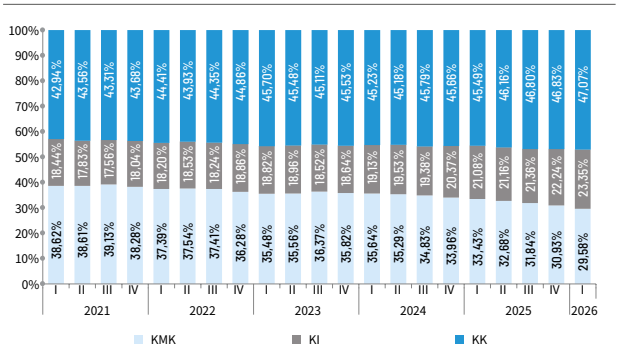
3.1.1 Kondisi Umum

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi kondisi domestik, kinerja pembiayaan di Jawa Barat mengalami moderasi dan risiko kredit menunjukkan peningkatan. Laju pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencapai 1,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 2,74% (yoy) (Grafik 3.1). Pertumbuhan kredit yang melambat tersebut turut diikuti dengan *Non-Performing Loan* (NPL) yang meningkat dari sebelumnya yang sebesar 3,64% menjadi 3,78%. Risiko kredit yang terus meningkat perlu dicermati sebagai tantangan dalam mencapai target pertumbuhan kredit nasional sebesar 8-11% (yoy). Ke depan, penyaluran pembiayaan masih memiliki ruang pertumbuhan di tengah likuiditas yang cukup longgar, tecermin oleh indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan sebesar 85,98% turun dari perode sebelumnya yang sebesar 88,61% (Grafik 3.2).



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Kredit dan LDR



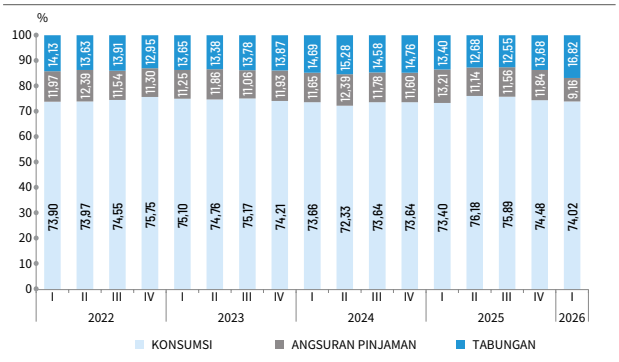
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.3 Porsi Penyaluran Pembiayaan/Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

3.1.2 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pertumbuhan kredit di Jawa Barat pada triwulan I 2026 tertahan oleh kontraksi yang semakin dalam pada kredit modal kerja (KMK). Perlambatan pertumbuhan KMK tersebut mencerminkan masih terbatasnya permintaan pembiayaan dari dunia usaha yang cenderung menahan ekspansi usaha di tengah dinamika permintaan dan ketidakpastian global. Pelaku usaha juga cenderung lebih selektif dalam melakukan penambahan kapasitas produksi serta optimalisasi utilisasi modal kerja yang telah tersedia. Sementara, kredit investasi tumbuh meningkat diikuti kredit konsumsi yang tumbuh positif kendati sedikit termoderasi dari periode sebelumnya sejalan dengan PDRB konsumsi rumah tangga dan PMTB yang meningkat.

Permintaan kredit di Jawa Barat masih didominasi oleh kebutuhan konsumsi. Pangsa kredit konsumsi meningkat menjadi 47,07% dari periode sebelumnya sebesar 46,83% (Grafik 3.3), mencerminkan permintaan



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.4 Proporsi Penggunaan Pendapatan Rumah Tangga

8 Klasifikasi perbankan yang digunakan terbatas pada bank umum dan tidak memasukkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

rumah tangga yang tetap terjaga. Sementara itu, KMK tercatat sebagai kontributor terbesar kedua dengan pangsa sebesar 29,58%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 30,93%, sejalan dengan moderasi penyaluran kredit modal kerja pada periode laporan. Di sisi lain, pangsa kredit investasi meningkat menjadi 23,35% dari sebelumnya 22,24%, didukung oleh berlanjutnya realisasi investasi pada beberapa sektor prioritas. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlambatan kredit secara umum lebih dipengaruhi oleh tertahannya KMK, sementara kredit konsumsi dan kredit investasi masih mencatatkan pertumbuhan positif didukung permintaan domestik dan aktivitas investasi yang tetap berlangsung.

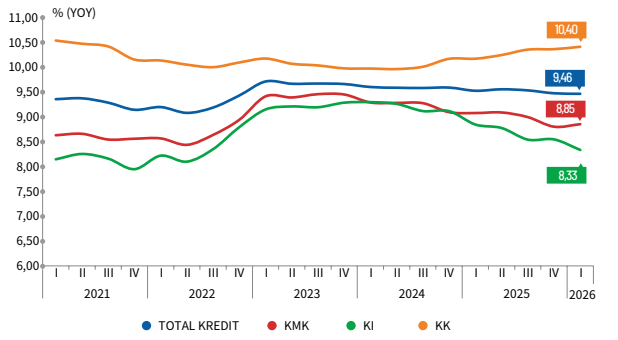
Kredit konsumsi sebagai penopang utama kredit di Jawa Barat tetap tumbuh positif sebesar 4,87% (yoy) pada triwulan I 2026, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,37% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan PDRB konsumsi rumah tangga yang meningkat dan permintaan domestik yang tetap terjaga pada momen HBKN Idulfitri. Namun demikian, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, menunjukkan proporsi pendapatan untuk pembayaran angsuran pinjaman menurun menjadi 9,16% dari sebelumnya 11,84% (Grafik 3.4), yang mengindikasikan kecenderungan rumah tangga untuk mengurangi penambahan kewajiban kredit baru. Selain itu, suku bunga kredit konsumsi masih berada pada level tinggi dan meningkat menjadi 10,40% dari sebelumnya 10,36% (Grafik 3.5), sehingga berpotensi menahan permintaan pembiayaan konsumsi ke depan. Hal tersebut salah satunya dapat disebabkan dari penjualan kendaraan nasional pada triwulan I 2026 juga tumbuh lebih moderat, khususnya penjualan mobil yang tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,75% (yoy)[9]. Risiko kredit konsumsi turut meningkat tecermin dari NPL kredit konsumsi yang naik menjadi 3,04% dari sebelumnya 2,97%. Secara keseluruhan, kredit konsumsi masih tumbuh positif didukung konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, meskipun sejumlah indikator mulai menunjukkan adanya potensi moderasi permintaan konsumsi dan pembiayaan rumah tangga ke depan.

Kredit investasi pada triwulan I 2026 menunjukan peningkatan pertumbuhan ditengah perlambatan pertumbuhan kredit lainnya. Realisasi investasi Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan 12,03% (yoy) atau senilai Rp76,78 triliun, dan menjadi yang tertinggi kedua secara nasional[10]. Dari sisi pembiayaan, suku bunga kredit investasi tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, yakni sebesar 8,33% (Grafik 3.5), sehingga turut mendukung permintaan kredit investasi. Kinerja investasi yang tetap terjaga juga terkonfirmasi dari hasil liaison Bank Indonesia, tecermin dari *likert scale* investasi yang masih berada pada level positif sebesar 0,56 meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,67 (Grafik 3.6). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih melanjutkan aktivitas investasi, meskipun cenderung lebih selektif dan berorientasi pada investasi yang bersifat non-ekspansif di tengah dinamika perekonomian yang berkembang. Meski demikian, peningkatan kredit investasi masih berlangsung secara terbatas seiring kecenderungan pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam memanfaatkan pembiayaan perbankan untuk mendukung ekspansi usaha. Selain itu, kualitas kredit investasi juga perlu dicermati, tecermin dari NPL kredit investasi yang meningkat menjadi 1,90% dari sebelumnya 1,80%, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko pada sebagian debitur meskipun masih berada dalam level yang relatif terjaga.

Pertumbuhan kredit lebih lanjut masih tertahan oleh KMK yang terkontraksi 10,32% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 6,45% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan preferensi pelaku usaha dalam menggunakan dana internal perusahaan untuk proses produksi dibandingkan investasi, seiring dengan kapasitas simpanan yang juga meningkat. Di sisi lain, kualitas kredit modal kerja juga perlu dicermati, tecermin dari NPL KMK yang meningkat menjadi 4,42% dari sebelumnya 4,01%, sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Ke depan, prospek permintaan pembiayaan modal kerja masih terbuka seiring kondisi usaha yang relatif membaik. Hal tersebut tecermin dari hasil *liaison* Bank Indonesia yang menunjukkan likert scale permintaan domestik

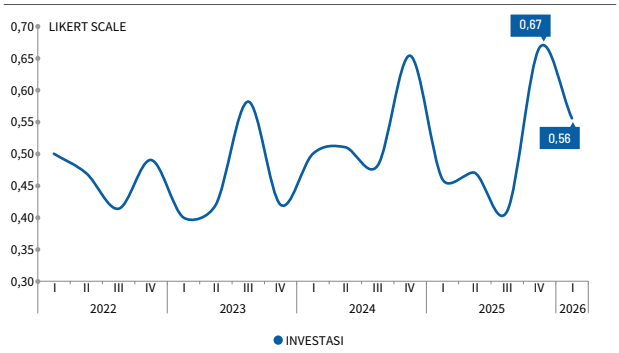
9 Sumber: GAIKINDO

10 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.5 Perkembangan Suku Bunga per Jenis Kredit



Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.6 Likert Scale Investasi

meningkat sebesar 0,64. Namun demikian, peningkatan suku bunga KMK menjadi 8,85% dari sebelumnya 8,80% mengindikasikan penyaluran kredit modal kerja masih dilakukan secara selektif oleh perbankan di tengah peningkatan risiko kredit.

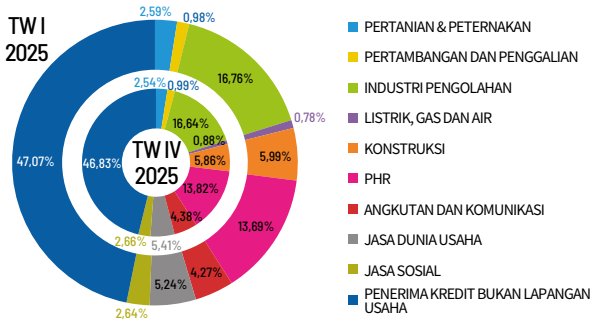
3.1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor

Ditinjau dari komposisi sektoral, industri pengolahan tetap mendominasi penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat pada triwulan I 2026 dengan pangsa sebesar 16,76%, tidak jauh berbeda dari 16,64% pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.7). Di posisi kedua, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) membukukan pangsa 13,69%, menurun tipis dari 13,82% pada triwulan sebelumnya. Posisi ketiga ditempati sektor konstruksi dengan pangsa 5,99%, sedikit menguat dari 5,86%. Adapun lapangan usaha pertanian dan peternakan mencatat pangsa 2,56%, hampir tidak berubah dari 2,54% pada periode sebelumnya.

Dari perspektif pertumbuhan, mesin utama ekspansi kredit pada triwulan I 2026 bertumpu pada industri pengolahan dan jasa dunia usaha, yang terakselerasi seiring kenaikan permintaan domestik dan aktivitas produksi menjelang HBKN Idulfitri. Di sisi lain, sektor konstruksi mengalami pembalikan arah menjadi kontraksi setelah sebelumnya tumbuh positif. Perlambatan juga berlanjut pada PHR, pertanian–peternakan, serta angkutan dan komunikasi yang masih berada di zona negatif, mencerminkan masih terbatasnya minat pelaku usaha di sektor-sektor tersebut dalam memanfaatkan pembiayaan perbankan.

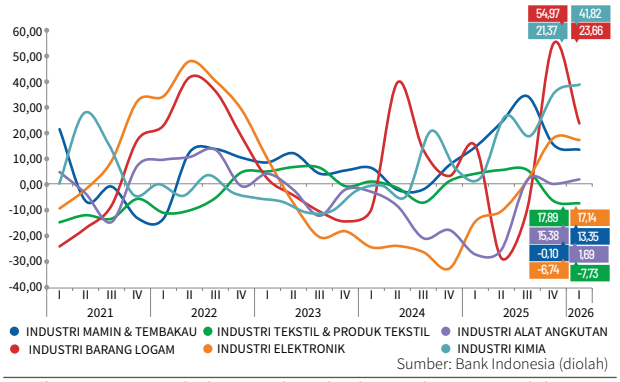
Kredit sektor industri pengolahan tumbuh terbatas sebesar 6,54% (yoy) pada triwulan I 2026, melambat dari 7,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kinerja positif ini bersumber dari beberapa subsektor unggulan. Industri kimia tampil sebagai pendorong terkuat dengan pertumbuhan kredit yang melonjak hingga 38,79% (yoy), jauh melampaui capaian triwulan sebelumnya sebesar 21,37% (yoy), ditopang oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku industri dan modal kerja menjelang HBKN Idulfitri. Industri kertas turut mencatatkan akselerasi yang menonjol, tumbuh 19,76% (yoy) dari hanya 5,92% (yoy) pada periode sebelumnya. Industri barang logam juga masih membukukan pertumbuhan yang solid sebesar 23,66% (yoy), meski lebih moderat dibandingkan lonjakan luar biasa 54,97% (yoy) yang terjadi pada triwulan IV 2025. Industri elektronik mempertahankan tren pertumbuhan yang konsisten sebesar 17,14% (yoy), ditopang oleh derasnya investasi pada infrastruktur *data center* dan semikonduktor dalam ekosistem transformasi digital serta pengembangan *artificial intelligence* (AI). Industri makanan minuman (mamin) dan tembakau juga memberi kontribusi positif dengan pertumbuhan kredit 13,35% (yoy), sejalan dengan peningkatan volume produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan konsumsi domestik pada momen HBKN Idulfitri. Penguatan kinerja subsektor-subsektor tersebut turut didukung oleh penurunan suku bunga kredit industri pengolahan menjadi 7,30% dari 7,40% pada periode sebelumnya.

Beberapa subsektor industri strategis Jawa Barat masih belum keluar dari tekanan pembiayaan. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mencatat penurunan kredit yang kian dalam sebesar 7,73% (yoy),



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.7 Pangsa Kredit Sektoral

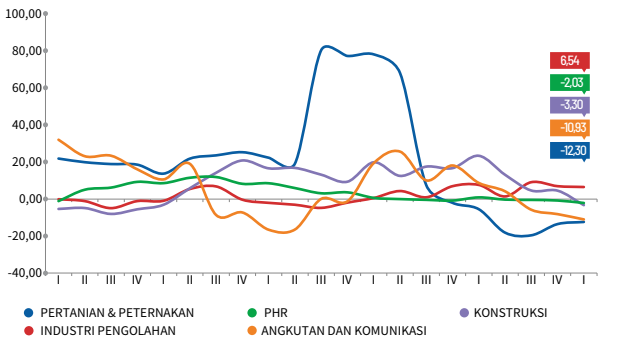


Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.9 Pertumbuhan Kredit Subsektor Industri Pengolahan

memburuk dari kontraksi 6,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sekaligus diikuti kenaikan NPL menjadi 5,46% dari 5,26%. Tren ini mengisyaratkan adanya tekanan permintaan yang berkelanjutan di tengah persaingan produk impor yang masih ketat. Subsektor plastik dan karet turut mencatat kontraksi yang berlanjut sebesar 15,63% (yoy), sedikit lebih dalam dari periode sebelumnya sebesar 14,99% (yoy). Berbeda dengan keduanya, subsektor alat angkutan menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan berbalik ke pertumbuhan positif sebesar 1,69% (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi 0,10% (yoy), seiring bergairahnya kembali penjualan kendaraan bermotor nasional yang turut mendorong kebutuhan pembiayaan industri otomotif.

Sektor konstruksi mengalami pergeseran yang cukup tajam pada triwulan I 2026, dengan pertumbuhan kredit yang berbalik menjadi kontraksi 3,30% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh 4,55% (yoy). Penurunan ini mencerminkan pola siklus triwulan pertama di mana penyerapan anggaran proyek pemerintah, termasuk infrastruktur dan bangunan yang masih rendah karena proses perencanaan dan pengadaan baru dimulai. Namun demikian, terdapat kenaikan NPL sektor konstruksi menjadi 3,35% dari 3,03% yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan risiko kredit ke depan. Sementara itu, suku bunga kredit konstruksi sedikit menurun menjadi 7,68% dari 7,71% memberikan ruang pertumbuhan bagi pembiayaan di sektor ini. Pemulihan kredit konstruksi diharapkan mulai terlihat seiring akselerasi realisasi belanja infrastruktur pemerintah dan penyelesaian proyek-proyek strategis yang dijadwalkan berjalan pada triwulan berikutnya.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

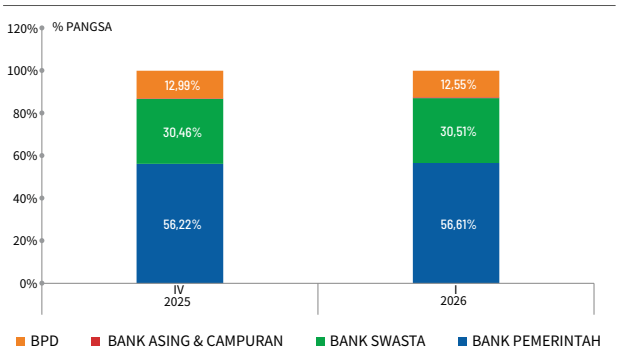
Grafik 3.8 Pertumbuhan Kredit Sektoral

Tekanan pada sektor PHR pada triwulan I 2026, tecermin dari kontraksi kredit yang melebar dari 0,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,03% (yoy). Penyumbang terbesar pelemahan ini adalah subsektor perdagangan besar dan eceran yang terkontraksi 3,19% (yoy), lebih dalam dari 1,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya, disertai kenaikan NPL menjadi 5,87% dari 5,58% yang perlu diwaspadai. Kecenderungan pelaku usaha ritel untuk mengandalkan pendanaan internal di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi turut meredam permintaan kredit pada subsektor ini. Di sisi yang berbeda, subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum (akmamin) masih mampu tumbuh melambat 6,71% (yoy), dari 8,56% (yoy) pada periode sebelumnya, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan pada momen HBKN Idulfitri. Peningkatan NPL pada sektor akmamin cukup signifikan dari 2,73% menjadi 4,20%, karena mengindikasikan tekanan arus kas yang mulai dirasakan pelaku usaha di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya solid.

Pada sektor pertanian dan peternakan, kredit tercatat masih terkontraksi sebesar 12,30% (yoy) pada triwulan I 2026, meskipun laju penurunan mulai sedikit mereda dibandingkan kontraksi 13,44% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lemahnya penyaluran kredit ini diiringi oleh memburuknya kualitas aset, sebagaimana tecermin dari kenaikan NPL menjadi 5,51% dari 5,14%, menunjukkan tekanan risiko kredit yang belum mereda. Suku bunga kredit pertanian yang masih berada di kisaran 10,49%, meskipun sedikit turun dari 10,64%, tetap menjadi kendala struktural dalam memperluas jangkauan pembiayaan, khususnya bagi petani skala kecil yang memiliki kapasitas agunan terbatas. Mengingat peran sentral sektor ini dalam mendukung ketahanan pangan daerah, diperlukan intervensi yang lebih terstruktur untuk membalikkan tren negatif ini. Perluasan program KUR pertanian, penguatan mekanisme penjaminan kredit berbasis klaster komoditas, serta integrasi pembiayaan rantai pasok dari hulu ke hilir, termasuk fasilitas pascapanen seperti pengeringan, pergudangan berpendingin, dan skema resi gudang, merupakan langkah konkret yang dapat meningkatkan kelayakan dan daya tarik kredit di sektor ini. Apabila ekosistem pembiayaan pertanian dapat diperkuat secara menyeluruh, sektor ini tidak hanya berpotensi mendorong peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga berkontribusi pada pengendalian inflasi volatile food dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian Jawa Barat secara berkelanjutan.

3.1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Kelompok Bank dan Lokasi Proyek

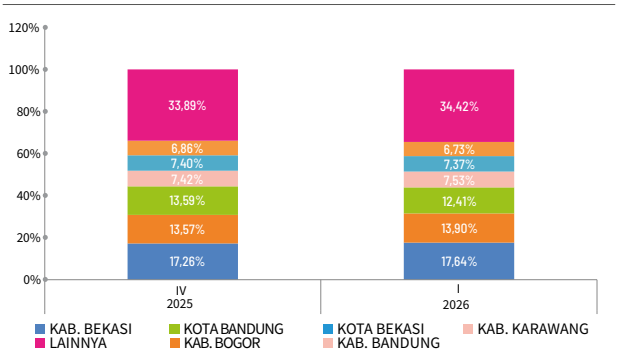
Ditinjau dari kelompok bank, bank pemerintah tetap dominan dalam penyaluran kredit di Jawa Barat pada triwulan I 2026 dengan pangsa sebesar 56,61%, meningkat dari 56,22% pada triwulan sebelumnya. Kuatnya posisi bank pemerintah ini mencerminkan berlanjutnya peran strategis perbankan milik negara sebagai katalis pembiayaan, khususnya untuk segmen produktif dan program-program kredit bersubsidi. Di sisi lain, bank swasta mencatat kenaikan pangsa yang moderat menjadi 30,51% dari 30,46%, menandakan ekspansi kredit yang berjalan secara bertahap. Sebaliknya, bank pembangunan daerah (BPD) mengalami penyempitan pangsa menjadi 12,55% dari



Grafik 3.10 Rasio Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Pembiayaan

12,99% pada triwulan sebelumnya perlu mendapat perhatian mengingat peran BPD yang strategis dalam menjangkau segmen masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Sementara itu, bank asing dan campuran masih mencatat pangsa sebesar 0,33%, relatif tidak berubah dari periode sebelumnya.

Dari sisi distribusi spasial, pola konsentrasi kredit pada wilayah-wilayah utama Jawa Barat masih berlanjut pada triwulan I 2026. Lima kabupaten/kota teratas, yakni Kabupaten Bekasi (17,64%), Kabupaten Bogor (13,90%), Kota Bandung (12,41%), Kabupaten Karawang (7,53%), dan Kota Bekasi (7,37%), secara kolektif menyerap 58,85% dari total kredit di Jawa Barat (Grafik 3.11). Dibandingkan triwulan sebelumnya, pangsa gabungan kelima wilayah ini sedikit menyusut dari 59,24%, mengindikasikan adanya redistribusi kredit yang perlahan mulai bergerak ke wilayah-wilayah lain. Kabupaten Bekasi mempertahankan posisi teratas dengan pangsa yang meningkat menjadi 17,64% dari 17,26%, selaras dengan intensitas aktivitas industrinya sebagai salah satu kawasan manufaktur terbesar di Indonesia. Kabupaten Bogor turut mencatat kenaikan pangsa menjadi 13,90% dari 13,57%, mencerminkan pertumbuhan permintaan kredit yang didorong oleh ekspansi industri dan perdagangan di wilayah penyangga ibu kota tersebut. Sebaliknya, pangsa Kota Bandung menyusut dari 13,59% menjadi 12,41%, perlu mendapatkan perhatian mengingat peran Kota Bandung sebagai pusat perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Konsentrasi yang masih tinggi pada beberapa wilayah menunjukkan bahwa pemerataan akses kredit ke 22 kabupaten/kota lainnya masih menjadi tantangan. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah,



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.11 Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek Menurut Lokasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat

OJK, dan perbankan, termasuk melalui optimalisasi peran BPD dan perluasan program KUR, menjadi kunci untuk mendorong inklusi pembiayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antarwilayah di Jawa Barat.

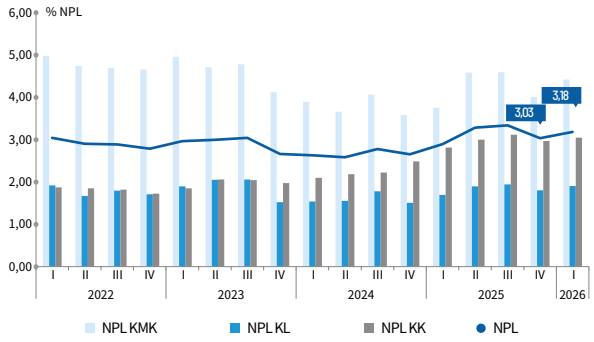
3.2 RISIKO PERBANKAN

3.2.1 Risiko Kredit

Kualitas penyaluran kredit di Jawa Barat pada triwulan I 2026 menunjukkan sedikit penurunan, tecermin dari meningkatnya rasio NPL *gross* menjadi 3,18% dari sebelumnya 3,03%. Kenaikan ini disebabkan, terutama peningkatan NPL kredit modal kerja yang cukup signifikan dari 4,01% menjadi 4,42%. Disamping itu, NPL kredit konsumsi dan investasi juga meningkat masing-masing menjadi 3,04% dan 1,90%, menandakan adanya dinamika perekonomian yang sedang berlangsung. Secara sektoral, kenaikan NPL terjadi pada sektor PHR dan pertanian yang masing-masing meningkat menjadi 5,65% dan 5,51% atau masih berada di atas ambang batas aman NPL (5%). Sektor konstruksi turut mengalami peningkatan dari 3,03% menjadi 3,35% pada periode berjalan. Lebih lanjut, NPL kredit pada sektor industri pengolahan juga meningkat dari 2,54% menjadi 2,62%, terutama disumbang oleh industri tekstil dan produk tekstil yang masih berada pada level risiko tinggi (dari 5,26% menjadi 5,47%). Kemudian diikuti industri alat angkutan (dari 1,15% menjadi 1,80%) dan industri kayu dan olahan (dari 6,32% menjadi 6,72%), yang mengindikasikan adanya pelemahan pada subsektor padat karya. Namun demikian, beberapa subsektor industri pengolahan mengalami perbaikan kualitas kredit yang ditandai penurunan NPL, yaitu pada sektor industri kertas (dari 3,97% menjadi 3,38%), industri elektronik (dari 4,56% menjadi 4,18%), dan industri alas kaki (dari 0,78% menjadi 0,66%). Secara keseluruhan, peningkatan NPL pada sektor PHR dan sektor berbasis musiman seperti pertanian mengindikasikan bahwa intermediasi perbankan masih menghadapi kerentanan, terutama terhadap pelemahan daya beli dan tekanan biaya input yang memengaruhi kapasitas bayar debitur.

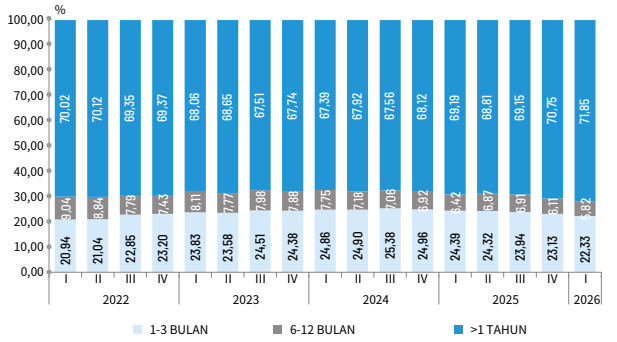
Pada golongan debitur, NPL perorangan sedikit meningkat dari 3,66% menjadi 3,79%, menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap kualitas kredit rumah tangga meskipun aktivitas konsumsi masih terjaga. Berdasarkan jangka waktu, peningkatan risiko kredit terlihat pada seluruh tenor baik kredit berjangka panjang, menengah (12-36 bulan) dan pendek (<12 bulan) yang secara berurutan sebesar 3,14%; 3,15%; dan 3,67% atau lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mencapai 2,95%; 3,09%; dan 3,63%. Meskipun demikian, secara agregat kualitas kredit masih relatif terjaga, tecermin dari rasio NPL pada seluruh golongan debitur yang masih berada di bawah ambang batas 5%, serta NPL debitur pemerintah yang tetap rendah sebesar 0,44%. Di sisi lain, kualitas kredit pada segmen UMKM perlu mendapat perhatian lebih lanjut seiring NPL yang terus meningkat hingga mencapai 6,62% atau berada di atas batas aman. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kerentanan sebagian pelaku UMKM, khususnya pada sektor konsumsi dan industri padat karya, terhadap tekanan biaya usaha dan dinamika permintaan yang masih berfluktuasi.

Perkembangan *Loan at Risk* (LaR) di Jawa Barat pada triwulan I 2026 menunjukkan sedikit peningkatan tekanan risiko kredit dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan LaR tecermin dari meningkatnya komponen NPL + Kol. 2 + Restru Kol. 1 dari 12,43% pada triwulan IV 2025 menjadi 12,78% pada triwulan I 2026. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan kredit "dalam perhatian khusus" (Kol. 2 non-restrukturisasi) dari 2,54% menjadi 2,82%. Di sisi lain, NPL *gross* juga naik dari 3,03% menjadi 3,14%, yang menunjukkan bahwa sebagian debitur mulai mengalami kesulitan pembayaran setelah keluar dari skema restrukturisasi atau dari fase *watchlist* (Kol. 2). Tren peningkatan ini perlu diwaspadai, khususnya pada kelompok debitur rentan seperti pelaku UMKM dan individu dengan beban cicilan tinggi.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.12 Rasio Non-Performing Loan (NPL) di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit



Sumber: LBUT Bank Indonesia

Grafik 3.14 Perkembangan Proporsi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jangka Waktu (%)

Secara keseluruhan, kualitas penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat pada triwulan I 2026 masih relatif terjaga meskipun terdapat peningkatan risiko pada beberapa indikator. Hal tersebut tecermin dari rasio NPL yang masih berada dalam batas aman, meskipun mengalami kenaikan pada sejumlah segmen debitur dan jenis penggunaan kredit. Di sisi lain, *Loan at Risk* (LaR) juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa risiko kredit ke depan masih perlu dicermati. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan debitur dan kualitas aset perbankan tetap terjaga, namun perbankan perlu terus memperkuat manajemen risiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Ke depan, penyaluran pembiayaan yang lebih terarah pada sektor-sektor produktif dengan profil risiko yang terukur akan menjadi penting untuk menjaga kualitas kredit sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

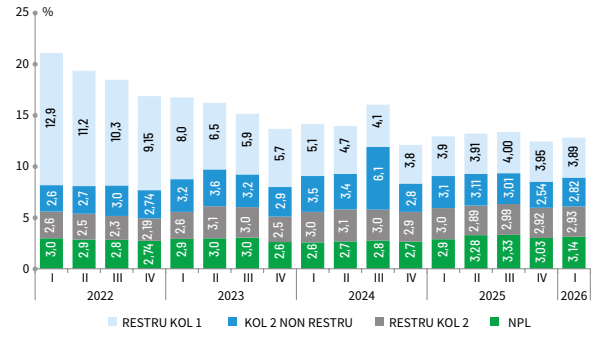
3.2.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas perbankan di Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap terjaga, tecermin dari struktur tenor sumber dana dan penyaluran kredit yang relatif seimbang. Simpanan dengan jangka waktu panjang (>1 tahun) masih mendominasi dengan pangsa sebesar 71,85%, sejalan dengan proporsi kredit jangka panjang (>3 tahun) yang mencapai 70,91% (Grafik 3.14 dan 3.15). Di sisi lain, Loan to Deposit Ratio (LDR) menurun dari 88,61% menjadi 85,98% pada triwulan laporan, mengindikasikan kondisi likuiditas yang masih memadai di tengah fungsi intermediasi perbankan yang tetap berjalan baik. Ke depan, struktur tenor yang selaras diperkirakan tetap mendukung ketahanan likuiditas perbankan. Namun demikian, posisi LDR yang masih berada pada kisaran relatif tinggi perlu terus dicermati melalui pengelolaan likuiditas dan biaya dana yang *prudent*, sehingga penyaluran kredit dapat tetap berlangsung secara berkelanjutan tanpa meningkatkan tekanan terhadap kondisi likuiditas perbankan.

3.3 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

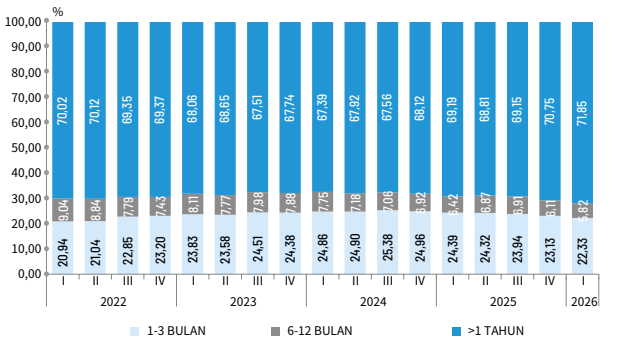
3.3.1 Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada UMKM pada triwulan I 2026 mengalami perbaikan meski masih terkontraksi 2,11% (yoy) dari triwulan IV 2025



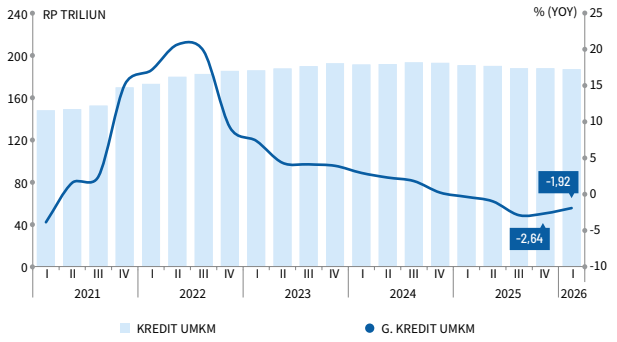
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.13 Perkembangan Loan at Risk Proyek di Jawa Barat



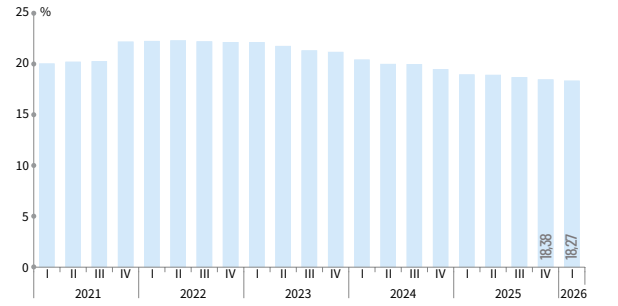
Sumber: LBUT Bank Indonesia

Grafik 3.15 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jangka Waktu



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.16 Perkembangan Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

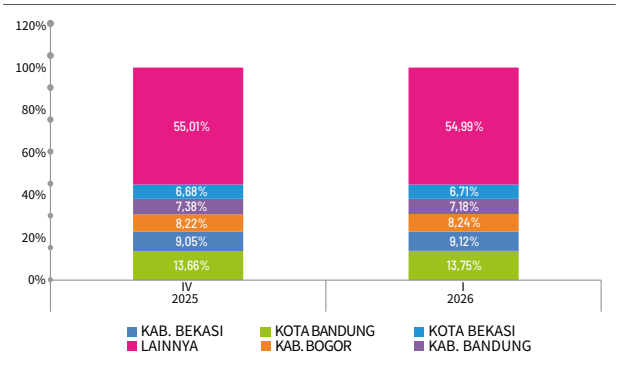
Grafik 3.17 Rasio Kredit UMKM di Jawa Barat

sebesar 2,64% (yoy) (Grafik 3.16). Perbaikan pada kredit UMKM didukung oleh tetap tumbuhnya kredit investasi serta perbaikan pada kontraksi kredit modal kerja (KMK). Kredit investasi UMKM tumbuh positif 8,89% (yoy), sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 9,03% (yoy), mengindikasikan pelaku UMKM yang melakukan ekspansi usaha pada awal tahun. Sementara, KMK terkontraksi 6,60% (yoy), membaik dari periode sebelumnya yang terkontraksi 7,36% (yoy). Hal ini mencerminkan tanda pemulihan aktivitas usaha, di mana pelaku UMKM mulai kembali meningkatkan produksi dan investasi secara terbatas seiring dengan permintaan yang lebih stabil terutama pada periode HBKN Idulfitri.

Di sisi lain, NPL kredit UMKM justru mencatatkan peningkatan menjadi 6,63% dari periode sebelumnya yang sebesar 6,29%. porsi penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan bank umum pada triwulan I 2026 tercatat turun menjadi sebesar 18,27% dari periode sebelumnya yang sebesar 18,38% (Grafik 3.17). Suku bunga kredit UMKM pun tercatat masih cukup tinggi yaitu sebesar 11,74% atau tetap dari periode sebelumnya. Risiko kredit yang masih cukup tinggi berdampak kepada perbankan yang lebih selektif dan berhati-hati terhadap penyaluran kredit ke UMKM.

Penguatan akses pembiayaan UMKM perlu mendapat prioritas mengingat posisi UMKM sebagai salah satu tonggak perekonomian Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilakukan baik dari sisi *supply* maupun *demand.* Secara *supply,* penguatan dilakukan melalui peningkatan appetite perbankan, inovasi skema pembiayaan yang lebih adaptif, serta fasilitasi *business matching* antara UMKM dan lembaga keuangan. Sementara, dari sisi *demand,* penguatan kapasitas UMKM melalui perluasan rantai pasok dan akses pasar.

Berdasarkan kategori debitur, membaiknya pertumbuhan penyaluran kredit UMKM ditopang utamanya oleh perbaikan pada kategori usaha mikro dan menengah serta tetap tumbuhnya kredit usaha kecil. Kredit usaha mikro dengan pangsa penyaluran terbesar yaitu mencapai 45,53% dari keseluruhan golongan debitur, mencatatkan perbaikan penyaluran menjadi -4,53% (yoy) pada triwulan I 2026, dari periode sebelumnya yang tumbuh -8,05% (yoy). Kredit usaha menengah (pangsa 23,31%) turut mencatatkan perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi 2,92% (yoy) menjadi -1,45% (yoy). Hal ini sejalan dengan penurunan pada suku bunga untuk kedua kategori debitur tersebut sehingga meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan menengah untuk melakukan pengajuan pembiayaan kepada perbankan. Suku bunga kredit usaha mikro dan menengah pada triwulan I 2026 secara berurutan sebesar 14,29% dan 9,35%, turun dari periode sebelumnya yang sebesar 14.60% dan 9,42%. Sementara, kredit usaha kecil (pangsa 31,16%) tetap tumbuh positif sebesar 1,13% (yoy) meski sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,35% (yoy). Perkembangan penyaluran kredit berdasarkan debitur sejalan dengan adanya kenaikan pangsa penyaluran untuk kredit usaha mikro dari 44,74% pada triwulan IV 2025 menjadi 45,53% pada triwulan I 2026. Sementara, pangsa penyaluran kredit untuk usaha kecil dan menengah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 31,94% dan 23,33% menjadi 31,16% dan 23,31%.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.18 Proporsi Kredit UMKM per Kab/Kota di Jawa Barat (%)

Secara spasial, penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat masih didominasi oleh 5 daerah utama pusat industri pengolahan dan perdagangan, yaitu Kota Bandung dengan pangsa sebesar 13,75%, diikuti oleh Kabupaten Bekasi (9,12%), Kabupaten Bogor (8,24%), Kabupaten Bandung (7,18%), dan Kota Bekasi (6,71%) (Grafik 3.18). Sementara itu, pangsa penyaluran kredit pada wilayah lainnya sebesar 54,99% atau relatif stabil dari sebelumnya 55,01%.

Sejalan dengan perbaikan pada kredit UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut mencatatkan perbaikan dengan tumbuh -4,02% (yoy), dari periode sebelumnya yang tumbuh -6,62% (yoy). Berdasarkan kategorinya, perbaikan pada KUR dikontribusikan oleh tumbuhnya kredit usaha mikro (pangsa 68,28%) sebesar 1,70% (yoy) dari periode sebelumnya yang terkontraksi 13,30% (yoy). Sementara, kredit usaha kecil dan menengah terkontraksi cukup dalam masing-masing sebesar 13,85% (yoy) dan 51,99% (yoy) dari periode sebelumnya yang tumbuh 7,24% (yoy) dan -48,98% (yoy).

Secara sektoral, pemulihan pada penyaluran intermediasi UMKM didukung oleh sektor pertanian dan peternakan serta perbaikan pada beberapa sektor utama Jawa Barat seperti perdagangan dan industri pengolahan. Penyaluran kredit pada sektor pertanian dan peternakan (pangsa 8,1%) mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,65% (yoy), sedikit lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh 8,64% (yoy). Perbaikan ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian seiring dengan momentum panen raya pada triwulan I 2026 dan peningkatan permintaan komoditas pangan pada periode HBKN Idulfitri. Sementara, sektor perdagangan (pangsa 48,3%) mengalami perbaikan kendati masih terkontraksi 5,25% (yoy) dari periode sebelumnya yang terkontraksi 5,83% (yoy). Sektor industri pengolahan (pangsa 54,3%) turut membaik dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar -4,91% (yoy) menjadi tumbuh -3,39% (yoy). Perbaikan pada kedua sektor tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan domestik pada periode HBKN Idulfitri yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi usaha. Di sisi lain, kinerja intermediasi pada sektor konstruksi justru mencatatkan pelemahan yang lebih dalam yaitu sebesar -4,40% (yoy) dari periode sebelumnya yang sebesar -3,08% (yoy). Periode pembaharuan atau dimulainya kontrak pada awal tahun, serta berkurangnya hari kerja akibat lbur HBKN Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, disinyalir menahan aktivitas konstruksi di Jawa Barat.

3.3.2 Program Peningkatan Akses Keuangan UMKM dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Jawa Barat

UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97,1% tenaga kerja, sehingga memiliki peran krusial dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di Jawa Barat, yang menampung sekitar 14% dari total UMKM nasional, sektor ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi sekaligus sumber signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Di tengah tren penurunan rasio kredit UMKM, kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat dukungan pembiayaan serta mengakselerasi pengembangan UMKM agar semakin kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Bank Indonesia terus mendorong penguatan pembiayaan UMKM melalui pendekatan dari sisi *supply* dan *demand*. Dari sisi *supply*, kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit dalam kisaran target 8–12% (yoy), salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan guna meningkatkan pembiayaan ke sektor prioritas, khususnya UMKM. Sejak 1 Desember 2025, batas maksimal insentif KLM ditingkatkan dari 5% menjadi 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

Selain itu, cakupan kebijakan juga diperluas dengan memasukkan sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan sebagai sektor prioritas tambahan. Dalam ketentuan terbaru, perbankan yang mampu mencatatkan pertumbuhan pembiayaan pada sektor tersebut di atas 4% (yoy) dengan pangsa lebih dari 1% berpotensi memperoleh insentif hingga 1,5% dengan tambahan maksimum 0,3%, sehingga diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan pembiayaan kepada UMKM.

Lebih lanjut, Bank Indonesia turut melakukan penguatan pembiayaan UMKM dari sisi *demand* terutama melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pasar sebagai upaya meningkatkan kelayakan pembiayaan (*bankability*) UMKM. Dalam momentum Ramadan dan Idulfitri 2026, Bank Indonesia Jawa Barat menginisiasi strategi promosi perdagangan melalui rangkaian kegiatan Optimalisasi Marketplace di Zaman Elektronifikasi Transaksi (OMZET) Road to Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2026 yang diselenggarakan pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026. Kegiatan ini mencakup pendampingan kepada pelaku UMKM dalam mengoptimalkan penjualan digital melalui pemanfaatan fitur iklan dan voucher pada platform marketplace, serta integrasi ke dalam kampanye penjualan digital Road to KKJ 2026. Sebanyak 98 UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Barat telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan diperkirakan mencatatkan peningkatan penjualan hingga 60%.

Selanjutnya, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya lembaga keuangan, terus diperkuat guna memperluas akses pasar sekaligus mendukung peningkatan akses pembiayaan UMKM. Bank Indonesia Jawa Barat berkolaborasi dengan Bank Mandiri dalam penyelenggaraan sejumlah kegiatan promosi perdagangan, antara lain Indonesia Mom Baby Kids Expo (IMOBY) pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026 serta Trademark Expo pada 5–8 dan 12–15 Maret 2026 yang diikuti hingga 300 UMKM. Selain itu, sinergi juga dilakukan bersama Bank BCA melalui partisipasi dalam BCA Expoversary Bandung 2026 pada 7–8 Februari 2026. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha dan visibilitas UMKM sehingga memperkuat profil usaha dan mendorong peningkatan kelayakan pembiayaan.

Di samping berbagai inisiatif tersebut, Bank Indonesia Jawa Barat juga secara rutin menyelenggarakan program *business matching* sebagai upaya konkret dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Melalui program ini, dilakukan identifikasi dan kurasi terhadap UMKM potensial yang memiliki kesiapan untuk memperoleh pembiayaan, baik dari sisi kinerja usaha, tata kelola, maupun prospek bisnis. Hasil kurasi tersebut kemudian disampaikan kepada perbankan sebagai pipeline pembiayaan, sehingga dapat mempercepat proses intermediasi dan memperluas penyaluran kredit kepada UMKM.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat kapasitas UMKM baik dari sisi manajerial, keuangan, maupun pemenuhan standar usaha agar semakin memenuhi kriteria kelayakan perbankan. Penguatan ini diharapkan dapat menurunkan persepsi risiko lembaga keuangan dan pada akhirnya meningkatkan *appetite* penyaluran kredit bagi UMKM, sehingga memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.4 ASESMEN SEKTOR KORPORASI

3.4.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Sepanjang triwulan I 2026, sektor korporasi Jawa Barat dihadapkan dengan berbagai dinamika yang utamanya berasal dari faktor eksternal global. Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan krusial yang melayani hingga 20% kebutuhan pasokan energi global. Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan biaya energi dan harga komoditas terutama yang bersumber dari negara di Kawasan Timur Tengah. Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga turut menimbulkan hambatan distribusi barang dan peningkatan biaya pengiriman (*freight cost*) yang pada gilirannya berpotensi menghambat kinerja sektor korporasi. Kejadian ini mendorong negara-negara mitra dagang utama Jawa Barat seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Eropa, dan Jepang, justru melakukan *frontloading* pembelian input secara agresif pada triwulan I 2026. Hal tersebut tecermin pada hasil *Purchasing Managers' Index* (PMI) negara tersebut yang berada pada zona optimis kecuali

Tiongkok. *Frontloading* tersebut tidak sepenuhnya berdampak pada peningkatan ekspor Jawa Barat, mengingat struktur ekspor Jawa Barat yang didominasi oleh produk jadi, bukan produk hulu maupun barang antara.

Ekspor luar negeri Jawa Barat pada triwulan I 2026 termoderasi, seiring dengan penurunan permintaan di beberapa negara mitra dagang. Total nilai ekspor Jawa Barat terkontraksi hingga 2,51% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang mampu tumbuh 0,96% (yoy). Secara sektoral, perlambatan ekspor tersebut utamanya terjadi pada industri pengolahan yang terkontraksi 2,54% (yoy). Lebih lanjut, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh komoditas elektronik dan TPT yang disinyalir disebabkan oleh mahalnya biaya bahan baku impor akibat pelemahan Rupiah serta penurunan drastis permintaan dari negara mitra dagang utama. Perlambatan kinerja ekspor turut terkonfirmasi dari hasil *liaison* Bank Indonesia di mana nilai *likert scale* ekspor triwulan I 2026 tercatat sebesar -0,25, lebih rendah dari periode sebelumnya yang sebesar 0,15. tumbuh lebih rendah pada tw I 2026 sebesar -0,25 dari sebelumnya sebesar 0,15.

Di sisi lain, kinerja impor luar negeri Jawa Barat menunjukkan perbaikan meskipun masih berada dalam zona kontraksi, dengan realisasi nominal impor tumbuh sebesar -2,85% (yoy), lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar -14,51% (yoy). Perbaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya impor bahan baku yang tumbuh sebesar 3,64% (yoy), berbalik dari kontraksi sebesar 4,91% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, impor barang modal juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 8,27% (yoy), dibandingkan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -22,90% (yoy). Sementara itu, impor barang konsumsi masih mengalami kontraksi sebesar 33,10% (yoy), meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 52,49% (yoy). Perkembangan ini mencerminkan adanya kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan *frontloading* pembelian bahan baku dan barang modal sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global yang berkepanjangan. Di sisi lain, konsumen cenderung beralih ke produk domestik di tengah ekspektasi kenaikan harga barang impor akibat meningkatnya biaya energi dan harga komoditas global.

Kombinasi dinamika tersebut, termasuk peningkatan biaya energi, gangguan distribusi, serta fluktuasi nilai tukar, mendorong pelaku usaha di Jawa Barat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pelaku usaha cenderung memprioritaskan efisiensi, menjaga likuiditas, serta melakukan penyesuaian strategi produksi untuk merespons ketidakpastian yang masih tinggi. Di sisi lain, perlambatan kinerja ekspor di tengah belum meratanya pemulihan permintaan global turut menahan kinerja sektor korporasi secara keseluruhan. Selain itu, berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, beberapa pelaku usaha juga mengeluhkan fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada peningkatan biaya input produksi. Oleh karena itu, eksposur risiko nilai tukar perlu diantisipasi melalui strategi mitigasi seperti pemanfaatan instrumen lindung nilai (*hedging*) serta optimalisasi penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT) dalam kegiatan perdagangan internasional.

3.4.2 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

Kinerja intermediasi sektor korporasi di Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencatatkan penurunan dengan terkontraksi 0,96% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 2,09% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh kontraksi yang semakin dalam pada KMK, sementara kredit investasi tetap tumbuh kuat pada periode berjalan. KMK dengan pangsa 52,23% terkontraksi 10,59% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,11% (yoy), seiring dengan preferensi korporasi mengoptimalisasi arus kas internal untuk membiayai produksi. Perlambatan ini diiringi dengan meningkatnya risiko pembiayaan KMK yang meningkat dengan NPL dari sebesar 3,17% pada periode sebelumnya yang menjadi sebesar 3,57%. Di sisi lain, kredit investasi dengan pangsa 47,69%, tetap tumbuh 12,30% (yoy), meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,61% (yoy). Peningkatan kredit investasi sejalan dengan kinerja PMTB yang tetap kuat pada periode berjalan yang mengindikasikan optimisme pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Permintaan kredit untuk investasi juga tecermin oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mencatatkan adanya peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi dari 5,54% menjadi 7,59%. Kualitas penyaluran kredit investasi juga terpantau masih stabil dengan NPL sebesar 0,80%, dari periode

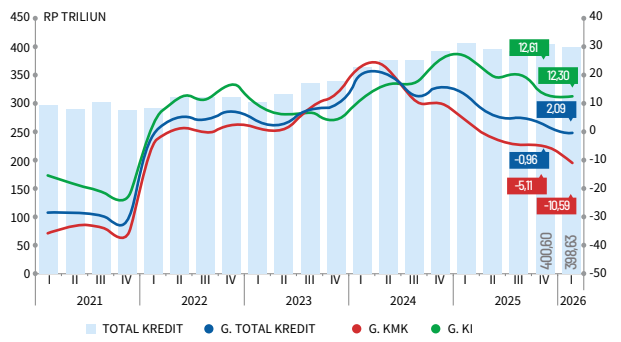
sebelumnya yang sebesar 0,72%. Secara keseluruhan, kualitas kredit korporasi masih terjaga, terkonfirmasi dari NPL sebesar 2,25% pada periode berjalan kendati sedikit meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 2,07%. Hal ini menggambarkan kondisi pelaku usaha korporasi di Jawa Barat yang tetap optimis terhadap kondisi ekonomi ke depan dengan mengambil pembiayaan terutama investasi jangka panjang, namun cenderung hati-hati terhadap pembelian barang jangka pendek terutama dengan upaya efisiensi di tengah kenaikan biaya energi dan harga komoditas.

Kebijakan moneter Bank Indonesia yang longgar seiring dengan penurunan BI-Rate tertransmisi kepada penurunan suku bunga tertimbang (SBT) kredit korporasi di Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, SBT kredit korporasi tercatat sebesar 7,33%, turun dari 7,39%. Penurunan SBT utamanya terjadi pada jenis kredit investasi yakni sebesar 7,32% dari sebelumnya sebesar 7,43%. Lebih lanjut, KMK turut mencatatkan penurunan SBT secara terbatas dari 7,35% menjadi 7,34%. Penurunan ini menunjukkan perbankan yang menyesuaikan *pricing* untuk mendorong penyerapan kredit, terutama pada investasi, sejalan dengan optimisme terhadap prospek pembiayaan jangka panjang.

Secara sektoral, perlambatan kinerja penyaluran kredit korporasi dipengaruhi oleh penurunan permintaan kredit pada sektor utama seperti konstruksi dan PHR. Sektor konstruksi dengan porsi penyaluran kredit mencapai 14,99%, mencatatkan kontraksi 3,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 4,97% (yoy). Hal ini sejalan dengan tengah berlangsungnya periode pembaharuan kontrak pada awal tahun, serta berkurangnya hari kerja akibat lbur HBKN Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, yang disinyalir menahan aktivitas konstruksi di Jawa Barat. Di samping itu, kualitas kredit konstruksi mulai perlu diwaspadai seiring dengan adanya kenaikan NPL menjadi 3,24%, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang sebesar 2,91%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja kredit sektor konstruksi masih tertahan oleh faktor musiman dan penyesuaian aktivitas usaha, dengan risiko kualitas kredit yang perlu terus dicermati.

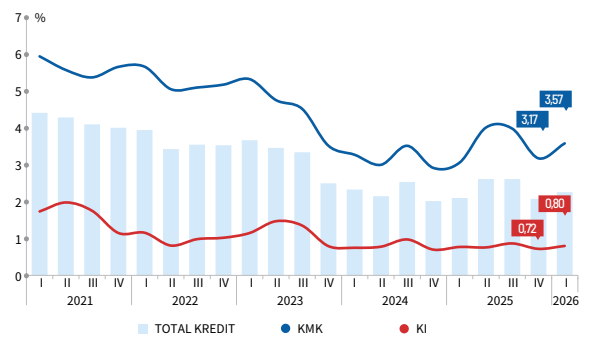
Pertumbuhan kredit pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) juga terpantau melandai, atau tumbuh 4,60% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang mampu tumbuh 8,27% (yoy). Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya permintaan kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 2,99% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 6,67% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan moderasi pertumbuhan yang terjadi pada PDRB sektor perdagangan, seiring dengan pelaku usaha yang masih berhati-hati dalam mengelola ekspansi bisnis di tengah dinamika harga energi dan komoditas global. Lebih lanjut, pertumbuhan kredit sektor PHR masih ditopang oleh penyaluran kredit untuk penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman yang tercatat tetap tumbuh *double digit* yaitu sebesar 13,35% (yoy), kendati termoderasi dari periode sebelumnya yang tumbuh 16,71% (yoy). Tetap kuatnya penyaluran pada sektor tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada triwulan I 2026, tecermin oleh jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ke Jawa Barat yang mencapai 56,54 juta perjalanan atau meningkat 17,48% (yoy) di tengah momentum Ramadan dan Idulfitri. Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor PHR perlu dicermati lebih lanjut seiring dengan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) menjadi 3,96% dari sebelumnya 3,43%, yang terutama dikontribusikan oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat penopang dari sisi permintaan domestik, kinerja kredit sektor PHR tetap menghadapi tekanan dengan risiko kualitas kredit yang perlu diwaspadai.

Kinerja intermediasi korporasi sektor pertanian dan peternakan juga terpantau masih tertahan dengan mengalami penurunan kredit yang cukup dalam hingga -30,44% (yoy), meskipun sedikit membaik dari periode sebelumnya sebesar -30,55% (yoy). Melemahnya kinerja penyaluran kredit pada sektor ini disinyalir oleh belum kuatnya permintaan pembiayaan dari pelaku usaha tani, dan tingginya sensitivitas sektor ini terhadap cuaca serta fluktuasi biaya input. Pada 2026, wilayah Jawa diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang sehingga meningkatkan kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit lebih lanjut. Risiko kredit sektor pertanian dan peternakan terpantau meningkat yaitu sebesar 4,20% dari periode sebelumnya yang sebesar 4,15%. Tekanan tersebut turut diperkuat oleh suku bunga tertimbang (SBT) kredit



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.19 Perkembangan Kredit Korporasi di Jawa Barat

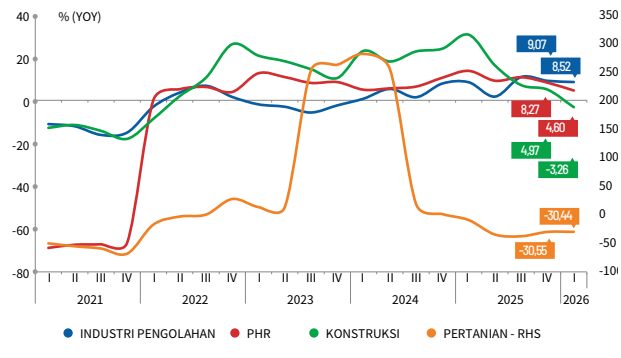


Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.21 Perkembangan NPL per Jenis Kredit

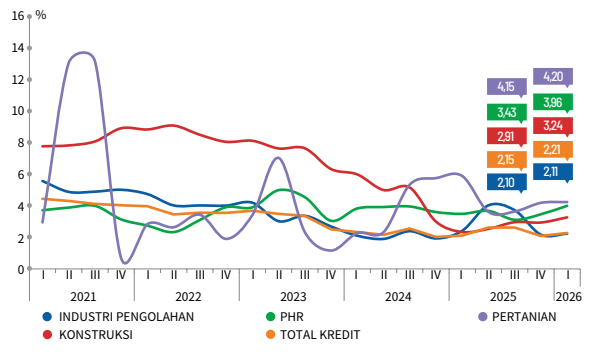
pertanian yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya, yaitu 7,50%, meskipun perbankan telah menurunkannya dari 7,75% pada periode sebelumnya sehingga menjadi level terendah sejak paruh 2022. Ke depan, peluang akselerasi pembiayaan ke depan tetap terbuka, terutama melalui penguatan berbagai program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta agenda swasembada pangan yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat akses pasar, dan mendorong kelayakan pembiayaan di sektor pertanian dan peternakan. Namun, kualitas kredit sektor pertanian tetap harus diwaspadai. Berbagai upaya untuk menjaga produktivitas pertanian terutama agar tidak bergejolak terhadap cuaca perlu dilakukan sehingga kapasitas bayar sektor tersebut dapat terus terjaga.

Sementara, sektor industri pengolahan yang menduduki porsi penyaluran kredit terbesar yakni mencapai 38,50%, tercatat tumbuh 8,52% (yoy), relatif tetap kuat dari periode sebelumnya yang tumbuh 9,07% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh subsektor industri mamin yang tumbuh 20,09% (yoy), meski tidak sekuat triwulan IV 2025 yang sebesar 23,91% (yoy), sejalan dengan peningkatan aktivitas industri khususnya untuk memenuhi kebutuhan HBKN Idulfitri. Pertumbuhan turut didorong oleh subsektor industri barang dari logam serta elektronik yang masing-masing tumbuh 24,52% (yoy) dan 17,85% (yoy), sejalan dengan masifnya investasi yang masuk pada industri untuk kebutuhan *high tech industry.* Membaiknya kinerja industri pengolahan turut tecermin pada NPL yang relatif baik sebesar 2,21%. Sementara, suku bunga sektoral terpantau lebih longgar sebesar 6,83%, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6,92% dan menjadi yang terendah sejak tahun 2024. Tingginya penyaluran dan membaiknya kualitas kredit pada industri pengolahan di tengah suku bunga yang relatif kompetitif semakin mendukung penguatan ekosistem usaha ke depan kendati dihadapkan dengan ketidakpastian global.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.20 Pertumbuhan Kredit Korporasi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Utama



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

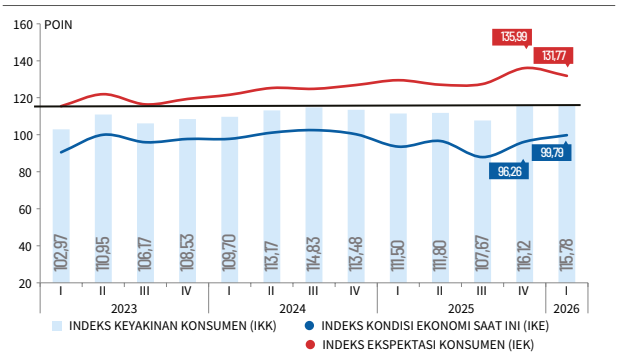
Grafik 3.22 Perkembangan NPL per Sektor Utama (dalam %)

3.5 KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

3.5.1 Kinerja dan Ketahanan Rumah Tangga

Pada triwulan I 2026, optimisme masyarakat Jawa Barat terhadap kondisi ekonomi cenderung meningkat. Hasil survei konsumen Bank Indonesia mencatatkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada zona optimis (>100) atau sebesar 115,78 dari periode sebelumnya yang sebesar 116,12. Optimisme ini ditopang oleh kuatnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang berada pada zona optimis sebesar 131,77, sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 135,99. Hal tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya ekspektasi terhadap peningkatan kegiatan usaha yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Hal tersebut sejalan dengan berbagai program pemerintah terutama paket kebijakan stimulus 8+4+5 seperti program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta masih berlangsungnya program magang nasional hingga paruh kedua tahun 2026. Program tersebut harapannya dapat mendorong dibukanya lapangan kerja dan akselerasi aktivitas usaha. meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini, tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang meningkat menjadi 99,79 dari periode sebelumnya yang sebesar 96,26, kendati masih belum berada pada zona optimis. ke depan, terkonfirmasi dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat pada level 135,99 dari periode sebelumnya sebesar 127,37. Ke depan, terdapat keyakinan akan adanya peningkatan kegiatan usaha yang selanjutnya berdampak pada peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan.

Sementara, keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dibandingkan satu semester ke belakang cenderung membaik, kendati masih memiliki ruang peningkatan lebih lanjut. Hal ini tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang meningkat menjadi 99,79 dari periode sebelumnya yang sebesar 96,26, kendati masih berada di bawah level optimis. Berdasarkan komponen pembentuknya,

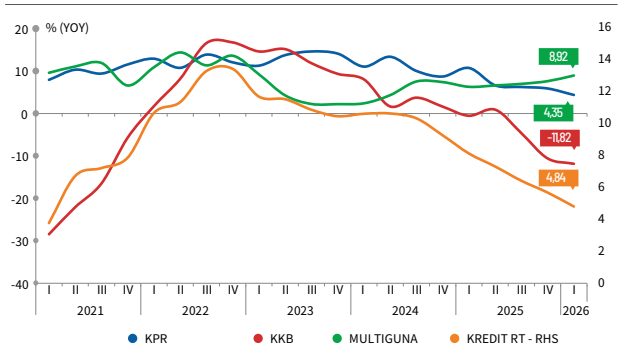


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 3.23 Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Jawa Barat

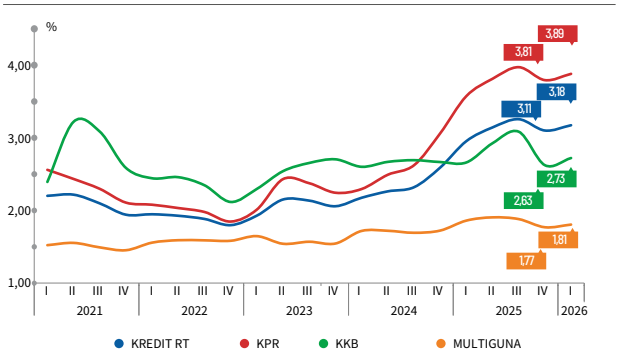
membaiknya keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini didukung oleh adanya peningkatan penghasilan didorong oleh pencairan THR dan gaji ke-13 ASN pada periode HBKN Idulfitri serta membaiknya ketersediaan lapangan kerja. Sementara, pembelian barang kebutuhan tahan lama masih relatif tertahan seiring preferensi masyarakat untuk mengutamakan kebutuhan pokok.

Guna menjaga daya beli masyarakat terutama di tengah kenaikan harga energi global, Pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, Pemerintah turut berupaya untuk menyuntikkan paket stimulus ekonomi Idulfitri 1447 Hijriah meliputi bonus hari raya (BHR) bagi pengemudi ojek daring dan kurir, bantuan bangan 10 kg beras dan 2 L minyak goreng, serta diskon transportasi. Selain itu, paket kebijakan 8+4+5 yaitu Program Magang Nasional berduarsi 6 bulan bagi lulusan perguran tinggi dengan total serapan hingga 2.059 peserta magang di Jawa Barat juga masih berlanjut pada triwulan I 2026. Perluasan lapangan kerja turut dilakukan melalui rekrutmen Sarjana Penggerak Perubahan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibuka pada Maret 2026 dan diperkirakan menyerap hingga 30.000 tenaga kerja. Sementara itu, di sektor properti, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan pelonggaran *Loan to Value* (LTV) hingga akhir 2026 untuk mendorong akses pembiayaan rumah dengan uang muka lebih rendah. Kombinasi kebijakan ini diharapkan mampu mempertahankan daya beli, memperkuat likuiditas ekonomi masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pada triwulan I 2026.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.24 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.25 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

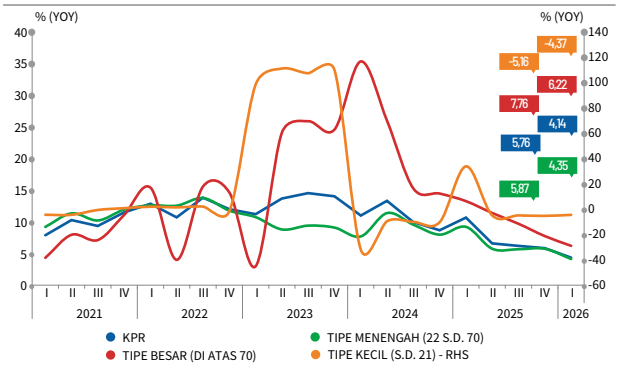
3.5.2 Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Kinerja intermediasi rumah tangga Jawa Barat pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,84% (yoy), sedikit termoderasi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 5,71% (yoy). Tetap terjaganya pertumbuhan kredit rumah tangga tersebut ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit multiguna serta masih kuatnya permintaan terhadap kredit pemilikan rumah (KPR). Sementara itu, kredit pemilikan apartemen (KPA) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tercatat mengalami kontraksi pada periode berjalan, yang mengindikasikan adanya penyesuaian preferensi konsumsi masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih esensial. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa permintaan kredit rumah tangga masih relatif terjaga, meskipun mulai menunjukkan tanda moderasi seiring dengan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Di samping itu, kualitas pembiayaan rumah tangga mencatatkan sedikit peningkatan risiko, tecermin dari rasio NPL gross kredit rumah tangga pada triwulan I 2026 yang meningkat menjadi 3,18% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,11%. Peningkatan NPL terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap kemampuan bayar masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga dan tekanan terhadap daya beli.

Detail perkembangan penyaluran kredit rumah tangga di Jawa Barat berdasarkan jenis kreditnya sebagai berikut:

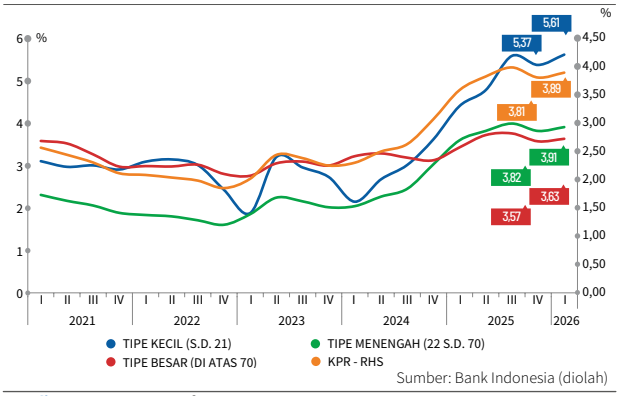
1. **Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**

   Kinerja penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,87% (yoy) (Grafik 3.26)**.** Perlambatan pertumbuhan KPR ini disebabkan oleh adanya kontraksi pada segmen rumah tipe kecil (hingga 21 m^2) sebesar 4,37% (yoy) sedikit membaik dari kontraksi periode sebelumnya yang sebesar 5,16% (yoy). Selain itu, KPR tipe besar dan menengah juga menunjukkan perlambatan, dengan secara berurutan tumbuh 6,22% (yoy) dan 4,14% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 7,76% (yoy) dan 5,76% (yoy). Penurunan permintaan tersebut sejalan dengan adanya penyesuaian pada sisi pasokan, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan moratorium penerbitan izin pembangunan perumahan baru di Jawa Barat. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan tata ruang dan mitigasi risiko bencana, yang diharapkan dapat mendorong pengembangan hunian yang lebih berkelanjutan dan terarah ke depan. Oleh karena itu, moderasi pertumbuhan KPR diperkirakan bersifat sementara dan berpotensi kembali menguat seiring dengan implementasi pengembangan hunian yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.



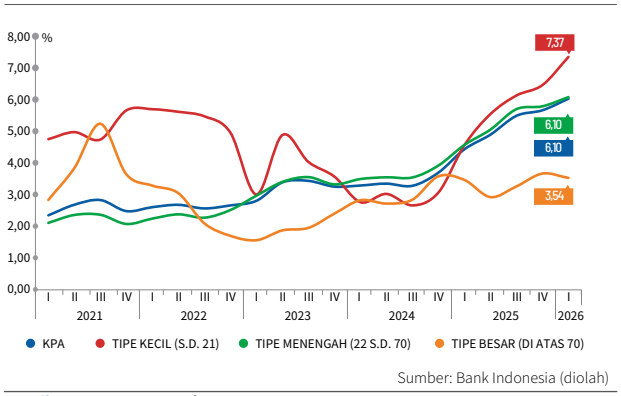
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.26 Perkembangan KPR



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

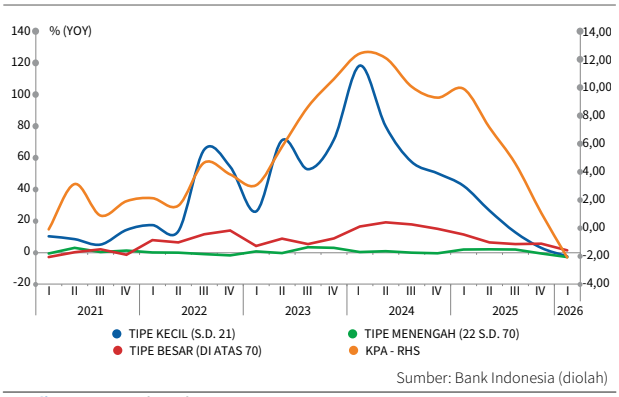
Grafik 3.27 *Non-Performing Loan Gross* KPR



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.29 *Non-Performing Loan Gross* KPA

Di samping itu, Bank Indonesia turut mendorong penguatan kredit properti di antaranya melalui perpanjangan kebijakan *Loan to Value* (LTV) hingga 100% atau uang muka 0% untuk pembelian rumah, yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini memungkinkan konsumen, terutama dari segmen menengah ke bawah dan pembeli rumah pertama, untuk mengakses KPR tanpa perlu menyediakan uang muka, sehingga mengurangi hambatan finansial dalam memiliki rumah. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 100% untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp2 miliar, yang efektif sejak awal 2025. Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) turut menjadi katalis dalam mendorong permintaan, khususnya pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat permintaan dan menjaga momentum pertumbuhan KPR secara berkelanjutan. Kombinasi dari kebijakan ini secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah tipe kecil dan menengah, serta mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan KPR ke segmen ini.



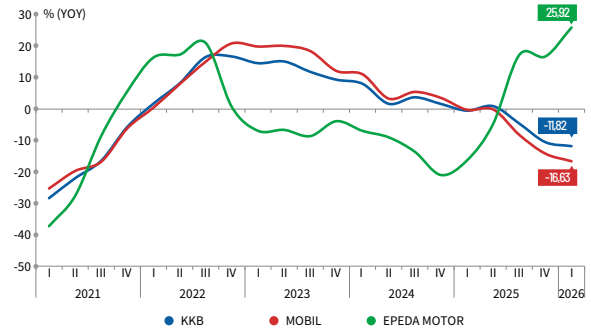
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.28 Perkembangan KPA

Di sisi lain, kualitas penyaluran KPR menunjukkan sedikit moderasi, tecermin dari rasio NPL *gross* KPR tercatat sebesar 3,89%, meningkat dari periode sebelumnya 3,81% (Grafik 3.27). Peningkatan terjadi merata di seluruh segmen rumah, dengan risiko tertinggi dimiliki oleh penyaluran kredit pada rumah tipe kecil yang memiliki rasio NPL sebesar 5,61% lebih rendah dari periode sebelumnya yang sebesar 5,37%. Segmen rumah menengah juga mencatatkan peningkatan NPL menjadi 3,91% dari 3,82%. Sementara itu, NPL segmen rumah besar tercatat sebesar 3,63%, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 3,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kredit perumahan perlu mulai diwaspadai.

2. Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mengalami perlambatan pada triwulan I 2026 dengan pertumbuhan sebesar -2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,10% (yoy) (Grafik 3.28). Perlambatan disebabkan oleh tertahannya pertumbuhan hampir pada seluruh segmen apartemen terutama tipe menengah dan tipe kecil yang masing-masing mencatatkan kontraksi 2,69% (yoy) dan 2,30% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh -0,43% (yoy) dan 3,14% (yoy). Kredit untuk apartemen tipe besar tetap tumbuh 1,51% (yoy), meski melambat dari periode sebelumnya yang tumbuh 5,87% (yoy). Hal serupa terjadi untuk permintaan kredit ruko/rukan yang tumbuh 6,37% (yoy), lebih rendah dari yang sebelumnya tumbuh 9,20% (yoy). Kondisi ini

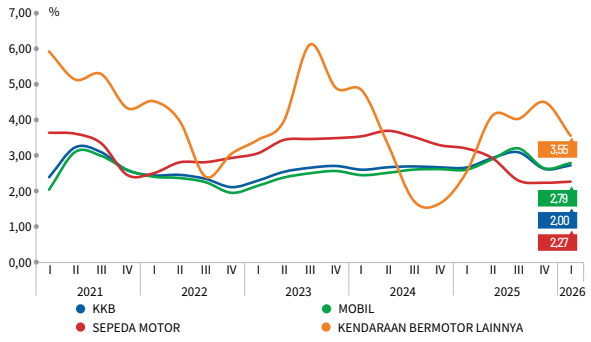


Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.30 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor

mengindikasikan adanya penurunan permintaan secara merata untuk keseluruhan segmen masyarakat seiring dengan daya beli yang masih belum cukup kuat.

NPL *gross* untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan menjadi 6,05% dari sebelumnya 5,68% dan masih berada di atas ambang batas NPL (Grafik 3.29). Kenaikan ini disumbangkan oleh kenaikan NPL pada tipe kecil, menengah, dan ruko yang masing-masing berada pada rasio di atas ambang NPL sebesar 7,37%, 6,10%, dan 5,23% dari sebelumnya sebesar 6,48%, 5,81%, dan 5,01%. Peningkatan ini memberi sinyal adanya tekanan kemampuan bayar pada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang kemungkinan masih menghadapi tekanan ekonomi dan belum sepenuhnya pulih dari dampak ketidakpastian global. Sementara, NPL pada tipe besar mencatatkan penurunan menjadi 3,54% dari 3,68%.



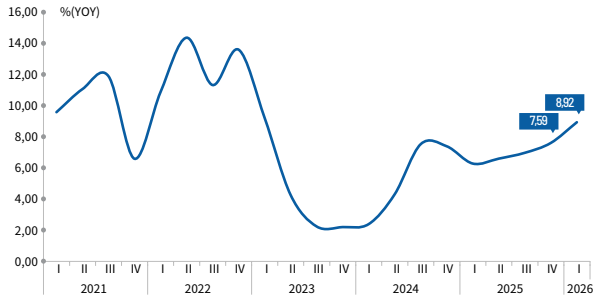
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.31 Perkembangan *Non-Performing Loan* Kredit Kendaraan Bermotor

3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada triwulan I 2026 mencatatkan kontraksi yang cukup dalam hingga 11,82% (yoy) dari periode sebelumnya yang terkontraksi 10,56% (yoy). Terkontraksinya kredit KKB disebabkan oleh perlambatan pada kredit jenis mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Penyaluran kredit mobil mengalami kontraksi yang semakin dalam yakni 16,63% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi 14,21% (yoy). Hal ini sejalan dengan perlambatan pada penjualan mobil domestik yang tumbuh 1,95% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 4,75% (yoy). Banyaknya hari libur pada periode HBKN Idulfitri, Imlek, serta Nyepi pada triwulan I 2026 mengakibatkan berkurangnya hari kerja yang pada gilirannya menahan pertumbuhan penjualan mobil lebih lanjut[11]. Sektor keuangan senantiasa berupaya mendorong peningkatan KKB dengan melakukan pelonggaran suku bunga yaitu sebesar 8,05% dari periode sebelumnya yang sebesar 8,11%. Sementara, penyaluran kredit sepeda motor tetap tumbuh signifikan yaitu 25,92% (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh 16,73% (yoy). Hal ini sejalan dengan pelonggaran suku bunga menjadi 14,03%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 14,46%. Secara keseluruhan, kinerja KKB pada triwulan I 2026 masih terkontraksi dan terutama dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit kendaraan roda empat yang sejalan dengan perlambatan penjualan mobil domestik serta faktor musiman yang menahan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan yang tetap kuat pada kredit sepeda motor serta adanya pelonggaran suku bunga mengindikasikan masih adanya potensi perbaikan permintaan ke depan, khususnya pada segmen kendaraan roda dua dengan nilai pembiayaan yang lebih kecil dan lebih erat dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Dari sisi kualitas kredit, sektor kendaraan bermotor mengindikasikan kemampuan bayar yang cukup baik seiring dengan rasio NPL *gross* yang berada pada level 2,73%, meski lebih tinggi dari periode sebelumnya yang sebesar 2,63%. NPL relatif terjaga baik pada kredit mobil maupun motor yakni secara berurutan sebesar 2,79% dan 2,27% dari periode sebelumnya yang sebesar 2,64% dan 2,24%.

11 Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.32 Perkembangan Kredit Multiguna

4. Kredit Multiguna

Kinerja penyaluran kredit multiguna pada triwulan I 2026 mencatatkan peningkatan pertumbuhan sebesar 8,92% (yoy) meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 7,59% (yoy). Di sisi lain, kualitas pembiayaan tetap terjaga, tecermin dari penurunan rasio NPL *gross* sebesar 1,81%, sedikit meningkat dari sebelumnya 1,77%. Perkembangan ini memberikan ruang optimisme bahwa permintaan kredit multiguna masih berpotensi tumbuh ke depan, terutama apabila pemulihan daya beli dan sentimen konsumen terus berlanjut seiring stabilisasi perekonomian.

BOKS 2

Memperkuat Ekosistem Halal:

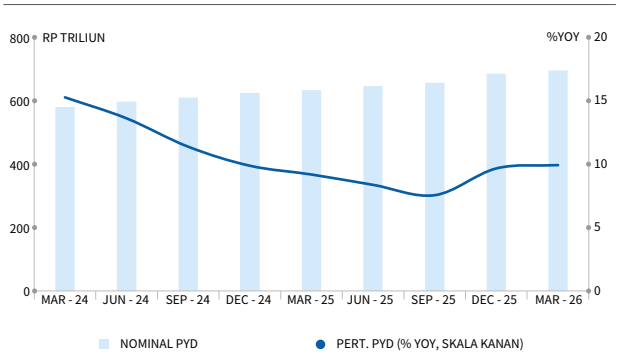
Peresmian Zona KHAS Terminal Tipe A Kota Banjar

Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan kinerja yang semakin solid di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, ekonomi syariah nasional mencatat akselerasi pertumbuhan yang kuat, tercermin dari sektor unggulan halal value chain (HVC) yang tumbuh sebesar 6,21% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,0% (yoy).

Momentum penguatan turut mendorong pangsa sektor unggulan HVC terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menjadi lebih dari 27%, terutama ditopang oleh kinerja sektor pertanian dan makanan-minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta fesyen muslim. Perkembangan ini menegaskan bahwa ekonomi syariah semakin berperan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru yang inklusif, produktif, dan berdaya tahan bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, pembiayaan perbankan syariah nasional juga terus tumbuh positif dan resilien. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,92% (yoy) hingga mencapai Rp695,73 triliun, didukung oleh inovasi produk, digitalisasi layanan keuangan syariah, serta penguatan pasar uang syariah. Perkembangan positif tersebut semakin diperkuat oleh meningkatnya literasi dan inklusi ekonomi syariah, perluasan edukasi kepada masyarakat, penguatan halal lifestyle, serta akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM dan pelaku usaha.

Penguatan ekonomi syariah nasional sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap *values-based economy* serta semakin luasnya pengembangan ekosistem halal di daerah. Dalam *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, Bank Indonesia menempatkan penguatan ekosistem rantai nilai halal, optimalisasi



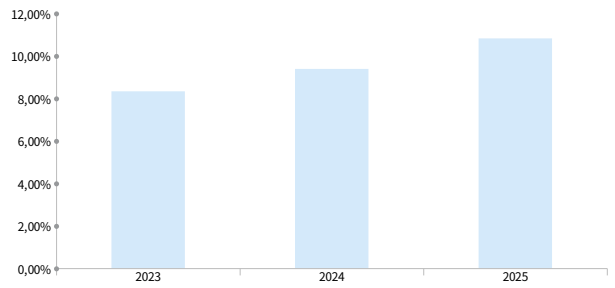
Grafik B2.1 Pembiayaan Perbankan Syariah Nasional

pembiayaan syariah, dan perluasan literasi ekonomi syariah sebagai strategi utama pengembangan ekonomi syariah nasional.

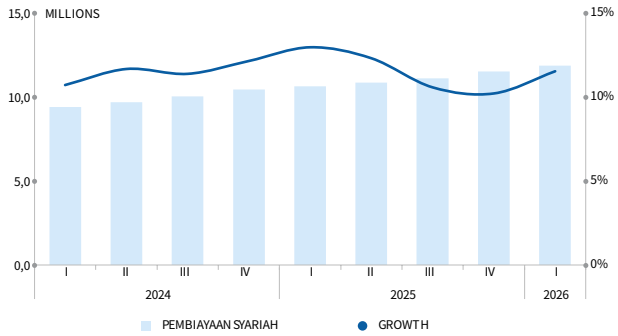
Ekonomi syariah nasional juga diperkuat oleh tren global yang tetap positif. Berdasarkan KEKSI 2025, nilai transaksi ekonomi syariah global diperkirakan mencapai sekitar USD2,77 triliun, terutama didorong oleh sektor makanan-minuman halal, pariwisata ramah muslim, kosmetik halal, serta media dan rekreasi islami. Meningkatnya preferensi global terhadap produk dan gaya hidup halal membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Di Priangan Timur, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki prospek yang kuat, ditopang oleh sektor perdagangan, UMKM, industri makanan-minuman, serta karakter masyarakat yang religius. Modal tersebut menjadi landasan penting untuk memperkuat industri halal daerah, khususnya kuliner halal, fesyen muslim, dan jasa berbasis syariah.

Penguatan ekosistem halal mulai tercermin dari kinerja pembiayaan syariah yang terus meningkat, meskipun struktur pembiayaan daerah masih didominasi oleh pembiayaan konvensional. Sejak 2024, penyaluran



Grafik B2.2 Pangsa Pembiayaan Syariah Priangan Timur



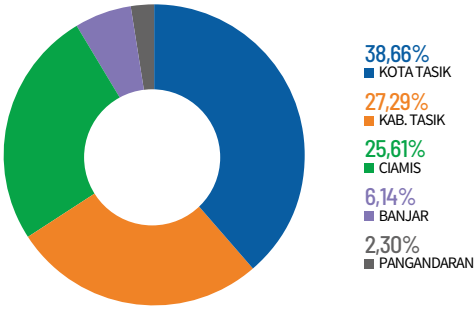
Grafik B2.3 Kinerja Pembiayaan Syariah Priangan Timur

pembiayaan syariah konsisten tumbuh di atas 5% (yoy) dan mencapai 11,53% (yoy) pada Triwulan I 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan syariah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

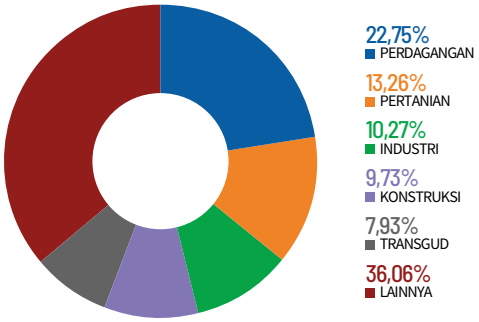
Secara spasial, pembiayaan syariah di Priangan Timur masih terkonsentrasi sekitar 90% pada tiga wilayah utama, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, pangsa pembiayaan syariah di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran masih relatif terbatas sehingga memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya ruang pengembangan ekonomi syariah yang masih sangat besar, terutama melalui penguatan ekosistem halal berbasis komunitas dan UMKM.

Khusus untuk Kota Banjar, wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai simpul transportasi dan perdagangan di kawasan timur Jawa Barat. Hal tersebut tercermin dari pangsa sektor ekonomi di Kota Banjar yang didominasi oleh sektor perdagangan (22,75%), pertanian (13,26%), dan industri (10,27%). Selain menjadi penghubung utama antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kota Banjar juga memiliki aktivitas mobilitas masyarakat dan perdagangan yang cukup tinggi melalui keberadaan Terminal Tipe A Kota Banjar. Terminal tersebut tidak hanya menjadi pusat transportasi, tetapi juga menjadi titik aktivitas ekonomi masyarakat yang melibatkan pelaku UMKM, pedagang kuliner, dan jasa informal lainnya.

Mencermati potensi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya bersama *stakeholder* terkait melakukan pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di Terminal Tipe A Kota Banjar. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem halal daerah melalui integrasi layanan transportasi dengan pengembangan UMKM halal, digitalisasi pembayaran, edukasi ekonomi syariah, serta penguatan halal lifestyle masyarakat.



Grafik B2.4 Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial



Grafik B2.5 Pangsa Ekonomi Kota Banjar





Terminal Tipe A Kota Banjar dipilih karena memiliki fungsi strategis sebagai pusat mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah Priangan Timur. Pengembangan Zona KHAS dilakukan agar terminal tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pengembangan industri halal daerah. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan citra terminal sebagai kawasan yang modern, bersih, nyaman, dan berdaya saing.

Pengembangan Zona KHAS menjadi bentuk transformasi kawasan publik berbasis ekonomi syariah yang mengintegrasikan pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekosistem halal. Melalui program ini, kawasan terminal diarahkan menjadi ruang ekonomi yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses produk makanan dan minuman halal.

Implementasi Zona KHAS Terminal Tipe A Banjar dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Kota Banjar, Dinas Perhubungan, Universitas Siliwangi, lembaga keuangan, komunitas UMKM, dan instansi terkait. Pendampingan dilaksanakan pada Juli–September 2025 dengan menyasar UMKM di kawasan terminal untuk memperoleh sertifikasi halal reguler. Kegiatan ini mencakup pelatihan halal awareness, fasilitasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta pendampingan penyusunan dokumen Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Penguatan ekosistem halal tersebut berlanjut melalui Marhaban Festival 2026 dan peresmian Zona KHAS Terminal Tipe A Banjar pada 12–13 Februari 2026. Zona KHAS ini juga telah melalui proses verifikasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta diperkuat dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 347 Tahun 2025.

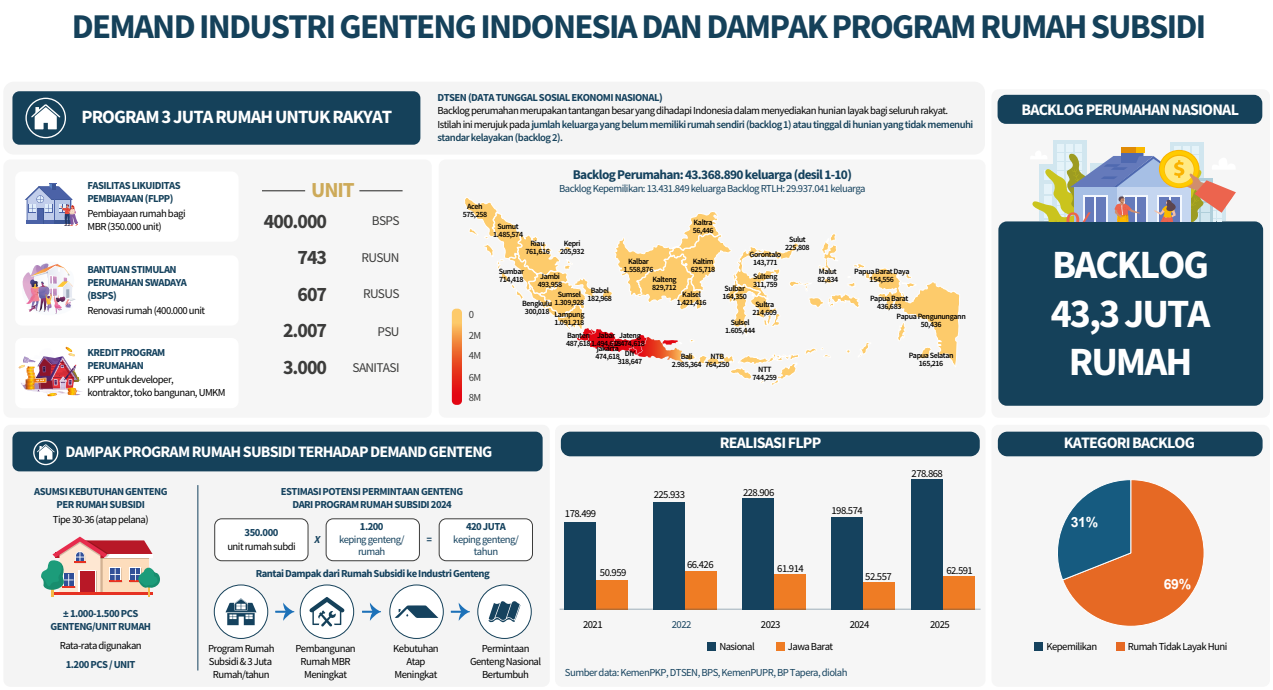
Zona KHAS Terminal Tipe A Banjar menjadi inovasi penguatan ekonomi syariah berbasis kawasan di Priangan Timur. Kota Banjar tercatat sebagai daerah pertama di Priangan Timur yang memiliki Zona KHAS, sekaligus menjadi lokasi Zona KHAS pertama di Indonesia yang berada di kawasan Terminal Tipe A. Program ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM halal dan literasi ekonomi syariah masyarakat, tetapi juga memperkuat integrasi ekosistem halal, digitalisasi pembayaran, dan pengembangan ekonomi daerah. Ke depan, model pengembangan kawasan halal berbasis komunitas ini perlu terus diperluas dan direplikasi untuk memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.


TERMINAL BANJAR
SELAMAT DATANG
DI TERMINAL TIPE A BANJAR
TERMINAL TIPE A BANJAR


TERMINAL BANJAR
SELAMAT DATANG
DI TERMINAL TIPE A BANJAR
TERMINAL TIPE A BANJAR

BOKS 3

Nyala Harapan Industri Genteng Majalengka Melalui Program Gentengisasi



Gambar B3.1 Sinergi Bank Indonesia Bersama IPB Dalam Pengembangan Model Bisnis UMKM Hijau

Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional 2 Februari 2026 lalu di Bogor, program gentengisasi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah yang hangat diperbincangkan. Program ini secara sederhana bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong penggunaan material bangunan yang lebih aman, tahan lama, dan sesuai standar. Gentengisasi diperkirakan akan membuka peluang besar khususnya bagi industri bahan bangunan dan dampak yang dihasilkan mulai dari peningkatan serapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kab. Majalengka rata-rata mencapai 6,46%[1] (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,09%[2] (yoy). Jika dilihat dari strukturnya, motor penggerak ekonomi Kab. Majalengka ditopang oleh sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan adanya program gentengisasi diperkirakan akan memberikan *multiplier effect* tidak hanya bagi sektor perumahan, namun juga lapangan usaha pendukung yang menjadi input pada sektor tersebut. Terlebih dengan jumlah penduduk sebanyak 52,2 juta jiwa atau tertinggi di Pulau Jawa, hal ini berpotensi mendorong tetap kuatnya permintaan kebutuhan rumah serta berpotensi

1 Data bersifat sangat sementara
2 Data bersifat sangat sementara

menjadikan Kab. Majalengka sebagai kawasan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Pada tahun 2026 *backlog*[3] perumahan nasional masih sangat tinggi, tercatat 13,4 juta keluarga belum memiliki rumah sendiri dan 29,9 juta keluarga tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Integrasi program gentengisasi saat ini disebut-sebut akan menjadi bagian dari program 3 juta rumah dibawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Tahun ini target yang ditetapkan lebih besar dibandingkan target rata-rata lima tahun terakhir. Target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 ditetapkan sebesar 350.000 unit, target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar 400.000 unit dan beberapa target lain seperti pembangunan rusun dan penyediaan akses sanitasi.

Berdasarkan data pada tahun 2022, secara nasional BPS mencatat 57,93% rumah di Indonesia sudah menggunakan genteng sebagai atap rumah mereka sementara 31,48% menggunakan seng dan sisanya bervariasi menggunakan beton, asbes, bambu atau kayu sirap serta opsi material lain. Genteng sendiri di Indonesia telah lama berkembang sebagai alternatif atap rumah sejak masa Kerajaan Jawa dan terus berkembang di masa kolonial. Sebelumnya, rumah tradisional berkembang dengan menggunakan bahan alami seperti daun alang-alang, daun nipah, rumbia hingga bambu atau ijuk. Meski relatif murah, ringan dan mudah didapat namun penggunaan atap alami cenderung mudah lapuk dan rentan kebakaran sehingga masyarakat mulai bergeser menggunakan genteng berbahan dasar tanah liat. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan penggunaan genteng sebagai atap rumah. Pada masa orde baru, genteng kemudian menjadi indikator kemakmuran karena harganya yang lebih mahal dan memerlukan struktur bangunan lebih kuat sebagai penopang sehingga hanya kalangan tertentu yang mampu menggunakannya.

Di Jawa Barat, Kabupaten Majalengka menjadi salah satu sentra produksi yang layak diperhitungkan. Industri genteng rakyat berawal dari tradisi kerajinan tanah liat masyarakat pedesaan yang didukung dengan ketersediaan tanah liat berkualitas tinggi di Majalengka. Letak geografis Majalengka yang berada di pertemuan kawasan vulkanik Gunung Ciremai dan dataran aluvial[4] Pantura menghasilkan bahan baku tanah liat yang halus, kaya mineral dan memiliki plastisitas tinggi sehingga cocok digunakan untuk produksi genteng, bata maupun kerajinan terakota. Selain itu sifat tanah liat di Majalengka juga mudah dibentuk, tidak mudah retak saat dibakar, menghasilkan warna terakota yang khas, dan tahan terhadap cuaca. Hal inilah yang kemudian terus berkembang di masyarakat, genteng tanah liat bukan hanya sekedar komoditas namun juga identitas sejarah dan budaya bagi Majalengka.

Dalam proses implementasi program gentengisasi, Kabupaten Majalengka turut terdampak angin segar. Saat ini masih terdapat 200 pabrik yang aktif dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta keping genteng tanah liat per hari. Arus permintaan yang begitu besar tentu juga diiringi dengan berbagai tantangan, terutama bagi industri yang pernah nyaris "mati suri". Berdasarkan hasil diskusi bersama pelaku usaha dan Pemerintah Kab. Majalengka, secara umum terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan industri genteng rakyat, diantara adalah sebagai berikut :

1. **Kesulitan Regenerasi Tenaga Kerja Terampil**

   Industri genteng rakyat termasuk dalam industri padat karya yang memerlukan tenaga besar dalam prosesnya, namun terjadi pergeseran minat kerja sehingga industri ini tidak menjadi pilihan yang popular bagi generasi muda. Selain itu, upah tenaga kerja yang ditawarkan juga masih dibawah besaran UMK yang ditetapkan pemerintah sehingga pekerja lebih memilih industri lain seperti industri tekstil atau alas kaki yang juga berkembang pesat di Kab. Majalengka dan sekitarnya. Keterampilan dalam menjalankan produksi genteng tanah liat pun juga tidak banyak diajarkan di sekolah vokasi sehingga keterampilan produksi diajarkan secara otodidak.

3 Indikator untuk mengukur kebutuhan rumah di Indonesia berdasarkan angka *home ownership rate* atau persentase kepemilikan rumah pada tiap rumah tangga

4 Bentang lahan datar atau landai yang terbentuk dari endapan sedimen (lumpur, pasir, kerikil) yang dibawa oleh aliran sungai dalam jangka waktu lama. Area ini umumnya subur karena nutrisi yang terbawa secara berkala

2. Kapasitas Produksi Belum Optimal

Struktur industri genteng rakyat di Majalengka masih berjalan secara tradisional dan mengandalkan faktor cuaca dimana saat musim angin atau musim hujan datang maka proses produksi dapat terhambat. Selain itu rangkaian produksi yang masih konvensional menyebabkan hasil produksi tidak sempurna, terlebih dari sekitar 200 pabrik yang aktif hanya 8 pabrik yang telah memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI), sisanya masih berjuang meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. SNI melakukan uji terhadap daya serap air, kekuatan beban, presisi ukuran, dan ketahanan terhadap cuaca. Sertifikasi menjadi kunci penting bagi kebangkitan industri genteng rakyat agar bisa bersaing di pasar modern dan proyek nasional.

3. Keterbatasan Bahan Baku dan Ancaman Kenaikan Biaya Produksi

Bahan baku utama genteng Jatiwangi adalah tanah liat yang berasal dari sawah dan pasir, selain itu juga bahan pendukung kayu bakar. Tanah liat dari sawah saat ini terkendala proses alih fungsi lahan sawah menjadi industri atau pemukiman yang mengancam keterbatasan bahan baku. Ruang margin yang tipis di angka 100-150 rupiah per keping genteng memberikan kewaspadaan karena sangat rentan terhadap kenaikan biaya produksi, di sisi lain harga kayu bakar sebagai sumber energi pembakaran yang berasal dari Sumedang dan Kuningan juga mulai meningkat.

4. Hambatan Akses Pembiayaan

Masalah akses pembiayaan menjadi salah satu penyebab industri genteng rakyat sulit berkembang mengikuti arus modernisasi. Masalahnya bukan pada ketersediaan likuiditas di bank, namun karena struktur industry genteng rakyat yang sering kali dianggap kurang *bankable*. Pada umumnya dalam proses penyaluran kredit, bank akan menilai usaha calon debitur melalui prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) yang diterjemahkan pada industri ini berupa *track record* pinjaman sebelumnya, stabilitas penjualan yang menjamin keberlangsungan usaha, struktur modal, kepemilikan agunan dan prospek kedepan. Akses pembiayaan perbankan saat ini juga cenderung diajukan secara perorangan sehingga perbankan perlu melakukan asesmen yang lebih dalam sebelum dapat mengalirkan kredit.

5. Landasan Program dan Kepastian Pasar

Meski telah digadang-gadang sebagai agenda strategis pemerintah, namun hingga kini landasan program gentengisasi masih belum *clear* baik dari sisi perencanaan program, integrasi antar program, hingga kontinuitas kedepan. Program ini memerlukan begitu banyak dukungan dari para pihak terutama pemerintah terkait sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan tidak hanya Presiden, namun juga pelaku usaha dan masyarakat. Industri genteng sangat bergantung pada sektor perumahan, namun pelaku usaha sektor perumahan dan konstruksi memiliki berbagai pilihan baik dari jenis atap yang digunakan, harga yang bersaing untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas bangunan hingga vendor pemasok atap yang dikerjasamakan. Integrasi dengan proyek pemerintah diharapkan mampu menjadi *anchor market* bagi industri genteng rakyat, seperti program Kementerian PKP yang telah melakukan pembelian 14 truk genteng atau setara nominal 199,7 juta rupiah. Permintaan serupa diharapkan terus berlanjut terutama melalui fasilitasi pembangunan rumah subsidi dari Kementerian PKP dan bantuan rutilahu dari Pemprov Jabar dan Pemkab Majalengka.

Menghadapi berbagai tantangan program gentengisasi tersebut, maka untuk hasil yang optimal perlu diperkuat dari berbagai aspek (pembiayaan, teknologi, standarisasi), perbaikan data dan skema implementasi program, serta intervensi masif untuk menciptakan ekosistem industri yang kuat. Respon positif juga muncul dari asosiasi yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Real Estate Indonesia (REI) yang menyebutkan bahwa peningkatan penyerapan genteng sangat mungkin dilakukan dalam skala besar namun perlu didukung dengan spesifikasi dan harga yang bersaing sehingga tidak memberikan tekanan pada biaya produksi perumahan baik skala rumah subsidi maupun komersil. Ruang penyerapan yang besar ini perlu disertai dengan kontinuitas produksi dan standar kualitas,

merespon hal tersebut Pemerintah Kab. Majalengka berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan khususnya pada 37 pelaku usaha genteng yang saat ini telah melalui proses SNI di Balai Besar Keramik. Sebagai advisor perekonomian daerah, Bank Indonesia senantiasa akan mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi pada kelancaran pemenuhan *supply* dan *demand* genteng Majalengka melalui pertemuan *business matching* hingga tercapai kesepakatan baik dari sisi harga maupun teknis kerjasamanya. Selain itu, asesmen terhadap potensi *multiplier effect* juga menjadi perhatian dan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif tidak hanya bagi Majalengka namun juga Ciayuamajakuning dan Jawa Barat.

Bagi Majalengka, industri ini bukan hanya penghasil komoditas namun juga cermin perkembangan industri yang menjadi sumber ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, revitalisasi industri genteng rakyat bukan hanya menghidupkan kembali pabrik tua melalui kepul cerobong asap, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan ekonomi kerakyatan, melestarikan identitas arsitektur tropis Indonesia, dan menumbuhkan harapan agar industri lokal dapat kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

BAB 4

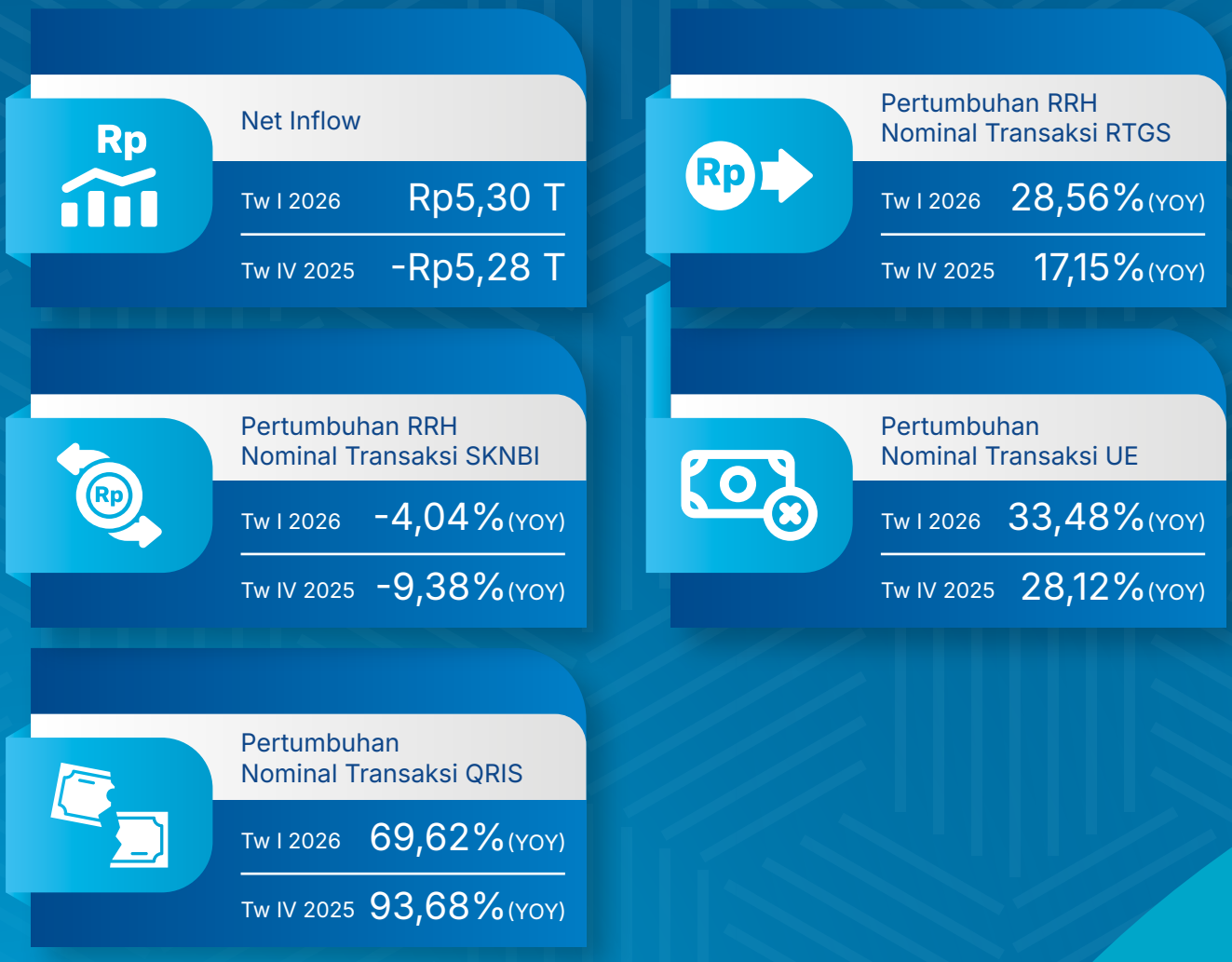
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi pembayaran nontunai dan tunai tetap kuat di tengah pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada triwulan I 2026. Kinerja transaksi nontunai yang tumbuh positif tecermin dari peningkatan pertumbuhan nominal transaksi baik melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) maupun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meskipun pada sisi volume mengalami penurunan. Di sisi lain, nominal transaksi melalui instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) debit menunjukkan penurunan dari sisi nominal dan volume. Sementara APMK kredit menunjukkan penurunan dari sisi nominal namun tumbuh lebih tinggi pada sisi volume. Selanjutnya, transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh positif, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya baik dari nominal maupun volume.

Perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS relatif stabil tecermin dari pertumbuhan yang positif dengan tren melandai. Transaksi QRIS secara nominal dan volume pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 69,62% (yoy) dan 89,28% (yoy). Pada periode laporan, terdapat penambahan 507.629 pengguna, sehingga total pengguna QRIS di Jawa Barat hingga periode pelaporan mencapai 13,58 juta atau 22,02% dari total pengguna QRIS nasional. Di sisi lain, jumlah *merchant* QRIS di Jawa Barat mendominasi secara nasional, mencapai 9,86 juta atau 22,41% dari total *merchant* secara nasional. Posisi ini memperkuat peran strategis Jawa Barat dalam mendukung akselerasi digitalisasi pembayaran.

Transaksi tunai di Jawa Barat tercatat dalam posisi *net-inflow* sebesar Rp5,30 triliun atau 157,12% (yoy), berbalik arah dari triwulan IV 2025 yang terekam mengalami *net-outlow* sebesar Rp5,28 triliun. Hal ini mencerminkan telah kembalinya aliran uang tunai di masyarakat pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal, Tahun Baru dan libur sekolah serta pada HBKN Ramadan dan Idulfitri.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pelaku industri guna mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini didukung oleh penguatan pelindungan konsumen melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, serta sosialisasi Pelindungan Konsumen (PeKA) terkait pemahaman hak konsumen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.




7:46
QRIS
Scan kode QR untuk bayar/transfer.
Bisa scan QR di berbagai negara! Cek di sini.
QR Bayar
QR Transfer
QRIS Tap

4.1 Kondisi Umum

Transaksi pembayaran tunai dan nontunai menunjukkan dinamika yang bervariasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada triwulan I 2026. Kinerja transaksi nontunai mengalami perbaikan yang tecermin dari meningkatnya nominal transaksi baik melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) maupun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Di sisi lain, transaksi melalui instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menunjukkan kecenderungan melemah, baik secara nominal maupun volume terutama pada ATM/Debit. Namun demikian, volume transaksi kartu kredit masih mencatatkan penguatan. Sementara itu, instrumen Uang Elektronik (UE) tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya baik untuk nominal maupun volume, mencerminkan meningkatnya preferensi masyarakat pada instrumen ini. Lebih lanjut, pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terus menunjukkan perkembangan yang positif seiring dengan meluasnya penetrasi digital di masyarakat. Jumlah pengguna (user) dan merchant QRIS di Jawa Barat mencapai 22% dari total nasional. Pada pembayaran tunai, arus kas di Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami posisi *net-inflow*, didorong oleh siklus pasca HKBN Natal dan Tahun Baru serta Ramadhan dan Idulfitri. Meskipun demikian, perlambatan aktivitas transaksi masih terindikasi sejalan dengan melemahnya aktivitas ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun domestik. Situasi tersebut turut memengaruhi perilaku belanja (*spending behaviour*) masyarakat di wilayah Jawa Barat.

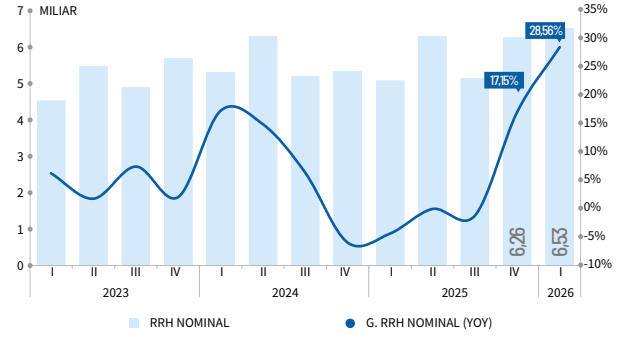
Kinerja transaksi non tunai nilai besar pada triwulan I 2026 menunjukan perbaikan. Hal ini tecermin dari perkembangan nominal dan volume transaksi rata-rata harian (RRH) melalui BI-RTGS yang tercatat tumbuh 28,56% (yoy) atau sebesar Rp6,53 triliun per hari. Selanjutnya, transaksi kliring melalui SKNBI turut mengalami perbaikan terutama dari sisi nominal. Secara nominal transaksi SKNBI tercatat Rp530,13 miliar per hari atau terkontraksi 4,04% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 9,38% (yoy). Sementara itu, dari sisi volume terekam mengalami kontraksi sebesar 12,41% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 8,02% (yoy) atau 13.787 transaksi per hari.

Di sisi lain, instrumen pembayaran APMK untuk ATM/Debit menunjukkan tren penurunan baik secara nominal maupun volume. Nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu debit terkontraksi 5,46% (yoy) atau tercatat sebesar Rp225,85 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 5,16% (yoy) atau sebesar Rp228,80 triliun. Dari sisi volume, transaksi kartu debit juga terkontraksi sebesar 12,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,13% (yoy). Pada instrumen kartu kredit, nominal transaksi pembayaran turut mengalami perlambatan menjadi 15,86% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 16,78% (yoy). Sebaliknya, dari sisi volume, transaksi kartu kredit tumbuh 19,17% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,70% (yoy).

Sementara itu, transaksi menggunakan Uang Elektronik (UE) terus menunjukkan kinerja positif. Dari sisi nominal, transaksi UE tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 33,48% (yoy) atau tercatat Rp37,65 triliun, dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 28,12% (yoy) atau tercatat Rp33,94 triliun. Dari sisi volume, transaksi UE tercatat tumbuh sebesar 34,95% (yoy) atau sebanyak 500,04 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 29,00% (yoy) atau sebanyak 472,14 juta transaksi.

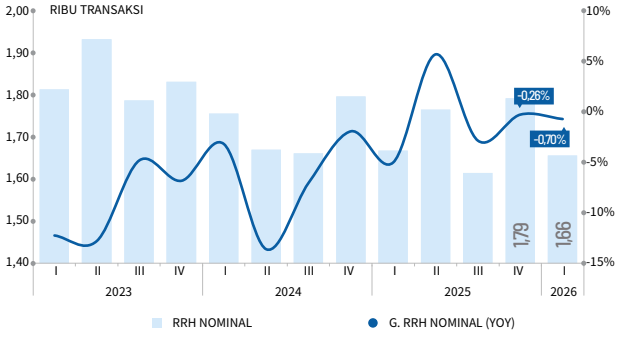
Kinerja transaksi menggunakan QRIS di wilayah Jawa Barat terus menunjukkan pertumbuhan positif, seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna yang mulai mengarah pada fase stabilitas. Nominal transaksi QRIS pada triwulan I 2026 sebesar Rp86,66 triliun meningkat dibandingkat triwulan sebelumnya yang tercatat Rp84,37 triliun. Dari sisi pertumbuhan, transaksi pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 69,62% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 93,68% (yoy).

Dari sisi volume, transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 89,28% (yoy) atau mencapai 965,27 juta transaksi, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 132,86% (yoy) atau mencapai 995,51 juta transaksi. Pertumbuhan volume transaksi QRIS yang tetap positif menunjukkan adanya adaptasi yang berkelanjutan dari masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran digital. Hal ini tecermin dari peningkatan signifikan baik pada volume



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan Transaksi RTGS Jawa Barat - Nominal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Transaksi RTGS Jawa Barat - Volume

maupun nominal transaksi QRIS dibandingkan periode sebelumnya.

Jumlah pengguna baru QRIS di Jawa Barat terus bertambah secara signifikan, dengan penambahan sebanyak 507.629 pengguna pada triwulan I 2026. Total pengguna QRIS di Jawa Barat pada akhir periode pelaporan mencapai 13,58 juta atau 22,02% dari total pengguna QRIS nasional. Dari sisi merchant, Jawa Barat juga menunjukkan dominasi nasional dengan jumlah merchant QRIS mencapai 9,86 juta atau 22,41% dari total merchant QRIS di Indonesia. Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS terbesar secara nasional, sekaligus mencerminkan keberhasilan perluasan adopsi QRIS dalam ekosistem pembayaran digital nasional.

Sementara itu, kinerja transaksi tunai di Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari posisi arus kas yang tercatat *net-inflow* sebesar Rp5,30 triliun atau tumbuh 157,12% (yoy), berbalik arah dari triwulan IV 2025 yang tercatat *net-outflow* sebesar Rp5,28 triliun. Kondisi ini mencerminkan telah kembalinya aliran uang tunai pasca periode HBKN Natal, Tahun Baru dan libur sekolah serta pada HBKN Ramadhan dan Idulfitri di triwulan I 2026.

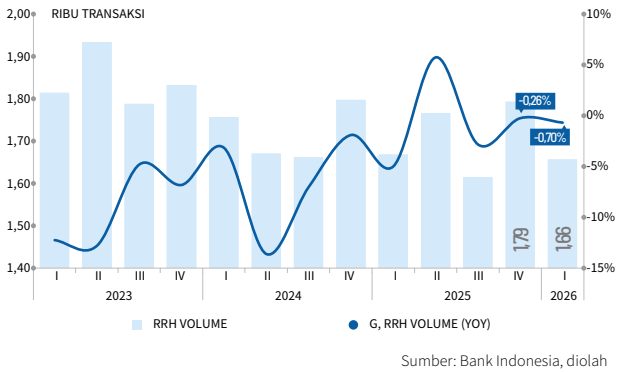
4.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

4.2.1 Transaksi Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Transaksi melalui BI-RTGS di Jawa Barat mengalami penguatan dari sisi nominal namun menunjukkan pelemahan dari sisi volume transaksi pada triwulan I 2026. Pertumbuhan nominal transaksi rata-rata harian (RRH) melalui BI-RTGS tercatat sebesar 28,56% (yoy) atau sebesar Rp6,53 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 17,15% (yoy) atau sebesar Rp6,26 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan volume RRH transaksi BI-RTGS masih terkontraksi 0,70% (yoy) atau tercatat 1.657 transaksi per hari, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,26% atau 1.793 transaksi per hari. Hal ini mengindikasikan adanya moderasi frekuensi transaksi sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi domestik, khususnya pada awal tahun yang umumnya mengalami normalisasi setelah peningkatan aktivitas pembayaran pada akhir tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tetap kuatnya pertumbuhan nominal transaksi BI-RTGS menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bernilai besar masih relatif terjaga sejalan dengan pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan laporan yang tumbuh 55,95% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 14,18% (yoy).

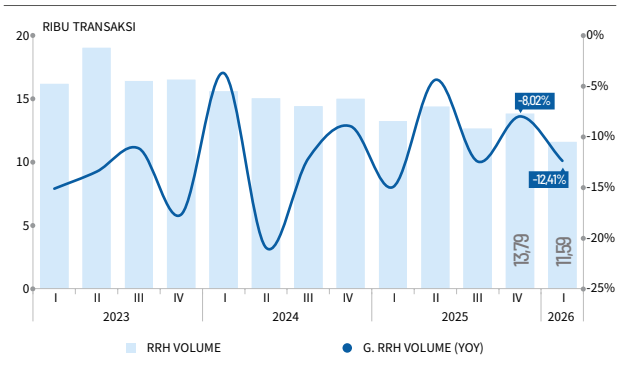
4.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Kinerja transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Jawa Barat pada triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan terbatas,



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Transaksi Kliring Jawa Barat - Nominal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Transaksi Kliring Jawa Barat - Volume

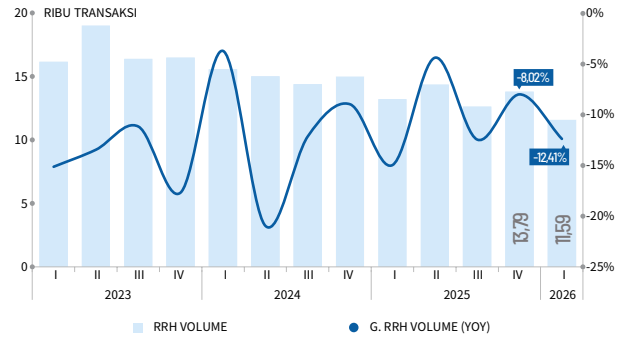
terutama dari sisi nominal transaksi. Nominal transaksi rata-rata harian (RRH) SKNBI tercatat mencapai Rp530,13 miliar per hari atau terkontraksi 4,04% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang tercatat Rp518,61 miliar per hari atau terkontraksi lebih dalam sebesar 9,38% (yoy). Di sisi lain, volume RRH transaksi SKNBI tercatat sebanyak 11.586 transaksi per hari atau terkontraksi 12,41% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 8,02% (yoy) atau 13.787 transaksi per hari. Perbaikan pada sisi nominal sejalan dengan masih terjaganya aktivitas ekonomi domestik, termasuk konsumsi rumah tangga yang tercatat 5,47% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,16% (yoy). Namun demikian, kontraksi yang terjadi pada sisi volume mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat ke infrastruktur pembayaran *real-time* seperti BI-FAST, yang mulai diimplementasikan pada 21 Desember 2021 dan menawarkan biaya lebih rendah dengan penyelesaian transaksi secara seketika (*real time*).

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat kebijakan sistem pembayaran. Hal tersebut terutama dilakukan melalui dilanjutkannya masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1,- per Data Keuangan Elektronik (DKE) Transfer Dana untuk Layanan Transfer Dana dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900,- dari bank kepada nasabah hingga 30 Juni 2026. Sedangkan transaksi DKE Warkat Debit dikenakan biaya maksimum Rp5.000,- dari bank ke nasabah, dan Rp1.000,- dari Bank Indonesia ke bank. Penyesuaian ini juga merupakan upaya Bank Indonesia untuk memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sejak 21 Desember 2024, Bank Indonesia menyediakan 3 (tiga) layanan baru BI-FAST yang merupakan tahapan pengembangan BI-FAST Fase I Tahap 2. Ketiga layanan baru tersebut yakni layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*). Secara lebih rinci, ketiga layanan baru BI-FAST yaitu:

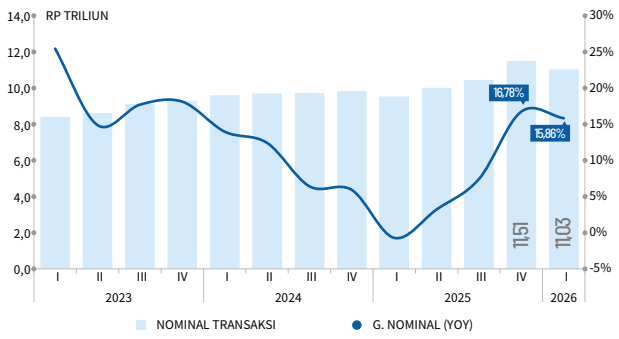
1. Layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*) merupakan solusi pengiriman dana dari satu pengirim ke banyak penerima sekaligus, paling sedikit 20 transaksi dalam satu instruksi *bulk*. *Bulk* transfer dapat digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran kepada vendor, dan pembayaran dividen. Layanan ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan transaksi dalam volume besar, baik bagi pelaku usaha maupun institusi lainnya.
2. Layanan pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*) yakni layanan yang menawarkan kemudahan bagi penerima dana untuk mengirimkan permintaan pembayaran kepada pengirim dana. *Request for Payment* dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti penagihan pembayaran *invoice* dan penagihan pembayaran perorangan.
3. Layanan transfer debit secara langsung (*direct debit*), layanan ini menghadirkan kemudahan pembayaran tagihan rutin secara otomatis. Melalui layanan ini, nasabah dapat memberikan otorisasi pendebitan rekening secara langsung untuk pembayaran seperti pembayaran listrik dan air, cicilan *leasing* serta premi asuransi.

Bank Indonesia menetapkan skema harga layanan BI-FAST Fase I Tahap 2 yang terdiri atas: (i) harga *bulk transfer* Rp16,- per transaksi yang dibebankan kepada peserta pengirim, dan maksimal Rp2.100,- per transaksi yang dibebankan oleh peserta pengirim kepada nasabah pengirim; (ii) harga *request for payment* Rp19,- per transaksi yang dibebankan kepada peserta pengirim, dan maksimal Rp2.500,- per transaksi yang dibebankan oleh peserta pengirim kepada nasabah pengirim; serta (iii) harga *direct debit* Rp19,- per transaksi yang dibebankan kepada peserta penerima, dan maksimal Rp2.500,- per transaksi yang dibebankan oleh peserta penerima kepada nasabah penerima.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.5 Perkembangan Transaksi APMK ATM/Debit - Nominal



Sumber: Bank Indonesia

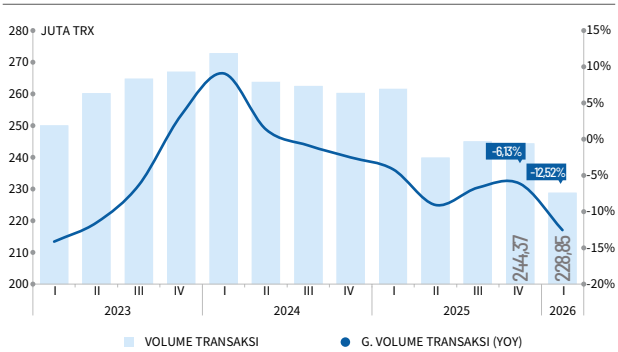
Grafik 4.7 Perkembangan Transaksi APMK ATM Kredit - Nominal

4.2.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Pada triwulan I 2026, transaksi APMK di Jawa Barat menunjukkan pelemahan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi menggunakan kartu debit tercatat terkontraksi sebesar 5,46% (yoy) atau tercatat sebesar Rp225,85 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,16% (yoy) atau sebesar Rp228,79 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi kartu debit turut mengalami kontraksi yaitu sebesar 12,52% (yoy) atau 228,85 juta transaksi, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,13% (yoy) atau 244,37 juta transaksi. Pelemahan pada sisi nominal dan volume transaksi mencerminkan adanya pergeseran preferensi masyarakat dengan menggunakan instrumen pembayaran digital lainnya yang menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan akses transaksi yang lebih cepat di berbagai lapisan masyarakat.

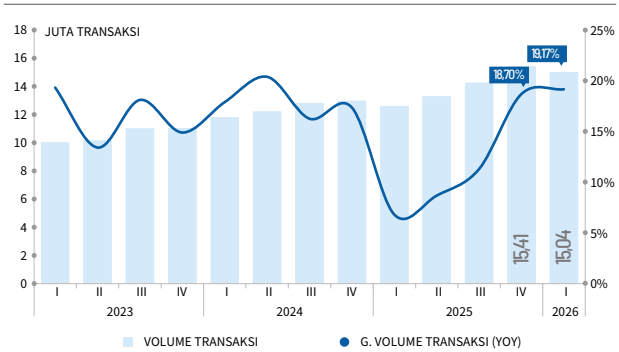
Lebih lanjut, nominal transaksi menggunakan kartu kredit di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang berbeda antara sisi nominal dan volume. Dari sisi nominal, transaksi kartu kredit tumbuh 15,86% (yoy) atau Rp11,03 triliun, melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 16,78% (yoy) atau Rp11,51 triliun. Di sisi lain, volume transaksi kartu kredit mencatat pertumbuhan 19,17% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,70% (yoy) meskipun dari jumlah transaksi mengalami penurunan menjadi 15,04 juta, dari 15,41 juta pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa transaksi kartu kredit cenderung dilakukan dalam nilai yang lebih kecil dengan frekuensi yang lebih tinggi, didukung oleh perilaku konsumsi masyarakat yang meningkat di tengah tetap terjaganya ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026.

Berbeda dengan pelemahan yang terjadi pada transaksi kartu debit, kinerja transaksi Uang Elektronik (UE) di Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Dari sisi nominal, transaksi UE tumbuh sebesar 33,48% (yoy) atau Rp37,65 triliun, dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 28,12% (yoy) atau Rp33,94 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi UE tumbuh 34,95% (yoy) atau sebanyak 500,04 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 29,00% (yoy) atau sebanyak 472,14 juta transaksi. Penguatan transaksi UE tersebut mencerminkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital di masyarakat, didukung oleh kemudahan akses,



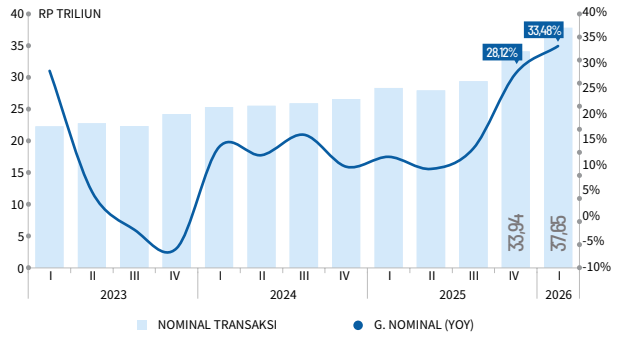
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.6 Perkembangan Transaksi APMK ATM/Debit - Volume



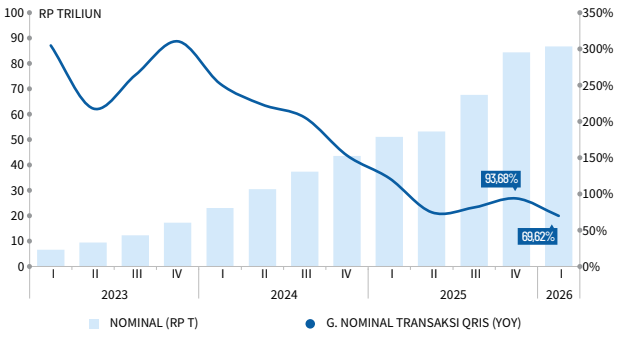
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Transaksi APMK ATM Kredit - Volume



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.9 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik - Nominal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

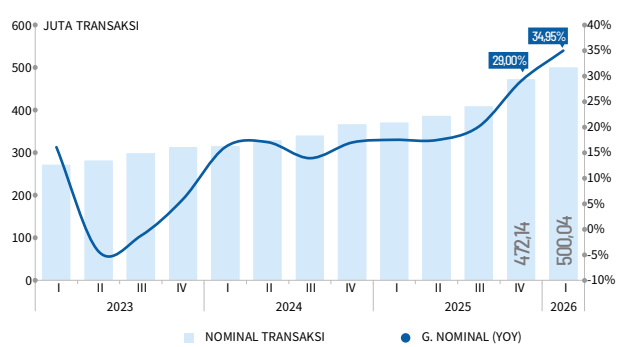
Grafik 4.11 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS

kecepatan transaksi, serta meningkatnya integrasi instrumen elektronik dengan berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari di Jawa Barat.

4.2.4 Perkembangan Transaksi QRIS

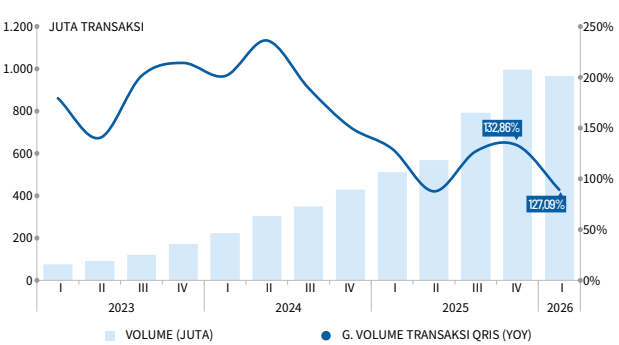
Kinerja transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat meskipun laju pertumbuhannya mulai mengalami normalisasi. Secara nominal, transaksi QRIS pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp86,66 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp84,37 triliun. Meskipun demikian, laju pertumbuhan nominal transaksi QRIS mengalami perlambatan, dari sebelumnya tumbuh 93,68% menjadi tumbuh sebesar 69,62% (yoy) pada triwulan laporan. Dari sisi volume, transaksi QRIS tetap tumbuh positif sebesar 89,28% (yoy) atau mencapai 965,27 juta transaksi, namun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 132,86% (yoy) atau mencapai 995,51 juta transaksi. Pertumbuhan transaksi QRIS pada triwulan I 2026 yang tetap kuat sejalan dengan upaya KPw BI Jawa Barat untuk memperluas adopsi QRIS melalui berbagai sinergi dengan mitra kerja, seperti Sosialisasi QRIS – Numofest, Sosialisasi QRIS – Indonesia Mom, Baby, and Kids Expo (IMOBY), Sosialisasi QRIS – Trademark Market, serta berbagai kegiatan sinergi dengan mitra kerja lainnya. Pertumbuhan tersebut juga mengindikasikan keberlanjutan adopsi pembayaran digital, sejalan dengan preferensi masyarakat terhadap instrument pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Jumlah pengguna baru QRIS di Jawa Barat terus meningkat dengan penambahan 507.629 pengguna selama triwulan I 2026. Secara kumulatif, total pengguna QRIS di Jawa Barat hingga akhir periode pelaporan tercatat sebesar 13,58 juta atau 22,02% dari total pengguna QRIS nasional. Capaian tersebut menegaskan peran Jawa Barat sebagai kontributor utama dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital nasional. Pertumbuhan jumlah pengguna terpotret menunjukkan tren peningkatan dari 6,80% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 9,34% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini menandakan bahwa adopsi QRIS di Jawa Barat masih berlanjut secara positif, didukung oleh berbagai upaya perluasan akseptasi dan edukasi yang dilakukan KPw BI Jawa Barat melalui sinergi bersama mitra kerja di berbagai sektor.



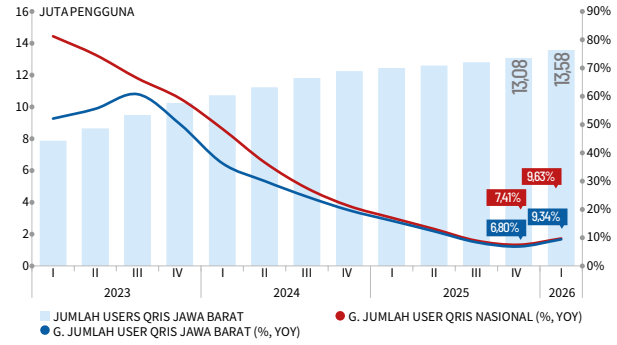
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.10 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik - Volume



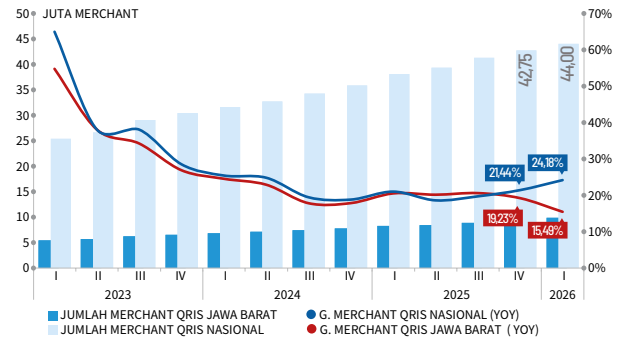
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS

Lebih lanjut, jumlah *merchant* QRIS di Jawa Barat pada triwulan laporan mencapai 9,86 juta atau 22,41% dari total *merchant* secara nasional, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah *merchant* terbanyak di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna, pertumbuhan jumlah *merchant* tercatat lebih tinggi pada periode laporan, menunjukkan bahwa berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan pada Januari – Maret 2026, seperti sosialisasi dan program kemitraan, efektif dalam mendorong *onboarding merchant* baru. Hal ini menandakan bahwa strategi perluasan ekosistem QRIS berhasil meningkatkan partisipasi pelaku usaha di Jawa Barat, sehingga lebih banyak *merchant* yang melakukan adopsi pembayaran digital melalui kanal QRIS.

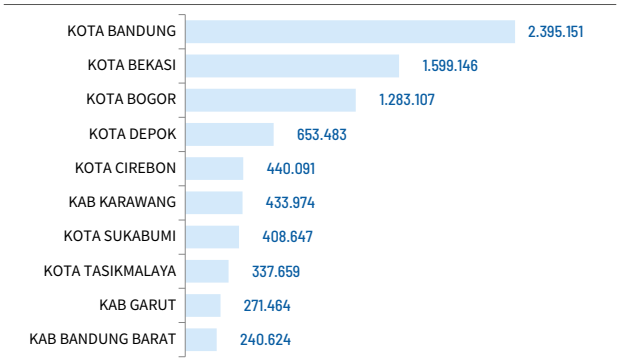
Peningkatan literasi digital, perluasan infrastruktur pembayaran, serta dukungan aktif pemerintah daerah turut berkontribusi signifikan dalam mendorong percepatan adopsi QRIS di Jawa Barat. Dalam konteks tersebut, perlambatan laju pertumbuhan pengguna lebih mencerminkan proses normalisasi adopsi seiring tingkat penetrasi QRIS yang telah relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan inklusi keuangan melalui sistem pembayaran digital berbasis QRIS terus berlanjut dan semakin luas dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi di Jawa Barat.

QRIS sebagai *game changer* dalam sistem pembayaran ritel, terus berkembang pesat sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang bertujuan mempercepat akselerasi ekonomi digital. BSPI dilengkapi dengan berbagai inisiatif untuk mendorong inovasi pembayaran digital yang dikembangkan Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan penguatan mitigasi risiko. Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat guna memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran serta memperkuat pelindungan konsumen. Upaya ini dilakukan melalui kampanye literasi digital, termasuk sosialisasi dan edukasi terkait QRIS, CBP Rupiah, serta pelindungan konsumen bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Secara spasial, Kota Bandung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah *merchant* QRIS terbanyak di Jawa Barat, yaitu sebanyak 2,40 juta *merchant* atau setara dengan 24,29% dari total *merchant* di Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Kota Bekasi (16,22%), Kota Bogor (13,01%), dan Kota Depok (6,63%) (Grafik 5.15). Sebaran tersebut menunjukkan bahwa akseptasi QRIS masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang relatif tinggi.

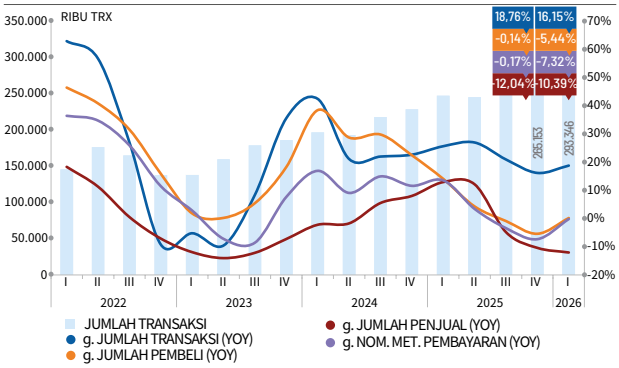
Berdasarkan skala usaha, *merchant* QRIS di Jawa Barat masih didominasi oleh Usaha Mikro dengan pangsa 63,44% (6,26 juta *merchant*), disusul Usaha Kecil (30,16%), Usaha Menengah (3,48%), Usaha Besar (2,47%), serta 0,45% sisanya merupakan Usaha Regional, *Public Service Obligation*, SPBU, dan Badan Layanan Umum (Grafik 5.16). Struktur tersebut mencerminkan bahwa QRIS telah menjadi instrumen pembayaran digital yang semakin terjangkau dan relevan bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Perkembangan implementasi pembayaran digital melalui QRIS turut didukung oleh meningkatnya literasi dan preferensi masyarakat terhadap transaksi digital, sejalan dengan visi Jawa Barat sebagai Provinsi Digital yang inklusif dan adaptif. Dengan dukungan infrastruktur pembayaran yang semakin memadai serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, penggunaan QRIS berpotensi terus meningkat dan memperkuat perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 Jumlah *Merchant* QRIS berdasarkan Kab/ Kota



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Transaksi E-commerce

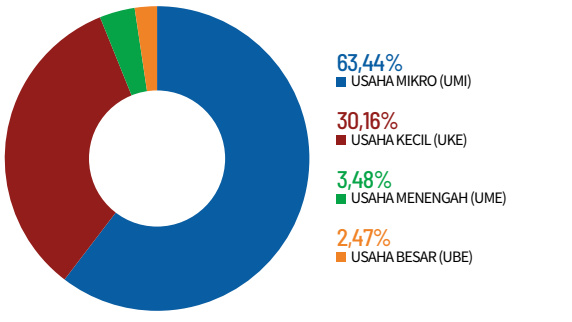
4.2.5 Perkembangan Transaksi *E-commerce*[1]

Transaksi *e-commerce* di Jawa Barat pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan sejalan dengan HBKN Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mendorong aktivitas jumlah maupun nominal transaksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan momentum periode HBKN Ramadan dan Idulfitri, platform *e-commerce* yang pada pola historisnya menawarkan berbagai insentif seperti promo, diskon, dan *cashback*. Kondisi ini menandakan bahwa semakin membaiknya ekosistem transaksi *e-commerce* dalam mendorong adopsi pembayaran digital di Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, jumlah transaksi[2] *e-commerce* mencapai 293,35 juta atau tumbuh 18,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,15% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan masih kuatnya aktivitas perdagangan digital serta semakin terintegrasinya kanal e-commerce dalam perilaku konsumsi masyarakat di Jawa Barat.

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan jumlah penjual pada *e-commerce* mengalami perbaikan, meskipun masih terkoreksi sebesar 0,17% (yoy), namun lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 7,32% (yoy). Jumlah pembeli juga meningkat dengan tumbuh sebesar 0,14% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,44% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan partisipasi pelaku pasar dalam ekosistem *e-commerce* di Jawa Barat pada triwulan laporan.

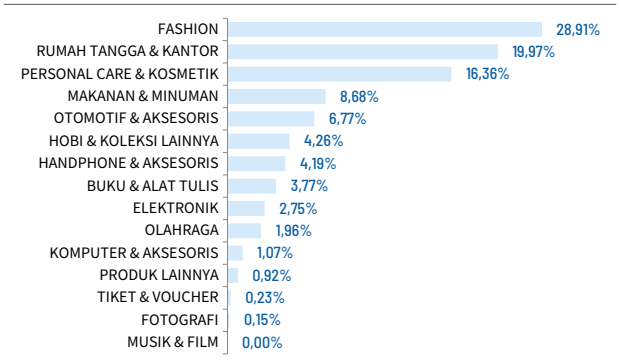
Berdasarkan kategori produk, transaksi *e-commerce* di Jawa Barat pada triwulan I 2026 masih didominasi oleh produk fashion dengan pangsa sebesar 28,91%, diikuti oleh produk rumah tangga dan kantor (19,97%) serta *personal care* & kosmetik (16,36%). Dominasi kategori tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi sehari-hari dan gaya hidup masih menjadi pendorong utama aktivitas belanja masyarakat melalui kanal digital.

Dari sisi metode pembayaran, *Cash on Delivery* (CoD) atau Tunai masih menjadi metode yang paling banyak digunakan (21,88%), diikuti oleh Transfer Bank (21,32%), dan Kredit Tanpa Kartu (20,92%). Komposisi tersebut



Sumber: Bank Indonesia, diolah

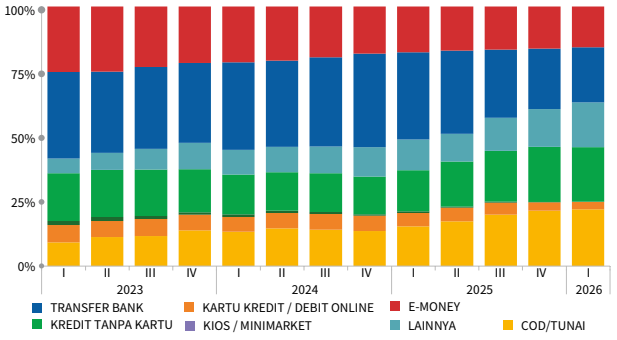
Grafik 4.16 Jumlah *Merchant* QRIS berdasarkan Skala Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Transaksi *E-commerce* berdasarkan Kategori

1 Data berasal dari beberapa e-commerce terbesar di Indonesia sehingga belum mencerminkan populasi industri e-commerce.
2 Jumlah transaksi merupakan banyaknya transaksi dalam 1 (satu) invoice.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Metode Pembayaran *E-commerce*

menunjukkan bahwa preferensi pembayaran masyarakat masih relatif beragam, mencerminkan perpaduan antara metode pembayaran konvensional dan digital dalam ekosistem *e-commerce* di Jawa Barat.

4.2.6 Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sosialisasi dan Implementasi Penggunaan Sistem Pembayaran Non tunai

Dalam rangka mengakselerasi implementasi sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia secara konsisten mendorong peningkatan transaksi melalui berbagai strategi perluasan akses terhadap sistem pembayaran nontunai. Alat pembayaran non tunai yang terus digencarkan Bank Indonesia salah satunya adalah QRIS yang merupakan *game changer* transaksi ritel. Sebagai upaya mendorong akselerasi implementasi QRIS di Jawa Barat, beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

a. Perluasan akseptasi dan implementasi sistem pembayaran non tunai melalui program elektronifikasi seperti *rest area* di sepanjang jalan tol dan elektronifikasi transaksi pembayaran.
b. Sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk elektronifikasi penyaluran bantuan sosial non tunai serta implementasi transaksi pendapatan dan belanja non tunai Pemerintah Daerah.
c. Implementasi sistem pembayaran non tunai melalui elektronifikasi pembayaran untuk UMKM dan transportasi umum di Provinsi Jawa Barat.
d. Sinergi dan kolaborasi bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan stakeholders terkait;
e. Edukasi/sosialisasi dan QRIS *Experience* melalui berbagai kegiatan seperti (a) QRIS *Goes to School/ Campus*, (b) Kolaborasi pada kegiatan/*event* strategis di Jawa Barat, dan (c) Sinergi *event* strategis Bank Indonesia;

Tabel 4.1 Wilayah Kerja Bank Indonesia di Jawa Barat

LOKASI	KOMODITAS
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon	Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis.

Catatan: Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi menjadi area pengelolaan uang Rupiah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI)

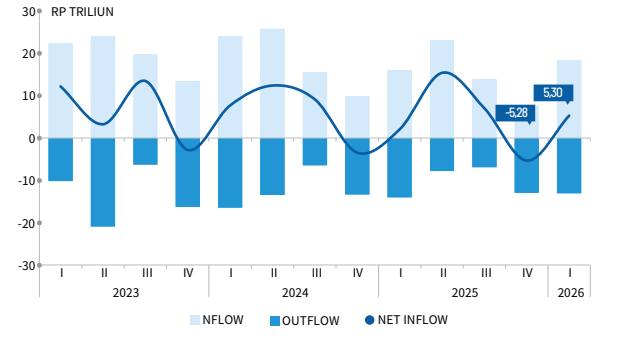
Langkah-langkah tersebut berhasil mendorong jumlah pengguna baru QRIS yang pada triwulan I 2026 tercatat sebanyak 507,63 ribu pengguna atau 321,19% dari target 2026. Selain menjaga kelancaran dan perluasan implementasi QRIS, KPwBI di wilayah Jawa Barat juga terus berupaya menjaga keamanan dalam bertransaksi melalui ketersediaan layanan dan sosialisasi pelindungan konsumen. Terkait kedua hal tersebut, hingga triwulan I 2026, KPwBI Provinsi Jawa Barat telah melakukan edukasi dan sosialisasi QRIS serta pelindungan konsumen sebanyak 339 kali kepada pelaku UMKM, mahasiswa, pelajar, guru dan masyarakat umum, dengan total peserta sebanyak 50.911 orang.

4.3 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia tecermin dari beberapa indikator utama yaitu jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), dan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Di Jawa Barat, kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah dilaksanakan di 3 (tiga) Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai berikut.

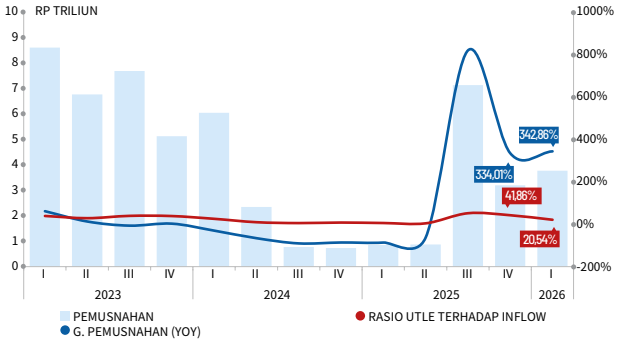
4.3.1 Aliran Uang Masuk/Keluar (*Inflow*/*Outflow*)

Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal di Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi *net-inflow* sebesar Rp5,30 triliun, berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat *net-outflow* sebesar Rp5,28 triliun. Posisi ini tercermin dari *inflow* uang kartal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan *Inflow – Outflow* Uang Kartal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Pemusnahan UTLE di Jawa Barat

yang masuk ke khazanah Bank Indonesia di seluruh Provinsi Jawa Barat pada periode laporan tercatat Rp18,32 triliun, sementara total *outflow* tercatat sebesar Rp13,01 triliun.

Jumlah *outflow* pada triwulan laporan terkontraksi menjadi 6,90% (yoy), lebih dalam dari periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,81% (yoy). Di sisi lain, jumlah *inflow* pada triwulan laporan tumbuh menjadi 14,18% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi sebesar 22,71% (yoy). Posisi *net-inflow* yang terjadi pada periode laporan mencerminkan normalisasi aliran uang tunai pasca momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta pada Ramadhan dan Idulfitri. Selain dipengaruhi faktor musiman, perkembangan tersebut juga mengindikasikan adanya penyesuaian aktivitas ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik, yang mendorong peningkatan uang kartal kembali ke sistem perbankan.

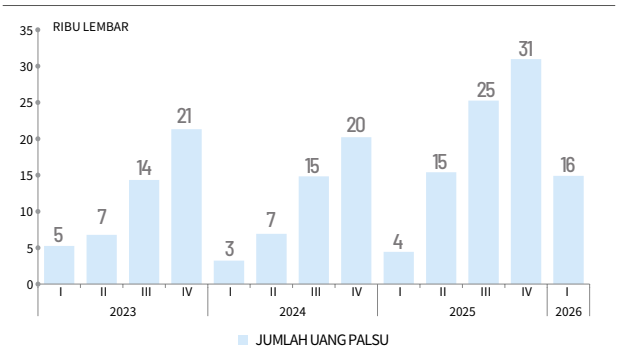
4.3.2 Penyediaan Uang Layak Edar

Bank Indonesia terus berupaya memastikan kebutuhan uang kartal masyarakat tersedia dengan menerapkan *clean money policy*. Bank Indonesia secara berkala melakukan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, pengolahan uang Rupiah, serta penggantian dengan uang Rupiah layak edar. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan frekuensi dan jangkauan kas keliling. Layanan kas keliling Bank Indonesia lebih difokuskan pada peningkatan frekuensi dan jangkauan ke *remote area*. Melalui layanan ini, kualitas uang layak edar di daerah terpencil diharapkan dapat terjaga dengan baik. Fokus tersebut meliputi pula pemenuhan modal kerja penukaran yang saat ini dilakukan oleh perbankan (baik bank umum maupun BPR), terutama yang berlokasi di luar kota. Dalam upaya menyediakan uang layak edar di masyarakat, KPw BI Jawa Barat sampai dengan triwulan I 2026 telah menyelenggarakan kegiatan kas keliling sebanyak 35 kali, mencakup dalam kota, luar kota, dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

4.3.3 Pengolahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk menjaga standar kualitas uang yang diedarkan kepada masyarakat. Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melakukan pemusnahan UTLE sebesar Rp3,76 triliun atau tumbuh sebesar 342,86% (yoy). Secara spasial, perkembangan pemusnahan UTLE di wilayah Jawa Barat menunjukkan dinamika yang beragam. Peningkatan laju pertumbuhan pemusnahan UTLE terutama terjadi di KPw BI Cirebon yang tumbuh sebesar 126,01% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,75% (yoy). Sementara itu, KPw BI Jawa Barat dan KPw BI Tasikmalaya masih mencatat pertumbuhan positif, meskipun dengan laju yang melambat. KPw BI Jawa Barat tumbuh sebesar 500,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebelumnya sebesar 548,75% (yoy), sedangkan KPw BI Tasikmalaya tumbuh sebesar 107,40% (yoy), melambat dari 297,40% (yoy) pada periode sebelumnya.

Tren peningkatan jumlah uang yang dimusnahkan didorong oleh implementasi program *clean money policy* Bank Indonesia yang bertujuan menjaga kualitas uang layak edar di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Perkembangan Temuan Uang Palsu di Jawa Barat

transaksi ekonomi. Strategi tersebut diwujudkan melalui kampanye nasional Cinta, Bangga, Paham Rupiah hingga ke wilayah 3T untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di seluruh wilayah Jawa Barat terutama melalui jargon 5J (Jangan Dilipat; Jangan Dicoret; Jangan Distaples; Jangan Diremas; dan Jangan Dibasahi).

4.3.4 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Pada triwulan I 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan 339 kali edukasi CBP Rupiah kepada 50.911 peserta. Kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah daerah. Melalui pendekatan yang beragam ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keaslian dan penggunaan Rupiah dapat semakin meningkat.

Edukasi CBP Rupiah juga diharapkan mampu menekan peredaran uang palsu/yang diragukan keasliannya. Hingga triwulan I 2026, ditemukan sebanyak 15.596 lembar uang palsu/yang diragukan keasliannya yang beredar di wilayah Jawa Barat. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam sosialisasi ciri-ciri keaslian Rupiah serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap peredaran uang palsu/diragukan keasliannya.

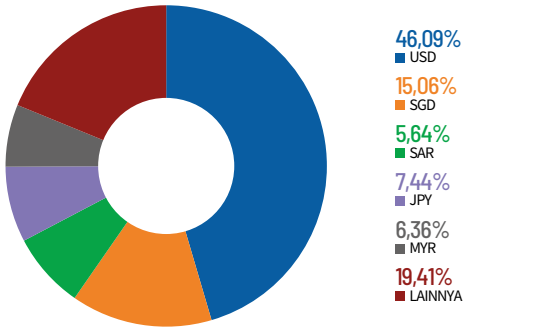
Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan edukasi CBP Rupiah demi memperkuat peran Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan bangsa.

4.4 Perkembangan Transaksi Kupva BB dan PPJP LR BB

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi Bukan Bank (PJP LR BB) di Provinsi Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus melakukan monitoring perizinan dan pengawasan terhadap operasional KUPVA BB dan PJP LR BB yang berada di wilayah Jawa Barat. Valuta asing yang ditransaksikan di KUPVA BB di Jawa Barat adalah sebanyak 38 jenis mata uang. Adapun penyelenggara KUPVA BB terdiri dari 30 (tiga puluh) Penyelenggara KUPVA BB yang telah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia Jawa Barat dan 17 (tujuh belas) KUPVA BB yang telah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia Cirebon. Selain KUPVA BB, tercatat 6 (enam) Penyelenggara PJP LR di bawah pengawasan Bank Indonesia Jawa Barat yang telah memiliki izin.

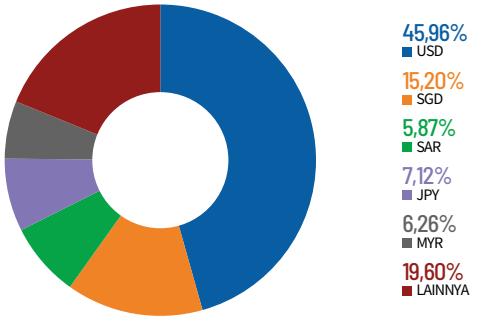
4.4.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan I 2026, transaksi pembelian valuta asing masih didominasi oleh mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 46,09%, diikuti oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 15,06%, Yen Jepang (JPY) sebesar 7,44%, dan Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 6,35%. Sejalan dengan



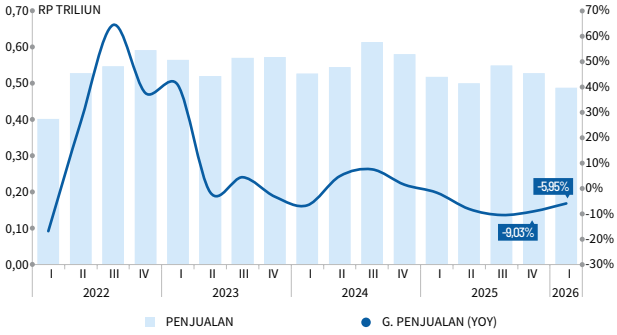
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Transaksi Pembelian Valas di KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Transaksi Penjualan Valas di KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

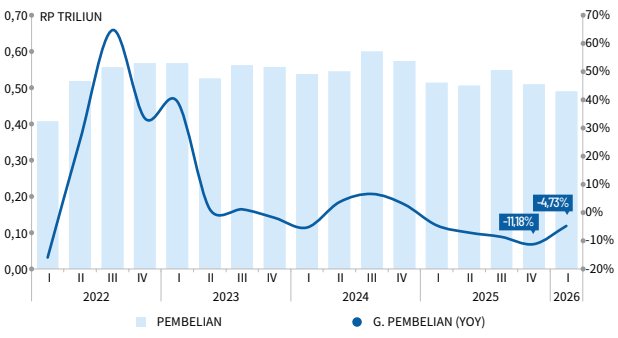
Grafik 4.26 Perkembangan Transaksi Penjualan Valas di KUPVA BB

pembelian, proporsi transaksi penjualan valuta asing juga didominasi oleh USD dengan pangsa 45,96%, SGD (15,20%), JPY (7,12%), dan MYR (6,26%).

Transaksi beli valuta asing melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai transaksi pembelian valuta asing tercatat sebesar Rp489,44 miliar atau masih terkontraksi sebesar 4,73% (yoy), namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,18% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, transaksi penjualan valuta asing juga menunjukkan perbaikan meskipun masih berada dalam zona kontraksi. Nilai transaksi penjualan valuta asing tercatat sebesar Rp487,29 miliar atau terkontraksi sebesar 5,95% (yoy), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 9,03% (yoy). Perbaikan kinerja transaksi KUPVA BB mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap valuta asing, sejalan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas internasional yang tetap terjaga pada awal tahun. Selain itu, faktor musiman pasca periode libur akhir tahun turut memengaruhi permintaan valuta asing, terutama untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan, dan aktivitas bisnis. Berdasarkan komposisi mata uang, dolar Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi KUPVA BB sejalan dengan perannya sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan sistem keuangan global. Sementara itu, tingginya pangsa dolar Singapura (SGD) mencerminkan eratnya hubungan ekonomi serta tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, untuk keperluan wisata, pendidikan, dan bisnis dengan Singapura.

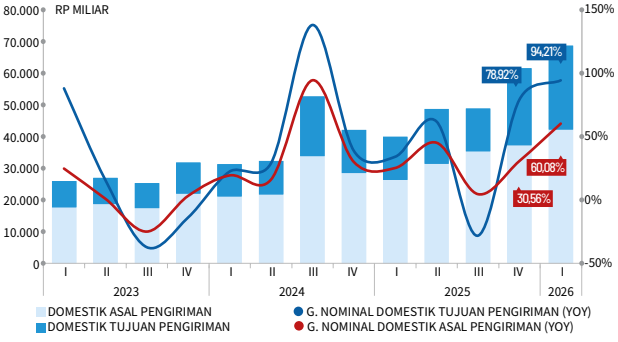
4.4.2 Perkembangan Kegiatan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Perkembangan transaksi transfer dana melalui Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Jawa Barat pada triwulan I 2026 mengalami penguatan baik untuk transaksi menurut asal maupun tujuan pengiriman. Transaksi Layanan Remitansi yang tergambar melalui data Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) menunjukkan bahwa pada triwulan I 2026 transfer dana domestik berdasarkan asal pengiriman Provinsi Jawa Barat tumbuh lebih tinggi



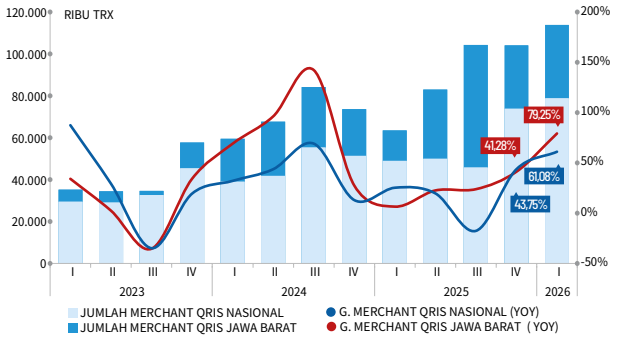
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Transaksi Pembelian Valas di KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27 Perkembangan Transaksi KUPU Domestik - Nominal

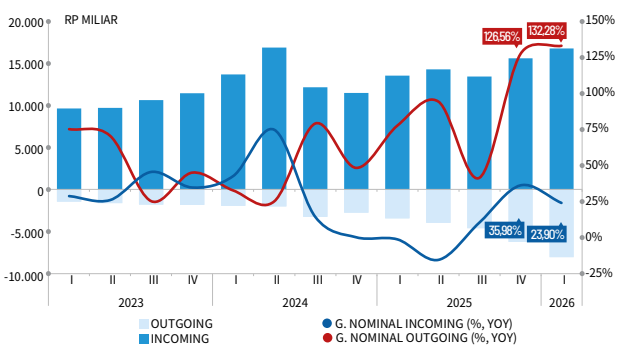


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Perkembangan Transaksi KUPU Domestik - Volume

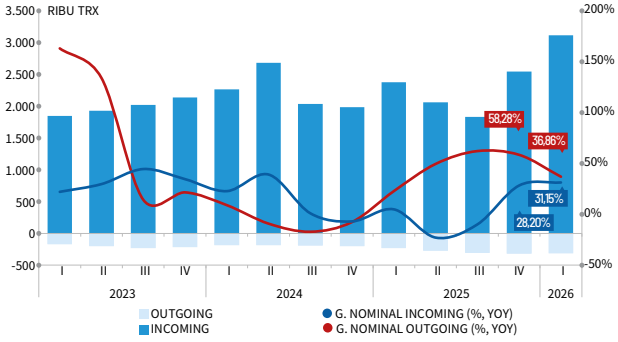
sebesar 60,08% (yoy) atau Rp42,18 triliun, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,56% (yoy) atau Rp37,23 triliun. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas transaksi keuangan masyarakat Jawa Barat, baik untuk kebutuhan konsumsi, aktivitas bisnis, maupun kebutuhan finansial lainnya menjelang momentum periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Capaian ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang tergambar dari pertumbuhan Konsumsi RT pada triwulan I 2026 sebesar 5,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,96% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, transaksi transfer dana domestik berdasarkan tujuan pengiriman ke Provinsi Jawa Barat juga mengalami penguatan pada triwulan I 2026. Nominal transaksi tercatat Rp26,45 triliun, tumbuh 94,21% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 78,92% (yoy). Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri yang turut mendorong peningkatan arus transfer dana menuju Jawa Barat.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.29 Perkembangan Transaksi KUPU Incoming dan Outgoing - Nominal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.30 Perkembangan Transaksi KUPU Incoming dan Outgoing - Volume

Secara umum, tren transaksi remitansi domestik tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai salah satu simpul utama arus dana domestik yang mendukung aktivitas ekonomi regional maupun nasional.

Pada transaksi internasional, layanan pengiriman uang menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif pada triwulan I 2026, meskipun dengan dinamika yang berbeda antara transaksi outgoing dan incoming. Dari sisi *outgoing*, nominal transaksi pengiriman dana ke luar negeri tumbuh 132,28% (yoy) dengan nilai Rp8,01 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 126,56% (yoy) atau senilai Rp6,23 triliun. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas pengiriman dana ke luar negeri pada awal tahun, baik untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan, bisnis, maupun transaksi internasional lainnya. Di sisi lain, nominal transaksi *incoming* masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 23,90% (yoy) dengan nilai mencapai Rp16,62 triliun, meningkat dibandingkan nominal triwulan sebelumnya yang tercatat Rp15,47 triliun. Namun demikian, laju pertumbuhan *incoming* tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 35,98% (yoy). Melambatnya pertumbuhan *incoming* sejalan dengan moderasi kinerja ekspor pada triwulan laporan yang tumbuh sebesar 1,76% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,44% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya perlambatan penerimaan dana dari luar negeri, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional dan pembayaran dari mitra usaha luar negeri pada sektor manufaktur, tekstil, otomotif, maupun komponen elektronik yang memiliki basis produksi kuat di Jawa Barat.

4.4.3 Upaya Pengawasan KUPVA BB dan Penyedia Jasa Pembayaran LR

Dalam melaksanakan perannya di bidang sistem pembayaran, KPwBI di wilayah Jawa Barat senantiasa melaksanakan fungsi perizinan dan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Pembayaran. Terkait hal ini, BI membuka peluang bagi Penyedia Jasa Pembayaran di antaranya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi Bukan Bank (PJP LR BB) untuk memperluas bisnis dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan akhir triwulan I 2026, KPwBI Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan umum kepada 4 (empat) penyelenggara KUPVA BB yang mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) serta aspek Non APU dan PPT. Beberapa upaya yang telah dilakukan melalui pengawasan tidak langsung antara lain:

1. Melakukan asesmen terhadap laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang disampaikan oleh KUPVA BB dan PJP LR BB.
2. Terdapat 2 (dua) KUPVA BB yang mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha, namun hingga akhir periode pelaporan masih dalam proses administratif.
3. Terdapat 1 (satu) KUPVA BB yang mengajukan permohonan izin, namun hingga akhir periode pelaporan masih dalam proses administratif.
4. Terdapat 1 (satu) PJP LR BB yang mengajukan permohonan izin, namun hingga akhir periode pelaporan masih dalam proses analisis substantif.

Selain itu, pada periode yang sama dilakukan pula monitoring atas tindak lanjut komitmen hasil pemeriksaan yang wajib dipenuhi oleh Penyelenggara yang selanjutnya diinput melalui BI-SSS serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan terhadap KUPVA BB dan PJP LR BB, pengawas senantiasa melakukan pemantauan Ease/E-licensing dalam rangka monitoring perizinan bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJP LR BB.

4.5 Perkembangan Transaksi Elektronifikasi

4.5.1 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya *less-cash society* dan peningkatan inklusi keuangan, melalui penyediaan kanal pembayaran non tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Di Jawa Barat, implementasi ETPD pada sisi belanja telah dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun 27 Kabupaten/Kota. Dalam operasionalnya, pemerintah daerah di Jawa Barat menggunakan berbagai platform sistem keuangan, seperti **SIMDA** yang digunakan oleh 14 Kabupaten/Kota, **SIPKD** oleh 11 Kabupaten/Kota, **SISMIOP** di Kota Tasikmalaya, serta **SIPADARAN** di Kabupaten Pangandaran. Untuk mendorong standarisasi dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, **Kementerian Dalam Negeri mendorong adopsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)**, yang mencakup fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan. Pemerintah daerah di Jawa Barat saat ini telah mulai mengimplementasikan SIPD RI secara bertahap. Di sisi pendapatan, khususnya pajak dan retribusi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat terus berperan aktif serta bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memperluas elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam pelaksanaannya, KPwBI di wilayah Jawa Barat bersinergi dengan perbankan untuk memfasilitasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat. Berdasarkan hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester II tahun 2025, seluruh wilayah Jawa Barat yang mencakup 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Provinsi memperoleh status digital dengan skor >90% pada IETPD yang mencerminkan tersedianya seluruh kanal pembayaran baik tunai maupun non tunai. Selain itu, perluasan digitalisasi pembayaran Pemerintah Daerah

di Jawa Barat juga tercermin pada transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Provinsi Jawa Barat yang telah mencapai 55.151 volume transaksi dengan nilai sebesar Rp182,96 miliar dari Januari–Desember 2025. Terdapat 25 Pemerintah Daerah yang telah melakukan Go Live KKI sejak KKI pertama kali diluncurkan pada 2023, di antaranya Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Tasikmalaya.

Beragam upaya yang telah dilakukan tersebut mampu membawa pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat memperoleh beberapa penghargaan Championship TP2DD Tahun 2025 yang diumumkan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD, yang meliputi: (1) Kab. Ciamis sebagai TP2DD Terbaik I Tingkat Kabupaten Jawa-Bali; (2) Provinsi Jawa Barat sebagai Terbaik I Program Unggulan Kategori Layanan Sistem Pembayaran, serta Terbaik II Program Unggulan Kategori Ketersediaan Layanan Sinyal/Jaringan dan Peningkatan Layanan PKB; (3) Kota Cimahi sebagai TP2DD Terbaik II Tingkat Kota Jawa Bali; dan (4) Kota Bogor sebagai terbaik II Program Unggulan Kategori Umum.

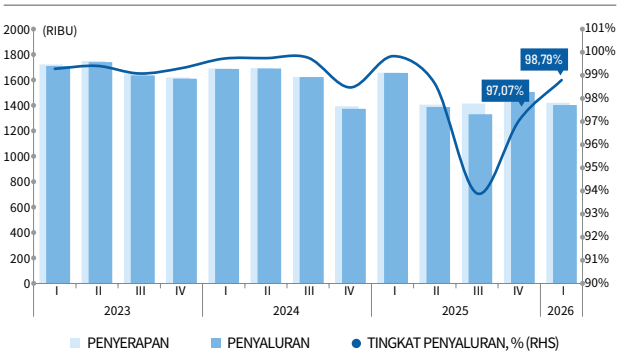
Untuk terus mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi digital, khususnya dalam mendorong ETPD, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang menyeluruh mencakup aspek implementasi, realisasi, serta lingkungan strategis. Oleh karena itu Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta perbankan dalam melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, Bank Indonesia melakukan digitalisasi *end to end* yang mencakup KKI, QRIS dan *fast payment* yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara *real time*;
2. Mendorong peningkatan infrastruktur perbankan dan Pemerintah Daerah, serta standardisasi sistem keuangan Pemerintah Daerah;
3. Mendorong penerbitan ketentuan dan pedoman pelaksanaan elektronifikasi transaksi non tunai di seluruh Pemerintah Daerah;
4. Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan transaksi non tunai pada transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Mendorong sinergi antara perbankan atau penyelenggara jasa sistem pembayaran lain untuk memperluas infrastruktur jaringan sistem pembayaran;
6. Melakukan upaya dan strategi dalam mendorong implementasi ETPD seperti:
   a. Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID dan TP2DD se-Jawa Barat,
   b. HLM TP2DD pada level Kab/Kota di wilayah Jawa Barat,
   c. Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi dan strategi peningkatan dan perluasan ETPD,
   d. Pendampingan pengisian survei indeks ETPD.

4.5.2 Implementasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT)

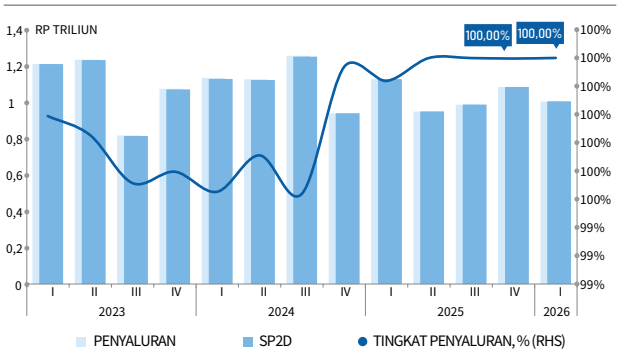
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas perluasan penyaluran Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Jawa Barat. Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu secara tunai oleh PT Pos Indonesia (Persero) dan secara non tunai melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Skema penyaluran ganda, tunai dan non tunai juga diterapkan dalam penyaluran Program Sembako, sebagai strategi untuk mempercepat dan memperluas distribusi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Implementasi BSNT di Provinsi Jawa Barat telah mencakup seluruh Kabupaten/Kota. Penyaluran secara nontunai dikoordinasikan bersama bank-bank anggota Himbara dimana di setiap wilayah terdapat Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Tingkat penyerapan program bantuan sosial pada triwulan I 2026 terekam mengalami peningkatan pada PKH, di sisi lain penyerapan pada Program Sembako menunjukkan penurunan. Bantuan sosial PKH telah terserap sebesar 98,79%, lebih tinggi dari periode



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31 Tingkat Penyerapan KPM PKH

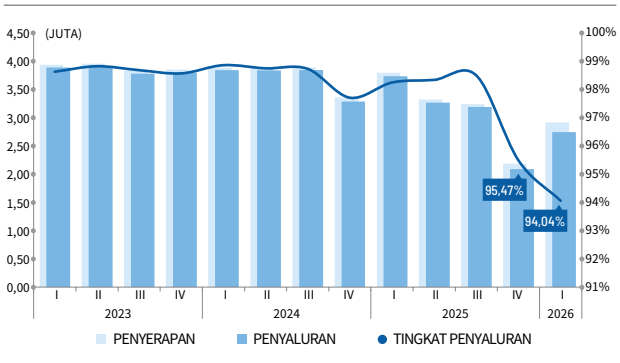


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.32 Tingkat Penyaluran Nominal PKH

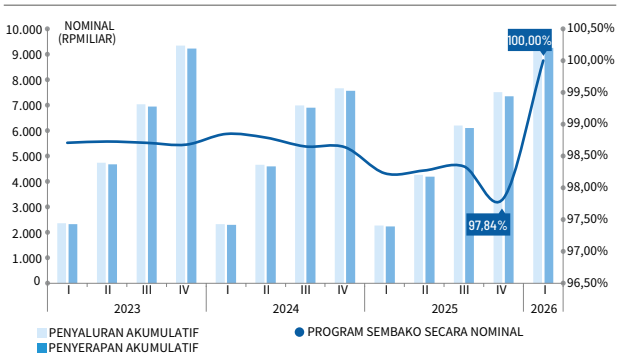
sebelumnya yang sebesar 97,07%. Pada periode laporan, bantuan sosial PKH di Jawa Barat telah disalurkan kepada 1,42 juta KPM atau 100% dari SP2D Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh alokasi dana PKH yang direncanakan telah berhasil disalurkan sepenuhnya sesuai target.

Pada periode yang sama, Program Sembako telah terserap sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 97,84%. Lebih lanjut, Program Sembako hingga periode laporan telah tersalurkan sebanyak 97,12% dari sisi nominal atau Rp7,34 triliun secara kumulatif. Di sisi lain, terdapat penurunan penyerapan pada sisi jumlah KPM dari 95,47% pada triwulan lalu menjadi 94,04% pada triwulan laporan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya KPM telah mengakses Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), meskipun secara nominal transaksi pemanfaatan bantuan tersebut terekam lebih optimal dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, implementasi bansos stimulus sudah dilaksanakan sejak Juli 2025 dan peralihan penuh ke mekanisme nontunai setelah penyaluran tunai ditiadakan oleh PT Pos Indonesia, menyebabkan adanya penyesuaian teknis dan administratif di lapangan. Penyesuaian ini dalam masa transisi kebijakan dan memerlukan adaptasi baik dari lembaga penyalur maupun KPM. Pelemahan tingkat penyerapan pada KPM pada periode tahap penyaluran ke depan perlu dimitigasi melalui perhatian lebih pada penguatan sistem monitoring dan pelaporan agar distribusi bantuan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, penguatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM menjadi sangat penting agar mereka memahami prosedur pencairan dan memanfaatkan layanan nontunai dengan lebih optimal. Secara umum, penyerapan BSNT di Jawa Barat pada triwulan I 2026 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, kinerja penyaluran tetap tergolong baik dengan capaian yang mendekati target. Ke depan, penguatan akses, peningkatan literasi KPM, serta optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program BSNT.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.33 Tingkat Penyerapan KPM Program Sembako



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.34 Tingkat Penyaluran Nominal Program Sembako



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Laju ketenagakerjaan Jawa Barat tercatat terus membaik seiring dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 menjadi 6,64% dan meningkatnya proporsi penduduk bekerja pada lulusan SMK dan Universitas.

Aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak pada masyarakat di Jawa Barat terus menguat, ditunjukan dari kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 menjadi 75,90 dan Rasio Gini yang terus membaik.

Kondisi kesejahteraan petani pada triwulan I 2026 tetap terjaga ditengah kinerja sektor pertanian yang tumbuh positif, tecermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

68,13%	Februari 2026
November 2025	67,67%
Agustus 2025	66,99%

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,64%	Februari 2026
November 2025	6,66%
Agustus 2025	6,77%

Nilai Tukar Petani (Rata-Rata Triwulan)

117,24	Tw I 2026
Tw IV 2025	116,53

Tingkat Kemiskinan

6,78%	September 2025
Maret 2025	7,02%
September 2024	7,08%

Gini Ratio

0,397%	September 2025
Maret 2025	0,416
September 2024	0,428



Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat tercatat membaik pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut tecermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sedikit menurun pada Februari 2026, menjadi sebesar 6,64% dari semula sebesar 6,66% pada November 2025**.** Peningkatan kualitas tenaga kerja juga terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Universitas, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring dengan penguatan sektor industri, jasa modern, dan transformasi ekonomi digital di Jawa Barat. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sedikit menurun terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk usia kerja yang melanjutkan pendidikan serta pergeseran preferensi menuju kewirausahaan dan pekerjaan informal.

Tingkat ketimpangan di Jawa Barat pada September 2025 semakin membaik yang tecermin dari Rasio Gini (Gini Ratio) sebesar 0,397 atau menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat Jawa Barat semakin merata. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pembangunan manusia juga terus meningkat, ditunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang meningkat menjadi 75,90 dari semula 74,92 pada tahun 2024.

Berdasarkan laporan terakhir, tingkat kemiskinan Jawa Barat menunjukkan tren perbaikan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan menjadi 6,78% atau menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 7,08%. Capain ini tidak terlepas dari intervensi program perlindungan sosial oleh pemerintah pusat dan daerah. Kedepan, kesejahteraan masyarakat diprakirakan terus meningkat sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang menguat pada triwulan I 2026, yaitu tumbuh sebesar 5,47% (yoy), kenaikan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 sebesar 5,7%, serta penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang mendukung penguatan daya beli, stabilitas dunia usaha, dan pemerataan investasi di Jawa Barat.

Kondisi kesejahteraan petani pada triwulan I 2026 meningkat ditengah kinerja sektor pertanian yang tumbuh positif sebesar 4,19% (yoy). Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat tercatat meningkat menjadi 117,24 dari periode sebelumnya sebesar 116,53. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan biaya konsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi masih mampu diimbangi oleh peningkatan pendapatan yang diterima petani, sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan petani tetap terjaga. **Selaras dengan NTP, Nilai Tukar Usaha Petani juga meningkat menjadi 121,74 pada triwulan I 2026, utamanya ditopang oleh subsektor hortikultura seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi di Jawa Barat.** Kendati demikian, pertanian di Jawa Barat masih memiliki tantangan, antara lain faktor perubahan iklim, produktivitas yang stagnan, alih fungsi lahan, serangan hama dan penyakit serta tingginya biaya distribusi.

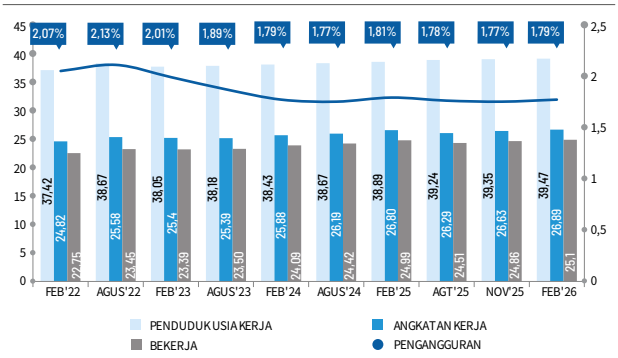
Berbagai program penguatan produktivitas pertanian terus dilakukan dalam rangka mendukung perbaikan kesejahteraan petani Jawa Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat turut mendukung program penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), dukungan klaster pertanian pada komoditas aneka cabai, bawang merah, padi serta pendampingan klaster dalam rangka peningkatan kelembagaan kelompok tani.

5.1 Ketenagakerjaan

Laju ketenagakerjaan tercatat terus mengalami perbaikan pada triwulan I 2026 ditengah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tetap terjaga. Perbaikan tersebut tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatnya proporsi penduduk bekerja pada lulusan SMK dan Universitas. Capaian ini tidak terlepas dari intervensi yang masif oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja lokal yang berdaya saing melalui penguatan *link and match* industri, digitalisasi informasi pasar kerja, serta berbagai pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah tekanan global yang masih membayangi sektor industri Jawa Barat.

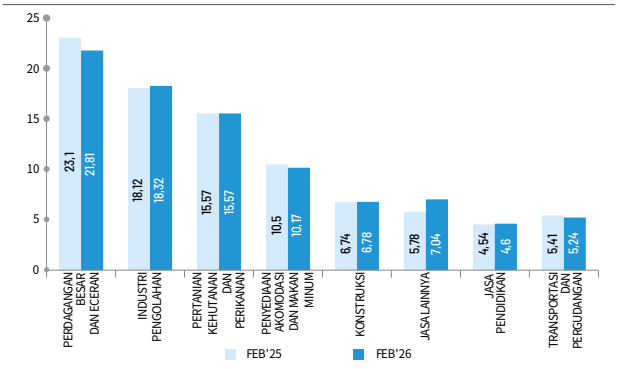
5.1.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Barat tercatat sebesar 39,47 juta orang pada Februari 2026 atau meningkat sebesar 1,49% dari semula 38,89 juta orang pada Februari 2025. Hal ini menggambarkan bahwa tenaga



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.1 Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Jawa Barat, 2022-2026 (dalam juta)



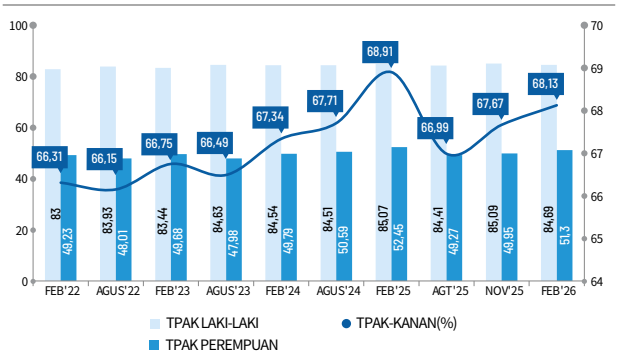
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, *Feb26 (KBU 2025)

Grafik 5.3 Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Jawa Barat (%)

kerja potensial di Jawa Barat terus bertambah sehingga perlu diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan khususnya pemberdayaan masyarakat lokal. Peningkatan tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah angkatan kerja menjadi 26,89 juta orang pada Februari 2026, atau lebih besar 0,09 juta orang dibandingkan Februari 2025. Adapun penduduk dengan status pengangguran terus mengalami perbaikan atau menurun, dari semula 1,81 juta orang pada Februari 2025 menjadi 1,79 juta orang pada Februari 2026, ditengah tantangan ekonomi global sepanjang tahun 2025. Pemerintah Jawa Barat terus berupaya dalam rangka akselerasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat melalui berbagai program, antara lain akses peningkatan kompetensi melalui paket pelatihan kerja, kewirausahaan dan pemagangan tahun 2026, menggelar *job fair* di berbagai kabupaten/kota, pelatihan vokasi Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kebutuhan industri serta penguatan program wirausaha dan UMKM.

5.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK Jawa Barat tercatat mengalami penurunan dari semula 68,91% pada Februari 2025 menjadi sebesar 68,13% pada Februari 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi



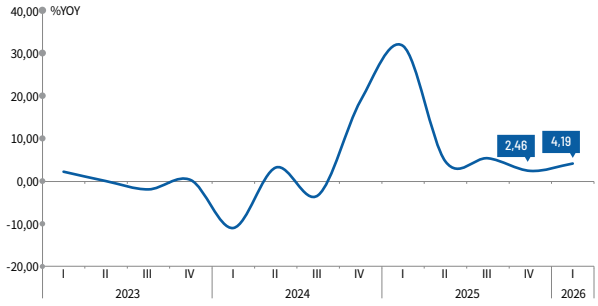
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.2 Perkembangan TPAK di Jawa Barat, 2022-2026 (dalam %)

angkatan kerja, khususnya di tengah perlambatan kinerja industri pengolahan akibat tekanan global**.** Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan, masing-masing menjadi sebesar 84,69% dan 51,30%, dibandingkan pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 85,07% dan 52,45%. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan angka penduduk usia kerja yang melanjutkan pendidikan lebih lanjut sebagai proses perbaikan kompetensi pekerja di Jawa Barat, serta adanya indikasi pergeseran tenaga kerja kepada sektor informal.

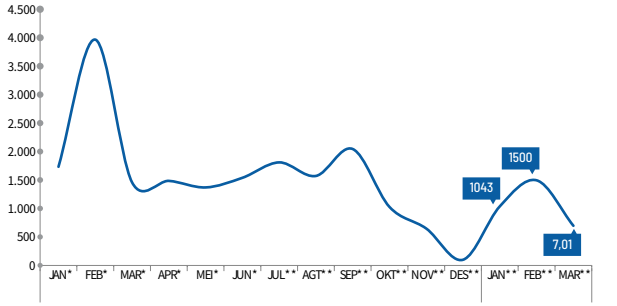
5.1.3 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pangsa ketenagakerjaan Jawa Barat pada Februari 2026 masih didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran (21,81%), Industri Pengolahan (18,32%), dan Pertanian (15,57%). Ketiga sektor tersebut tetap memberikan peran yang kuat terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Jawa Barat merupakan salah satu pusat manufaktur nasional dengan konsentrasi kawasan industri terbesar yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang, khususnya pada industri otomotif, tekstil, elektronik, serta makanan dan minuman. Secara umum, industri-industri tersebut juga menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekspor daerah. Sementara itu, tingginya pangsa sektor pertanian dipengaruhi oleh struktur wilayah Jawa Barat yang masih didominasi kawasan pertanian serta kuatnya peran Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan sentra produksi utama tersebar di Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 5.4 Pertumbuhan Pertanian %yoy



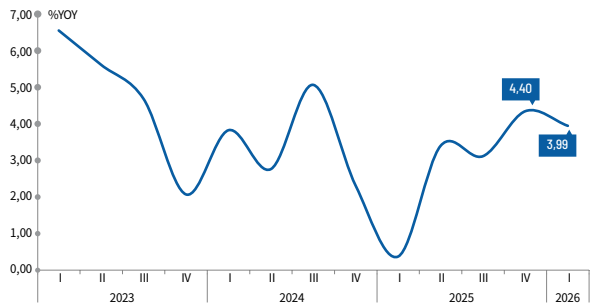
Sumber : Satudata Kemnaker (*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara)

Grafik 5.6 Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK periode 2025 – Triwulan I 2026

Penyerapan tambahan tenaga kerja pada tiga sektor tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian pada triwulan I 2026 yang utamanya ditopang industri pengolahan. LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 4,19% (yoy)y, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,46% (yoy) didukung momentum panen raya yang juga bertepatan dengan HBKN Ramadan Idulfitri 2026. Sedangkan untuk LU Industri Pengolahan sebagai penopang utama ekonomi Jawa Barat kinerjanya mengalami perlambatan dari semula 4,40% (yoy) menjadi 3,99%(yoy) pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi tekanan biaya produksi, gangguan bahan baku, serta pelemahan permintaan global. Isu perlambatan industri juga tecermin dari tekanan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat meningkatnya efisiensi perusahaan pada sektor manufaktur padat karya, khususnya tekstil dan produk turunannya.

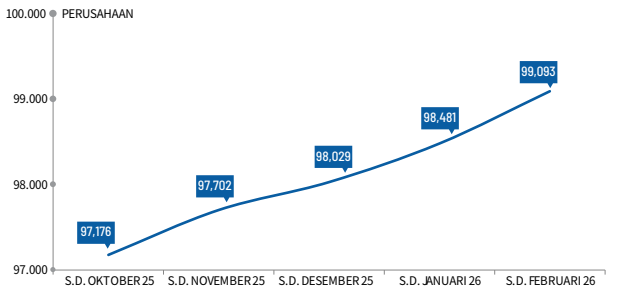
Pekerja di Jawa Barat masih dihadapkan pada tiga masalah utama, yaitu dominasi kerja kontrak/ outsourcing, tingginya kecelakaan kerja, dan ancaman PHK yang terus berulang. Berdasarkan data Kemnaker, jumlah PHK di Jawa Barat tercatat tertinggi selama periode triwulan I 2026 yaitu sebesar 3.244 orang atau 21,78% dari total PHK nasional. Beberapa faktor pemicu PHK tersebut, antara lain ketidakpatian situasi domestik dan global ditengah tensi geopolitik perang Iran – Israel-Amerika yang memberikan tekanan pada produk ekspor dari industri di Jawa Barat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain memastikan pemenuhan hak pekerja terdampak PHK (a.l pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan/ JKP, Jaminan Hari Tua/JHT) serta menyiapkan program stimulus dan mitigasi agar PHK tidak meluas.

Disisi lain, perlindungan pekerja di Jawa Barat terus membaik, tecemin dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang terus mengalami peningkatan atau mencapai 99.093 perusahaan pada Februari 2026. Kondisi ini mengindikasikan semakin kuatnya kepatuhan perusahaan di Jawa Barat terhadap regulasi ketenagakerjaan, antara lain meminimalisir risiko finansial ditengah ketidakpastian global, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja karena adanya kepastian kualitas hidup pekerja. Hal ini diharapkan dapat menopang stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke depan.



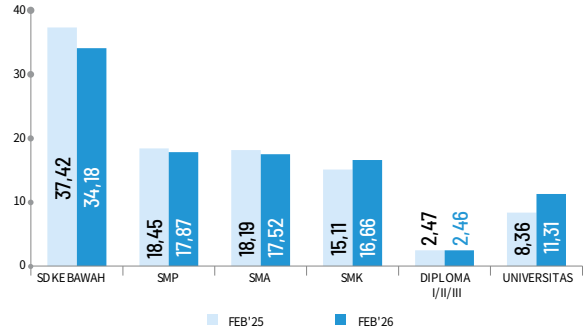
Sumber : BPS, diolah

Grafik 5.5 Petumbuhan Industri Pengolahan %yoy



Sumber: Kemnaker

Grafik 5.7 Akumulasi Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Tw IV 2025 - 2026



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.8 Penduduk Bekerja di Jawa Barat Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)

5.1.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Peningkatan kualitas tenaga kerja di Jawa Barat juga tecermin dari pergeseran pangsa bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan atau yang berasal dari pangsa lulusan SMK dan Universitas mengalami kenaikan. Hal ini semakin memperjelas bahwa pekerja di Jawa barat memiliki kualitas yang baik atau memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri. Tercatat bahwa lulusan SMK meningkat sebesar 16.66% pada Februari 2026 dari semula 15,11% pada Februari 2025, sedangkan lulusan universitas meningkat sebesar 2,95 poin persen atau menjadi 11,31% pada periode pelaporan terakhir. Pada awal tahun 2026, pemerintah provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat terus memperkuat berbagai program peningkatan kualitas serta penyerapan tenaga kerja lulusan SMK dan perguruan tinggi, antara lain dengan mendorong penyelarasan kurikulum SMK dan pelatihan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026, termasuk di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi, serta mendorong penguatan sistem pendataan lulusan *(tracer study)* untuk memantau tingkat penyerapan kerja alumni SMK. **Kendati demikian, pangsa penduduk bekerja di Jawa Barat pada Februari 2026 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah.** Kondisi tersebut disebabkan oleh masih besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor padat karya dan informal seperti perdagangan, pertanian, konstruksi, dan usaha mikro yang umumnya tidak mensyaratkan pendidikan tinggi, dan struktur ekonomi Jawa Barat yang didominasi oleh sektor pertanian dan industri. Meskipun demikian, proporsi pekerja SD ke bawah menurun dari 37,42% menjadi 34,18% pada Februari 2026. Hal ini merupakan sinyal yang positif bagi perbaikan kualitas tenaga kerja di Jawa Barat, sejalan dengan berkembangnya sektor industri manufaktur modern, ekonomi digital, dan jasa berbasis teknologi. Ke depan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi diperkirakan akan terus meningkat.

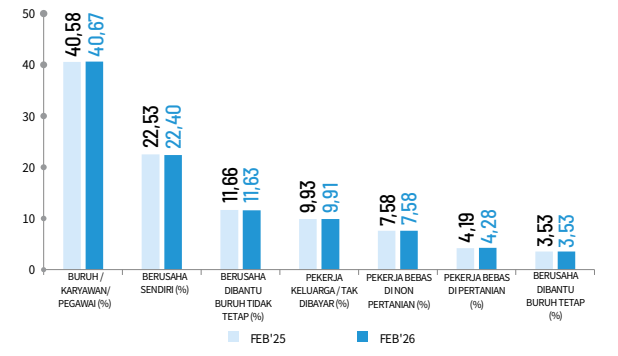
5.1.5 Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan dan Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan utama penduduk Jawa Barat pada Februari 2026 masih didominasi oleh penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 40,67%. Status pekerjaan tersebut sedikit meningkat dari semula sebesar 40,58% pada Februari 2025. Hal ini sejalan dengan peningkatan pangsa pekerja sektor formal dari semula 44,11% meningkat menjadi 44,20%. Perkembangan ini didukung oleh masifnya investasi Kawasan Industri di Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang) dengan capaian investasi sebesar Rp78,8 triliun atau meningkat 12,03% dari tahun 2025, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 114.838 orang[11]. Selain itu menguatnya sektor formal juga didorong oleh membaiknya aktivitas industri yang tecermin dari neraca perdagangan yang surplus hingga Maret 2026 sebesar USD 1,98 miliar [12] serta meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode HBKN Ramadan/ Idulfitri tahun 2026.

Keberhasilan ini juga merupakan upaya pemerintah Jawa Barat yang berfokus pada penguatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui percepatan penggunaan aplikasi “Nyari Gawe” yang ditujukan untuk memperluas akses informasi lowongan kerja bagi lulusan SMA/SMK serta memperkuat peran Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah, sehingga lulusan lebih cepat terserap ke pasar kerja formal. Pada tingkat daerah juga dilakukan program akselerasi penyerapan tenaga kerja lokal seperti di Kabupaten Majalengka melalui program unggulan Matahati (Masyarakat Cepat Kerja) yang dirancang dengan sistem transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar yang selama ini kerap merugikan pencari kerja dan diklaim mampu membantu penyerapan hingga 12.000 tenaga kerja[13].

Selanjutnya, untuk status Berusaha Sendiri tercatat sebesar 22,40% atau sedikit menurun dari semula 22,53%

11 BKPM
12 DJBc Jawa Barat
13 Pemda Kab Majalengka



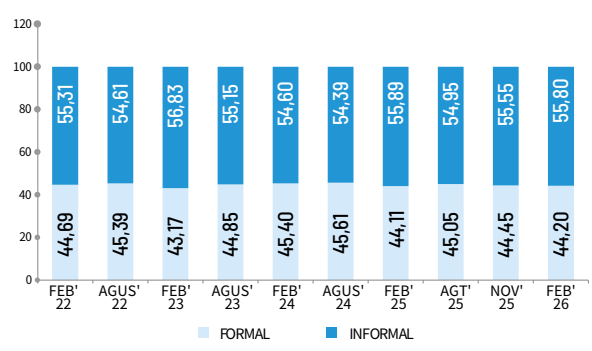
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.9 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama

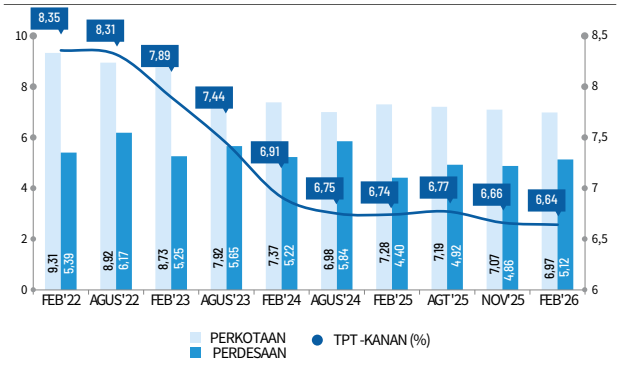
pada Februari 2025. Hal ini sejalan dengan penurunan sektor informal menjadi 55,80% dibandingkan sebelumnya sebesar 55,89%. Dengan pertimbangan bahwa sektor informal masih mendominasi pangsa tenaga kerja, Pemprov Jawa Barat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal seperti UMKM, pedagang, nelayan, buruh tani, pengemudi ojek *daring,* tenaga kebersihan, hingga pekerja seni dan budaya. Salah satunya dilakukan dengan membantu pekerja informal mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) agar mudah mengakses pembiayaan.

5.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat. TPT pada Februari 2026 tercatat menurun menjadi 6,64% dibandingkan Februari 2025 sebesar 6,74%. Penurunan TPT pada triwulan I 2026 terutama ditopang oleh momentum Ramadan dan Idulfitri yang mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi, pergudangan, serta distribusi barang. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat menurun yang mengindikasikan



Grafik 5.10 Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Kegiatannya



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

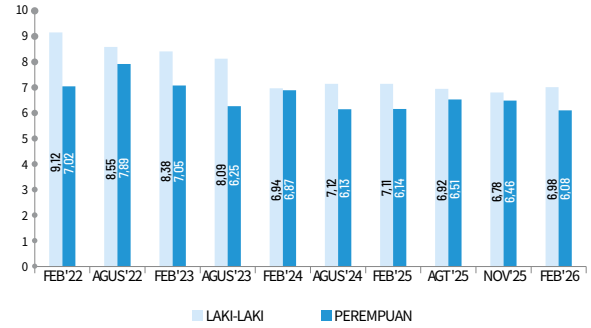
Grafik 5.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat Berdasarkan Tempat Tinggal, 2022-2026 (dalam %)

sebagian penduduk usia produktif memilih tidak aktif bekerja maupun berhenti mencari pekerjaan serta masih melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya sehingga menurunkan partisipasi angkatan kerja.

Berdasarkan wilayah, TPT perkotaan tercatat menurun menjadi 6,97% dari semula 7,28%. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk status buruh/karyawan pegawai pada periode Februari 2026. Sedangkan TPT wilayah pedesaan sedikit mengalami peningkatan dari semula 4,40% menjadi 5,12% pada Februari 2026. Kondisi ini disebabkan oleh fenomena PHK yang cukup tinggi di Jawa Barat khususnya bagi para pekerja sektor industri tekstil atau padat karya, dan sektor industri otomotif ditengah masuknya mobil listrik impor secara masif. Akibatnya, sebagian pekerja yang sebelumnya bekerja di kawasan industri perkotaan kembali ke wilayah perdesaan dan belum terserap kembali ke pasar kerja sehingga meningkatkan tekanan pengangguran di wilayah perdesaan.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan maupun laki-laki menurun, dari semula 6,14% dan 7,11% menjadi 6,08% menjadi 6,98%. Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan penyerapan tenaga kerja seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor transportasi pergudangan dan pertanian. Namun demikian, TPT laki-laki masih relatif lebih tinggi akibat tekanan pada sektor padat karya yang didominasi pekerja laki-laki.

Berdasarkan laporan terakhir, TPT di Jawa Barat yang tertinggi berada di Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor. Tingginya angka pengangguran di Kota Cimahi disebabkan terjadinya kesenjangan antara jurusan sekolah kejuruan

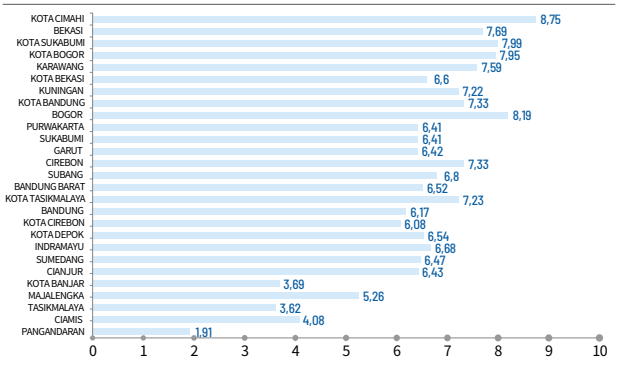


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin, 2022-2025 (dalam %)

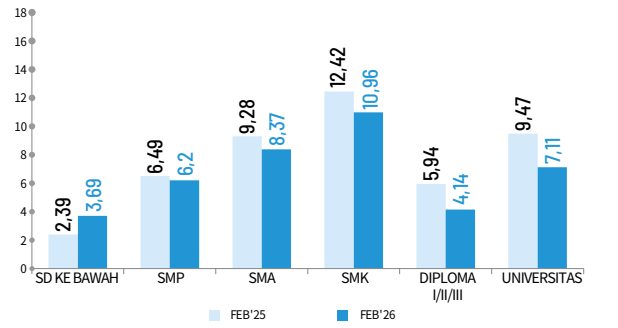
dengan industri yang ada di Kota Cimahi, serta resesi ekonomi global yang berdampak pada perusahaan TPT. Fenomena TPT yang tinggi di wilayah konsumen dan industri dipengaruhi oleh faktor penyerapan tenaga kerja yang bukan merupakan warga lokal kabupaten/kota tersebut, melainkan didominasi oleh pekerja komuter dari luar daerah. Kondisi ini didorong oleh disparitas upah antar kabupaten/kota yang cukup tinggi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan investasi di Jawa Barat melalui penyelenggaraan *West Java Investment Summit* 2026 dalam rangka mempromosikan proyek investasi yang potensial kepada calon investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan investasi yang makin masif dan tersebar lebih merata diharapkan akan meningkatkan daya serap tenaga kerja di Jawa Barat.

Komposisi TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa hampir seluruh tingkat pendidikan mengalami penurunan TPT, kecuali lulusan SD ke bawah yang justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan lebih tinggi memiliki daya saing dan peluang



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2025 (dalam%)



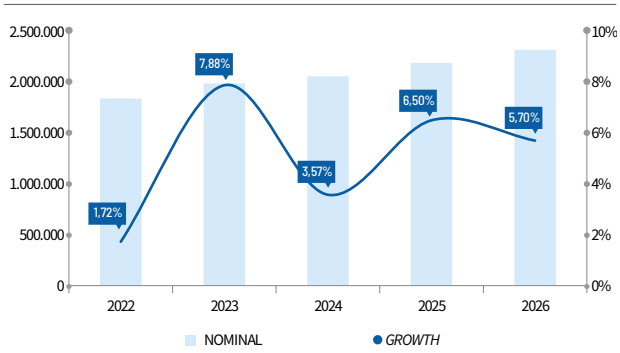
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.14 Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam%)

kerja yang lebih baik di pasar tenaga kerja. Penurunan TPT terbesar terjadi pada lulusan Universitas, dari 9,47% pada Februari 2025 menjadi 7,11% pada Februari 2026, yang mencerminkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sarjana seiring kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan kompetensi dan kualifikasi yang lebih tinggi. Adapun pada tamatan SMK mengalami penurunan dari semula 12,42% menjadi 10,96% pada Februari 2026. Keberhasilan ini salah satunya akibat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama akademisi maupun *stakholders* terkait melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan memperkuat *link and match* antara pendidikan dengan kebutuhan industri di Jawa Barat serta akselerasi aplikasi NYARI GAWE. Dengan adanya digitalisasi layanan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat memperluas jangkauan layanan, mengurangi hambatan geografis, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

5.1.7 Peningkatan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jawa Barat tahun 2026 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 sebesar Rp2.317.601 atau meningkat 5,7% dibanding tahun 2025 sebesar Rp2.191.238. Secara spasial, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi yaitu di Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443/bulan dan terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Penetapan UMP Provinsi Jawa Barat tahun 2026 secara resmi didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang merupakan regulasi terbaru pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait klaster ketenagakerjaan. Dalam formulasi kali ini, kenaikan upah



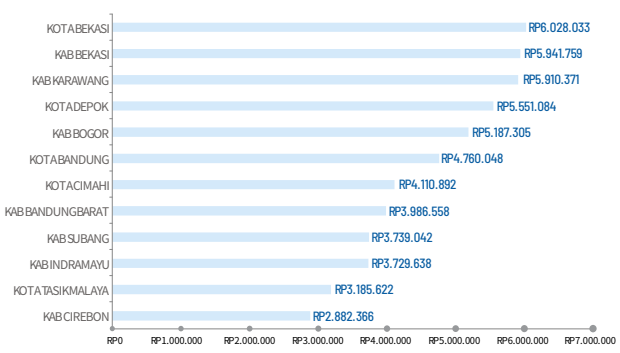
Grafik 5.15 Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat

ditentukan oleh kombinasi variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang kini dipatok lebih tinggi pada rentang 0,5 hingga 0,9 guna memberikan bobot lebih besar pada kontribusi tenaga kerja.

Selaras dengan penetapan UMP, telah dikeluarkan secara resmi Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025. Besaran UMSK ini tidak lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kebijakan ini merupakan standar upah yang berlaku khusus bagi pekerja di sektor-sektor industri tertentu yang memiliki nilai tambah tinggi sebagai upaya perlindungan pengupahan karena memiliki karakteristik, risiko kerja, produktivitas, serta kemampuan usaha yang berbeda dibanding sektor lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas dunia usaha maupun penyebaran dan pemerataan investasi di Jawa Barat.

5.2 Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat berdasarkan pelaporan terakhir menunjukkan optimisme. Hal tersebut tecermin dari indikator jumlah penduduk miskin dan Rasio Gini yang membaik. Perkembangan tersebut didukung program kebijakan perlindungan sosial, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat yang secara masif telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkerjasama dengan stakeholders terkait.



Grafik 5.16 Upah Minimum Sektorak Kabupaten/Kota Jawa Barat

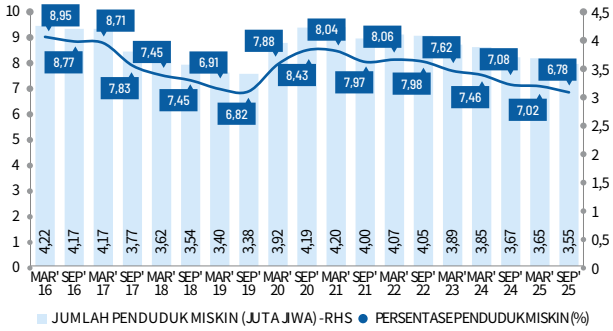
5.2.1 Jumlah Penduduk Miskin

Kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat mengalami perbaikan yang tecermin dari penurunan jumlah penduduk miskin pada periode September 2025 menjadi sebesar 6,78% (3,55 juta orang) dari semula 7,08% (3,65 juta orang) pada September 2024 atau menurun sebanyak 117,64 ribu orang. Capaian ini tidak terlepas dari intervensi yang masif dari pemerintah pusat dan daerah melalui penyaluran program sosial. Hal ini terkonfirmasi dari realisasi belanja APBN provinsi pada tahun 2025 terkait belanja bantuan sosial yang meningkat menjadi Rp.59,92 miliar dari semula Rp.46,06 miliar atau meningkat sebesar 30,11% (yoy).[14]

Berbagai program perlindungan sosial telah dilakukan dalam rangka mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat khususnya pada periode triwulan IV 2025 dan dinilai berkontribusi positif dalam menjaga konsumsi rumah tangga, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah di Jawa Barat, antara lain :

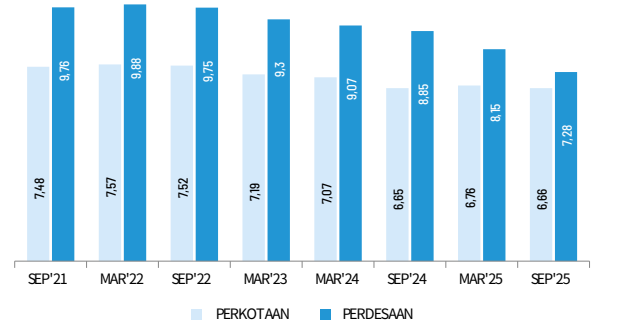
1. Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebagai instrumen penguatan daya beli masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, dengan total bantuan Rp900.000 per KPM yang disalurkan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) sebesar Rp300.000 per bulan di Jawa Barat. Penyaluran ini dilakukan melalui transfer bank Himbara serta kantor pos bagi penerima tanpa rekening.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Dinas Sosial di Jawa Barat pada periode Oktober–Desember 2025.
3. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan sebanyak 1.863 titik (per 12 Desember 2025[15]) sebagai bentuk sinergi DKPP Jawa Barat, Bulog, Satgas Pangan, dan pemangku kepentingan daerah guna menjaga stabilitas harga pangan.

14 DJPb Jabar
15 DKPP Jabar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.17 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.18 Perbandingan Angka Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Barat, 2021-2025 (dalam %)

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan melalui kolaborasi APBD, dana desa, APBN, dan CSR diantaranya Disperkim Jawa Barat yang menargetkan 1.720 unit hingga akhir 2025, Kota Bandung 1.785 unit dengan target 9.000 unit hingga 2029, Kabupaten Bogor 3.750 unit di 40 kecamatan dan 416 desa, Kabupaten Indramayu 163 unit dari APBD kabupaten dan 335 unit dukungan APBN serta sejumlah kabupaten/kota lainnya.

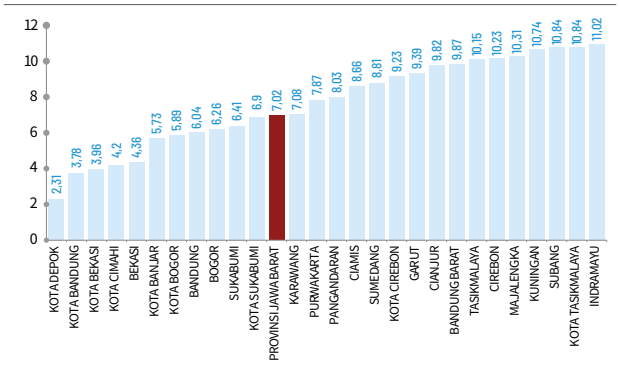
Secara spasial, tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada September 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan khususnya di wilayah perdesaan atau menurun dari 8,85% pada September 2024 menjadi 7,28%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami sedikit peningkatan dari 6,65% pada September 2024 menjadi 6,66% pada September 2025. Penurunan yang dominan di wilayah perdesaan mencerminkan efektivitas intervensi perlindungan sosial mengingat mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Barat didominasi oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.

Sedangkan dari sisi aspek pendidikan, Pemerintah Jawa Barat terus memperkuat akses bagi kelompok rentan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan dan menekan risiko putus sekolah pada keluarga yang kurang mampu.

Selanjutnya pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 32/KS.01.02.04/Dinkes Tahun 2025 tentang evaluasi dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD, yang menegaskan bahwa pelayanan medis merupakan prioritas utama tanpa pembedaan mekanisme pembayaran. Kebijakan ini berlaku bagi rumah sakit negeri maupun swasta baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan, optimisme perbaikan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat semakin terlihat, salah satunya dari persetujuan APBD tahun 2026 yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang berfokus pada penyelesaian infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, kemantapan jalan, serta pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai guna mendorong pemerataan pembangunan.

Kabupaten Bekasi memperoleh apresiasi kinerja pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,44% dan penurunan kedalaman kemiskinan sebesar 0,26% atau melampaui rata-rata nasional untuk kabupaten berkemampuan fiskal tinggi. Capaian ini mencerminkan sinergi perangkat daerah dan dukungan masyarakat melalui program berbasis data, serta diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain di Jawa Barat untuk terus memperkuat inovasi pengentasan kemiskinan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Secara spasial, terdapat 16 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan nilai penduduk miskin di atas nilai tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebesar 7,02% pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Indramayu sebesar 11,02%, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Subang masing-masing sebesar 10,84%, serta Kabupaten Kuningan sebesar 10,74%. Sedangkan tiga daerah dengan penduduk miskin terendah adalah Kota Depok sebesar 2,31%, Kota Bandung sebesar 3,78% dan Kota Bekasi sebesar 3,96%. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, wilayah penduduk miskin cenderung berada di wilayah sektor pertanian. Kondisi ini membutuhkan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.19 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Jawa Barat tahun 2025

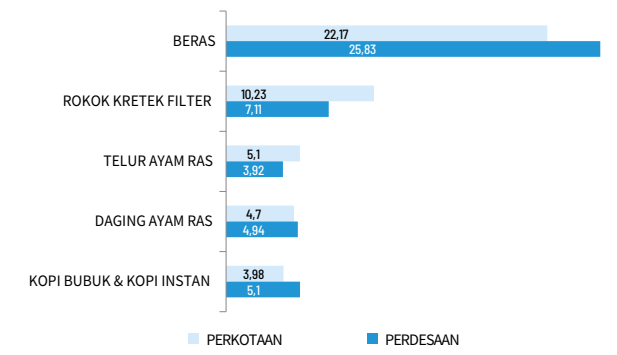
sinergi dari pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam rangka akselerasi kebijakan dari hulu-hilir mulai dari peningkatan nilai tambah, efisiensi produksi, kepastian pasar, dan penguatan kelembagaan petani sebagai pendukung peningkatan produksi.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan ketimpangan dan disparitas wilayah pada tahun 2025 dilakukan melalui strategi integrasi infrastruktur dan dekonsentrasi ekonomi yang sangat terstruktur. Pemerintah secara masif melakukan percepatan pembangunan di wilayah Jabar Selatan, khususnya melalui optimalisasi Jalur Pantai Selatan (Pansela) dan pengembangan sektor agromaritim yang dirancang untuk membuka isolasi ekonomi di daerah pesisir. Langkah ini dibarengi dengan kebijakan insentif investasi yang lebih menarik bagi para pelaku usaha yang bersedia membuka lapangan kerja di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sehingga pertumbuhan industri tidak lagi hanya terpusat di wilayah Jawa Barat utara atau Bodetabek. Selain dari sisi infrastruktur, pemerataan kualitas sumber daya manusia turut diperkuat melalui program beasiswa tematik dan digitalisasi pedesaan yang memungkinkan sarjana lokal mengembangkan potensi daerahnya tanpa harus melakukan urbanisasi. Dengan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan langsung di pusat-pusat kemiskinan perdesaan, pemerintah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Sinergi antara pembangunan konektivitas digital, penguatan modal bagi UMKM, dan pemerataan fasilitas pendidikan ini terbukti efektif dalam menurunkan Rasio Gini Jawa Barat.

Angka garis kemiskinan di Jawa Barat pada September 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp575.499 dari semula Rp535.509 pada September 2024. Berdasarkan jenis pembentuknya, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp430.422 dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp145.077. Peranan komoditas makanan terhadap GK sangat dominan dibandingkan dengan komoditas bukan makanan. Sumbangan komoditi makanan terhadap GK Jawa Barat mendominasi dengan angka 74,89% dan GKNM sebesar 25,21% pada September 2025. Komoditas makanan didominasi oleh beras, rokok kretek filter, telur dan daging ayam ras, serta kopi bubuk & kopi instan. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat Jawa Barat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi oleh komoditas makanan. Komoditas non makanan didominasi oleh perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Dominasi kelompok komoditas makanan yang tinggi terhadap GK menegaskan urgensi stabilisasi harga pangan dan pasokan komoditas bahan pokok penting (bapokting) di Jawa Barat, antara lain melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penyaluran bantuan pangan. Pada periode Oktober-November 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan untuk komoditas beras sebanyak 66,849 ton dan minyak goreng sebanyak 13,369,972 liter [16] yang disalurkan melalui 8 kantor cabang Bulog di Jawa Barat (Kota Bandung, Kab Cianjur, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Karawang, Kab Subang, Kab Ciamis dan Kota Bogor).

5.2.2 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

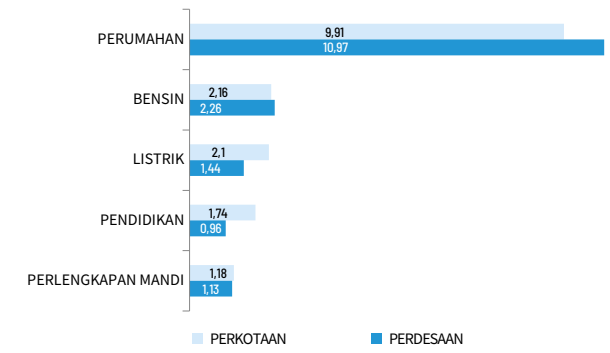
Kondisi ketimpangan di Jawa Barat pada periode September 2025 menunjukkan perbaikan yang tecermin dari penurunan angka *Rasio Gini* menjadi 0,397. Perbaikan tersebut didukung oleh wilayah perkotaan dan perdesaan yang masing-masing menjadi sebesar 0,408 dan 0,308. Penurunan Rasio Gini di Jawa



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

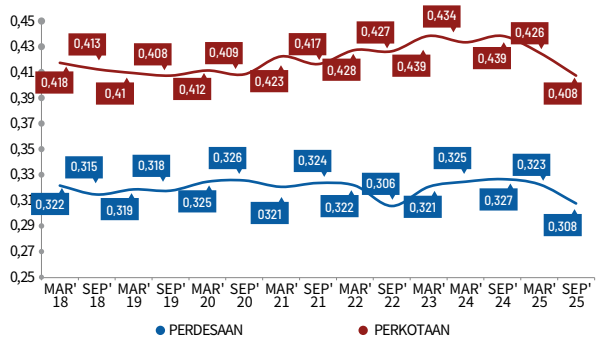
Grafik 5.20 Peranan Komoditas Makanan terhadap GK Jawa Barat, September 2025 (dalam %)

16 Bulog Kanwil Jabar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.21 Peranan Komoditas Non-Makanan terhadap GK Jawa Barat, Maret 2025 (dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.23 Perbandingan Rasio Gini Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Barat

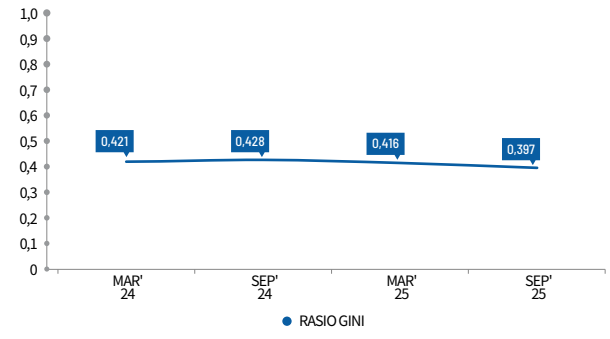
Barat mengindikasikan tren pemerataan pendapatan di Jawa Barat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan Rasio Gini yaitu program bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran dan perbaikan infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah Jawa Barat. Bank Indonesia dan pemerintah daerah terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah sehingga diharapkan dapat mencegah penurunan konsumsi riil pada rumah tangga miskin. Penurunan Rasio Gini juga terus didorong melalui pemerataan pembangunan di wilayah Jabar Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi melalui peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata di Pantai Selatan (Pansela) dan konektivitas agrobisnis.

5.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat

IPM Jawa Barat tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,92 menjadi 75,90 atau berada dalam level yang "tinggi" (70≤IPM<80). IPM yang tinggi menunjukan perbaikan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Prioritas program Provinsi Jawa Barat pada pembangunan infrastuktur, pendidikan berkarakter, peningkatan layanan kesehatan termasuk penurunan *stunting* dan peningkatan gizi menjadi faktor pendorong capaian IPM. Tingginya IPM tahun 2025 juga sejalan dengan perekonomian yang tumbuh positif sepanjang tahun 2025.

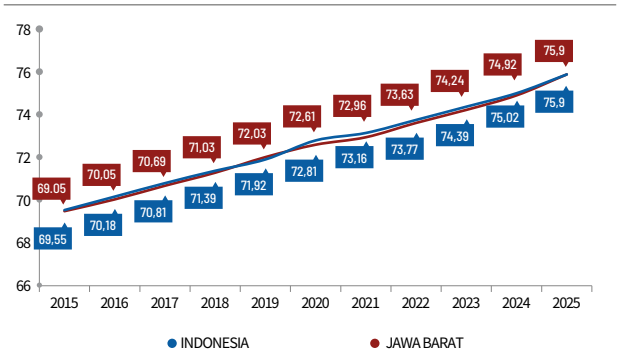
Seluruh indikator pembentuk IPM Jawa Barat tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan. Dimensi Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) mengalami peningkatan dari semula 74,07 pada tahun 2024 menjadi 75,53 tahun pada 2025 atau meningkat hingga 1,46 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan masing-masing menjadi 9,14 tahun dan 13,02 tahun pada 2025 dari sebelumnya 8,87 tahun dan 12,80 tahun. Ke depan, peningkatan pembangunan manusia di Jawa Barat diperkirakan tetap optimis didukung berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas manusia maupun pengembangan infrastuktur pendukung di Jawa Barat.

Selaras dengan nilai IPM provinsi, IPM 27 kabupaten/kota di Jawa Barat juga mengalami peningkatan. Tiga wilayah dengan IPM tertinggi yaitu Kota Bandung sebesar 84,66, Kota Bekasi sebesar 84,43, dan Kota Depok sebesar 84,04



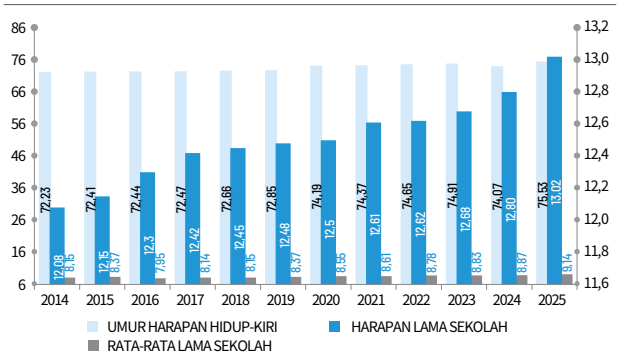
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.22 Rasio Gini Jawa Barat



Sumber : BPS

Grafik 5.24 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat dan Nasional



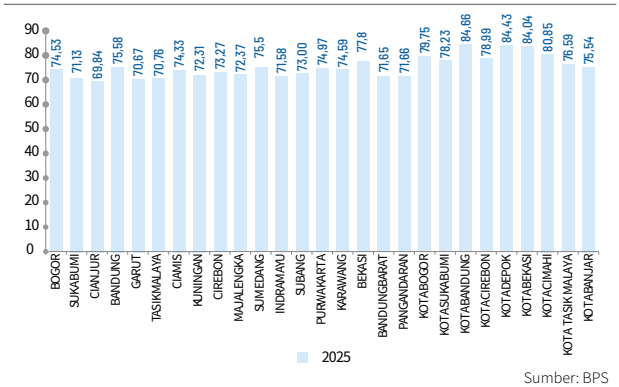
Sumber : BPS , diolah

Grafik 5.25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup di Jawa Barat (tahun)

atau dengan status "sangat tinggi" (IPM ≥80). Sementara wilayah dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Cianjur sebesar 69,84 dengan status "Sedang" (60 ≥ IPM <70). Tercatat dua wilayah yang mengalami peningkatan status IPM dari semula "Sedang" menjadi "Tinggi" yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat telah melakukan program peningkatan kualitas hidup, antara lain penyaluran bantuan pemerintah daerah terkait revitalisasi dan pembangunan kelas baru di Kabupaten Garut, dukungan pada sektor pendidikan di Jawa Barat antara lain pemberian Tunjangan Profesi Guru/Dosen (TPG/TPD) Non PNS sebesar Rp1,82 triliun (Kemdiktisaintek, Kemenag), PIP/KIP kuliah/ beasiswa lainnya Rp.47 miliar (Kemenag,Kemenkeu, Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen), renovasi/ revitalisasi sekolah Rp195,52 miliar (DAK) dan Rp1,21 triliun (Kemendikdasmen), serta Sekolah Rakyat Rp34,8 miliar (Kemen PU, Kemensos dan Kemendikdasmen).[8]

Optimisme pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga tecermin dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun yang terus tumbuh positif. Rata-



Sumber: BPS

Grafik 5.26 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat 2025



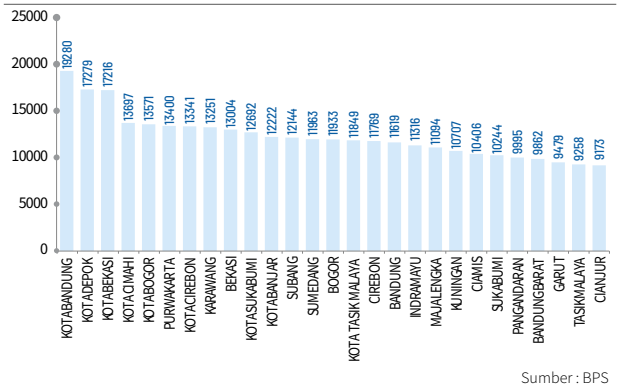
Sumber : BPS,diolah

Grafik 5.27 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Jawa Barat (juta Rp)

rata pengeluaran riil per kapita per tahun mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, yaitu dari semula 12,16 juta menjadi 12,45 juta. Hal ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif sepanjang tahun 2025. Secara spasial, pengeluaran per kapita tertinggi masih ditempati oleh Kota Bandung yiatu sebesar 19,28 juta pada tahun 2025 atau meningkat dari semula 18,79 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan tingkat daya beli di wilayah perkotaan yang lebih tinggi. Pengeluaran per kapita terendah berada di Kabupaten Cianjur sebesar 9,17 juta.

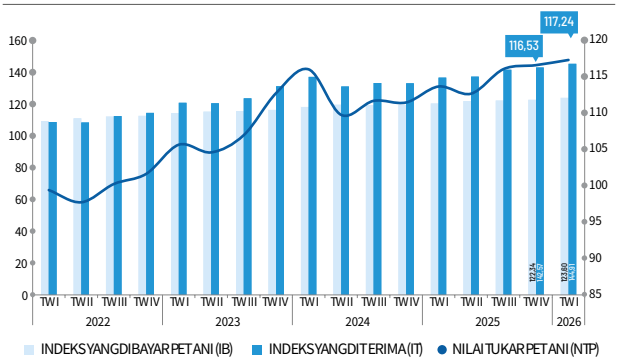
5.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap terjaga atau meningkat dari semula 116,53 menjadi 117,24. Peningkatan tersebut didorong meningkatnya Indeks yang Diterima Petani (IT) dari 142,57 menjadi 144,91 atau lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (IB) dari 122,34 menjadi 123,60. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya konsumsi dan produksi petani masih mampu diimbangi oleh peningkatan pendapatan petani sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan petani relatif tetap terjaga. Selain itu, meningkatnya harga beberapa komoditas



Sumber : BPS

Grafik 5.28 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Jawa Barat 27 Kab/Kota di Jawa Barat (juta Rp)



BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.29 Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks yang Dibayar Petani (IB) dan Indeks yang Diterima Petani (IT)

pertanian pada periode Ramadan dan Idulfitri 2026 turut mendukung perbaikan pendapatan petani di Jawa Barat.

Peningkatan daya beli petani Jawa Barat pada triwulan I 2026 juga tecermin dari meningkatnya Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 1,34% (qtq). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,44% (qtq) seiring meningkatnya harga emas global yang termaterialisasi pada harga emas domestik di tengah ketidakpastian global, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,71% (qtq) akibat meningkatnya harga sejumlah bahan pangan strategis seperti daging ayam, beras, bawang putih, tomat dan bawang merah pada momentum Ramadan dan Idulfitri 2026. Selain itu, kelompok pakaian dan alas kaki meningkat sebesar 1,08% (qtq) sejalan dengan naiknya permintaan masyarakat menjelang Lebaran. **Di sisi lain, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBBPM) ikut meningkat sebesar 0,41% (qtq),** terutama dipengaruhi kenaikan upah buruh khususnya upah pemanenan dan perontokan serta biaya sewa ditengah periode panen hortikultura pada awal tahun. Namun demikian, tekanan biaya produksi relatif tertahan karena harga input pertanian seperti pupuk (Urea, NPK, NPK for Khusus, ZA dan Organik), pestisida, obat-obatan, dan pakan mengalami penurunan sebesar -1,08% (qtq). Hal ini didukung oleh stabilnya harga pupuk bersubsidi serta pemberian diskon pupuk sebesar 20% sejak awal 2026 oleh pemerintah. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa biaya produksi petani tetap terkendali sehingga daya beli dan kesejahteraan petani Jawa Barat masih relatif terjaga.

Berdasarkan subsektor, perbaikan kesejahteraan petani Jawa Barat pada triwulan I 2026, utamanya ditopang oleh subsektor hortikultura seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi. Hal tersebut tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada subsektor hortikultura yang meningkat signifikan dari 123,78 menjadi 130,13 atau naik sebesar 6,35 persen poin dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya produksi komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. Hal ini terkonfirmasi dari produksi bawang merah yang menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Maret 2026 sejalan dengan bertambahnya luas panen dengan realisasi produksi mencapai 12,33 ribu

Tabel 5.1 Perbandingan Indeks yang Dibayar Petani (IB) Triwulan IV 2025 dan I 2026

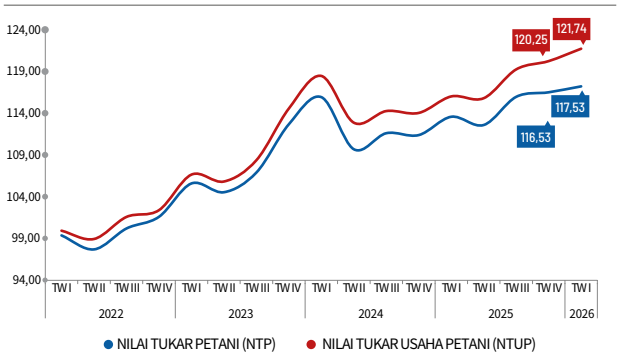
	INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (IB)	TW IV 2025	TW I 2026	PERUBAHAN (%, QTQ)
Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)		**123,70**	**124,35**	**0,53%**
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	128,12	130,31	1,71%
2	Pakaian dan Alas Kaki	129,34	130,74	1,08%
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	110,05	110,33	0,25%
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,65	120,03	0,31%
5	Kesehatan	123,41	123,79	0,30%
6	Transportasi	119,96	120,51	0,46%
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,49	100,36	-0,13%
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	117,15	117,14	-0,01%
9	Pendidikan	108,89	108,89	0,00%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	118,90	119,70	0,67%
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	133,08	137,66	3,44%
Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBBPM)		**118,55**	**119,04**	**0,41%**
1	Bibit	117,80	118,12	0,28%
2	Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan	113,38	112,16	-1,08%
3	Sewa dan Pengeluaran Lainnya	111,76	112,66	0,80%
4	Transportasi dan Komunikasi	123,79	124,40	0,49%
5	Barang Modal	111,96	112,62	0,59%
6	Upah Buruh	120,79	121,88	0,91%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

ton.[17] Selain itu, produksi cabai rawit juga meningkat cukup tinggi dan puncaknya terjadi pada Maret 2026. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan pendapatan petani hortikultura di tengah tingginya permintaan masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.

Sejalan dengan meningkatnya NTP, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Jawa Barat pada triwulan I 2026 juga tercatat meningkat menjadi 121,74 dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut juga didorong oleh subsektor hortikultura seiring masuknya masa panen dan tingginya harga produksi di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Berdasarkan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), komoditas utama pendorong peningkatan NTUP antara lain cabai rawit, cabai merah, dan gabah. Kondisi tersebut didukung oleh kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar 0,29% dengan rata-rata harga Maret 2026 mencapai Rp6.559 per kg, serta Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan yang meningkat sebesar 0,73% dengan rata-rata harga mencapai Rp7.803 per kg.[18] Selain itu, berkurangnya pasokan akibat curah hujan di sejumlah sentra produksi di Jawa Barat turut mendorong kenaikan harga aneka cabai. Hal ini didukung oleh harga cabai merah yang tertinggi mencapai Rp95.000 per kg di Kabupaten Ciamis dan cabai rawit merah sebesar Rp120.000 per kg di Kabupaten Cirebon pada minggu keempat Maret 2026.[19] Kondisi tersebut turut menopang peningkatan NTUP Jawa Barat di tengah mulai masuknya masa panen hortikultura di sejumlah sentra produksi utama seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur.

Penyumbang Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) tertinggi pada periode triwulan I 2026 yaitu subsektor hortikultura sebesar 130,13. Kondisi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 5.30 Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Jawa Barat

tersebut terkonfirmasi dari kinerja produksi aneka cabai yang menunjukkan capaian cukup baik terutama pada komoditas cabai keriting dan cabai rawit yang realisasinya melampaui sasaran produksi. Selain itu, cabai besar/TW-teropong juga menunjukkan produksi yang relatif stabil pada awal tahun dengan capaian tertinggi sekitar 14.862 ton pada Januari 2026.[20] Selanjutnya, kinerja produksi bawang merah pada periode ini juga tercatat relatif baik dan stabil dengan realisasi produksi berada pada kisaran 15–18 ribu ton per bulan. Bahkan, puncak produksi bawang merah tahun 2026 diproyeksikan terjadi pada Juni 2026 dengan target produksi sekitar 20,3 ribu ton.[21] Peningkatan produksi subsektor hortikultura tersebut turut mendorong kenaikan total penerimaan petani, yang terkonfirmasi dari tren kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah pada awal tahun 2026. Selain itu, peningkatan penerimaan yang tidak diikuti kenaikan biaya produksi secara signifikan menyebabkan margin usaha tani di Jawa Barat terus membaik sehingga tingkat keuntungan petani relatif meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, NTUP pada subsektor tanaman pangan terpantau relatif stagnan pada level 121,62. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha tani pada subsektor tanaman pangan khususnya komoditas padi, masih mampu menjaga tingkat keuntungan dan daya tahan usaha petani di tengah meningkatnya biaya

Tabel 5.2 Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor pada Tahun 2022 hingga Tw I 2026

NTP PER SUBSEKTOR	2022				2023				2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
Tanaman Pangan	98,78	94,96	96,04	100,22	120,46	103,33	106,68	114,15	118,30	107,45	113,31	113,81	114,42	112,27	116,90	117,34	116,87
Hortikultura	102,62	107,49	117,93	108,72	125,97	110,94	110,60	118,52	122,46	125,86	121,03	106,38	118,45	123,05	123,16	123,78	130,13
Tanaman Perkebunan Rakyat	96,39	95,84	97,15	96,41	109,41	98,74	101,54	102,03	101,88	105,49	106,10	109,71	112,40	119,03	118,15	117,74	119,70
Peternakan	98,18	100,43	103,47	102,01	118,24	105,31	105,19	102,45	102,38	105,82	104,25	104,03	104,40	102,91	103,00	104,73	105,02
Perikanan	109,80	110,13	108,92	109,46	124,01	106,89	112,22	113,29	111,82	112,33	112,23	111,65	111,85	111,34	110,78	110,08	112,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

17 DTPH Jabar
18 DTPH Jabar
19 SILINDA DI Jabar
20 DTPH Jabar
21 DTPH Jabar

konsumsi rumah tangga dan tekanan harga input tertentu. Selain itu, penyerapan beras oleh Bulog dilakukan secara masif pada periode triwulan I 2026 yaitu sebesar 639,055 ton.[22] Hal lain juga didukung oleh kuatnya kinerja produksi padi Jawa Barat yang berkontribusi sebesar 15,98% terhadap produksi padi nasional sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor produksi padi terbesar ketiga secara nasional.

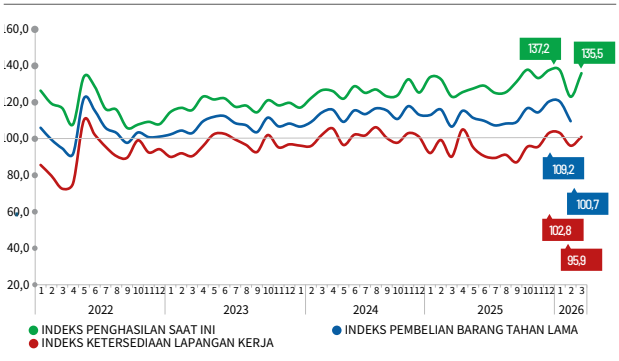
Berbagai program peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dalam rangka mendukung perbaikan kesejahteraan petani Jawa Barat khususnya pada periode triwulan I 2026, antara lain :

1. Dalam menghadapi perubahan iklim musim kemarau tahun 2026 telah diterbitkan Surat antisipasi dampak kemarau dari Menteri Pertanian ke Gubernur Jawa Barat, Surat kewaspadaan Kekeringan pada Musim Kemarau 2026 dari Kepala Dinas TPH Provinsi ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Percepatan rehab bangunan irigasi di Kabupaten Cianjur (menjelang selesai), normalisasi Situ Bagendit, normalisasi irigasi di Kabupaten Cirebon, Pemetaan daerah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan para petugas lapangan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi pertanian organik untuk mendorong seluruh areal padi untuk memanfaatkan limbah pertanian (jerami) sebagai bahan organik, percontohan budidaya organik, bantuan pupuk hayati cair/pupuk organik cair, pengembangan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH), peningkatan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat melalui bantuan APBN dan APBD, optimalisasi penggunaan varietas lokal yang memiliki potensi produktivitas tinggi serta optimalisasi penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian yang stagnan.
3. Pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT), gerakan pengembangan Rumah Burung Hantu (RUBUHA) untuk pengendalian tikus, gerakan pengambilan kelompok telur untuk pengendalian penggerek batang serta koordinasi dengan Kementan dalam penyediaan *stock* cadangan pestisida dalam rangka mengurangi dampak serangan hama dan penyakit.
4. Rencana pembangunan bendungan/irigasi pembagi di Kabupaten Ciamis/Pangandaran, optimalisasi penggunaan pompa bantuan/swadaya, dan optimalisasi irigasi perpompaan dalam rangka optimalisasi indeks pertanaman.

Selain itu, berbagai upaya strategi penguatan produksi maupun pasca panen seapanjang tahun 2026 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, antara lain melalui penerapan *Good Agriculture Practise (GAP)* atau dukungan 19 Klaster Pertanian Komoditas Aneka Cabai, Bawang Merah, Padi yang direncanakan pada triwulan II dan III, serta pendampingan klaster hilirasi pangan komoditas bawang merah, ikan dan tepung beras yang akan dihubungkan dengan agregator dan implementasi Biochar diarahkan menjadi nilai tambah bagi klaster.

5.2.5 Potensi Perbaikan Kesejahteraan pada Triwulan I 2026

Kondisi kesejahteraan diproyeksikan tumbuh positif pada triwulan I 2026. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia periode Maret 2026 menunjukkan optimisme yang lebih tinggi di Jawa Barat. Haltersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tercatat meningkat dari 109,25 pada Februari 2026 menjadi 118,10 pada Maret 2026. Meningkatnya indeks keyakinan konsumen tidak terlepas dari ekspektasi masyarakat terhadap terkendalinya laju inflasi, yang memberikan dorongan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tumbuh dari 122,63 menjadi 135,50. Selain itu, kepercayaan masyarakat bahwa harga barang dan jasa yang tetap stabil telah mendorong perbaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari level pesimis (indeks 95,90) menjadi level optimis sebesar 100,70. Perkembangan tersebut memperkuat posisi IKK secara umum tetap dalam level yang optimis.



Grafik 5.31 Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

22 Bulog Jabar

BAB 6

PROSPEK PEREKONOMIAN

Prospek perekonomian global diprakirakan melambat, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, seiring tingkat gejolak global akibat perang Timur Tengah yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diprakirakan turun menjadi 3,0% (yoy) dari 3,4% (yoy) pada 2025, disertai perbedaan laju pertumbuhan (divergensi) antarnegara. Prakiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz, serta terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara yang mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya dan berpengaruh pada aktivitas ekonomi global.

Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy), sejalan dengan penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, sehingga mampu memperkuat daya tahan dan momentum ekspansi ekonomi.

Dengan memperhatikan masih tingginya ketidakpastian global dan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap resiliens, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, dan berada pada kisaran 4,9-5,7% (yoy). Optimisme tersebut bersumber dari penguatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan adanya stimulus fiskal serta terjaganya kinerja investasi seiring iklim investasi yang semakin kondusif dan pengembangan Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus.

Dari sisi perkembangan harga, Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat tahun 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi inti diprakirakan tetap dalam rentang sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, serta *imported inflation* yang terkendali, dan inflasi pangan yang diprakirakan terjaga seiring penguatan produksi pangan dan didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pertumbuhan Global

3,0%

2026[p]

Pertumbuhan Nasional

4,9%-5,7%

2026[p]

Pertumbuhan Jawa Barat

4,9%-5,7%

2026[p]

Inflasi Jawa Barat

2,5%±1%

2026[p]



6.1 Prospek Perekonomian Global

6.1.1 Prospek Perekonomian Global

Prospek perekonomian global menunjukkan kecenderungan perlambatan seiring dengan tingkat gejolak global akibat perang Timur Tengah yang masih tinggi. Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya. Perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diprakirakan lebih rendah menjadi 3,0% (yoy) dari 3,4% (yoy) pada 2025, disertai perbedaan laju pertumbuhan yang semakin nyata antarnegara.

Respons kebijakan moneter global cendrung lebih ketat seiring prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya. Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, *Fed Fund Rate* (FFR), diperkirakan tidak turun hingga akhir 2026 dan terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 seiring dengan inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi. Imbal hasil US Treasury telah naik ke 4,66% (tenor 10 tahun) dan 4,11% (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026, dan diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal Amerika Serikat yang makin membesar.

Prakiraan IMF pada perekonomian global tahun 2026 sedikit lebih tinggi. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF edisi April 2026, **pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diprakirakan lebih rendah di kisaran 3,1% (yoy), turun 0,2 poin persentasi dibandingkan proyeksi sebelumnya pada WEO Januari 2026.** Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas terutama harga energi. Pertumbuhan ekonomi negara maju diprakirakan sebesar 1,7% (yoy) pada 2026, menurun dibanding 2025. Amerika Serikat menunjukkan kinerja yang relatif lebih kuat dibandingkan kawasan lain, didukung aliran modal keluar dari berbagai negara ke *safe-haven asset* khususnya obligasi Amerika Serikat yang mendorong kuatnya indeks dollar Amerika Serikat dan menimbulkan tekanan pelemahan terhadap mata uang negara maju dan berkembang. Sementara kawasan Eropa masih menghadapi dampak berkepanjangan dari krisis energi. Jepang diprakirakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sementara itu, negara berkembang dan *emerging markets* tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan global dengan laju 3,9% (yoy), meskipun trennya melambat. Secara keseluruhan, prospek perekonomian global diprakirakan lebih rendah. Lebih rendahnya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%, YoY)

NEGARA	2022	2023	2024	2025	2026*
Dunia	3,5	3,3	3,3	3,4	3,0
Negara Maju	2,6	1,7	1,8	1,9	1,7
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,1	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,9	1,4	0,9
Jepang	1,0	1,5	0,1	1,2	0,7
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,3	4,4	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	5,0	5,0	4,4
India	6,8	7,7	6,5	7,6	6,5
ASEAN-5	5,5	4,0	4,6	4,5	4,0
Amerika Latin	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,3	3,4	2,0	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	5,4	2,0	2,4	3,6	2,6

Sumber: IMF World Economic Outlook,
*Proyeksi Bank Indonesia

6.1.2 Prospek Inflasi Global

WEO IMF edisi April 2026 memprakirakan bahwa inflasi utama global akan meningkat dari 4,1% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 4,4% (yoy) pada tahun 2026. Proyeksi inflasi tersebut meningkat 0,7 poin persentasi dibandingnya proyeksi sebelumnya di bulan Januari 2026 atau Oktober 2025 akibat melonjaknya harga minyak dampak dari penutupan Selat Hormuz, dan prakiraan inflasi di Amerika Serikat yang tetap tinggi. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan harga komoditas lainnya.

6.2 Prospek Perekonomian Nasional

6.2.1 Prospek Perekonomian Nasional 2026

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat di tengah tekanan global yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,39% (yoy)**.** Perekonomian utamanya didukung oleh konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif stimulus pemerintah. Di samping itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi bangunan meningkat dipengaruhi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Di sisi Lapangan Usaha (LU), LU industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan informasi komunikasi mencatatkan kinerja yang baik.

Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy), sejalan dengan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal, sehingga mampu memperkuat daya tahan dan momentum ekspansi ekonomi. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap tejaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah.

6.2.2 Prospek Inflasi Nasional 2026

Pada April 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,48% (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor berakhirnya *base effect* dari kebijakan pemberian diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% pada Januari–Februari 2025 dan penurun inflasi inti didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Meskipun demikian, secara fundamental tekanan inflasi tetap terkendali. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) juga turun menjadi 3,37% (yoy) dipengaruhi oleh berlangsungnya panen raya di daerah sentra produksi dan terjaganya pasokan pangan di berbagai daerah.

Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi pada tahun 2026 akan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% (yoy). Inflasi inti diperkirakan tetap terkendali sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah kapasitas optimal serta konsistensi kebijakan moneter dalam menjaga ekspektasi inflasi dan memitigasi tekanan inflasi impor. Inflasi pangan juga diprakirakan tetap stabil melalui penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID), serta optimalisasi implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Secara keseluruhan, stabilitas harga diperkirakan tetap terjaga dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

6.3 Prospek Perekonomian Jawa Barat

6.3.1 Prospek Perekonomian Jawa Barat Tahun 2026

Perekonomian Jawa Barat triwulan I 2026 tetap terjaga. Realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 5,79 (yoy), sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,85% (yoy). Capaian ini tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh terjaganya Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,47% (yoy), Konsumsi Pemerintah sebesar 55,95% (yoy), serta investasi sebesar 4,57% (yoy). Peningkatan Konsumsi Tumah Tangga sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Konsumsi Pemerintah turut menjadi penopang, didukung oleh tingginya realisasi belanja pegawai, Tunjangan Hari Raya (THR), serta belanja modal sejalan fokus pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Sementara itu, Investasi atau PMTB menunjukkan kinerja positif seiring realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) triwulan I 2026 yang mencapai Rp76,80 triliun, atau tumbuh 12,12% (yoy).

Tabel 6.2 Faktor Pendorong dan Penahan Perekonomian Jawa Barat Tahun 2026

FAKTOR PENDORONG/ PENAHAN	KETERANGAN	ARAH
Kebijakan Bank Indonesia	Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.	↑
Penguatan Sinergi dan Kolaborasi	Koordinasi kebijakan moneter diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai kapasitas fundamental. Penguatan sinergi kebijakan antara BI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ("*pro growth*") dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.	↑
Pembangunan Infrastruktur dan Interkoneksi Antar Daerah	Infrastruktur dan interkoneksi antar daerah yang bagus dan andal merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 berfokus untuk melakukan pemerataan distribusi akses layanan dasar dan konektivitas daerah.	↑
Stimulus dan Insentif untuk Meningkatkan Daya Beli	Potensi perbaikan permintaan domestik didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat. Beberapa program stimulus pemerintah kembali dilanjutkan pada 2026 seperti paket stimulus ekonomi, pembangunan Sekolah Rakyat, magang lulusan Perguruan Tinggi (PT), rehabilitasi sekolah, program pembiayaan perumahan atau FLPP yang terus diakselerasi.	↑
Ekosistem Digital	Pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi masyarakat, dan digitalisasi di seluruh aspek diharapkan dapat memperlancar transaksi ekonomi sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi, menambah efisiensi, dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pemerintah mempercepat integrasi sistem pembayaran regional dan memperluas pemanfaatan teknologi melalui *Digital Economic Framework Agreement*.	↑
Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Di tengah dinamika ketidakpastian global yang masih berlanjut dan moderasi pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya untuk mengoptimalisasikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti pariwisata, ekonomi syariah, hilirisasi, ekonomi hijau/ekonomi biru, ekonomi kreatif, dan keuangan hijau yang memberikan *multiplier* besar terhadap perekonomian.	↑
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai sekitar 50,76 juta jiwa berdasarkan data BPS 2025. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dengan pangsa konsumsi rumah tangga besar (sekitar 60%) maka pemerintah perlu menjaga konsumsi domestik a.l. melalui bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal.	↑
Optimalisasi Belanja Daerah	Optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kebijakan realokasi anggaran merupakan terobosan untuk memastikan belanja pemerintah dilakukan untuk kegiatan prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi.	↑
Diversifikasi Pasar Ekspor	Optimalisasi kinerja ekspor dan substitusi impor, serta melakukan diversifikasi pasar ekspor dan produk ke pasar nontradisional termasuk optimalisasi perdagangan intra ASEAN.	↑
Outlook kondisi iklim yang normal dan stabil	Potensi musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Musim kemarau diprediksi berlangsung secara bertahap mulai April hingga mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Fenomena El Nino akan berdampak pada penurunan curah hujan dan berpengaruh pada sektor pertanian, sistem irigasi dan ketersediaan air bersih.	↓
Perlambatan perekonomian global dan eskalasi tensi geopolitik	Prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan gejolak global tetap tinggi. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh dampak perang di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia dan harga beberapa komoditas global lainnya.	↓
Kesenjangan Wilayah dan Akses Infrastruktur	Keterbatasan akses jalan, listrik, dan air di wilayah selatan dan timur Jawa Barat. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat tahun 2026 berpusat di 5 kabupaten/kota, sebanyak 3 kabupaten diantaranya berada di Jawa Barat bagian utara dengan porsi investasi 57% dari total investasi di Jawa Barat. Penyerapan tenaga kerja peringkat 5 besar dari investasi PMA dan PMDN terkonsentrasi di Jabar utara (54,9%).	↓
Perlambatan kinerja ekspor	Tekanan ekspor sebagai dampak dari penetapan kebijakan tarif resiprokal, serta penurunan permintaan seiring dengan kondisi perekonomian dan perdagangan dunia yang melambat.	↓
Kepastian ketentuan terkait investasi	Tumpang tindih dan inkonsistensi ketentuan, termasuk terkait RTRW mengenai wilayah LBS (Lahan Baku Sawah) dapat mempengaruhi berkurangnya minat investasi asing di wilayah Jawa Barat	↓

Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, berada pada kisaran 4,9-5,7% (yoy). Prospek pertumbuhan 2026 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, terjaganya kinerja investasi, serta tetap kuatnya kinerja fiskal daerah sejalan berlanjutnya penyelesaian berbagai proyek dan program stimulus pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi berpeluang meningkat melalui penguatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya aktivitas ekonomi yang didukung berbagai program stimulus pemerintah. Iklim investasi yang semakin kondusif melalui program kemudahan layanan investasi dan promosi investasi yang lebih agresif diprakirakan mendorong kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kinerja investasi diperkirakan terjaga didukung juga adanya kenaikan investasi pada proyek strategis, perluasan kapasitas industri, serta pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Selain itu, berbagai program stimulus pemerintah seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pendidikan dan rehabilitasi sekolah, serta program pembiayaan perumahan turut berkontribusi pada aktivitas ekonomi daerah. Sumber-sumber pertumbuhan baru, termasuk sektor pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi syariah,

dan ekonomi hijau, juga berpotensi memperluas basis pertumbuhan Jawa Barat.

Risiko ketidakpastian global yang masih tinggi perlu terus diwaspadi karena dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Beberapa risiko tersebut antara lain gejolak global akibat perang Timur Tengah yang masih tinggi dan terus berlangsung, risiko kenaikan harga komoditas dunia akibat terganggunya proses produksi, distribusi, dan rantai pasok, serta penetapan kebijakan tarif resiprokal yang berdampak pada tekanan ekspor. Secara keseluruhan, faktor pendorong dan risiko tersebut membentuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kisaran 4,9-5,7% (yoy) pada tahun 2026, dengan potensi penguatan konsumsi domestik dan investasi terjaga secara berkelanjutan.

6.3.1.1 Prospek Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2026 diprakirakan tetap solid, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi yang menunjukkan tren perbaikan di tengah kinerja ekspor yang menghadapi tantangan eksternal akibat kondisi perekonomian global. Konsumsi RT diperkirakan meningkat seiring dengan berlanjutnya kebijakan stimulus fiskal pemerintah dan kenaikan upah minimum. Kinerja investasi diperkirakan juga mengalami peningkatan sejalan dengan fokus pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah serta percepatan pembangunan kawasan industri serta KEK strategis.

Konsumsi Rumah Tangga

Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup berlanjutnya stimulus bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program Makan Bergizi Gratis (MGG), serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mencapai 3.600 unit pada Juli 2026. Per Mei 2026, KDKPM yang sudah beroperasi sebanyak 933 unit. Selain itu, program 'Gentengisasi' sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang melibatkan beberapa UMKM di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan program gentengisasi dengan membeli produk UMKM dari sentra genteng Jatiwangi, Majalengka, pada Mei 2026. Langkah ini sekaligus untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.

Dengan pertimbangan tersebut, Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan II 2026 diprakirakan tetap terjaga meskipun mengalami moderasi. Hal tersebut dipengaruhi normalisasi permintaan pasca HBKN Idulfitri, Nyepi dan Imlek yang terjadi pada triwulan I 2026. Hal tersebut sejalan dengan pantauan terhadap indikator Indeks Keyakinan Konsumen yang pada April-Mei 2026 berada di kisaran 113,0 lebih rendah dari triwulan I 2026 yang sebesar 115,8. Indeks Penjualan Riil (IPR) juga mengalami moderasi, dari 169,04 (data April 2026) menjadi 163,6 pada triwulan II 2026. Perlambatan terjadi pada komponen makanan, minuman, peralatan informasi dan komunikasi, serta barang budaya dan rekreasi.

Ke depan, penguatan Konsumsi Rumah Tangga juga perlu didorong melalui stabilisasi harga pangan dan energi, penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta perluasan akses pembiayaan yang sehat. Optimalisasi belanja pemerintah daerah pada program padat karya dan dukungan terhadap UMKM juga penting untuk menjaga pendapatan masyarakat. Digitalisasi transaksi dan perluasan ekosistem pembayaran non-tunai dapat meningkatkan efisiensi serta mendorong konsumsi yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, dengan kombinasi dukungan fiskal, pelonggaran moneter, dan perbaikan pendapatan masyarakat, Konsumsi Rumah Tangga **pada 2026 diproyeksikan meningkat dan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat**.

Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah Jawa Barat pada triwulan II 2026 diprakirakan terjaga di tengah keterbatasan ruang fiskal. Penurunan pagu pendapatan dan belanja APBD 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, serta pergeseran alokasi TKD, memengaruhi ruang fiskal daerah pada triwulan II 2026. Selain itu, adanya akselerasi belanja pegawai dan modal yang sudah dilakukan pada triwulan

I 2026 diperkirakan akan mempengaruhi realisasi pada triwulan berikutnya di tengah kapasitas fiskal daerah yang lebih terbatas. Dengan perkembangan tersebut, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 diprakirakan mengalami perlambatan.

Dari sisi likuiditas, simpanan pemerintah daerah pada akhir 2025 tercatat meningkat dan masih relatif tinggi pada awal 2026, yang mengindikasikan belum optimalnya penyerapan belanja di awal tahun. Meskipun demikian, adanya peningkatan belanja kementerian/ lembaga untuk program prioritas nasional di daerah termasuk penguatan ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi *upside factor* yang dapat menahan perlambatan lebih dalam. Dengan percepatan eksekusi belanja pada triwulan berikutnya, konsumsi pemerintah diprakirakan kembali meningkat dan memberikan dorongan pada permintaan domestik. Selain itu, adanya belanja program prioritas pemerintah pusat di daerah, termasuk program perlindungan sosial dan penguatan sektor strategis, menjadi penopang meningkatnya kinerja fiskal daerah. Optimalisasi perencanaan kas, percepatan proses pengadaan, serta penguatan belanja yang memiliki *multiplier effect tinggi* (padat karya dan belanja barang/jasa domestik) menjadi kunci agar konsumsi pemerintah lebih efektif menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Secara keseluruhan tahun, **kinerja konsumsi pemerintah pada 2026 diprakirakan meningkat seiring dengan implementasi program prioritas pemerintah.** Dukungan belanja negara difokuskan pada delapan agenda prioritas, termasuk ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan desa dan UMKM. Meskipun demikian, risiko penurunan tetap ada terutama akibat pemotongan dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, di mana alokasi nasional dan TKD Jawa Barat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja Ekspor-Impor

Kinerja ekspor Jawa Barat pada triwulan II 2026 diprakirakan tetap resilien di tengah tekanan kondisi eksternal. Sebagai provinsi dengan basis industri pengolahan yang dominan dan berorientasi ekspor, dinamika eksternal sangat memengaruhi kinerja perdagangan. Nilai ekspor Jawa Barat pada April 2026 mencapai USD3,45 miliar atau tumbuh 25,11% (yoy), lebih tinggi dibanding Maret 2026 yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan. Berdasarkan komoditas, nilai ekspor nonmigas selama Januari-April 2026 terbesar berupa komoditas Kendaraan Bermotor dan Bagiannya. Sementara berdasarkan negara, didorong ekspor ke Amerika Serikat, Filipina dan Jepang. Peningkatan kinerja ekspor April 2026 diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2026 seiring terjaganya permintaan dari negara mitra dagang utama serta kenaikan harga komoditas global. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan nilai likert scale ekspor dari hasil survei Bank Indonesia yang membaik, menjadi sebesar -0,10 dari triwulan sebelumnya -0,25.

Diversifikasi pasar dan penguatan perdagangan intra-kawasan menjadi peluang untuk menjaga kinerja ekspor lebih lanjut. Optimalisasi perjanjian perdagangan, peningkatan daya saing produk manufaktur (tekstil, alas kaki, elektronik, dan otomotif), serta penguatan rantai pasok domestik dapat mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tradisional. Digitalisasi perdagangan dan efisiensi logistik juga menjadi faktor penting dalam menekan biaya dan meningkatkan daya saing harga.

Sementara itu, kinerja impor diprakirakan juga terjaga dipengaruhi permintaan domestik dan ekspor di tengah strategi efisiensi industri. Nilai impor Jawa Barat pada April 2026 tercatat sebesar USD1,1 miliar, atau tumbuh 5,63% (yoy), meningkat dibandingkan Maret 2026 yang mengalami kontraksi. Nilai impor nonmigas pada April 2026 yang tercatat sebesar USD1,01 miliar merupakan impor tertinggi sejak 2025. Impor barang modal yang mulai membaik akan menjadi sinyal positif bagi investasi, sedangkan pengendalian impor konsumsi dan peningkatan substitusi impor dapat mendukung neraca perdagangan daerah. Secara neto, kinerja net ekspor Jawa Barat pada triwulan II 2026 diprakirakan lebih tinggi, dengan risiko yang tetap perlu diwaspadai terutama dari sisi eksternal.

Kinerja ekspor pada tahun 2026 diprakirakan tumbuh positif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di tengah kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi. Per Juni 2026, rencana penerapan

tarif resiprokal Amerika Serikat kepada Indonesia menjadi 10% dari sebelumnya sekitar 19% pasca dibatalkannya kebijakan tarif oleh Mahkamah Agung AS diperkirakan dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya kinerja ekspor Indonesia. Pada Februari 2026 telah ditandatangani *Agreement on Reciprocal Tariff* antara Indonesia – Amerika Serikat. Dampak positif terhadap ekspor Indonesia a.l terkait akses tarif 0% pada beberapa komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, dan komponen pesawat terbang. Selain itu, AS juga memberikan tarif 0% khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, dengan mekanisme *Tariff Rate Quota* atau TRQ. Hal ini dapat mendorong kenaikan volume ekspor dan daya saing produk TPT Indonesia di AS. Meskipun demikian, potensi tantangan dan risiko ekspor yang akan dihadapi tetap tinggi karena hanya sebagian kecil produk ekspor yang mendapatkan tarif 0%. Ini berarti dampak langsung penurunan tarif *selected commodities* 0% terhadap keseluruhan ekspor Indonesia relatif terbatas, terutama dalam total nilai perdagangan Indonesia secara global.

Lebih lanjut, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan strategis. Indonesia telah memfinalkan perjanjian perdagangan dengan Kanada, menyelesaikan EU-CEPA yang kini memasuki tahap harmonisasi bahasa di Parlemen Eropa, serta menyiapkan proses aksesi CPTPP pada 2026. Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan negara-negara BRICS+ dan meningkatkan kontribusi pada *New Development Bank* sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global. Selain itu, dukungan terhadap agenda aksesi OECD semakin solid dengan mayoritas negara anggota telah menyatakan dukungannya.

Diversifikasi pasar ekspor dapat menjadi alternatif solusi pada sektor-sektor yang terdampak tarif. Untuk komoditas tekstil, alas kaki, dan elektronik terdapat hubungan perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dengan Tiongkok yang merupakan pasar produk elektronik dan pakaian. Sementara itu, perekonomian India yang berkembang diikuti dengan perkembangan kelas menengah, menjadi pasar potensial untuk barang konsumsi seperti tekstil dan elektronik. Untuk produk alas kaki, Indonesia dapat menawarkan harga yang bersaing di pasar India. Hubungan dagang dengan India bernaung dalam payung India – ASEAN *Free Trade Agreement* (AFTA). Selain itu, peluang penguatan perdagangan intra-ASEAN dalam kerangka ASEAN AFTA juga penting untuk dilakukan guna mendorong kinerja ekspor. Sementara itu, hubungan dagang *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dapat membantu mengurangi hambatan tarif sehingga permintaan lebih stabil. Adanya perjanjian perdagangan bebas dapat juga memberikan angin segar agar industri elektronik Indonesia dapat masuk ke pasar Jepang meskipun sangat kompetitif.

Kinerja Investasi

Kinerja investasi (PMTB) pada triwulan II 2026 diprakirakan tumbuh positif dan lebih tinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan impor barang modal yang mengalami perbaikan di April 2026, meskipun masih di zona kontraksi. Indikator penjualan semen pada awal triwulan II 2026 juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 35,72%, meningkat dibandingkan kontraksi pertumbuhan yang terjadi pada triwulan I 2026. Selain itu, kredit pemilikan rumah (KPR) juga melanjutkan pertumbuhan pada awal triwulan 2026, dengan tumbuh sebesar 4,71% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,35% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2026, kinerja investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan target investasi penanaman modal serta fokus pemerintah dalam pengembangan KI dan KEK. Jawa Barat konsisten menjadi provinsi dengan realisasi investasi penanaman modal tertinggi secara nasional. Nilai investasi penanaman modal meningkat hampir dua kali lipat, dari Rp136,1 triliun pada 2021 menjadi Rp296,8 triliun pada 2025. Sedangkan realisasi investasi penanaman modal pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp76,8 triliun, tumbuh 12% (yoy), dan merupakan peringkat kedua terbesar di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Capaian ini didukung oleh ekosistem investasi yang kuat, infrastruktur yang terintegrasi, serta kebijakan daerah yang pro-investasi, sehingga

memperkuat peran Jawa Barat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Target investasi pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp314 Triliun. Jawa Barat memiliki tingkat investasi tertinggi di Indonesia, tetapi distribusinya tidak merata, dengan sekitar 70% investasi terkonsentrasi hanya di lima kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan pembangunan sehingga terjadi pemerataan investasi. Beberapa regulasi terkait investasi diperkuat untuk menunjang kemudahan berinvestasi bagi para investor, yaitu:

a) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permeninveshill) No. 5/2025 pasal 209 yakni tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*)
b) Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 286 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Penetapan Kawasan Industri untuk Kemudahan Langsung Konstruksi (KLIK).
c) Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kejaksaan Agung Nomor 19/P/A.1/2025 dan Kepolisian RI Nomor 8/P.A.1/2025.
d) Penerbitan Perda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan koordinasi antar instansi terkait menjadi lebih baik sehingga mempercepat proses pelayanan investasi dan menarik lebih banyak investasi.
e) Pengawalan penerapan PP 28 tahun 2025 mengenai penerapan SLA dan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan proses perizinan. Selain itu terdapat penguatan sistem pengawasan dengan mekanisme profil kepatuhan yang diinput ke dalam sistem OSS untuk pembaruan data secara digital
f) Percepatan perizinan dan pemberian kepastian berusaha melalui penerapan fiktif positif (Fikpos). Terdapat sebanyak 258 Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) yang telah diberlakukan skema Fikpos dan selanjutnya akan diimplementasikan pada 1.066 KBLI.
g) Percepatan PP Turunan dari UU No 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambahan mineral dan batubara. UU ini disahkan pada 19 Maret 2025 dan mengatur hal-hal terkait izin dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Peningkatan pengawasan terhadap izin Usaha Pertambangan yang telah dipulihkan dalam melaksanakan kegiatan investasi dan pemenuhan komitmen perizinan.
h) Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26 tahun 2025 tentang standar kawasan industri dan akreditasi kawasan industri, yang berlaku efektif pada Januari 2026. Melalui regulasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, serta daya saing kawasan industri nasional sehingga mampu menarik minat investor untuk menanamkan modlanya di berbagai kawasan industri di Indonesia.

Terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong akselerasi kinerja investasi 2026. Faktor-faktor tersebut antara lain investasi swasta *multiyears* yang berlanjut, pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), wacana program pembangunan sekolah rakyat, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pembangunan infrastruktur lain.

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025, terdapat 12 proyek yang dikategorikan sebagai PSN di Jawa Barat untuk periode 2025-2029, antara lain pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) serta bagian dari proyek Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban. Selain itu, terdapat juga proyek Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura dan potensi proyek Jaringan Gas Perkotaan di beberapa wilayah, serta proyek waste to energy di Kabupaten Bekasi dan Bogor Raya yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan membuka peluang bisnis baru dalam ekonomi sirkular.

Penerbitan regulasi dan iklim investasi yang kondusif dapat menjaga tetap solidnya kinerja investasi. Maraknya permasalahan sosial dan ormas memicu dampak negatif terhadap iklim usaha di Jawa Barat. Adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 300/Kep.160-

Bakesbangpol/2025 mengenai Satgas Pemberantasan Premanisme, penguatan regulasi dan dukungan kebijakan, serta finalisasi Ranperda kemudahan investasi dan berusaha diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Jawa Barat. Satgas Pemberantasan Premanisme bertugas melaksanakan "Operasi Jabar Manunggal", mencakup langkah preventif, pre-emptif, serta penindakan terhadap praktik premanisme termasuk yang mengganggu iklim investasi di Jawa Barat. Adanya aplikasi Nyari Gawe untuk peningkatan kesempatan kerja di sektor industri dan fasilitasi pertanahan serta perizinan untuk industri diharapkan dapat memastikan efisiensi dan kecepatan proses bisnis dunia industri.

6.3.1.2 Prospek Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian pada tahun 2026 diprakirakan ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Kinerja LU Industri Pengolahan (pangsa terbesar dalam perekonomian Jawa Barat) diperkirakan tumbuh positif, dan kinerja LU Perdagangan, Transgud, dan Akmamin diperkirakan terjaga seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 diprakirakan meningkat seiring dengan perkembangan permintaan baik untuk ekspor maupun domestik. perkembangan indikator pendukung pada awal triwulan menunjukkan perbaikan. Penjualan kendaraan bermotor khususnya di pasar domestik tumbuh signifikan pada awal triwulan laporan, yaitu sebesar 57,75% dipengaruhi tingginya minat dalm membeli mobil. Kredit pada LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 11,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,54% (yoy). Pemakaian listrik industri tumbuh 24,37% (yoy) pada wal triwulan, meningkat dari periode sebelumnya, mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas industri. Selain itu, PMI dari negara tujuan ekspor utama (Eropa, Jepang, Tiongkok dan Amerika Serikat) yang mengalami peningkatan dan berada di zona ekspansi memberikan optimisme terkait tetap kuatnya permintaan ekspor ke depan.

Industri pengolahan Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 seiring dengan peningkatan kapasitas utilisasi produksi serta peningkatan aktivitas pada kawasan industri. Perbaikan kinerja sektor manufaktur seiring meningkatnya utilisasi kapasitas produksi, diperkirakan untuk memenuhi permintaan domestik yang didorong berbagai stimulus fiskal maupun untuk pasar ekspor. Penguatan industri juga ditopang oleh target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, serta keberlanjutan insentif fiskal seperti PPh 21 DTP untuk sektor padat karya. Selain itu, mulai beroperasinya sejumlah proyek strategis seperti investasi industri kendaraan listrik dan baterai di Karawang, berproduksinya perusahaan mobil di Subang, serta optimalisasi operasional Pelabuhan Patimban diperkirakan memperkuat rantai pasok dan daya saing manufaktur Jawa Barat.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, peningkatan tensi geopolitik, serta potensi penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat dan negara mitra dagang lainnya dapat menekan permintaan eksternal. Dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan risiko tersebut, kinerja industri pengolahan Jawa Barat pada 2026 diprakirakan tetap ekspansif dengan kecenderungan membaik, meskipun menghadapi tantangan dari sisi eksternal.

LU Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 2026 diprakirakan mengalami moderasi, dipengaruhi normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan Idulfitri. SBT sektor perdagangan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan penurunan dari sebesar 6,38% menjadi 2,74%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal triwulan II 2026 tercatat sebesar 112,78, lebih rendah dari triwulan I 2026 (115,78). Nilai likert scale (LS) permintaan domestik dan kapasitas utilisasi juga turun cukup dalam, masing-masing sebesar -1,33 dan -1,17 dari sebelumnya 0,86 dan 0,00. Perlambatan kinerja perdagangan juga tecermin pada penjualan eceran. Indeks Penjualan Riil pada awal triwulan II 2026 mengalami penurunan, yaitu menjadi

sebesar 163,57 dari triwulan sebelumnya 174,22 seiring dengan berkurangnya pembelian barang tersier, seperti peralatan rumah tangga dan bahan bakar kendaraan.

Secara keseluruhan tahun 2026, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan meningkat, didorong oleh penguatan daya beli masyarakat melalui stimulus lanjutan seperti insentif PPh 0,5% UMKM, PPh 21 DTP, insentif PPN sektor tertentu, serta diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan. Prospek percepatan belanja pemerintah juga mendukung perputaran konsumsi domestik.

Faktor pendorong peningkatan kinerja LU Perdagangan lainnya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat dan gaya hidup sebagian masyarakat yang mengarah ke pergeseran konsumsi modern sebagai dampak pertumbuhan kelas menengah serta dukungan digitalisasi. Revolusi digital juga telah memfasilitasi pertumbuhan *e-commerce* dan memberikan dampak yang besar terhadap sektor perdagangan. Sebagian besar perusahaan ritel mempertahankan konsep *omnichannel* yakni konsep penjualan ketika pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu cara penjualan, seperti toko ritel, *e-commerce*, *mobile-commerce*, dan *social-commerce*. Konsep tersebut juga membuat pelanggan dapat melakukan riset, membeli, mendapatkan, dan mengembalikan atau menukar barang dari ritel dengan mudah. Perpaduan toko *offline* dan *online* pun dikuatkan karena pertumbuhan penjualan *online* yang masih mengalami peningkatan.

Bank Indonesia senantiasa berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan sektor ritel. Sebagaimana tercantum pada UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), bahwa salah satu tujuan Bank Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, upaya memastikan keberlanjutan pertumbuhan berbagai sektor terutama ritel terus diupayakan baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Melalui salah satu kegiatan Karya Kreatif Jawa Barat, Bank Indonesia Jawa Barat memberikan dukungan dari sisi permintaan dengan mempromosikan berbagai produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan Jabar baik di skala regional hingga internasional. BI Jabar turut mendukung ekspansi usaha dengan mendorong akses pembiayaan serta *business matching* UMKM yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pertumbuhan sektor ritel. Tidak hanya itu, dari sisi penawaran, Bank Indonesia juga memberikan dukungan melalui Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi maupun kelancaran modal kerja.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 diprakirakan meningkat seiring penguatan investasi dan dimulainya periode kontrak pekerjaan. Hasil SKDU sektor konstruksi menunjukkan peningkatan, dengan nilai SBT tumbuh sebesar 1,90% pada triwulan II 2026 dari tiruwulan sebelumnya kontraksi 0,79%. Penjualan semen tumbuh 35,72% (yoy), meningkat signifikan dari periode sebelumnya yang terkongtraksi 1,91% (yoy). Dari sisi pembiayaan, kredit kepemilikan rumah tumbuh meningkat pada wal triwulan II 2026, yaitu sebesar 4,72% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,35% (yoy). Hal tersebut mencerminkan aktivitas konstruksi yang mulai pulih seiring dengan geliat investasi.

Selaras dengan perkiraan investasi, kinerja LU Konstruksi tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan akselerasi pembangunan kawasan industri dan KEK strategis, percepatan proyek infrastruktur nasional, serta pembangunan perumahan melalui program 3 juta rumah. Sejumlah proyek besar seperti pengembangan kawasan industri, pembangunan data center, PLTS terapung, serta infrastruktur transportasi (jalan, tol, dan konektivitas kawasan) menjadi pendorong utama kinerja LU konstruksi. Dukungan belanja pemerintah dan peningkatan anggaran Kementerian PUPR juga memperkuat prospek sektor ini. Dengan kombinasi proyek strategis dan dukungan fiskal, sektor konstruksi diperkirakan menjadi salah satu motor pertumbuhan utama Jawa Barat pada tahun 2026.

LU Pertanian

Kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2026 diprakirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring adanya faktor *base effect* panen raya pada periode sebelumnya serta masuknya musim hujan pada awal tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) April 2026 sebesar 121,59 atau menurun dibandingkan Desember 2025 sebesar 123,95, penurunan terjadi utamanya pada NTP tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan. Faktor cuaca ekstrem, potensi serangan hama dan OPT, kenaikan biaya produksi seperti harga bibit, plastik, dan bahan bakar, dan adanya bencana alam banjir menyebabkan gagal panen pada beberapa sentra produksi pertanian di Jawa Barat. Sementara itu, curah hujan April-Juni 2026 yang berada pada rentang dibawah normal (berdasarkan informasi BMKG) berpotensi menimbulkan kekeringan dan menurunkan produksi tanaman pangan dan holtikultura. Dari sisi pembiayaan, kredit pertanian masih mengalami kontraksi, yaitu sebesar 10,49% (yoy) pada awal triwulan II 2026, meskipun sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada tahun 2026, LU pertanian Jawa Barat diprakirakan tumbuh positif meskipun termoderasi dari tahun 2025 karena dipengaruhi *base effect* peningkatan produksi pada tahun 2025. Pertumbuhan pertanian didukung oleh keberlanjutan program swasembada pangan, peningkatan produktivitas melalui perluasan lahan panen dan intensifikasi/ekstensifikasi, program MBG, serta dukungan kebijakan seperti PPN 12% DTP untuk sektor pertanian.

6.3.2 Prospek Inflasi Jawa Barat Tahun 2026

Realisasi inflasi April tahun 2026 Jawa Barat sebesar 2,49% (yoy), tetap terjaga dalam rentang sasaran target inflasi, yaitu 2,5±1% (yoy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat pada bulan April 2026 mencatatkan deflasi sebesar 0,07% (mtm) atau inflasi 1,17% (ytd), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi nasional yang inflasi sebesar 0,13% (mtm) atau 1,06% (ytd). Secara spasial, inflasi yang terjadi di seluruh pantauan IHK di Jawa Barat tetap terjaga di target sasaran dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Majalengka sebesar 3,01% (yoy). Capaian ini didukung oleh sinergi kuat pengendalian inflasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Capaian kinerja pengendalian inflasi Provinsi Jawa Barat diakui secara nasional dengan raihan TPID *Award* Juara III - Kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali atas upaya pengendalian inflasi TPID tahun 2024. Jawa Barat juga memperoleh award pada kategori Kabupaten/Kota Terbaik (IHK) yang diperoleh Kota Tasikmalaya, serta kategori Kabupaten/Kota Berprestasi (Non IHK) yang diperoleh Kabupaten Tasikmalaya. Pada forum Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik/Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta pada Kamis, 4 Juni 2026 yang lalu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka mendapat perhargaan Kabupaten Terbaik I dan Terbaik III dalam kategori pengendalian inflasi. Sementara untuk penghargaan kota terbaik dalam pengendalian inflasi, diraih oleh Kota Cirebon, sebagai Kota Terbaik I.

Dengan mempertimbangkan kondisi inflasi pada bulan April 2026 dan kondisi terkini, inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2026 diprakirakan mengalami moderasi dibanding triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh inflasi inti dan *administered prices*. Tekanan inflasi inti sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas subsitusi minyak (a.l. CPO), tekanan nilai tukar, dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, tekanan *administered prices* dipengaruhi oleh *base-year effect* yang rendah seiring normalisasi diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari-Februari 2025.

Prospek Inflasi IHK Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran target inflasi. Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh penyesuaian harga energi domestik, seperti LPG dan BBM nonsubsidi. Inflasi *volatile food* diprakirakan mendapat tekanan dari sisi pasokan, sejalan dengan prakiraan kondisi cuaca yang lebih kering sehingga menghambat produksi komoditas pangan dan hortikultura di Jawa Barat. Selain itu, peningkatan harga komoditas pertanian global (antara lain jagung, kedelai, gandum) dapat meningkatkan biaya produksi komoditas pangan. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan mendapat tekanan dari penguatan harga emas akibat ketidakpastian ekonomi global, kenaikan komoditas jadi, dan *imported inflation*. Di sisi lain, perang Timur Tengah yang berkepanjangan menjadi faktor risiko yang berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi melalui penyesuaian harga

BBM domestik yang tertransmisi pada tarif transportasi dan biaya logistik sehingga meningkatkan harga akhir di tingkat konsumen. Namun, terdapat sejumlah faktor risiko penahan inflasi seperti kebijakan pemerintah yang cenderung berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tarif, terutama dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, dan upaya pengendalian inflasi yang lebih agresif untuk mencapai inflasi dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan

Mencermati perkembangan saat ini, diperlukan *extra effort* dalam pengendalian inflasi di daerah, khususnya dalam **koordinasi penyesuaian tarif dan komunikasi publik**. Selain itu, diperlukan dukungan pada komoditas pangan untuk **menjaga tingkat produksi** di tengah kondisi cuaca yang lebih kering dan potensi peningkatan biaya produksi. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah perlu **memperkuat ruang fiskal** sebagai *buffer* untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Bank Indonesia akan terus mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan inflasi melalui forum TPID untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Strategis (GPIPS).

6.3.3 Sinergitas dan Kolaborasi Bank Indonesia Jawa Barat untuk Stabilisasi Harga dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

Bank Indonesia Jawa Barat memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi antar komponen penthahelix terkait berbagai upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga, akselerasi investasi, pengembangan UMKM, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, digitalisasi sistem pembayaran serta sinergi lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam aspek pengendalian inflasi dan stabilisasi harga, Bank Indonesia Jawa Barat memperkuat koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung pada 20 Mei 2026 yang menghasilkan kesepakatan upaya untuk pengendalian inflasi menjelang HBKN Iduladha. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Antar Daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau sebagai dukungan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan. Bank Indonesia Jawa Barat dan TPID Provinsi Jawa Barat bersinergi menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan melalui Gerakan Pangan Murah Digital pada tanggal 3 Mei 2026.

Penguatan UMKM menjadi pilar penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sinergi dilakukan melalui kegiatan pameran dan *onboarding* UMKM seperti pelaksanaan sinergi kegiatan Trademark Market Bandung yang diikuti oleh UMKM *fashion* dan *food* pada tanggal 5 – 8 dan 12 – 15 Maret 2026, serta program Omzet Ramadan untuk mendorong optimalisasi penjualan UMKM binaan dan mitra di *marketplace* pada 19 s.d. 31 Maret 2026. Kegiatan sinergi dan promosi perdagangan menjadi *Road to* Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2026 sebagai *flagship event* pengembangan UMKM di Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, BI Jawa Barat memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui peluncuran buku GAUNG EKSyar merupakan kumpulan materi khutbah ekonomi keuangan syariah, edukasi literasi ekonomi keuangan syariah, peluncuran program wakaf produktif Pabrik roti ponpes Al Muhajirin Purwakarta serta *capacity building* pesantren untuk penguatan *Halal Value Chain* (HVC), khususnya komoditas padi di Cianjur dan Subang. Pada puncaknya penyelenggaraan *West Java Sharia Economic Festival* (WJSEF) 2026 diharapkan menjadi katalisator tahunan dalam memperkokoh posisi Provinsi Jawa Barat sebagai pusat ekonomi keuangan syariah di Indonesia.

Pada aspek sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, kolaborasi diperkuat melalui sosialisasi QRIS dan edukasi perlindungan konsumen pada berbagai *event*, *capacity building* TP2DD, serta program Kas Keliling 3T di wilayah terpencil Jawa Barat. Beberapa kegiatan lain seperti *West Java Economic Society* (WJES) yang merupakan *event* tahunan sinergi Bank Indonesia dan ISEI Jawa Barat yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset yang ditujukan kepada Pemerintah Jawa Barat. Selain itu, rangkaian kegiatan penggalian potensi investasi yang dikemas dalam *West Java Investment*

Challenge (WJIC), rangkaian kegiatan promosi investasi baik melalui *West Java Investment Roadshow* (WJIR), dan *West Java Investment Summit* (WJIS) akan dilakukan untuk mendorong realisasi investasi di Jawa Barat.

Peran Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi, akselerasi investasi, pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta digitalisasi sistem pembayaran dan menjamin ketersediaan uang Rupiah, Bank Indonesia berperan secara proaktif memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi pentahelix yang semakin solid, Jawa Barat memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk menghadapi tantangan global sekaligus mengoptimalkan potensi domestik guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Daftar Istilah

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun pada suatu daerah.
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan, menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu daerah.
Administered price	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu. Sejak Januari 2014 menggunakan Tahun Dasar 2012 = 100.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Indeks ini memiliki skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok lapangan usaha industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	*Month to month.* Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu dengan menetapkan tahun 2010 sebagai Tahun Dasar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	*Quarter to quarter.* Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah respondenyang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” danmengabaikan jawaban “sama”.
SBT	Saldo Bersih Tertimbang. Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih lapangan usaha/subkategori usaha yang bersangkutan dengan bobot lapangan usaha/subkategori usaha yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Lapangan usaha ekonomi dominan	Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
West Texas Intermediate	Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.
Yoy	*Year on year.* Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

PENGARAH

Junanto Herdiawan

Wihujeng Ayu Rengganis

Laura Rulida Eka Sari Putri

PENANGGUNG JAWAB

Muslimin Anwar

Naniek Sekarningsih

KOORDINATOR PENYUSUN & EDITOR

Siti Muarofah

Duddy Adiyatna

TIM PENULIS

Elsa Sabrina Maharani

Desy Wartati

Rahma Hanii Maulida

Stefanus Febri Adi Nugroho

Azzahra Rahmadani Wilasto

Andreas Cornelius Purba

Lupita Ramdhaina Yusuf

Affan Irhamsyah

KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi KEKDA

Divisi Implementasi SP, PUR dan MI

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon

Edisi Mei 2026

Buku Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat ini diterbitkan oleh

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat

Jl. Braga No. 108 Bandung, 40111

No. Telp. (022) 4230223 ext. 8290 No. Fax.(022) 4214326

Email : kpwjabar-kpkp@bi.go.id

Softcopy dapat diunduh di

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Mei-2026.aspx



Halaman ini sengaja dikosongkan



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

Kelompok Perumusan KEKDA
Provinsi Jawa Barat

Jl. Braga No. 108 Bandung, 40111
Telp. (022) 4230223 ext. 8290 Fax (022) 4214326
Email : kpwjabar-kpkp@bi.go.id

Scan QRcode untuk
Mengunduh ebook LPP